



LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 12

TAHUN 2024

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK
dan
WALI KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025- 2045.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.

8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai arahan dan acuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan tujuan Pembangunan Daerah sesuai Visi dan Misi.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:

- a. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang rasional, proposional, efektif dan efisien dalam melaksanakan pembangunan;
- b. menjamin adanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Daerah Kota dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah pusat; dan
- c. pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB II SISTEMATIKA RPJPD

Pasal 4

- (1) RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan Dokumen Perencanaan yang memuat Visi, Misi dan arah Pembangunan Daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 serta mempedomani Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok.
- (2) RPJPD Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat pengantar, pengertian, latar belakang, landasan hukum, hubungan antar dokumen RPJPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, maksud, tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memuat tentang dasar-dasar analisis gambaran umum kondisi daerah, meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan sosial dan budaya, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, evaluasi RPJPD 2006-2025, analisa tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik serta identifikasi dan analisis pusat pertumbuhan wilayah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini menguraikan analisis permasalahan utama yang merupakan faktor penghambat yang dihadapi untuk waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang apabila ditangani dapat melepaskan potensi daerah yang tertahan secara signifikan, serta analisis isu-isu strategis daerah berkenaan dengan kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan karena memiliki dampak luas dan konsekuensi ke depan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Bab ini menguraikan Visi dan Misi Pembangunan Kota Depok 2025-2045.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

Bab ini menguraikan arah kebijakan pembangunan jangka panjang yang menghubungkan antara sasaran dengan sasaran pokok tiap tahapan pembangunan lima tahunan.

BAB VI PENUTUP

Pasal 5

RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 2 September 2024

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 2 September 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

NINA SUZANA

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2024 NOMOR 12
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT : (11/149/2024)

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Kota Depok merupakan kota yang memiliki letak yang sangat strategis, berbatasan langsung dengan Daerah Khusus Jakarta dan berada pada poros kawasan aglomerasi Jabodetabekjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur). Dengan posisi ini Kota Depok memiliki peluang serta keunggulan kompetitif dan komparatif, ditinjau dari segi politik, pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan. Dengan luas wilayah 199,91 km², Kota Depok dihuni oleh 2.145.400 jiwa penduduk (BPS 2023), dengan karakteristik masyarakat yang sangat heterogen, baik suku, agama, etnis dan golongan. Dalam kurun waktu 25 tahun sejak Depok menjadi daerah otonom pada Tahun 1999, pembangunan di Kota Depok menunjukkan trend yang sangat positif, yang ditandai dengan keberhasilan capaian indikator makro pembangunan seperti meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), semakin tingginya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), berkurangnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), turunnya angka kemiskinan, Indeks Gini Rasio dalam kategori sedang, terkendalinya inflasi dan semakin meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Sebagai sebuah kota yang mulai tumbuh dan mensejajarkan posisinya dengan kota-kota lainnya di Indonesia, Kota Depok juga menghadapi berbagai tantangan perkotaan sebagai dampak dari pesatnya pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, antara lain peningkatan kebutuhan layanan transportasi publik dan konektivitas wilayah, penanganan sampah dan banjir, pengelolaan lingkungan hidup, serta meningkatnya kebutuhan akses terhadap layanan sosial, kesehatan, pendidikan dan pemukiman. Disamping itu, terdapat tantangan pemerintahan dalam merumuskan kebijakan publik yang dapat menyelesaikan permasalahan perkotaan dan berdampak pada kemajuan pembangunan kota yang berkelanjutan. Demikian pula halnya dengan penyelenggaraan pelayanan publik yang efisien, terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan, iklim investasi yang kondusif dan kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas, sangat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas, kemajuan dan daya saing Kota Depok, baik dalam tataran kota-kota di Indonesia maupun dunia.

Selanjutnya dengan berlakunya Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi sebuah isu strategis regional yang berdampak pada perencanaan perkotaan khususnya daerah-daerah di kawasan aglomerasi Jabodetabekjur termasuk Kota Depok. Pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi menjadi peluang bagi integrasi kelembagaan koordinatif yang lebih produktif dalam penyelesaian permasalahan kawasan secara terpadu. Selain itu, pemindahan ibukota negara ke Kalimantan Timur juga menghadirkan tantangan bagi Kota Depok terutama dalam mengelola dampak positif dan negatif yang ditimbulkan, terutama dampak sosial, ekonomi dan lingkungan.

Dihadapkan hal diatas, untuk merespon tuntutan dan kebutuhan pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan formulasi kebijakan berupa perencanaan pembangunan daerah, baik jangka panjang berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), jangka menengah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun jangka pendek berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65 ayat (1) huruf c, Kepala Daerah mempunyai tugas “*menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD*”. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, merupakan penjabaran dari visi dan misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun, yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dalam rangka menjaga keberlangsungan dan kesinambungan pembangunan, RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045 selain untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kota Depok, juga diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dengan menempatkan masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan, serta sebagai *stakeholders* utama dalam pembangunan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, adalah pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, pendekatan atas-bawah dan bawah atas, pendekatan holistik tematik, pendekatan integratif dan pendekatan spasial dengan melibatkan seluruh *stakeholders* pembangunan sebagai perwujudan prinsip pemerintahan kolaboratif (*collaborative governance*).

Guna memastikan harmonisasi RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045 dengan agenda pembangunan nasional dan pembangunan Jawa Barat, RPJPD Kota Depok dipastikan selaras dengan visi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, yaitu Visi Indonesia Emas 2045: “Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan”, serta Visi RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045: “Provinsi Jawa Barat Termaju, Berdaya Saing Dunia dan Berkelanjutan”. Selain itu, RPJPD Kota Depok memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) untuk mengintegrasikan aspek lingkungan, tata ruang, dan perlindungan lingkungan hidup.

Sebagai sebuah dokumen yang diformulasikan secara komprehensif, holistik dan kolaboratif dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan kota dan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat, RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045 disusun sebagai panduan bagi semua pemangku kepentingan dan aktor-aktor pembangunan dalam merumuskan perencanaan jangka menengah dan jangka pendek, serta sebagai panduan dalam implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan secara berkesinambungan. Dengan adanya panduan ini, diharapkan para pemangku kepentingan dan para aktor pembangunan dapat berperan aktif dan berkolaborasi dalam mencapai tujuan pembangunan jangka panjang di Kota Depok.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 42

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2025 – 2045 dapat tersusun dengan baik.

RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. RPJPD Kota Depok Tahun 2025 – 2045 disusun berdasarkan amanat Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dokumen RPJPD Kota Depok Tahun 2025 – 2045 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan RPJPD Provinsi Jawa Barat serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Untuk mewujudkan Visi Depok Emas 2045 yaitu **Kota Peradaban yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan**, rencana pembangunan yang tertuang dalam RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045 dibagi dalam 4 (empat) tahapan yaitu tahap I (2025-2029) Penguatan Fondasi Pembangunan, tahap II (2030-2034) Akselerasi Pembangunan, tahap III (2035-2039) pemantapan pembangunan dan tahap IV (2040-2045) perwujudan visi Depok emas 2045.

Dokumen RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045 diharapkan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan dokumen perencanaan lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pedoman bagi calon kepala daerah dalam menyusun visi dan misinya.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045.

Depok, 2 September 2024

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1 Latar Belakang	I - 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I - 3
1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya	I - 5
1.4 Maksud dan Tujuan	I - 6
1.5 Sistematika Penulisan	I - 7
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II - 1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II - 1
2.1.1 Kondisi Geografis	II - 1
2.1.2 Kondisi Topografi dan Tanah	II - 4
2.1.3 Kondisi Hidrologi	II - 4
2.1.4 Kondisi Klimatologi	II - 5
2.1.5 Penggunaan Wilayah	II - 5
2.1.6 Wilayah Rawan Bencana	II - 6
2.1.7 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH)	II - 9
2.1.8 Ketahanan Daerah	II - 11
2.1.9 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	II - 12
2.1.10 Ketahanan Pangan	II - 13
2.1.11 Demografi	II - 14
2.2 Aspek Kesejahteraan Sosial dan Budaya	II - 18
2.2.1 Fokus Kesejahteraan Ekonomi	II - 18
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial Budaya	II - 23
2.3 Aspek Daya Saing Daerah	II - 34
2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah	III - 34
2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia	II - 39
2.3.3 Daya Saing Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II - 43
2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi	II - 45
2.4 Aspek Pelayanan Umum	II - 48
2.5 Evaluasi RPJPD Kota Depok Tahun 2006-2025	II - 51
2.6 Analisa Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik	II - 55
2.6.1 Analisis Proyeksi Kependudukan	II - 56
2.6.2 Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana	II - 63
2.7 Identifikasi dan Analisis Pusat Pertumbuhan Wilayah	II - 71

2.7.1	Struktur Ruang	II - 71
2.7.2	Pola Ruang	II - 76
2.7.3	Kawasan Strategis Daerah	II - 83
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS		III - 1
3.1	Permasalahan Pembangunan Daerah	III - 1
3.1.1	Aspek Geografi dan Demografi	III - 1
3.1.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	III - 6
3.1.3	Aspek Daya Saing Daerah	III - 12
3.1.4	Aspek Pelayanan Umum	III - 17
3.1.5	Permasalahan Kota dalam KLHS RPJPD	III - 19
3.2	Isu Sesuai Konteks	III - 20
3.2.1	Isu Global	III - 20
3.2.2	Isu Nasional	III - 22
3.2.3	Isu Provinsi Jawa Barat	III - 25
3.3	Isu Strategis Kota Depok	III - 26
3.3.1	Peningkatan Kualitas Manusia	III - 31
3.3.2	Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Ketahanan Kota	III - 32
3.3.3	Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi	III - 36
3.3.4	Pengembangan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan Kota yang Berkelanjutan	III - 39
3.3.5	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	III - 42
3.3.6	Adaptasi terhadap Kebijakan Strategis Nasional	III - 43
BAB IV VISI DAN MISI DAERAH		IV - 1
4.1	VISI.....	IV - 2
4.1.1	Visi Indonesia Emas 2045	IV - 2
4.1.2	Visi Jawa Barat 2045	IV - 4
4.1.3	Visi Depok Emas 2045	IV - 5
4.1.4	Sasaran Visi	IV - 9
4.2	MISI	IV - 13
BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH		V - 1
5.1	Arah Kebijakan	V - 1
5.1.1	Misi Mewujudkan Transformasi Sosial yang Inklusif, Sehat dan Cerdas	V - 5
5.1.2	Misi Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang kreatif, Inovatif dan bertumpu pada Ekonomi Hijau	V - 8
5.1.3	Misi Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Berbasis Digital dan Berkelas Dunia	V - 13
5.1.4	Misi Mewujudkan Kota yang Aman dan Tertib Serta Menjaga Stabilitas Ekonomi Daerah	V - 14
5.1.5	Misi Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi yang berkelanjutan, inklusif dan Berbasis Ketahanan Keluarga	V - 16
5.1.6	Misi Meningkatkan Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan	V - 19
5.1.7	Misi Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	V - 21
5.1.8	Misi Mewujudkan Pembangunan yang Berkesinambungan	V - 23

5.2	Sasaran Pokok	V - 58
5.2.1	Arah Pembangunan	V - 58
5.2.2	Arah Kebijakan Transformasi	V - 64
5.2.3	Indikator Utama Pembangunan	V - 74
BAB VI	PENUTUP	VI - 1
6.1	Pelaksanaan	VI - 1
	Pembiayaan	VI - 3
	Mitigasi Risiko	VI - 3

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Luas Wilayah Kota Depok per Kecamatan	II - 3
Tabel 2.2. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	II - 12
Tabel 2.3. Data Kependudukan Kota Depok 2023	II - 15
Tabel 2.4. Indeks Perlindungan Anak Kota Depok	II - 24
Tabel 2.5. Indikator Penyusun IPP Kota Depok	II - 32
Tabel 2.6. Indeks Ekonomi Hijau Kota Depok Tahun 2023	II - 37
Tabel 2.7. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Depok 2023	II - 41
Tabel 2.8. Indeks Kota Layak Huni Kota Depok 2023 pada Aspek Infrastruktur	II - 44
Tabel 2.9. Indeks Trantibum Kota Depok 2023	II - 47
Tabel 2.10. Indeks Daya Saing Daerah Kota Depok 2023.....	II - 48
Tabel 2.11. Nilai Indeks Pelayanan Publik Kota Depok Tahun 2022- 2023.....	II - 49
Tabel 2.12. Proyeksi Penduduk Kota Depok Berdasar Kelompok Umur	II - 57
Tabel 2.13. Proyeksi Kebutuhan Hunian Tempat Tinggal Kota Depok 2025-2045	II - 64
Tabel 2.14. Kebutuhan Air Bersih 2025-2045	II - 65
Tabel 2.15. Proyeksi Kebutuhan Listrik Kota Depok 2025-2045	II - 67
Tabel 2.16. Kebutuhan Infrastruktur Sampah Kota Depok 2025-2045	II - 67
Tabel 2.17. Kebutuhan Infrastruktur Kesehatan Kota Depok 2025-2045	II - 69
Tabel 2.18. Proyeksi Sarana Pendidikan Kota Depok 2025-2045	II - 70
Tabel 2.19. Sistem Pusat Pelayanan Kota Depok	II - 72
Tabel 2.20. Sistem Jaringan Transportasi Kota Depok	II - 73
Tabel 2.21. Kawasan Strategis Kota Depok	II - 84
Tabel 3.1. Keterkaitan isu prioritas pembangunan berkelanjutan dengan TPB	III - 19
Tabel 3.2. Hubungan Isu Strategis Global, Nasional, dan Daerah	III - 27
Tabel 4.1. Sasaran Visi RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045	IV - 11
Tabel 5.1. Arah Kebijakan RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045	V - 25
Tabel 5.2. Keselarasan arah pembangunan RPJPD Kota Depok dengan Arah Pembangunan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045	V - 58
Tabel 5.3. Arah Kebijakan Transformasi Kota Depok	V - 65
Tabel 5.4. Keselarasan Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045, RPJPN dan RPJPD Jawa Barat Tahun 2025-2045	V - 74
Tabel 5.5. Perumusan Sasaran Pokok Kota Depok Tahun 2025-2045	V - 84
Tabel 5.6. Hubungan Visi dengan Sasaran Pokok RPJPD Kota Depok Tahun 2025- 2045	V - 101

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1	Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan I -
Gambar 2.1	Peta Wilayah Kota Depok II - 2
Gambar 2.2	Peta Indeks Risiko Banjir Kota Depok II - 7
Gambar 2.3	Jumlah Kejadian Bencana Kebakaran Kota Depok 2019-2023 II - 8
Gambar 2.4	Peta Rawan Longsor Kota Depok II - 9
Gambar 2.5	Status DDDTLH Pangan Kota Depok II - 10
Gambar 2.6	Status DDDTLH Penyedia Air Kota Depok II - 11
Gambar 2.7	Indeks Ketahanan Daerah Kota Depok II - 11
Gambar 2.8	Nilai IKLH Kota Depok II - 12
Gambar 2.9	Indeks Ketahanan Pangan Kota Depok II - 13
Gambar 2.10	Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Depok II - 14
Gambar 2.11	Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Depok Tahun 2020-2023 II - 15
Gambar 2.12	Jumlah Penduduk Berdasar Jenis Kelamin (ribu jiwa) II - 16
Gambar 2.13	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok 2019-2023 II - 18
Gambar 2.14	Indeks Gini Kota Depok 2019-2023 II - 19
Gambar 2.15	Angka Kemiskinan Kota Depok 2019-2023 II - 20
Gambar 2.16	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Depok II - 21
Gambar 2.17	IPM Kota Depok II - 22
Gambar 2.18	Indeks Pembangunan Keluarga Kota Depok II - 26
Gambar 2.19	Indikator Pembangunan Keluarga Per Kecamatan Kota Depok II - 27
Gambar 2.20	Indeks Ketahanan Keluarga Kota Depok II - 29
Gambar 2.21	Indeks Ketahanan Keluarga Kota Depok Per Kecamatan II - 29
Gambar 2.22	Indeks Pembangunan Gender Kota Depok II - 30
Gambar 2.23	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Depok II - 31
Gambar 2.24	PDRB ADHB Kota Depok 2019-2023 (Rp Triliun) II - 35
Gambar 2.25	PDRB per kapita Kota Depok, 2019-2023 II - 36
Gambar 2.26	Indeks Pendidikan Kota Depok II - 40
Gambar 2.27	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Depok 2019-2023 II - 41
Gambar 2.28	Proporsi Penduduk yang Menggunakan Internet Kota Depok 2019 - 2023 II - 43
Gambar 2.29	Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019 - 2023 II - 51
Gambar 2.30	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok Tahun 2006-2023 II - 52
Gambar 2.31	Indeks Pembangunan Manusia Kota Depok Tahun 2010-2023 II - 52
Gambar 2.32	Persentase Kemiskinan Kota Depok Tahun 2006-2023 II - 53
Gambar 2.33	Ketimpangan Pendapatan Kota Depok Tahun 2009-2023 II - 53
Gambar 2.34	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Depok Tahun 2010-2023 II - 54
Gambar 2.35	Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Depok 2023-2045 (juta jiwa) II - 57
Gambar 2.36	Piramida Penduduk Kota Depok 2020 dan 2035 (ribu jiwa) II - 58
Gambar 2.37	Kepadatan Penduduk Kota Depok II - 59
Gambar 2.38	Proyeksi Penduduk Usia Produktif 2025-2045 II - 60
Gambar 2.39	Proyeksi Angka Ketergantungan Depok 2025 - 2045 II - 61
Gambar 2.40	Proyeksi Penduduk Usia Lanjut Kota Depok 2025-2045 II - 62
Gambar 3.1	Permasalahan Geografi Kota Depok III - 1
Gambar 3.2	Permasalahan Demografi Kota Depok III - 4
Gambar 3.3	Permasalahan Kesejahteraan Ekonomi Kota Depok III - 6
Gambar 3.4	Permasalahan Kesejahteraan Sosial Budaya Kota Depok III - 8
Gambar 3.5	Permasalahan Daya Saing Ekonomi Kota Depok III - 12
Gambar 3.6	Permasalahan Daya Saing Manusia Kota Depok III - 13
Gambar 3.7	Permasalahan Daya Saing Infrastruktur Kota Depok III - 14
Gambar 3.8	Permasalahan Daya Saing Iklim Investasi Kota Depok III - 16
Gambar 3.9	Permasalahan Pelayanan Umum Kota Depok III - 17
Gambar 3.10	Ringkasan Isu Global III - 20
Gambar 3.11	Ringkasan Isu Nasional III - 22
Gambar 3.12	Ringkasan Isu Provinsi Jawa Barat III - 25
Gambar 3.13	Ringkasan Isu Strategis Kota Depok III - 31

Gambar 4.1	Kerangka Berpikir Visi Misi RPJPD Kota Depok 2025-2045	IV - 2
Gambar 4.2	Kerangka Pikir Pembangunan	IV - 5
Gambar 4.3	Rancang Bangun Visi Depok Emas Tahun 2025-2045	IV - 7
Gambar 4.4	Keterkaitan antara isu strategis dan pilar visi Kota Depok	IV - 8
Gambar 4.5	Positioning Kota Depok	IV - 9
Gambar 4.6	Sasaran Utama Visi Depok Emas 2025-2045	IV - 10
Gambar 4.7	Rancang Bangun Misi Kota Depok Tahun 2025-2045	IV - 14
Gambar 4.8	Keselarasn Misi RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045 dengan Misi RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045	IV - 19
Gambar 5.1	Tahapan dan Tema Pembangunan 5 Tahunan Kota Depok	V - 2
Gambar 5.2	Tahapan Misi Mewujudkan Transformasi Sosial yang Inklusif, Sehat dan Cerdas	V - 5
Gambar 5.3	Tahapan Misi Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang kreatif, Inovatif dan bertumpu pada Ekonomi Hijau	V - 8
Gambar 5.4	Tahapan Misi Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Berbasis Digital dan Berkelas Dunia	V - 13
Gambar 5.5	Tahapan Misi Mewujudkan Kota yang Aman dan Tertib Serta Menjaga Stabilitas Ekonomi Daerah	V - 15
Gambar 5.6	Tahapan Misi Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi yang Berkelanjutan, inklusif dan Berbasis Ketahanan Keluarga	V - 16
Gambar 5.7	Tahapan Misi Meningkatkan Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan	V - 19
Gambar 5.8	Tahapan Misi Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	V - 21
Gambar 5.9	Tahapan Misi Mewujudkan Pembangunan yang Berkesinambungan	V - 23
Gambar 5.10	Game Changers RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045	V - 108



Pendahuluan

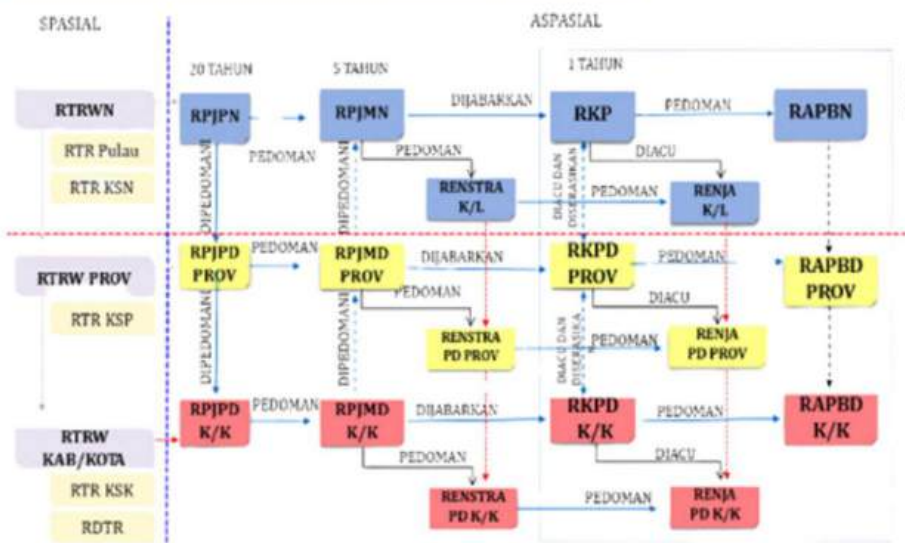
Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok

BAB I

Pendahuluan

Kota Depok telah mengalami kemajuan pembangunan selama 25 tahun terakhir. Namun keberlanjutan pembangunan ini masih dihadapkan dengan berbagai tantangan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2025-2045 dirancang untuk mengatasi tantangan yang ada dan memandu proses pembangunan yang lebih baik. RPJPD ini berfokus pada tujuan pembangunan berkelanjutan dan menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, dan politis, serta kombinasi metode perencanaan *Bottom-Up* dan *Top-Down*.

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



Tujuan RPJPD Kota Depok harus sejalan dengan RPJPD Provinsi Jawa Barat dan mendukung tujuannya. Sinergi ini juga mencakup keselarasan kebijakan dengan RPJPN, untuk memastikan konsistensi rencana dan kebijakan di semua tingkatan.

“RPJPD Kota Depok disusun dengan maksud untuk menjadi pedoman (guidance) strategis yang mengarahkan jalannya pembangunan Kota Depok selama kurun waktu 20 tahun.

Tujuan



Teridentifikasinya gambaran umum kondisi daerah dan capaian hasil pembangunan 2006-2025, proyeksi penduduk dan kebutuhan infrastruktur 2025-2045, gambaran pusat pertumbuhan dan arah kebijakan kewilayahan sesuai RTRW Kota Depok.



Terumuskannya sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan guna merealisasikan visi dan misi Kota Depok Tahun 2025-2045.



Teridentifikasinya permasalahan dan isu strategis Kota Depok, sebagai dasar dalam merumuskan visi dan misi Kota Depok Tahun 2025-2045.



Tercapainya keselarasan pembangunan di Kota Depok dengan Pembangunan di Jawa Barat dan Nasional, serta terwujudnya harmonisasi RPJPD dengan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Depok merupakan kota yang memiliki letak yang sangat strategis, berbatasan langsung dengan Daerah Khusus Jakarta dan berada pada poros kawasan aglomerasi Jabodetabekjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur). Dengan posisi ini Kota Depok memiliki peluang serta keunggulan kompetitif dan komparatif, ditinjau dari segi politik, pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan. Dengan luas wilayah 199,91 km², Kota Depok dihuni oleh 2.145.400 jiwa penduduk (BPS 2023), dengan karakteristik masyarakat yang sangat heterogen, baik suku, agama, etnis dan golongan. Dalam kurun waktu 25 tahun sejak Depok menjadi daerah otonom pada tahun 1999, pembangunan di Kota Depok menunjukkan *trend* yang sangat positif, yang ditandai dengan keberhasilan capaian indikator makro pembangunan seperti meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), semakin tingginya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), berkurangnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), turunnya angka kemiskinan, Indeks Gini Rasio dalam kategori sedang, terkendalinya inflasi dan semakin meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Sebagai sebuah kota yang mulai tumbuh dan mensejajarkan posisinya dengan kota-kota lainnya di Indonesia, Kota Depok juga menghadapi berbagai tantangan perkotaan sebagai dampak dari pesatnya pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, antara lain peningkatan kebutuhan layanan transportasi publik dan konektivitas wilayah, penanganan sampah dan banjir, pengelolaan lingkungan hidup, serta meningkatnya kebutuhan akses terhadap layanan sosial, kesehatan, pendidikan dan pemukiman. Disamping itu, terdapat tantangan pemerintahan dalam merumuskan kebijakan publik yang dapat menyelesaikan permasalahan perkotaan dan berdampak pada kemajuan pembangunan kota yang berkelanjutan. Demikian pula halnya dengan penyelenggaraan pelayanan publik yang efisien, terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan, iklim investasi yang kondusif dan kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas, sangat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas, kemajuan dan daya saing Kota Depok, baik dalam tataran kota-kota di Indonesia maupun dunia.

Selanjutnya dengan berlakunya Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi sebuah isu strategis regional yang berdampak pada perencanaan perkotaan khususnya daerah-daerah di kawasan aglomerasi Jabodetabekjur termasuk Kota Depok. Pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi menjadi peluang bagi integrasi kelembagaan

koordinatif yang lebih produktif dalam penyelesaian permasalahan kawasan secara terpadu. Selain itu, pemindahan ibukota negara ke Kalimantan Timur juga menghadirkan tantangan bagi Kota Depok terutama dalam mengelola dampak positif dan negatif yang ditimbulkan, terutama dampak sosial, ekonomi dan lingkungan.

Dihadapkan hal diatas, untuk merespon tuntutan dan kebutuhan pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan formulasi kebijakan berupa perencanaan pembangunan daerah, baik jangka panjang berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), jangka menengah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun jangka pendek berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65 ayat (1) huruf c, Kepala Daerah mempunyai tugas *“menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD”*. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, merupakan penjabaran dari visi dan misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun, yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dalam rangka menjaga keberlangsungan dan kesinambungan pembangunan, RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045 selain untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kota Depok, juga diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dengan menempatkan masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan, serta sebagai *stakeholders* utama dalam pembangunan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, adalah pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, pendekatan atas-bawah dan bawah atas, pendekatan holistik tematik, pendekatan integratif dan pendekatan spasial dengan melibatkan seluruh *stakeholders* pembangunan sebagai perwujudan prinsip pemerintahan kolaboratif (*collaborative governance*).

Guna memastikan harmonisasi RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045 dengan agenda pembangunan nasional dan pembangunan Jawa Barat, RPJPD Kota Depok dipastikan selaras dengan visi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, yaitu Visi Indonesia Emas 2045: *“Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan”*, serta Visi RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045: *“Provinsi Jawa Barat Termaju, Berdaya Saing Dunia dan Berkelanjutan”*. Selain

itu, RPJPD Kota Depok memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) untuk mengintegrasikan aspek lingkungan, tata ruang, dan perlindungan lingkungan hidup.

Sebagai sebuah dokumen yang diformulasikan secara komprehensif, holistik dan kolaboratif dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan kota dan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat, RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045 disusun sebagai panduan bagi semua pemangku kepentingan dan aktor-aktor pembangunan dalam merumuskan perencanaan jangka menengah dan jangka pendek, serta sebagai panduan dalam implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan secara berkesinambungan. Dengan adanya panduan ini, diharapkan para pemangku kepentingan dan para aktor pembangunan dapat berperan aktif dan berkolaborasi dalam mencapai tujuan pembangunan jangka panjang di Kota Depok.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045 ini berlandaskan pada beberapa dasar hukum, yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

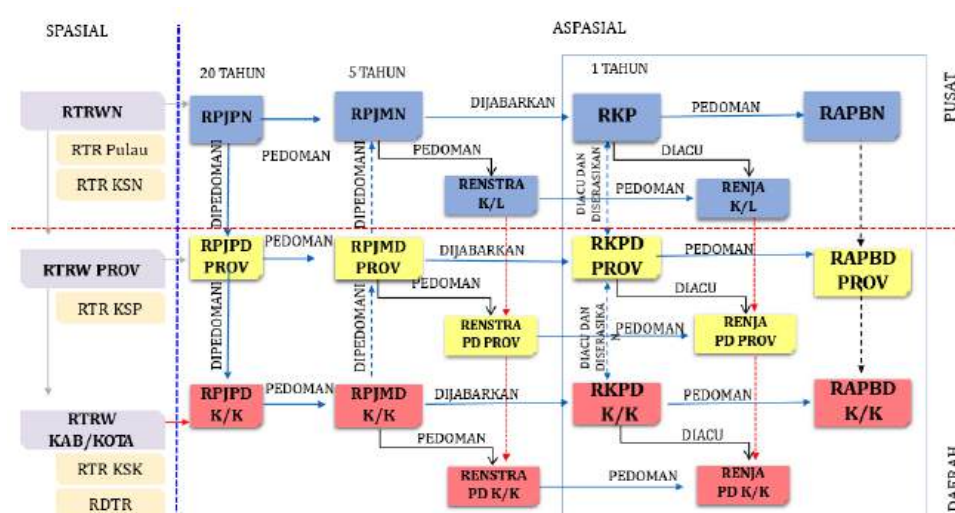
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 64);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 20).

1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dirancang untuk menciptakan sinergi perencanaan diantara berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari level nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota dan sebaliknya. RPJPD Kota Depok dikembangkan dengan mengacu pada kerangka RPJPD Provinsi Jawa Barat dan RPJPN. Pendekatan ini bertujuan untuk menjamin agar perencanaan pembangunan di Kota Depok selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi dan nasional, serta dapat memperkuat integrasi dan koordinasi antar semua level pemerintahan dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Gambar 1. 1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



Sumber: Kemendagri, 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) melalui Peraturan Daerah sebagai acuan dalam merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJPD ini berperan sebagai dasar utama dalam menyiapkan RPJMD dan sekaligus sebagai implementasi Dokumen RPJPD sesuai dengan tahapan. Selain itu dapat berfungsi sebagai manifestasi dari visi, misi, dan program kepala daerah yang harus dirancang berdasarkan kerangka RPJPD, dengan mempertimbangkan RPJMD Provinsi Jawa Barat serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Selanjutnya sebagai dokumen yang mengatur perencanaan pembangunan dalam jangka waktu lima tahun, RPJMD kemudian dijabarkan dalam rencana tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam proses penyusunan RPJPD memperhatikan aspek tata ruang yang ada dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok Tahun 2022-2042, hal ini

bertujuan agar pembangunan daerah selaras dengan kebijakan tata ruang dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

1.4. Maksud dan Tujuan

RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045 disusun dengan maksud untuk menjadi pedoman (*guidance*) strategis yang mengarahkan jalannya pembangunan Kota Depok selama kurun waktu 20 tahun. Adapun tujuan dari penyusunan RPJPD Kota Depok adalah:

1. Teridentifikasinya gambaran umum kondisi daerah dan capaian hasil pembangunan 2006-2025, proyeksi penduduk dan kebutuhan infrastruktur 2025-2045, gambaran pusat pertumbuhan dan arah kebijakan kewilayahan sesuai RTRW Kota Depok.
2. Teridentifikasinya permasalahan dan isu strategis Kota Depok, sebagai dasar dalam merumuskan visi dan misi Kota Depok Tahun 2025-2045.
3. Terumuskannya sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan guna merealisasikan visi dan misi Kota Depok Tahun 2025-2045.
4. Tercapainya keselarasan pembangunan di Kota Depok dengan Pembangunan di Jawa Barat dan Nasional, serta terwujudnya harmonisasi RPJPD dengan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan tentang Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing, Aspek Pelayanan Umum, Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2006-2025, Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik, Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dirangkum dari analisis di Bab II. Selanjutnya, bab ini menguraikan isu-isu strategis yang relevan dalam konteks global, nasional, dan internasional, serta menjelaskan dampaknya, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap perkembangan Kota Depok. Selain itu, bab ini juga menyoroti permasalahan yang paling dominan serta mengidentifikasi potensi-potensi daerah yang

dapat dimanfaatkan untuk mengatasi tantangan dan mendukung pembangunan kota secara berkelanjutan.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

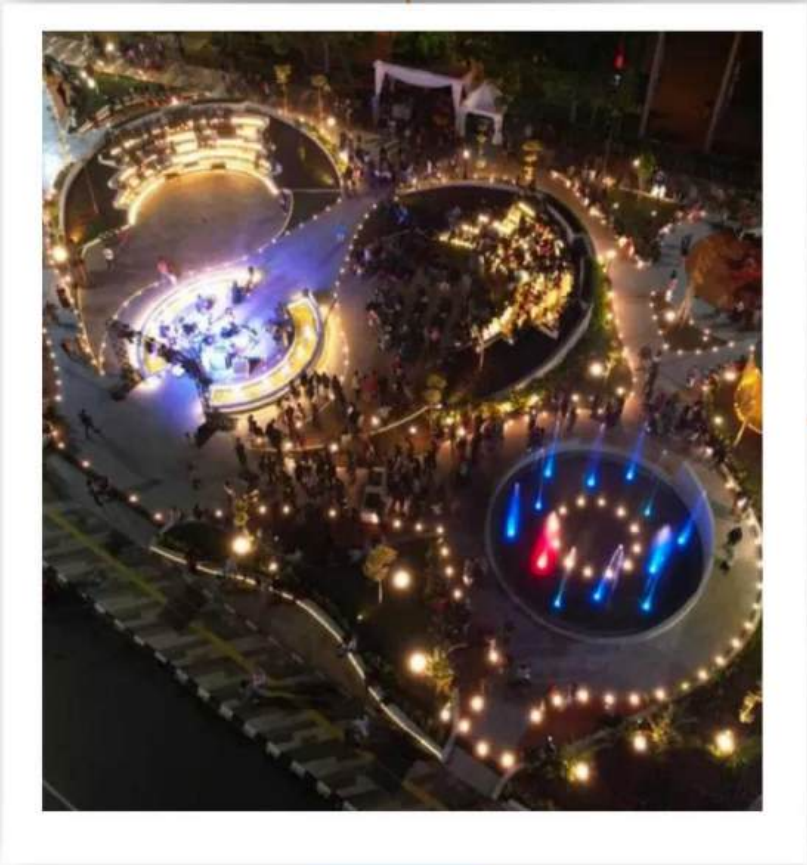
Bab ini akan menjelaskan secara rinci tentang Visi Kota Depok Emas 2045, yaitu gambaran ideal mengenai kondisi yang ingin dicapai oleh Kota Depok hingga tahun 2045. Visi ini mencerminkan aspirasi dan tujuan jangka panjang kota dalam berbagai aspek pembangunan. Selain itu, bab ini juga akan menguraikan tentang misi sebagai langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi tersebut. Misi-misi ini mencakup berbagai upaya konkret dan terencana yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Depok bersama dengan semua pemangku kepentingan untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

Bab ini menguraikan arah kebijakan dan sasaran pokok yang akan menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kota Depok per lima tahun. Arah kebijakan ini dirancang untuk memberikan kerangka strategis yang jelas bagi semua pihak dalam upaya mencapai visi dan misi jangka panjang Kota Depok.

BAB VI PENUTUP

Bab ini menekankan pentingnya pengendalian dan evaluasi yang efektif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kota Depok. Pengendalian yang ketat memastikan setiap program berjalan sesuai rencana, sementara evaluasi berkala menilai kinerja dan efektivitas, memungkinkan penyesuaian strategi berdasarkan hasil dan tantangan yang dihadapi.



Gambaran Umum Kondisi Daerah

Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kota Depok

BAB II

Gambaran Umum Kondisi Daerah



Luas Wilayah

199,91 km
11 kecamatan
63 kelurahan



Jumlah Penduduk

Total 2.145.400 jiwa
laki-laki 1.080.541 jiwa
perempuan 1.064.859 jiwa

Kesejahteraan Ekonomi Meningkat



Laju pertumbuhan ekonomi stabil (5,05%) dan pulih dengan cepat setelah covid

Indeks pembangunan manusia (IPM) (82,53) terus mengalami peningkatan

Tingkat kemiskinan (2,38%), tingkat Pengangguran (6,97%) menurun meski mengalami peningkatan pasca covid, walaupun rasio gini (0,402) mengalami tren peningkatan

Daya Saing Daerah Membaik



PDRB ADHB (Rp 85, 57 triliun) dan PDRB perkapita (Rp 40,82 juta) terus meningkat

Tingkat partisipasi angkatan kerja (62,76) perlahan pulih dari efek Covid

Indeks pendidikan (77,38) terus mengalami tren peningkatan nilai

Pelayanan Umum Memiliki Ruang Improvisasi



Indeks birokrasi Kota Depok mendapat nilai 82,14, dengan skor A-

Indeks pelayanan publik untuk Dinas Sosial dan RSUD Khidmat Sehat Afiat mendapat skor A-

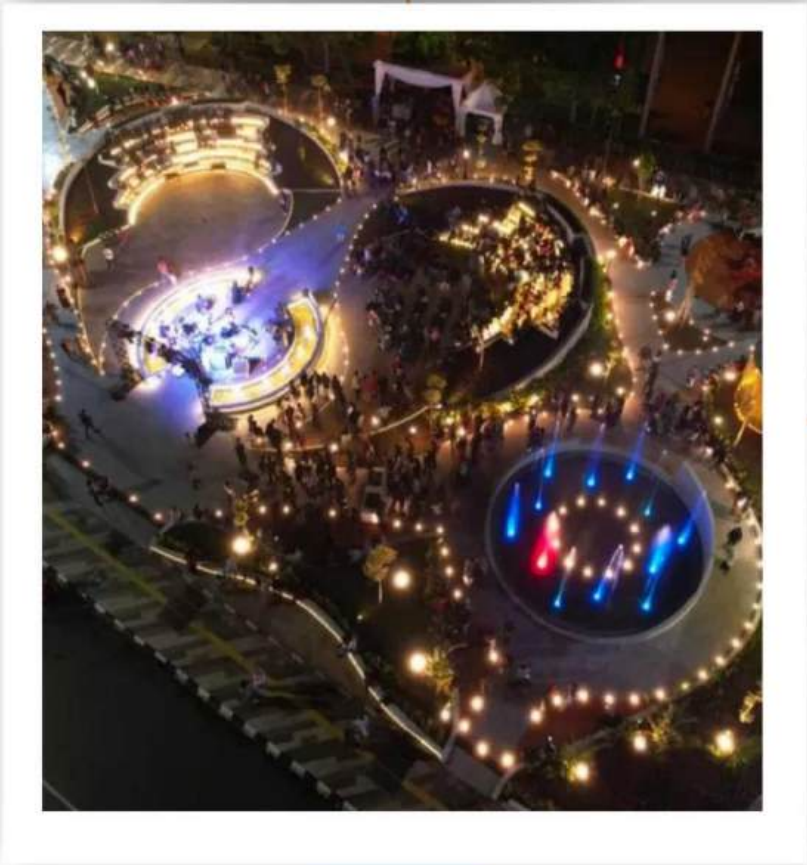
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mendapat skor 3,7, masuk kategori Sangat Baik

*Semua data pada tahun 2023

Sumber: Kota Depok Dalam Angka 2023; LKPJ Walikota Depok 2019-2023; BPS Kota Depok; Kemenpan RB, 2024

DAFHESLYN





Gambaran Umum Kondisi Daerah

Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kota Depok

BAB II

Gambaran Umum Kondisi Daerah



Luas Wilayah

199,91 km
11 kecamatan
63 kelurahan



Jumlah Penduduk

Total 2.145.400 jiwa
laki-laki 1.080.541 jiwa
perempuan 1.064.859 jiwa

Kesejahteraan Ekonomi Meningkat



Laju pertumbuhan ekonomi stabil (5,05%) dan pulih dengan cepat setelah covid

Indeks pembangunan manusia (IPM) (82,53) terus mengalami peningkatan

Tingkat kemiskinan (2,38%), tingkat Pengangguran (6,97%) menurun meski mengalami peningkatan pasca covid, walaupun rasio gini (0,402) mengalami tren peningkatan

Daya Saing Daerah Membaik



PDRB ADHB (Rp 85, 57 triliun) dan PDRB perkapita (Rp 40,82 juta) terus meningkat

Tingkat partisipasi angkatan kerja (62,76) perlahan pulih dari efek Covid

Indeks pendidikan (77,38) terus mengalami tren peningkatan nilai

Pelayanan Umum Memiliki Ruang Improvisasi



Indeks birokrasi Kota Depok mendapat nilai 82,14, dengan skor A-

Indeks pelayanan publik untuk Dinas Sosial dan RSUD Khidmat Sehat Afiat mendapat skor A-

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mendapat skor 3,7, masuk kategori Sangat Baik

*Semua data pada tahun 2023

Sumber: Kota Depok Dalam Angka 2023; LKPJ Walikota Depok 2019-2023; BPS Kota Depok; Kemenpan RB, 2024

DAFHESLYN



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

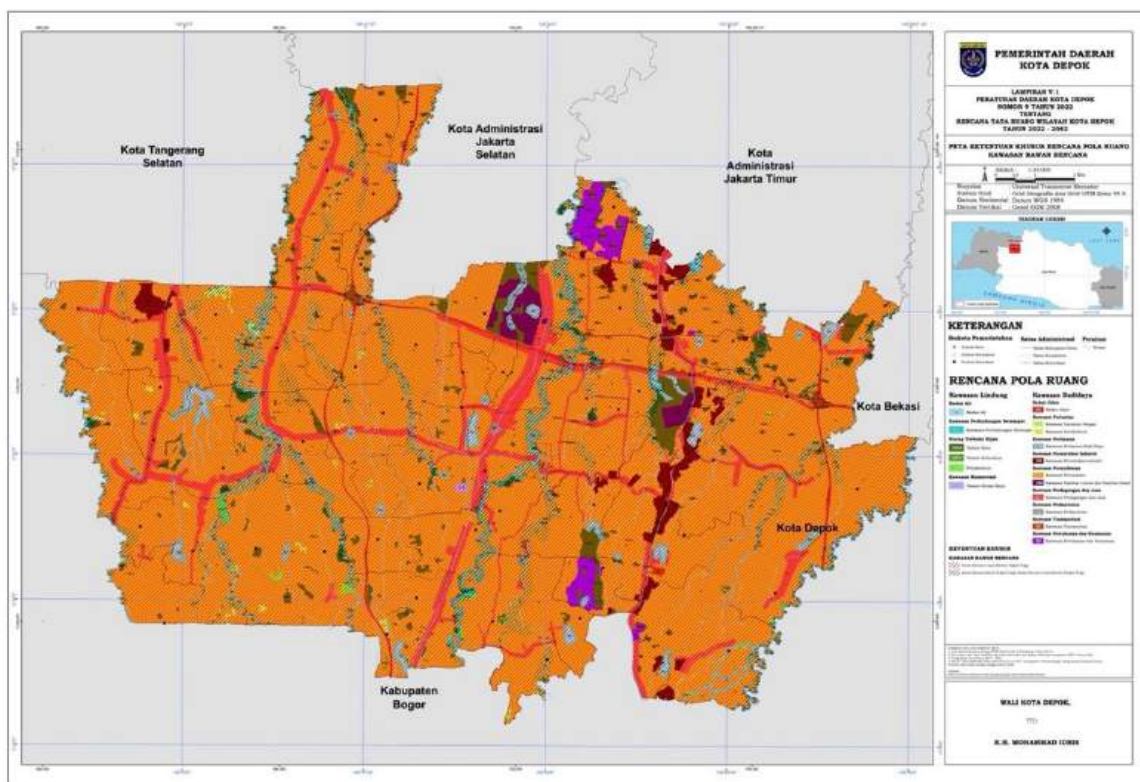
Dalam konteks perencanaan pembangunan yang diformulasikan dalam dokumen RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045, aspek geografi dan demografi merupakan aspek yang sangat penting dalam merancang masa depan kota berkelanjutan. Penjabaran rinci dari aspek geografi, topografi, hidrologi dan klimatologi digunakan untuk memetakan kondisi lingkungan alam sebagai dasar perencanaan pembangunan sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah. Selanjutnya aspek demografi yang menyediakan data dan informasi tentang kependudukan dan potensi bonus demografi, dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pembangunan manusia. Dengan demikian keseluruhan aspek tersebut bertujuan untuk memberikan data dan informasi yang tepat dalam merumuskan perencanaan dan strategi pembangunan jangka panjang yang inklusif dan berkelanjutan, berbasis kependudukan dan karakteristik wilayah Kota Depok.

2.1.1. Kondisi Geografis

Secara geografis Kota Depok terletak pada koordinat 6018'30" - 6028'00" Lintang Selatan dan 106042'30" - 106055'30" Bujur Timur. Bentang alam wilayah Kota Depok dari Selatan ke Utara merupakan daerah dataran rendah dan perbukitan bergelombang lemah dengan sungai yang termasuk dalam dua Satuan Wilayah Sungai (SWS) Besar, yaitu Sungai Ciliwung dan Cisadane. Batas-batas wilayah Kota Depok meliputi:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.

Gambar 2. 1 Peta Wilayah Kota Depok



Sumber: Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 RTRW Kota Depok 2022-2042

Berbatasan langsung dengan Daerah Khusus Jakarta, Kota Depok memiliki peran strategis di Provinsi Jawa Barat. Dalam Perda Jawa Barat Nomor 9 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat 2022-2042 telah mengatur kebijakan pemantapan peran perkotaan dan kebijakan pengembangan wilayah yang bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup penduduk, serta mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang seimbang di seluruh wilayah provinsi. Dalam perda tersebut, Kota Depok ditetapkan sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kawasan Perkotaan Bodebek yang memiliki peran sebagai pusat koleksi dan distribusi skala internasional, nasional atau beberapa provinsi. Selain itu, dalam konteks pengembangan wilayah provinsi, Kota Depok termasuk dalam Wilayah Pengembangan (WP) Bodebekpunjur yang juga merupakan bagian dari pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Jabodetabekpunjur, kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi. Pengembangan Kota Depok diarahkan sebagai simpul pelayanan dan jasa perkotaan, serta mengembangkan sektor perdagangan, jasa dan industri padat tenaga kerja. Untuk menjalankan peran strategis ini Kota Depok perlu mempersiapkan fasilitas pendukung perhubungan antara lain melalui layanan transportasi yang terintegrasi antar wilayah dan pengembangan sistem angkutan umum massal berbasis rel, serta infrastruktur dan fasilitas ekonomi skala regional. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan tema pengembangan bagi WP Bodebekpunjur, yaitu Mengendalikan Perkembangan Wilayah.

Dengan kata lain, Kota Depok harus dapat menyeimbangkan fungsi kawasan perkotaannya dengan fungsi konservasi terutama pada wilayah resapan air dan rawan bencana, dan mengoptimalkan pemanfaatan lahan kota.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang RTRW Kota Depok, luas wilayah Kota Depok kurang lebih 19.991 ha, meliputi 11 kecamatan yang terdiri dari 63 kelurahan.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kota Depok per Kecamatan

NO	KECAMATAN	LUAS (ha)	NO	KECAMATAN	LUAS (ha)
I	BEJI	1462,88	VII	CINERE	1053,22
1	Beji	193,81	33	Cinere	371,74
2	Beji Timur	71,16	34	Gandul	264,35
3	Kemiri Muka	226,87	35	Pangkalan Jati	263,85
4	Pondok Cina	277,59	36	Pangkalan Jati Baru	153,28
5	Kukusan	346,73	VIII	CIMANGGIS	2177,73
6	Tanah Baru	346,72	37	Cisalak Pasar	180,97
II	PANCORAN MAS	1804,7	38	Mekarsari	389,65
7	Pancoran Mas	348,77	39	Tugu	557,27
8	Depok	368,62	40	Pasir Gunung Selatan	266,85
9	Depok Jaya	118,51	41	Harjamukti	597,15
10	Rangkapan Jaya Baru	380,39	42	Curug	185,84
11	Rangkapan Jaya	370,27	IX	TAPOS	3342,99
12	Mampang	218,14	43	Tapos	630,71
III	CIPAYUNG	1137,57	44	Leuwinanggung	430,65
13	Cipayung	214,31	45	Sukatani	481,27
14	Cipayung Jaya	222,91	46	Sukamaju Baru	425,88
15	Ratujaya	308,61	47	Jatijajar	265,50
16	Bojong Pondok Terong	219,59	48	Cilangkap	615,55
17	Pondok Jaya	172,16	49	Cimpaeun	493,43
			X	SAWANGAN	2607,06
IV	SUKMAJAYA	1736,66	50	Sawangan	328,56
18	Sukmajaya	336,30	51	Kedaung	204,86
19	Mekarjaya	325,98	52	Cinangka	343,82
20	Baktijaya	276,13	53	Sawangan Baru	276,66
21	Abadijaya	250,25	54	Pengasinan	404,67
22	Tirtajaya	287,40	55	Bedahan	585,64
23	Cisalak	260,61	56	Pasir Putih	462,85
V	CILODONG	1537,89	XI	BOJONGSARI	1940,56
24	Sukamaju	435,92	57	Bojongsari	205,65
25	Cilodong	219,00	58	Bojongsari Baru	196,54
26	Kalibaru	324,56	59	Pondok Petir	308,97
27	Kalimulya	306,64	60	Serua	327,89

NO	KECAMATAN	LUAS (ha)	NO	KECAMATAN	LUAS (ha)
28	Jatimulya	251,77	61	Curug	422,69
VI	LIMO	1189,37	62	Duren Mekar	191,43
29	Limo	422,83	63	Duren Seribu	287,39
30	Meruyung	276,75			
31	Grogol	287,75	KOTA DEPOK		19.991
32	Krukut	202,04			

Sumber: Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang RTRW Kota Depok 2022-2042

2.1.2. Kondisi Topografi dan Tanah

Kota Depok memiliki topografi yang sangat beragam, mulai dari kemiringan lereng yang landai, dengan kemiringan berkisar antara 0 hingga 25 persen, menandakan keberadaan dataran rendah dan perbukitan bergelombang dengan ketinggian bervariasi antara 50 hingga 140 meter di atas permukaan laut (mdpl). Air permukaan di Kota Depok diatur oleh sungai-sungai besar dan mata air yang sebagian membentuk situ-situ kecil. Bagian utara umumnya berupa dataran rendah, sedangkan di wilayah bagian Selatan umumnya merupakan daerah bergelombang. Ketinggian wilayah berkisar antara 40 hingga 70 mdpl, mencakup seluruh Kecamatan Beji, sebagian kecil bagian selatan Kecamatan Cinere, hampir seluruh Kecamatan Cimanggis, bagian utara Kecamatan Bojongsari, dan sebagian besar Kecamatan Pancoran Mas. Sedangkan bagian selatan Kota Depok memiliki ketinggian 100-140 mdpl, antara lain berada di Kecamatan Sawangan, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Cilodong, dan Kecamatan Tapos. Secara umum kemiringan lereng di Kota Depok hampir rata dengan rata-rata kemiringan 0-8%, adapun kemiringan 8-15% hanya terdapat di wilayah sektor sempadan sungai.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa bagian utara dan barat Kota Depok ditandai oleh elevasi yang lebih tinggi, dengan bukit-bukit kecil dan pegunungan yang memberikan lanskap indah dan alami, serta cenderung lebih hijau. Sementara itu, bagian selatan dan timur memiliki elevasi yang lebih rendah dan lebih datar, wilayah ini merupakan pusat kota yang padat penduduk, dengan berbagai pemukiman, jalan-jalan utama, dan pusat komersial yang aktif.

2.1.3. Kondisi Hidrologi

Kota Depok memiliki dua sumber daya air yaitu sungai dan situ. Secara umum sungai-sungai di Kota Depok termasuk kedalam Wilayah Sungai Ciliwung – Cisadane. Kota Depok memanfaatkan potensi sungai ini sebagai sumber air baku bagi Perusahaan Daerah Air Minum. Terdapat 7 (tujuh) sungai besar yang melintasi wilayah kota Depok yang merupakan bagian dari WS Ciliwung – Cisadane, yaitu Sungai Ciliwung, Sungai Angke, Sungai Cipinang, Sungai Sugutamu, Sungai Pesanggrahan, Sungai Cikeas, dan Sungai Krukut serta beberapa

sungai kecil yang merupakan anak sungai dan saluran irigasi. Semua sungai ini melintas di Kota Depok dan bermuara di Jakarta.

Berdasarkan kondisi hidrogeologi, Kota Depok didominasi oleh kelompok endapan danau, pasir, kerikil dan kerakal hasil pengendapan kembali endapan vulkanik kuartar (kipas aluvial muda) serta konglomerat dan pasir sungai (endapan alluvial tua), dengan tingkat kelulusan air sedang sampai tinggi termasuk akuifer dengan produktivitas tinggi di bagian utara dan akuifer dengan produktivitas sedang di bagian selatan dengan penyebaran akuifer luas dengan debit antara 1-5 liter/detik. Keadaan ini menunjukkan bahwa Kota Depok memiliki kandungan air tanah yang cukup baik. Selain sumber daya air tanah, di Kota Depok juga terdapat sumber daya air lain yang berasal dari air permukaan yaitu meliputi 30 situ dan 34 sungai yang melintasi Kota Depok. Luas keseluruhan situ yang ada di Kota Depok berdasarkan data Perda RTRW Tahun 2022-2042 seluas 142,03 Ha. Kedalaman situ di Kota Depok bervariasi antara 1 sampai 5 meter. DAFHESLYN

Namun demikian, pada saat ini situ di Kota Depok belum banyak dimanfaatkan sebagai sumber air bersih. Penduduk Kota Depok masih memanfaatkan air tanah sebagai sumber air bersih bagi kegiatan masyarakat sehari-hari. Sekitar 78,94% (tujuh puluh delapan koma sembilan puluh empat) persen penduduk Kota Depok memanfaatkan air tanah atau sumber lainnya sebagai sumber air bersih dan 21,06% (dua puluh satu koma nol enam) persen penduduk Kota Depok memanfaatkan air bersih yang berasal dari perpipaan PDAM.

2.1.4. Kondisi Klimatologi

Kota Depok terletak di zona iklim tropis dan dipengaruhi oleh iklim muson, yang menggambarkan kondisi iklim yang stabil secara keseluruhan. Suhu di Kota Depok berfluktuasi antara 24,3 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara rata-rata mencapai 82 persen. Penguapan tahunan tercatat sekitar 3,9 mm, sementara kecepatan angin rata-ratanya adalah 3,3 knot. Depok juga mendapatkan penyinaran matahari sebesar 49,8 persen. Dalam setahun, Kota Depok menerima curah hujan sebanyak 2.684 mm dengan total 222 hari hujan, yang menunjukkan intensitas presipitasi yang tinggi.

2.1.5. Penggunaan Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok tahun 2022-2042, zona wilayah Kota Depok dibagi menjadi dua kawasan yaitu zonasi kawasan lindung dan zonasi kawasan budi daya. Dalam Pasal 93 ayat (1) dijelaskan bahwa yang termasuk dalam zonasi kawasan lindung Kota Depok adalah zonasi badan air, zonasi kawasan perlindungan setempat, zonasi kawasan konservasi, dan zonasi ruang terbuka hijau. Sementara itu, dalam Pasal 93 ayat (2) yang termasuk ke dalam

zonasi kawasan budi daya adalah zonasi badan jalan, zonasi kawasan pertanian, zonasi kawasan perikanan, zonasi kawasan peruntukan industri, zonasi kawasan permukiman, zonasi kawasan perdagangan dan jasa, zonasi kawasan perkantoran, zonasi kawasan pertahanan dan keamanan, serta zonasi kawasan transportasi.

Secara keseluruhan, Kota Depok memiliki kapasitas yang memadai untuk mendukung kegiatan budidaya, termasuk pertanian dan non-pertanian, meskipun terdapat beberapa wilayah yang memiliki daya dukung rendah untuk pengembangan karena memiliki lereng curam, rawan longsor, dan berpotensi erosi seperti kawasan di sekitar Sungai Ciliwung, Cikeas, Pesanggrahan, dan Sungai Angke. Wilayah lain yang menghadapi kendala serupa termasuk area sepanjang jalur pipa gas, jalur kereta api, situ, dan jalur distribusi listrik tegangan tinggi dan ekstra tinggi.

Namun demikian, ketersediaan lahan untuk kegiatan budidaya termasuk pertanian semakin berkurang seiring dengan tingginya kebutuhan untuk pembangunan infrastruktur fisik dan sosial sebagai ruang temu dan berinteraksi antara sesama masyarakat. Hal ini ditunjukkan dari pola peningkatan pembangunan perumahan formal dan swadaya di lahan yang seharusnya untuk pertanian atau sebagai kawasan lindung seperti sempadan sungai dan situ. Terjadi juga peningkatan kepadatan di kawasan perumahan dari rendah menjadi sedang, bahkan tinggi. Lebih lanjut, lahan di sepanjang jalan utama bertransformasi menjadi kawasan dengan fungsi campuran, mencakup perkantoran dan perdagangan baik retail maupun non-retail.

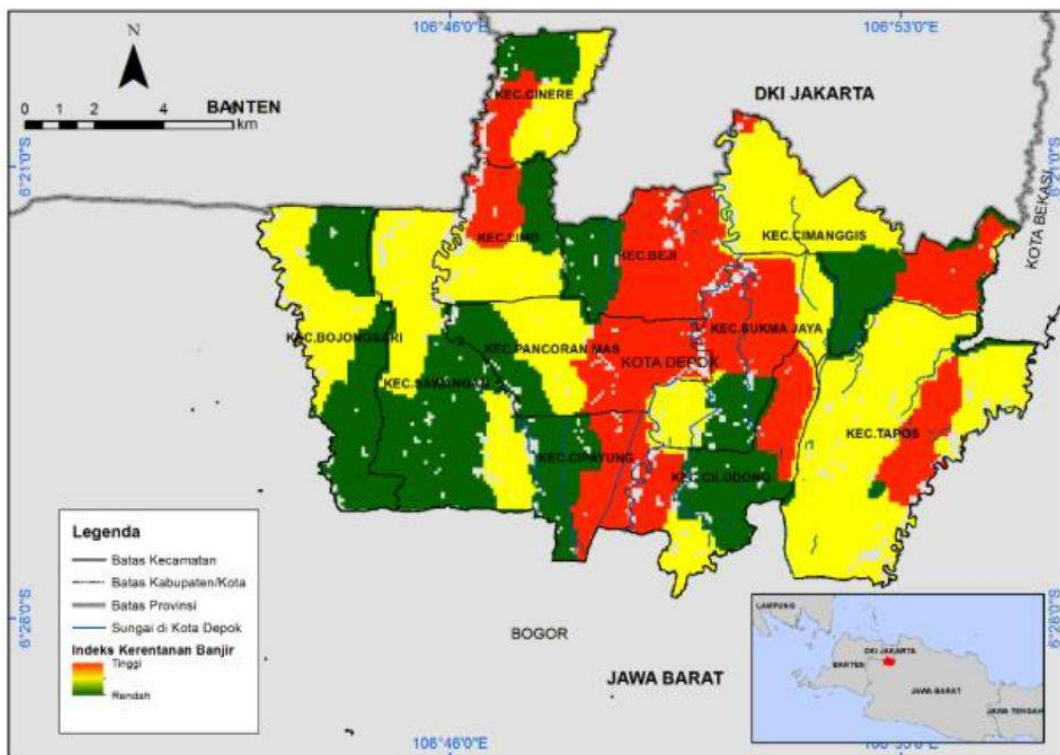
Tekanan pada tata guna lahan di Kota Depok ini meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan dinamika regional. Penggunaan lahan terutama didominasi oleh pembangunan perumahan, perkantoran, dan pusat bisnis. Tekanan ini berpengaruh pada penurunan tutupan lahan hijau dan mempersulit pemenuhan kewajiban menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 30% dari luas wilayah. Untuk merespon dinamika pembangunan yang terjadi, saat ini wilayah Depok terbagi menjadi 4 (empat) Pusat Pelayanan Kota (PPK) dan 8 (delapan) Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK), serta 63 Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

2.1.6. Wilayah Rawan Bencana

Salah satu tantangan utama yang dihadapi Kota Depok adalah banjir, terutama di beberapa daerah yang teridentifikasi sebagai rawan bencana banjir. Berdasarkan data dari Dinas PUPR Kota Depok (2021) luasan wilayah rawan bencana banjir dan genangan air yaitu 163,76 Ha. Beberapa faktor yang memicu terjadinya banjir di Kota Depok adalah:

- Curah hujan tinggi seringkali merupakan penyebab utama banjir. Kota Depok menerima curah hujan yang signifikan selama musim hujan, dan hujan dengan intensitas tinggi dapat mengakibatkan air sungai meluap dan air hujan tidak dapat segera disalurkan.
- Kemiringan dasar saluran sungai kecil di beberapa daerah kurang efisien, sehingga air mengalir dengan lambat dan dapat menggenangi wilayah sekitarnya. Kapasitas aliran sungai juga tidak memadai untuk menampung air berlebih selama hujan deras.
- Sistem drainase yang kurang memadai mengakibatkan air hujan tidak tersalurkan dengan baik. Infrastruktur drainase yang tidak memadai menjadi penyebab banjir permukaan di beberapa wilayah kota.
- Peningkatan lahan terbangun yang tidak diimbangi dengan upaya meresapkan air hujan mengakibatkan peningkatan limpasan air hujan di permukaan (*run-off*) dan resiko terjadinya banjir.

Gambar 2. 2 Peta Indeks Risiko Banjir Kota Depok



Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045

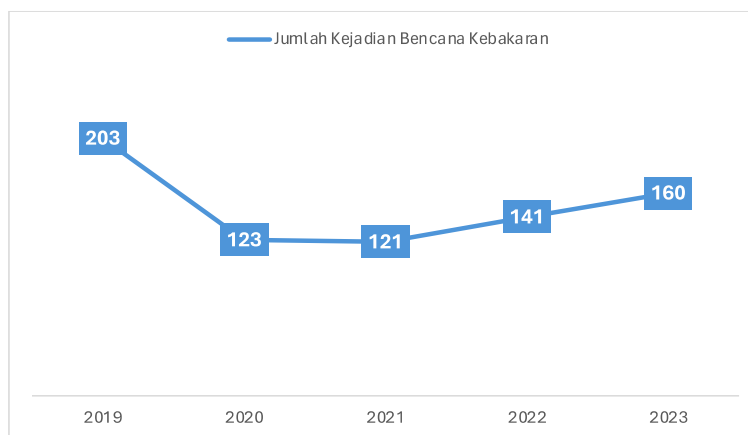
Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2022 terjadi 83 kejadian banjir yang tersebar hampir diseluruh kecamatan. Upaya pengendalian banjir dilakukan dengan mengikuti Keppres No. 114 tahun 1999 yang menyatakan beberapa kecamatan sebagai kawasan konservasi air dan tanah, serta merencanakan pembangunan jangka panjang hingga tahun 2025 yang mencakup peningkatan pengelolaan sumber daya air melalui sumur resapan, sumur imbuhan, biopori, dan mata air. Peta risiko banjir Kota Depok menunjukkan sebagian kelurahan di Kecamatan Beji, Kecamatan Cipayung,

Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Limo, Kecamatan Cinere, dan Kecamatan Tapos memiliki tingkat kerentanan banjir yang tinggi.

Pada potensi kerawanan kebakaran Kota Depok, sebagai kota penyangga Jakarta dengan luas wilayah mencapai 199,91 kilometer persegi dan jumlah penduduk sekitar 2.145.400 jiwa, menghadapi risiko tinggi terhadap kebakaran. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis dalam bentuk *Fire Management Area* (FMA) untuk melindungi warga dari ancaman kebakaran.

Selain itu, karakteristik pemukiman yang padat dan gang-gang sempit menyulitkan pelayanan DAMKAR (Dinas Pemadam Kebakaran) ke lokasi kejadian kebakaran. Sehingga, Kota Depok perlu mengambil langkah-langkah kongkrit untuk menghadapi masalah kebakaran yang dapat mempengaruhi keselamatan warganya. Ini termasuk meningkatkan personel DAMKAR, perbaikan akses ke lokasi kebakaran di pemukiman padat, dan pengembangan SDM yang terampil dalam penanggulangan kebakaran.

Gambar 2. 3 Jumlah Kejadian Bencana Kebakaran Kota Depok 2019-2023

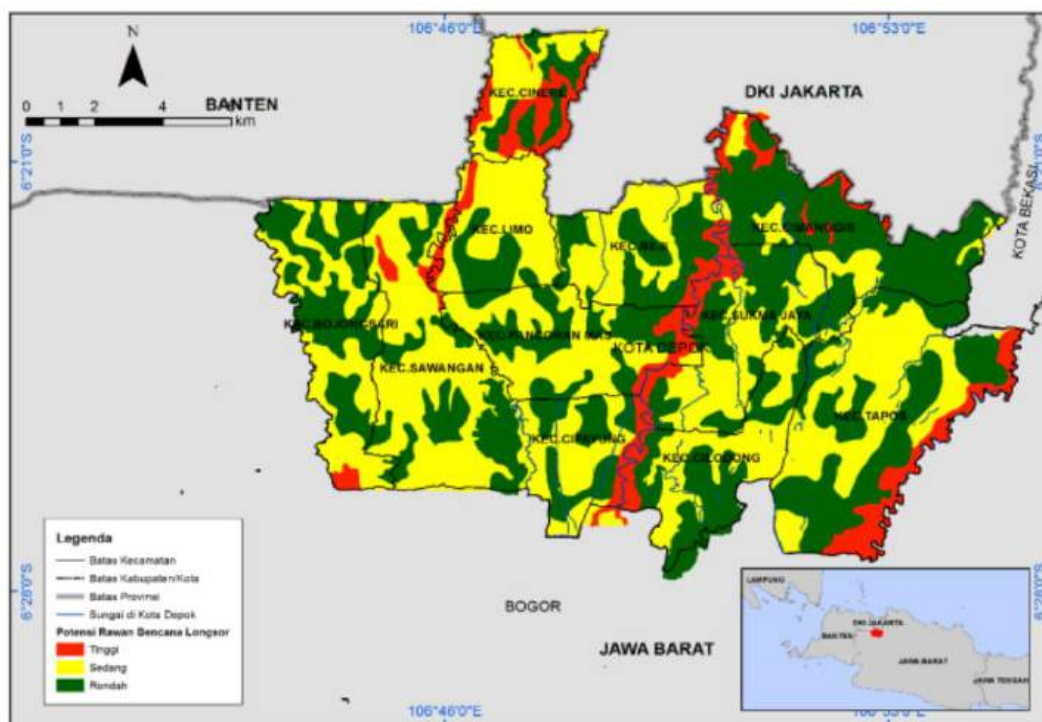


Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Depok, 2019 -2023

Selanjutnya potensi rawan longsor di Kota Depok sebagian besar masuk kedalam kategori sedang, dengan tingkat potensi tinggi terutama di sepanjang sungai-sungai besar seperti Sungai Ciliwung dan Pesanggrahan.

Meskipun dalam kategori sedang, potensi bencana longsor juga wajib diperhatikan di Kota Depok karena menimbulkan kerugian material bagi korban. Sepanjang tahun 2022 terdapat 81 kejadian longsor yang antara lain disebabkan oleh abrasi tebing sungai akibat meningkatnya debit air sungai. Potensi longsor juga dapat disebabkan oleh eksploitasi air tanah yang akan mengakibatkan penurunan muka air tanah dan pergerakan tanah.

Gambar 2. 4 Peta Rawan Longsor Kota Depok



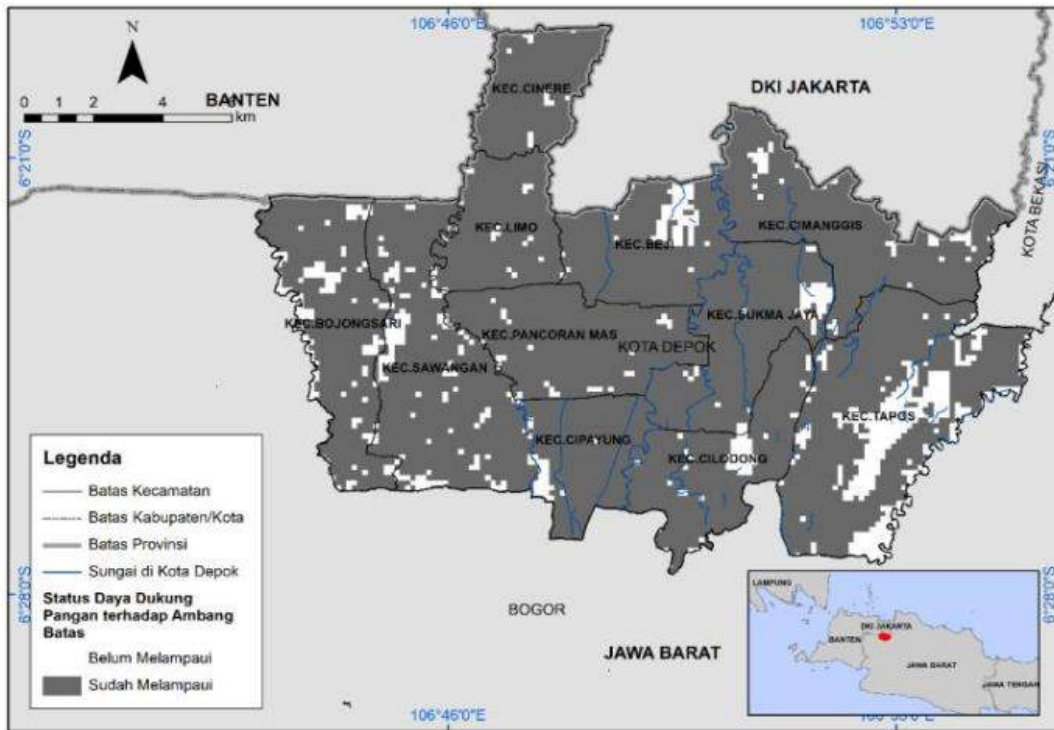
Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045

2.1.7. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH)

Ambang Batas DDDTLH Penyedia Pangan

Ambang batas dan status DDLH penyedia pangan di Kota Depok dianalisis menggunakan grid spasial berukuran 5" x 5" (150 m x 150 m). Ketersediaan pangan dihitung berdasarkan produksi tanaman pangan, hortikultura, dan hasil peternakan, dengan menggunakan Indeks Jasa Ekosistem (IJE) sebagai indikator. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa mayoritas wilayah Kota Depok memiliki ketersediaan pangan yang rendah. Namun, beberapa lokasi di Kecamatan Tapos menunjukkan ketersediaan pangan yang lebih tinggi, disebabkan oleh dominasi permukiman di Kecamatan Cimanggis, Sukmajaya, dan Beji.

Gambar 2. 5 Status DDDTLH Pangan Kota Depok



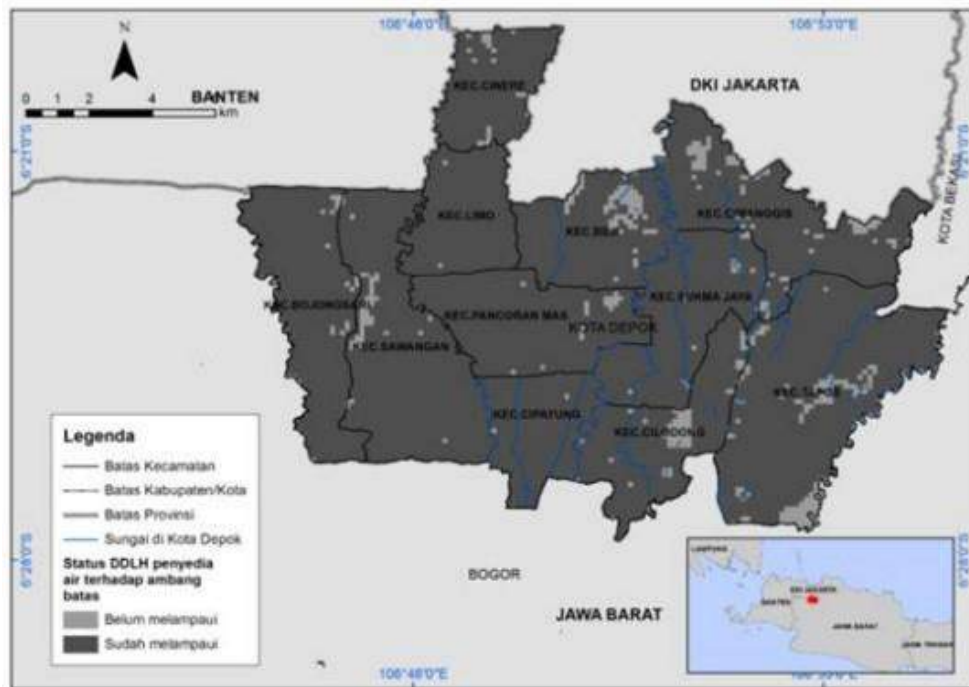
Sumber: Laporan Penyusunan Kajian TPB Untuk Mendukung Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Depok 2024-2029

Status "belum melampaui" terjadi ketika jumlah penduduk lebih rendah dari nilai ambang batas, menunjukkan bahwa lokasi tersebut masih mampu mendukung kebutuhan pangan. Sebaliknya, status "sudah melampaui" terjadi ketika jumlah penduduk melebihi nilai ambang batas, menunjukkan bahwa lokasi tersebut sudah tidak mampu mendukung kebutuhan pangan. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa hampir seluruh wilayah Kota Depok memiliki status daya dukung penyedia pangan yang sudah melampaui. Namun, terdapat wilayah dengan status "belum melampaui" yang cukup luas di Kecamatan Tapos.

Ambang Batas DDDTLH Penyedia Air

Ambang batas dan status DDLH Penyedia Air di Kota Depok dihitung berdasarkan ketersediaan air, kebutuhan, dan jumlah penduduk dalam sistem grid 5" x 5" ($\pm 150 \times 150$ m). Ketersediaan air yang digunakan berasal dari air permukaan/air sungai di DAS Ciliwung-Cisadane dengan total 82,7 juta m^3 /tahun. Wilayah dengan ketersediaan air rendah, terutama terdapat di Kecamatan Cinere, Cimanggis, Sukmajaya, Beji, dan sebagian Tapos dan Cilodong, yang memiliki kepadatan penduduk tinggi. Secara keseluruhan, distribusi ketersediaan air di setiap kecamatan dapat dianggap rendah hingga sedang.

Gambar 2. 6 Status DDDLH Penyedia Air Kota Depok



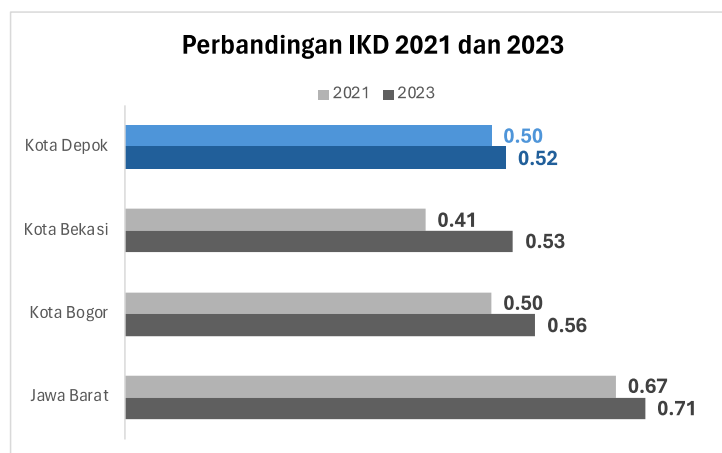
Sumber: Laporan Penyusunan Kajian TPB Untuk Mendukung Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Depok 2024-2029

Hampir semua wilayah Kota Depok memiliki status DDLH sudah melampaui ambang batas. Hal ini menandakan tingginya kebutuhan air di wilayah permukiman dengan kepadatan penduduk tinggi, di mana ketersediaan air alamiahnya tidak mencukupi. Wilayah-wilayah ini bergantung pada suplai air dari daerah lain, termasuk dari PDAM.

2.1.8. Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan alat penting untuk mengukur kemampuan daerah dalam mengatasi bencana, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Untuk Kota Depok, IKD pada tahun 2021 dan 2023 menunjukkan stabilitas dan sedikit peningkatan, dari 0,5 menjadi 0,52. Dengan nilai ini, Kota Depok dikelompokkan sebagai daerah dengan ketahanan sedang.

Gambar 2. 7 Indeks Ketahanan Daerah Kota Depok



Sumber: BPBD Kota Depok, 2023

Bila dibandingkan dengan dua kota lain di Jawa Barat, yakni Kota Bekasi dan Kota Bogor, IKD Kota Depok pada tahun 2021 berada di posisi tengah. Kota Bogor mencetak IKD tertinggi (0,5) di antara ketiga kota tersebut, disusul oleh Kota Depok dan Kota Bekasi (0,41). Namun, pada tahun 2023, Kota Depok hanya mengalami peningkatan IKD sebesar 0,02, sementara Kota Bekasi melonjak 0,12 menjadi 0,53 dan Kota Bogor naik 0,06 menjadi 0,56. Walaupun begitu, IKD Kota Depok masih berada di bawah rata-rata provinsi Jawa Barat, baik pada tahun 2021 (0,67) maupun 2023 (0,71).

2.1.9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan instrumen holistik yang mengevaluasi dan menyajikan gambaran komprehensif tentang kondisi lingkungan hidup dalam ruang lingkup dan periode waktu tertentu. Alat ukur ini secara efektif menyediakan indikasi awal dan kesimpulan yang cepat mengenai status lingkungan, memungkinkan pemangku kepentingan untuk membuat keputusan informasi berbasis data. IKLH merupakan agregasi dari beberapa indeks khusus, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), yang masing-masing memberikan evaluasi terperinci terhadap aspek tertentu dari lingkungan.

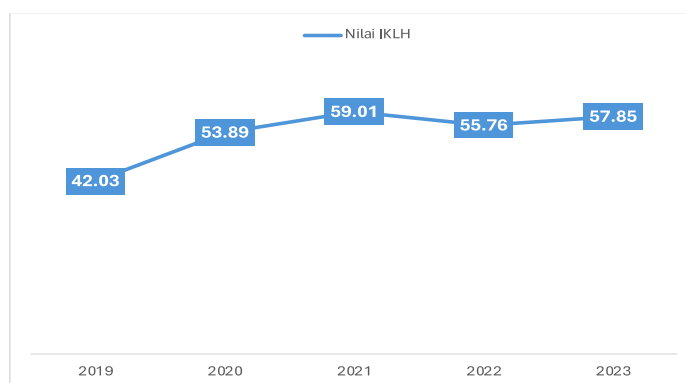
Tabel 2. 2 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	32,13	51,61	61,03	58,37	52,017
2	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	65,17	65,76	69,63	70,82	74,77
3	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	22,575	35,873	35,88	23,52	36,512

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 2023

Berdasarkan data dari satudata.depok.go.id, berikut nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Depok.

Gambar 2. 8 Nilai IKLH Kota Depok



Sumber: Satudata.depok.go.id, 2023

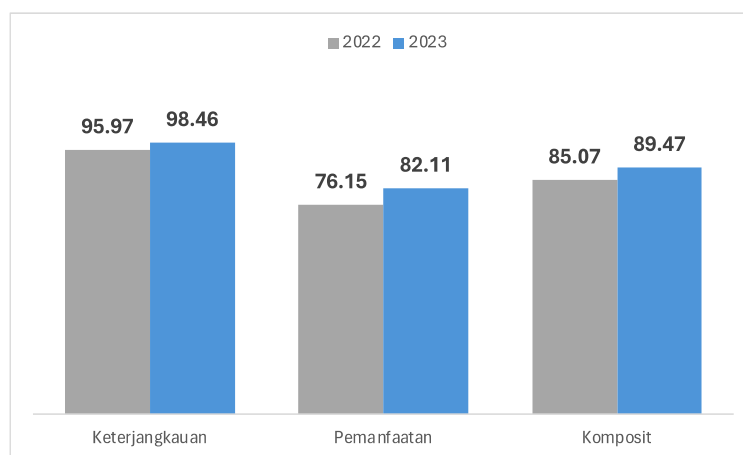
2.1.10. Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan komponen integral dari Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA*), yang berperan signifikan dalam analisis dan evaluasi ketahanan pangan dan nutrisi di berbagai wilayah. IKP tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai efektivitas dan efisiensi kebijakan serta program pangan dan gizi yang dilaksanakan, tetapi juga berkontribusi dalam mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian khusus dan intervensi yang lebih terarah.

Melalui penerapan IKP, dapat dilakukan evaluasi komprehensif terhadap capaian ketahanan pangan di wilayah tertentu, yang mencakup aspek ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas pangan. Indeks ini memungkinkan pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem pangan lokal, serta menetapkan prioritas dalam alokasi sumber daya dan pengembangan strategi.

IKP memberikan gambaran peringkat atau ranking pencapaian ketahanan pangan di berbagai wilayah, yang berfungsi sebagai indikator penting dalam pengukuran kemajuan dan perbandingan kinerja antar wilayah. Hal ini mendorong penciptaan lingkungan kompetitif yang sehat di antara wilayah untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas intervensi ketahanan pangan.

Gambar 2. 9 Indeks Ketahanan Pangan Kota Depok



Sumber: Indeks Ketahanan Pangan 2023 (Badan Pangan Nasional)

Analisis data ketahanan pangan Kota Depok menunjukkan peningkatan skor untuk ketahanan pangan berbasis indeks dari tahun 2022 ke 2023. Pada tahun 2022, skor keterjangkauan adalah 95,97 dan pemanfaatan adalah 76,15, dengan nilai komposit sebesar 85,07. Di tahun 2023, terjadi peningkatan pada setiap aspek, keterjangkauan menjadi 98,46 pemanfaatan menjadi 82,11, sehingga nilai komposit naik menjadi 89,47. Data ini

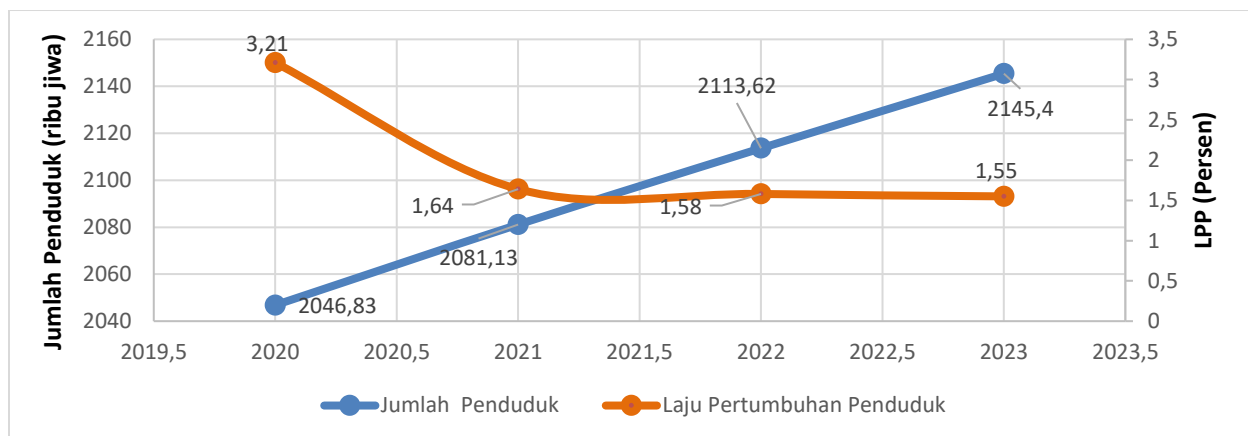
mengindikasikan bahwa terjadi perbaikan ketahanan pangan di kota Depok, baik dalam hal keterjangkauan dan pemanfaatan.

2.1.11. Demografi

Populasi penduduk Kota Depok berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2023 sebanyak 2.145.400 jiwa yang terdiri atas 1.080.540 jiwa penduduk laki-laki dan 1.064.860 jiwa penduduk perempuan (BPS, 2024).

Pada Gambar 2. 11 diperlihatkan perkembangan Penduduk Kota Depok 4 tahun terakhir (Tahun 2020-2023) yang tumbuh rata-rata sekitar 1,99% per tahun. Dari gambar tersebut terlihat adanya kenaikan jumlah penduduk setiap tahunnya. Namun laju pertumbuhan penduduk Kota Depok menunjukkan tren menurun. Hal ini bisa dilihat dari LPP Kota Depok pada tahun 2020 sebesar 3,21% menjadi 1,55% pada tahun 2023.

Gambar 2. 10 Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Depok

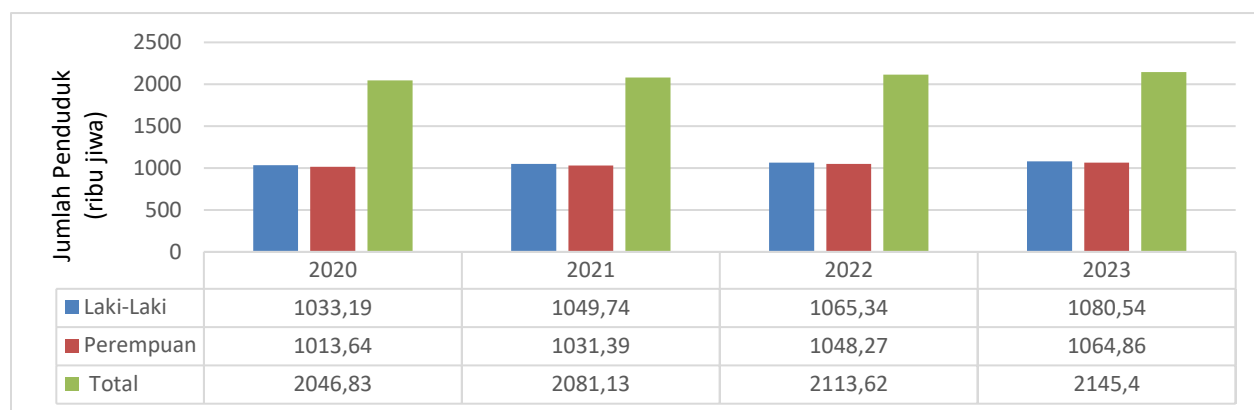


Sumber: BPS Kota Depok, 2024 (diolah)

Jika dilihat dari komposisi berdasarkan jenis kelamin, total jumlah penduduk laki-laki di Depok lebih tinggi daripada total jumlah penduduk perempuan. Secara keseluruhan, rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan Kota Depok tahun 2023 sebesar 101. Hal ini menunjukkan bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki.

Perkembangan jumlah penduduk Kota Depok menurut jenis kelamin tahun 2020-2023 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2. 11 Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Depok Tahun 2020- 2023



Sumber: Kota Depok dalam Angka, 2024 (diolah)

Proyeksi penduduk Kota Depok untuk tahun 2023 mencatat jumlah total penduduk sebanyak 2.145.400 jiwa, meningkat 31.780 jiwa dari tahun sebelumnya. Selain karena fertilitas, peningkatan penduduk di Kota Depok juga disebabkan oleh migrasi masuk. Menurut data BPS Depok, pada tahun 2021, tercatat ada 37.332 migrasi masuk dan 35.633 migrasi keluar.

Dari jumlah tersebut, penduduk laki-laki berjumlah 1.080.541 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 1.064.859 jiwa. Rasio jenis kelamin tahun 2023 yang mencapai 101 mengindikasikan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Dengan luas wilayah kurang lebih 19.991 ha, rata-rata kepadatan penduduk Kota Depok di Tahun 2023 adalah sebanyak 10.732 jiwa per kilometer persegi. Sementara itu, distribusi kepadatan penduduk di 11 kecamatan yang ada di Kota Depok menunjukkan variasi yang signifikan. Kecamatan Cipayung mencatat kepadatan tertinggi dengan 16.265 orang per kilometer persegi. Di sisi lain, Kecamatan Sawangan dan Bojongsari memiliki kepadatan yang terendah, dengan masing-masing hanya 7.563 orang per kilometer persegi. Variasi ini memberikan gambaran yang jelas mengenai distribusi dan kepadatan penduduk di berbagai kecamatan, yang berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan dan pelayanan publik di masing-masing kecamatan.

Tabel 2. 3 Data Kependudukan Kota Depok 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk Per KM2	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
1	Sawangan	197,17	3,59	9,19	7.563	104
2	Bojongsari	146,81	2,91	6,84	7.563	102
3	Pancoran Mas	253,36	1,23	11,81	14.036	101
4	Cipayung	184,93	2,76	8,62	16.265	102
5	Sukmajaya	256,06	0,51	11,94	14.741	99
6	Cilodong	181,41	0,79	8,46	11.795	103

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk Per KM2	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
7	Cimanggis	252,37	2,05	11,76	11.587	102
8	Tapos	276,01	-1,72	12,87	8.256	102
9	Beji	171,66	1,01	8	11.331	101
10	Limo	124,02	-2,55	5,78	10.431	102
11	Cinere	101,6	2,02	4,74	9.649	100

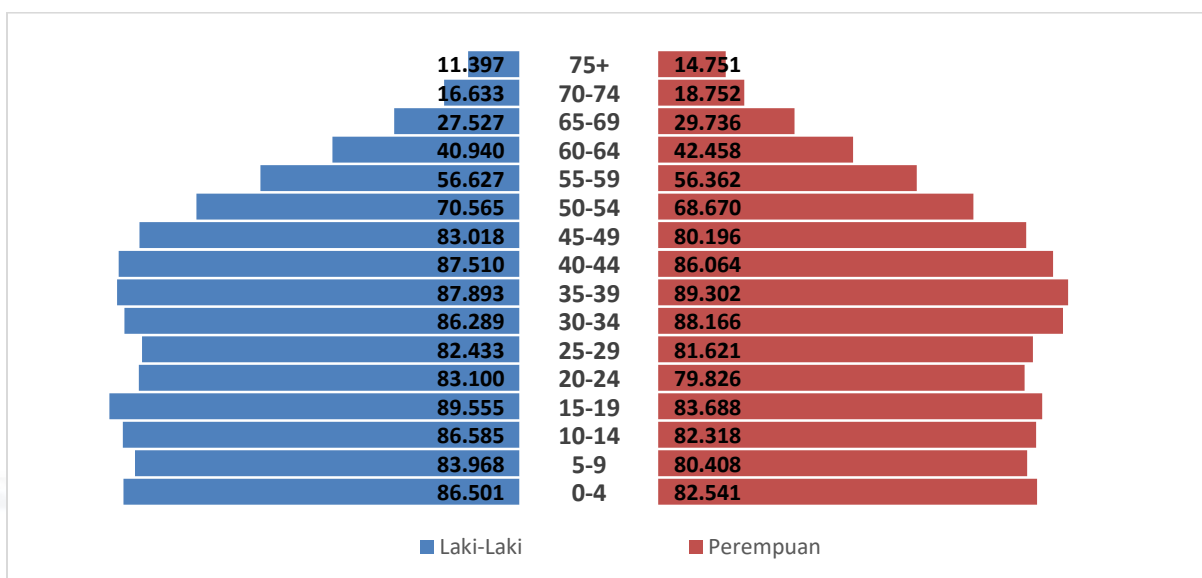
Sumber: Kota Depok Dalam Angka 2024

Piramida penduduk Kota Depok pada Tahun 2023 menunjukkan piramida penduduk ekspansif. Piramida ekspansif memiliki bentuk yang besar pada bagian bawah dan semakin kecil ke bagian puncak. Piramida ini dikenal juga dengan istilah piramida segitiga, kerucut, limas, atau piramida penduduk muda. Piramida ekspansif ini menunjukkan bahwa penduduk di Kota Depok berada dalam keadaan tumbuh. Piramida seperti ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia muda lebih besar. Hal ini dapat diartikan bahwa angka kelahiran tinggi dan tingkat kematian bayi rendah.

Jika dilihat dari komposisi berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki di Depok secara umum berimbang dengan penduduk perempuan. Begitu pula dengan komposisi penduduk laki-laki dan perempuan menurut usia, secara umum menunjukkan pola serupa, yaitu didominasi oleh kelompok usia produktif.

Komposisi penduduk Kota Depok didominasi oleh usia produktif, dan diperkirakan dalam 5 tahun kedepan, komposisi itu tidak berubah secara drastis. Dengan demikian, pemerintah harus melakukan antisipasi dengan membuka lapangan kerja yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja.

Gambar 2. 12 Jumlah Penduduk Berdasar Jenis Kelamin (ribu jiwa)



Sumber: Kota Depok Dalam Angka 2024 (diolah)

Analisis data demografis berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin memberikan wawasan penting mengenai distribusi penduduk. Dari data yang disajikan, terlihat bahwa jumlah penduduk pria dan wanita dalam kelompok umur 0-4 tahun adalah yang terbesar, dengan total 169.042 anak, yang menandakan tingkat kelahiran yang relatif tinggi atau masuknya banyak keluarga muda di daerah tersebut.

Seiring bertambahnya usia, terlihat pola di mana jumlah individu pada kelompok umur 5-9, 10-14, dan 15-19 tahun berangsur menurun, tetapi tidak signifikan. Pada kelompok umur produktif, yaitu 20-39 tahun, jumlahnya stabil dengan jumlah penduduk wanita pada kelompok 30-39 tahun yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pria, menunjukkan kemungkinan lebih tingginya angka harapan hidup wanita atau migrasi masuk yang lebih besar pada kelompok umur ini.

Kelompok umur 40-54 tahun menunjukkan penurunan yang lebih tajam. Memasuki kelompok umur 55 tahun ke atas, jumlahnya semakin menurun secara signifikan, terutama setelah umur 65 tahun. Pada kelompok usia lanjut, 75 tahun ke atas, jumlah total 26.148, dengan jumlah wanita yang lebih tinggi dibandingkan pria, yang konsisten dengan pola umum di mana wanita memiliki angka harapan hidup yang lebih panjang. Secara keseluruhan, distribusi penduduk menunjukkan bahwa wilayah Kota Depok memiliki populasi yang cenderung muda, dengan total penduduk pria sebanyak 1.080.541 dan penduduk wanita 1.064.859, menghasilkan jumlah total 2.145.400. Komposisi jumlah penduduk ini kebijakan perencanaan kota dan pengembangan layanan di masa depan.

Pada tahun 2023, persentase angkatan kerja di Kota Depok mencapai 62,76 persen, sedangkan penduduk yang bukan angkatan kerja sebesar 37,24 persen. Dari penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja, 12,49 persen memiliki pendidikan setingkat SD, 10,54 persen memiliki pendidikan SMP, 47,33 persen lulusan SMA, dan 29,64 persen telah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Tingkat pengangguran di Kota Depok pada tahun 2022 tercatat sebesar 6,97 persen, menunjukkan adanya tantangan dalam penyerapan tenaga kerja meskipun sebagian besar penduduk memiliki pendidikan menengah dan tinggi.

Kota Depok memiliki karakteristik penduduk multikultural dilihat dari suku, agama dan ras yang berasal dari seluruh Indonesia. Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemajuan Kebudayaan, identitas budaya daerah Kota Depok adalah Betawi Depok. Penduduk Kota Depok tidak hanya penduduk lokal, melainkan penduduk komuter atau penduduk yang bekerja di DKI Jakarta dan melakukan perjalanan dengan commuter line. Berdasarkan data dari Kereta Commuter Indonesia (KCI) terdapat pengguna commuter line Jabodetabek yang masuk melalui pintu masuk stasiun commuter line di Kota Depok sebesar

33.086.254 orang di Tahun 2023, mengalami peningkatan sebesar 7.661.484 orang jika dibandingkan tahun 2022.

2.2. Aspek Kesejahteraan Sosial dan Budaya

Kesejahteraan masyarakat merupakan aspek penting dalam pembangunan Kota Depok. Pembangunan kota yang berkesinambungan dan inklusif tidak dapat dilepaskan dari upaya peningkatan kualitas hidup warga. Aspek kesejahteraan sosial dan budaya ini mengupas secara menyeluruh mengenai kondisi kesejahteraan warga Kota Depok saat ini, yang akan menjadi pijakan yang kuat dalam perencanaan strategis untuk masa depan. Dengan menganalisis informasi ini, pemerintah Kota Depok mampu mengidentifikasi gap dan kebutuhan yang ada, serta merumuskan strategi yang tepat guna mengatasi tantangan yang dihadapi.

Selain itu, pemetaan komprehensif terhadap aspek kesejahteraan memungkinkan pemerintah Kota Depok untuk menggali potensi dan peluang yang ada. Dengan demikian, RPJPD Kota Depok bukan hanya menjadi sebuah dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi instrumen yang memandu transformasi sosial-ekonomi secara holistik.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan Ekonomi

Karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi ditinjau melalui berbagai indikator, yang mencerminkan kondisi sosial dan ekonomi secara komprehensif. Indikator-indikator utama yang digunakan adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Gini Rasio, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan indikator penting yang mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Depok. LPE yang tinggi menunjukkan peningkatan produksi barang dan jasa, yang mencerminkan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. LPE dijadikan sebagai tolak ukur efektivitas kebijakan pembangunan ekonomi lokal dan menjadi indikator kunci untuk menilai kemajuan ekonomi daerah.

Gambar 2. 13 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok 2019-2023



Sumber: BPS Jabar; BPS Depok; BPS Tangsel; BPS DKI Jakarta; BPS Nasional, 2024 (Diolah)

Grafik LPE Kota Depok dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan terjadinya penurunan signifikan LPE dari 6,74% di tahun 2019 menjadi -1,92% di tahun 2020, yang menggambarkan terjadinya kontraksi ekonomi. Penurunan ini disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19, yang mempengaruhi kegiatan bisnis dan konsumsi secara global.

Pada tahun 2021, ekonomi menunjukkan pemulihan dengan LPE naik menjadi 3,76%. Angka ini menunjukkan bahwa ekonomi mulai pulih dari dampak negatif pandemi. Di tahun 2022, terjadi peningkatan lebih lanjut dalam LPE menjadi 5,24%, yang menandakan penguatan tren pemulihan. Untuk tahun 2023, LPE sedikit menurun menjadi 5,05%. Meskipun ini menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya, angka tersebut masih menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Tren LPE yang terjadi di Kota Depok juga sejalan dengan tren yang terjadi pada daerah setara, provinsi dan nasional.

Data ini menggambarkan kondisi ekonomi Kota Depok yang menunjukkan ketahanan dan kemampuan adaptasi dalam menghadapi krisis, dengan pemulihan ekonomi yang signifikan setelah tahun yang sulit, dan kemudian bergerak menuju pertumbuhan yang lebih stabil.

Rasio Gini

Disparitas pendapatan yang signifikan merupakan suatu isu ekonomi yang dihadapi oleh Indonesia, termasuk dalam konteks lokal Kota Depok. Keadaan ini kontras dengan visi pembangunan yang telah lama diidam-idamkan, yaitu realisasi peningkatan pendapatan per kapita yang didistribusikan secara merata yang memungkinkan seluruh lapisan masyarakat untuk merasakan manfaat ekonomi secara proporsional. Rasio Gini merupakan metrik yang umum digunakan untuk menghitung tingkat ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan di antara penduduk sebuah kawasan. Rasio Gini, yang dihitung berdasarkan tingkatan pendapatan, memberikan nilai dalam rentang 0 hingga 1, di mana angka yang mendekati satu mengindikasikan peningkatan dalam ketidakmerataan pendapatan, sedangkan angka mendekati nol menunjukkan adanya peningkatan kesetaraan dalam alokasi pendapatan.

Gambar 2. 14 Indeks Gini Kota Depok 2019 – 2023



Sumber: BPS Jabar; BPS Depok; BPS Tangsel; BPS DKI Jakarta; BPS Nasional, 2024 (Diolah)

Pada tahun 2023, rasio Gini Kota Depok tercatat memiliki nilai 0,402, menempatkannya dalam klasifikasi ketimpangan yang moderat. Apabila dibandingkan dengan nilai Indeks Gini pada tahun 2020 yang sebesar 0,344, tahun 2021 sebesar 0,367, dan tahun 2022 sebesar 0,394, terdapat tren peningkatan ketimpangan pendapatan setiap tahunnya di Kota Depok.

Dibandingkan dengan daerah lain yang sebanding, pada tahun 2022, indeks Gini Kota Depok lebih rendah daripada Kota Bogor (0,43), Kota Bekasi (0,441), dan DKI Jakarta (0,431). Tetapi, indeks ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan Tangerang Selatan (0,359). Sementara itu, bila dibandingkan dengan daerah berstatus lebih tinggi seperti provinsi dan nasional, Kota Depok berada di bawah Jawa Barat (0,425) dan sedikit lebih tinggi dibandingkan tingkat nasional (0,388).

Angka Kemiskinan

Angka Kemiskinan digunakan untuk mengukur persentase penduduk yang penghasilannya di bawah garis kemiskinan. Penurunan angka ini merupakan indikator penting dalam RPJPD yang menggambarkan peningkatan akses penduduk terhadap kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas hidup.

Gambar 2. 15 Angka Kemiskinan Kota Depok 2019-2023



Sumber: BPS Jabar; BPS Depok; BPS Tangsel; BPS DKI Jakarta; BPS Nasional, 2024 (Diolah)

Angka kemiskinan Kota Depok dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan kondisi sosial ekonomi yang dinamis. Pada tahun 2019, persentase kemiskinan di Kota Depok tercatat sebesar 2,07% (49,35 ribu), yang merupakan titik terendah dalam rentang lima tahun terakhir. Namun, terjadi peningkatan pada tahun 2020, di mana angka kemiskinan naik menjadi 2,45% (60,43 ribu). Peningkatan ini terjadi karena pandemi COVID-19, yang menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi dan hilangnya lapangan pekerjaan. Pada tahun 2021, terlihat kenaikan angka kemiskinan lagi menjadi 2,58% (63,86 ribu), yang mencerminkan kelanjutan dari dampak pandemi, di mana banyak sektor belum pulih sepenuhnya dan masyarakat yang paling rentan terus menghadapi kesulitan ekonomi. Namun, pada tahun 2022, ada penurunan tipis angka kemiskinan menjadi 2,53% (64,36 ribu). Penurunan ini, meskipun kecil, menunjukkan adanya indikasi pemulihan dan dampak

positif dari intervensi kebijakan serta upaya pemulihan ekonomi. Lebih lanjut, pada tahun 2023, angka kemiskinan berkurang menjadi 2,38% (61,95 ribu), yang menggambarkan peningkatan kondisi sosial ekonomi penduduk Kota Depok.

Kota Depok memiliki persentase kemiskinan paling rendah dibandingkan dengan daerah lainnya di Jabodetabek. Persentase kemiskinan di Depok sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Tangerang Selatan (2,57%) dan berbeda jauh dengan Kota Bogor (6,67%), Kota Bekasi (4,1%), dan DKI Jakarta (4,44%). Hal ini juga berlaku saat dibandingkan dengan tingkat kemiskinan rata-rata nasional (9,36%) dan Provinsi Jawa Barat (7,62%).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator krusial dalam mengevaluasi keberlangsungan ekonomi suatu wilayah karena menggambarkan jumlah individu yang sedang mencari pekerjaan aktif tetapi belum berhasil mendapatkannya. Sebagai parameter utama dalam analisis ekonomi makro, TPT memberikan pemahaman tentang kondisi pasar tenaga kerja dan dapat mengilustrasikan sejauh mana kapasitas ekonomi suatu daerah dalam menyerap tenaga kerja yang tersedia.

Gambar 2. 16 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Depok



Sumber: BPS Jabar, BPS Depok, BPS Tangsel, BPS DKI Jakarta, BPS Nasional (Diolah, 2024)

Data tingkat pengangguran terbuka di Kota Depok dari tahun 2019 hingga 2023 tersaji pada gambar di atas. Pada tahun 2019, tingkat pengangguran terbuka adalah 6,12%, yang menandakan bahwa sejumlah kecil penduduk dalam usia kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Namun, terjadi lonjakan drastis dalam tingkat pengangguran pada tahun 2020, di mana angkanya melonjak hingga 9,87%. Kenaikan ini terjadi akibat langsung dari dampak pandemi COVID-19, yang menyebabkan penutupan banyak bisnis, pembatasan kegiatan ekonomi, dan pemutusan hubungan kerja. Secara umum tren TPT Kota Depok dari tahun 2020 mengikuti siklus krisis yang baru mencapai fase pemulihan di tahun 2023. Pada tahun 2023 nilai TPT Kota Depok hampir kembali menyentuh angka sebelum pandemi (6,97). Tren pergerakan angka TPT ini selaras dengan Provinsi dan Nasional.

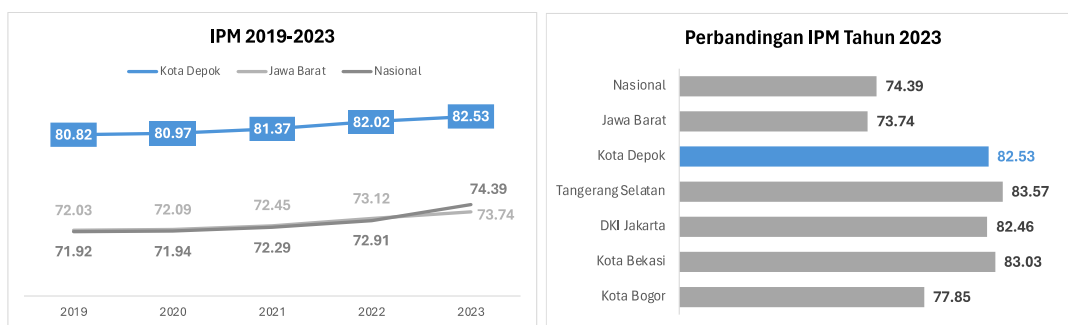
Secara perbandingan di tahun 2023, tingkat pengangguran Kota Depok lebih rendah dibanding Kota Bogor (9,39%) dan Kota Bekasi (7,9%) meski masih lebih tinggi

dibandingkan Tangerang Selatan (5,81%) dan DKI Jakarta (6,53%). Dengan tingkat daerah yang lebih tinggi, tingkat pengangguran Kota Depok lebih tinggi dibanding nasional (5,32%) dan sedikit lebih rendah dibanding Jawa Barat (7,44%).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. IPM digunakan sebagai ukuran dalam penilaian kemajuan kualitatif hidup manusia di suatu wilayah. IPM mengukur akses penduduk terhadap hasil pembangunan, yang tercermin melalui dimensi pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.

Gambar 2. 17 IPM Kota Depok



Sumber: BPS Jabar, BPS Depok, BPS Tangsel, BPS DKI Jakarta, BPS Nasional (Diolah, 2024)

Data IPM Kota Depok dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan tren peningkatan yang stabil dan positif dalam hal pembangunan manusia. Pada tahun 2019, IPM Kota Depok berada pada angka 80,82, yang sudah menunjukkan tingkat pembangunan manusia yang cukup tinggi.

Pada tahun 2020, terjadi kenaikan yang relatif kecil menjadi 80,97. Meskipun peningkatan ini tidak signifikan secara besar, namun tetap memiliki arti yang penting mengingat situasi global saat itu di mana pandemi COVID-19 mulai menyebar, menyebabkan gangguan besar dalam berbagai aspek pembangunan ekonomi dan sosial di berbagai kota dan negara. Fakta bahwa Depok berhasil meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam konteks krisis tersebut menunjukkan tingkat ketahanan dan adaptasi yang baik terhadap kondisi yang sulit.

Tahun 2021 menunjukkan pertumbuhan lebih lanjut menjadi 81,37, dan pada tahun 2022 meningkat lagi menjadi 82,02. Pada tahun 2023, IPM Kota Depok mencapai 82,53, menegaskan bahwa Kota Depok terus membuat kemajuan dalam pembangunan manusia, menunjukkan peningkatan dalam kualitas hidup penduduk.

Bila dibandingkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok memiliki nilai yang tidak jauh berbeda dengan Kota Bekasi (83,03) dan DKI Jakarta (82,46), sedikit lebih rendah dibanding Tangerang Selatan (83,57) tetapi lebih tinggi dibanding Kota Bogor (77,85). IPM Kota Depok juga lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Barat (73,74) dan nasional (74,39).

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial Budaya

Kesejahteraan sosial budaya merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan. Penilaian atas aspek kesejahteraan sosial budaya dilakukan dengan mengambil sejumlah indikator yang memadukan elemen kesehatan keluarga, pendidikan, ketahanan keluarga, perlindungan sosial, pemberdayaan gender, dan pemajuan kebudayaan. Indikator-indikator tersebut mencakup Indeks Keluarga Sehat, Indeks Perlindungan Anak, Indeks Pembangunan Keluarga, Indeks Ketahanan Keluarga, Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender, Indeks Pembangunan Pemuda, Indeks Pembangunan Kebudayaan, yang seluruhnya berperan sebagai instrumen pengukuran yang sesuai dengan konteks regional Kota Depok. Kesejahteraan sosial budaya di Kota Depok diarahkan untuk mengoptimalkan potensi lokal dalam menciptakan kualitas hidup yang lebih baik, pembangunan yang merata dan inklusif, serta pelestarian budaya yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Indeks Keluarga Sehat (IKS)

Indeks Keluarga Sehat memegang peranan penting dalam pembangunan jangka panjang di Kota Depok. Indeks Keluarga Sehat merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat. IKS terdiri dari 12 indikator yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Indikator ini dirancang untuk memastikan bahwa keluarga memiliki lingkup dan akses hidup sehat yang memadai. Sebagai indikator komprehensif yang mengukur berbagai aspek kesehatan dan kesejahteraan keluarga, indeks ini memberikan gambaran yang jelas tentang keadaan kesehatan dan kesejahteraan di tingkat lokal, yang sangat penting untuk perencanaan dan implementasi kebijakan publik. Secara keseluruhan, Indeks Keluarga Sehat merupakan alat penting yang membantu Kota Depok dalam merancang strategi pembangunan jangka panjang yang holistik, terfokus pada kesehatan, dan berkelanjutan, dengan mengutamakan kesejahteraan dan keberlangsungan hidup keluarga. Data Dinas Kesehatan menunjukkan IKS Kota Depok Tahun 2023 sebesar 0,34, masuk dalam kategori tidak sehat.

Indeks Perlindungan Anak

Menuju era Indonesia Emas 2045, bangsa Indonesia dihadapkan pada fenomena bonus demografi yang mana puncak populasi usia produktif diperkirakan akan tercapai. Fenomena demografi ini harus diiringi dengan peningkatan potensi kualitas dan produktivitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang signifikan. Dengan kualitas SDM yang unggul, Indonesia

berkesempatan meraih status sebagai kekuatan ekonomi yang dominan di kancah global. Namun, bonus demografi dapat menjadi bumerang jika tidak dikelola dengan bijak, berisiko menimbulkan berbagai permasalahan sosial seperti kemiskinan, kesehatan yang buruk, pengangguran, dan peningkatan kriminalitas.

Mengingat pentingnya perlindungan hak anak dalam mencapai tujuan nasional tersebut, maka pengukuran kinerja perlindungan anak menjadi penting. Sub bab ini akan mengulas tentang Indeks Perlindungan Anak (IPA), sebuah instrumen yang dirancang untuk mengevaluasi dan memonitor sejauh mana anak-anak di Indonesia terlindungi dan berhak atas kesempatan tumbuh kembang yang layak. Indeks ini tidak hanya mengukur intervensi yang dilakukan tetapi juga mengidentifikasi ruang-ruang yang membutuhkan peningkatan dalam rangka menjamin setiap anak di Indonesia dapat berkembang sesuai potensi mereka, aman dari ancaman dan tantangan yang dapat menghambat perkembangan mereka.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan ukuran baku yang tepat untuk menghitung capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. IPA disusun berdasarkan komitmen Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) yang diharapkan dapat menjadi landasan dalam membuat program maupun kebijakan yang efektif dan efisien untuk menangani permasalahan, khususnya terkait perlindungan anak, pemenuhan hak anak, maupun perlindungan khusus anak. IPA juga menjadi indikator target kinerja pembangunan perlindungan anak pada RPJPD Tahun 2025-2045. Hal ini karena IPA merupakan indeks yang menggambarkan capaian perlindungan anak di Indonesia baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Indeks Klaster Penyusun IPA yaitu Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, dan Klaster Perlindungan Khusus.

Tabel 2. 4 Indeks Perlindungan Anak Kota Depok

Kabupaten/ Kota	Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan	Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejah- teraan	Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	Klaster V Perlindungan Khusus	IPA	IPHA	IPKA
Kota Depok	50,84	89,98	84,72	62,53	75,15	73,00	72,28	82,24

Sumber: Indeks Perlindungan Anak (Kemen PPPA, 2022)

Data tentang Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kota Depok memberikan gambaran komprehensif tentang kualitas dan efektivitas perlindungan anak di berbagai klaster. Berikut analisis dari nilai indeks untuk setiap klaster dan total IPA:

- *Klaster I - Hak Sipil dan Kebebasan*: Nilai klaster ini adalah 50,84, yang merupakan nilai terendah di antara klaster lainnya. Angka ini mengindikasikan bahwa terdapat ruang perbaikan yang signifikan dalam aspek hak sipil dan kebebasan anak di Kota Depok. Hal ini bisa mencakup aspek legalitas kelahiran, hak atas identitas, serta kebebasan berekspresi dan berpendapat.
- *Klaster II - Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif*: Skor yang tinggi yaitu 89,98 menunjukkan bahwa Kota Depok telah melakukan pekerjaan yang baik dalam menyediakan lingkungan yang mendukung untuk keluarga dan pengasuhan alternatif, termasuk dalam aspek kehidupan keluarga yang stabil dan penuh kasih sayang, serta dukungan bagi anak yang tidak dapat tinggal bersama orang tua mereka.
- *Klaster III - Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan*: Skor 84,72 menandakan bahwa anak-anak di Kota Depok memiliki akses yang baik terhadap layanan kesehatan dasar dan kesejahteraan yang mencukupi, termasuk nutrisi, air bersih, dan fasilitas sanitasi.
- *Klaster IV - Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya*: Nilai 62,53 menunjukkan bahwa meskipun ada capaian positif, masih ada peluang peningkatan dalam kualitas pendidikan, kesempatan dalam kegiatan budaya, serta pengelolaan waktu luang yang bermanfaat untuk pengembangan anak.
- *Klaster V - Perlindungan Khusus*: Nilai 75,15 menggambarkan bahwa anak-anak di Kota Depok mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan kondisi lain yang berisiko, meskipun masih ada area yang perlu ditingkatkan.
- *IPA (Indeks Perlindungan Anak)*: Nilai IPA keseluruhan adalah 73,00, yang menunjukkan bahwa Kota Depok memiliki tingkat perlindungan anak yang baik secara umum.
- *IPHA (Indeks Perlindungan Hak Anak)*: Nilai 72,28 menggambarkan sejauh mana hak-hak anak dihormati dan dilindungi di Kota Depok.
- *IPKA (Indeks Pelayanan Kesejahteraan Anak)*: Dengan nilai 82,24, menunjukkan bahwa layanan kesejahteraan anak di Kota Depok cukup memadai.

Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa Kota Depok telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam melindungi dan menjaga kesejahteraan anak-anak. Namun, terdapat area tertentu, khususnya terkait dengan hak sipil dan kebebasan serta pendidikan dan kegiatan budaya, yang masih memerlukan perhatian dan peningkatan.

Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga, yang disebut “iBangga,” adalah pengukuran kualitas keluarga yang mencakup ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan. Indeks ini menggambarkan peran dan fungsi keluarga di seluruh wilayah Indonesia. iBangga merupakan indikator penting untuk menilai keberhasilan dalam membangun kualitas keluarga, dan digunakan untuk mengklasifikasikan wilayah berdasarkan status pembangunan keluarga yaitu tangguh, berkembang, atau rentan. Adapun nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut:

- iBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40.
- iBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40 - 70.
- iBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70.

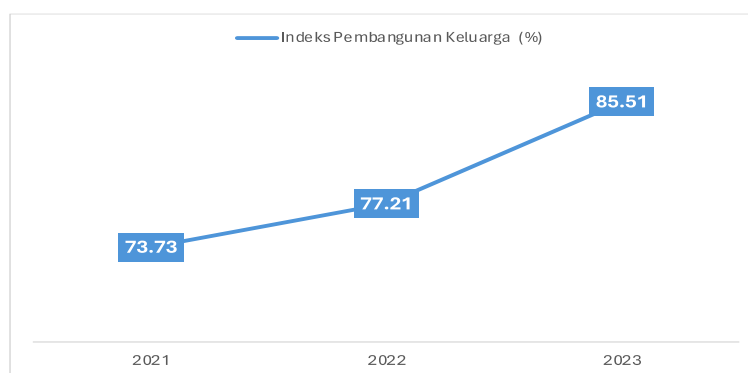
IBangga terdiri dari 3 dimensi:

Pertama, “Dimensi Ketenteraman”. Ketenteraman adalah kondisi keluarga yang didalamnya memiliki rasa aman, tenang, baik hati maupun pikiran dalam kehidupan berkeluarga. Dimensi ketenteraman terdiri dari 4 indikator yaitu kegiatan ibadah, legalitas keluarga, jaminan kesehatan, dan keharmonisan keluarga.

Kedua, “Dimensi Kemandirian”. Kemandirian adalah kemampuan keluarga untuk bertindak sesuai dengan keadaan dan mampu memenuhi kebutuhan hidup tanpa meminta atau tergantung pada keluarga lain. Dimensi kemandirian terdiri dari 4 indikator, yaitu Pemenuhan kebutuhan dasar, Jaminan keuangan, Keberlangsungan pendidikan, Kesehatan keluarga dan Akses Media Online.

Ketiga, “Dimensi Kebahagiaan”. Kebahagiaan adalah kondisi keluarga yang didalamnya terdapat unsur kasih sayang, menerima kondisi keluarga dan lingkungannya serta mampu mengaktualisasikan diri. Dimensi kebahagiaan terdiri dari 2 indikator yaitu ; Interaksi keluarga dan Interaksi Sosial.

Gambar 2. 18 Indeks Pembangunan Keluarga Kota Depok



Sumber: Laporan Survei Indikator Pembangunan Keluarga dan Indeks Ketahanan Keluarga 2023

Capaikan Indeks Pembangunan Keluarga yang meningkat secara konsisten dari tahun 2021 hingga 2023 dengan nilai di atas 70 menandakan bahwa seluruh keluarga di Depok masuk dalam kategori tangguh. Ketangguhan atas aspek ketenteraman, aspek kemandirian dan aspek kebahagiaan, merupakan dampak keberhasilan program pembangunan berbasis ketahanan keluarga yang dilakukan oleh pemerintah Kota Depok secara berkesinambungan. Ketangguhan keluarga yang meningkat ini juga memberikan dampak pada penurunan angka perceraian dari tahun 2021 sebanyak 3556 menjadi 2847 di tahun 2023. Hal ini menandakan bahwa Depok selalu berkomitmen untuk menjadikan peningkatan kualitas keluarga sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan.

Analisis terhadap IPK Kota menunjukkan peningkatan skor dari ke 3 aspeknya. Aspek ketenteraman (92.54) menjadi aspek dengan skor yang tertinggi jika dibandingkan dengan skor aspek kebahagiaan (89.77) dan skor aspek kemandirian (77.06). Ini menunjukkan bahwa keluarga di Depok memiliki rasa aman, tenang dan hubungan keluarga yang harmonis. Namun Aspek kemandirian keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar harus walau secara skor sudah tangguh namun perlu ditingkatkan agar ketahanan keluarga menjadi lebih baik.

Gambar 2. 19 Indikator Pembangunan Keluarga Per Kecamatan Kota Depok



Sumber: Laporan Survei Indikator Pembangunan Keluarga dan Indeks Ketahanan Keluarga 2023

Seluruh kecamatan telah terkategori tangguh dan mencapai skor di atas 80 bahkan terdapat dua kecamatan yang memperoleh skor di atas 90 yaitu Kecamatan Pancoran Mas dan Sukmajaya. Namun demikian ada 2 kecamatan, dengan nilai IPK terendah yaitu Cimanggis dan Tapos. Strategi pembangunan keluarga kedepan harus menjadikan 2 kecamatan ini sebagai daerah prioritas pelaksanaan program ketahanan keluarga.

Indeks Ketahanan Keluarga (IKK)

Ketahanan keluarga menurut UU No. 52 Tahun 2009 merupakan kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, serta mengandung kemampuan fisik-material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, dan mengembangkan diri dan

keluarganya untuk hidup harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Dengan menggunakan pendekatan sistem (input-proses-output), ketahanan keluarga didefinisikan sebagai kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya keluarga, mengelola dan menanggulangi masalah yang dihadapi, untuk mencapai tujuan yaitu kesejahteraan keluarga (Sunarti, 2015).

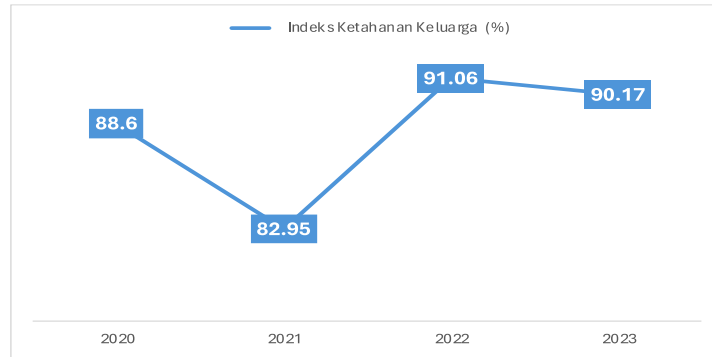
Ketahanan keluarga dapat dilihat berdasarkan dua pendekatan yaitu komponen laten dan pendekatan sistem. Tiga faktor laten ketahanan keluarga yaitu ketahanan fisik, ketahanan sosial, dan ketahanan psikologis. Adapun penjelasan mengenai ketiga faktor ketahanan keluarga sebagai berikut, yaitu:

Ketahanan Fisik-ekonomi. Ketahanan fisik-ekonomi berkaitan dengan kemampuan ekonomi keluarga yaitu kemampuan anggota keluarga dalam memperoleh sumber daya ekonomi dari luar sistem keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Keluarga dikatakan telah memiliki ketahanan fisik apabila memiliki pendapatan per kapita yang melebihi dari kebutuhan fisik minimum dan atau lebih dari satu orang keluarga bekerja dan memperoleh sumber daya ekonomi melebihi kebutuhan fisik minimum.

Ketahanan Sosial. Merupakan kekuatan keluarga dalam penerapan nilai agama, pemeliharaan ikatan dan komitmen, komunikasi efektif, pembagian peran dan penerimaan peran, penetapan tujuan serta dorongan untuk maju, yang akan menjadi kekuatan dalam menghadapi masalah keluarga serta memiliki hubungan sosial yang sehat. Ketahanan sosial terdiri dari sumber daya non fisik, mekanisme penanggulangan masalah yang baik, berorientasi terhadap nilai-nilai agama, efektif dalam berkomunikasi, senantiasa memelihara dan meningkatkan komitmen keluarga, memelihara hubungan sosial, serta memiliki penanggulangan krisis.

Ketahanan Psikologis. Kemampuan anggota keluarga untuk mengelola emosinya sehingga menghasilkan konsep diri yang positif dan kepuasan terhadap pemenuhan kebutuhan dan pencapaian tugas perkembangan keluarga. Kemampuan mengelola emosi dan konsep diri yang baik menjadi kunci dalam menghadapi masalah-masalah keluarga yang bersifat non fisik (masalah yang tidak berkaitan dengan materi namun pada masalah kesalahpahaman, konflik suami dan istri, dan sebagainya). Keluarga dikatakan memiliki ketahanan psikologi apabila anggota keluarga memiliki konsep diri dan emosi yang positif. Syarat utama untuk tercapainya ketahanan psikologis adalah kepribadian yang matang dan kecerdasan emosi pasangan suami

Gambar 2. 20 Indeks Ketahanan Keluarga Kota Depok

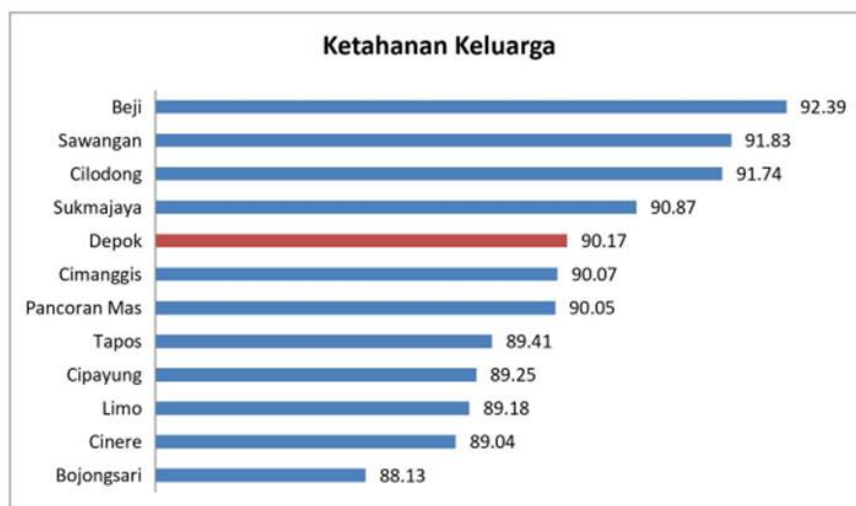


Sumber: Survei IKK Kota Depok 2020-2023

Dalam masa pandemi, semua keluarga mengalami kondisi yang tidak mudah untuk tetap mempertahankan fungsi keluarganya, termasuk keluarga di Kota Depok. Hal ini ditunjukkan dengan IKK Kota Depok yang sempat turun pada tahun 2021, yaitu 82.95. Namun, upaya sistematis dan berterusan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok untuk menguatkan kembali fungsi keluarga setelah wabah telah menunjukkan hasil yang positif, sehingga di tahun 2023 IKK mengalami peningkatan yang signifikan yaitu 90.17.

IKK Kota Depok memiliki Ketahanan sosial dengan skor tertinggi (94.79) dibandingkan ketahanan psikologis (88.83) dan Ketahanan fisik-ekonomi, yang menjadi dimensi dengan skor terendah (81.39) pada Indeks ketahanan keluarga. Hal ini sesuai dengan hasil survei Indeks Pembangunan Keluarga yang menunjukkan bahwa aspek kemandirian berupa pemenuhan kebutuhan dasar keluarga juga memiliki skor terendah. Ini menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan keluarga dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar diantaranya kebutuhan kesehatan, ekonomi dan perumahan harus menjadi fokus prioritas pembangunan keluarga

Gambar 2. 21 Indeks Ketahanan Keluarga Kota Depok Per Kecamatan



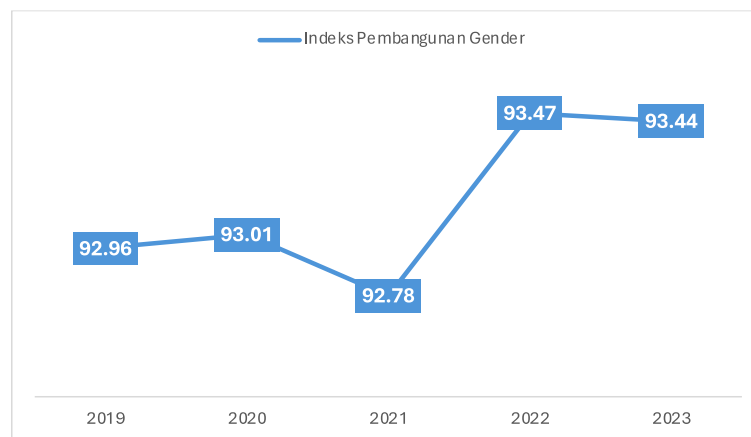
Sumber: Laporan Survei Indikator Pembangunan Keluarga dan Indeks Ketahanan Keluarga 2023

IKK di 11 kecamatan menunjukkan kategori tinggi yaitu berkisar antara 88,13 (Kecamatan Bojongsari) sampai 92,39 (Kecamatan Beji). Ini menunjukkan bahwa pemerataan program peningkatan ketahanan keluarga sudah di implementasikan dengan baik oleh pemerintah Kota Depok, namun komitmen berkelanjutan dalam pembangunan keluarga harus tetap di prioritaskan karena tantangan keluarga dalam periode 20 mendatang akan semakin besar.

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah suatu metrik yang dirancang untuk mengukur kemampuan dasar dalam pembangunan manusia dengan memfokuskan pada aspek ketimpangan gender. Meskipun menggunakan indikator yang sama dengan IPM, yang mencakup harapan hidup, harapan pendidikan, dan distribusi pendapatan, IPG secara spesifik bertujuan untuk menyoroti perbedaan antara laki-laki dan perempuan. IPG menjadi alat penting untuk mengidentifikasi dan memahami kesenjangan dalam pembangunan manusia berdasarkan gender. Pencapaian kesetaraan gender diindikasikan ketika nilai IPM dan IPG berada pada level yang sama. Variabel yang digunakan dalam menghitung IPG berasal dari sumber data seperti SAKERNAS, SUPAS, dan Sensus Penduduk. Skala nilai IPG berada dalam rentang 0 hingga 100 persen, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan adanya ketimpangan yang lebih besar dalam pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Gambar 2. 22 Indeks Pembangunan Gender Kota Depok



Sumber: BPS Kota Depok, 2024

Data IPG Kota Depok dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan Peningkatan kesetaraan gender dalam masyarakat. Pada tahun 2019, IPG tercatat sebesar 92,96 dan meningkat menjadi 93,44 pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa ada tingkat kesetaraan gender yang relatif tinggi di Kota Depok, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan ada upaya berkelanjutan untuk mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Nilai IPG yang konsisten selama lima tahun menunjukkan bahwa Depok telah memprioritaskan kesetaraan gender sebagai bagian penting dari pembangunan sosial.

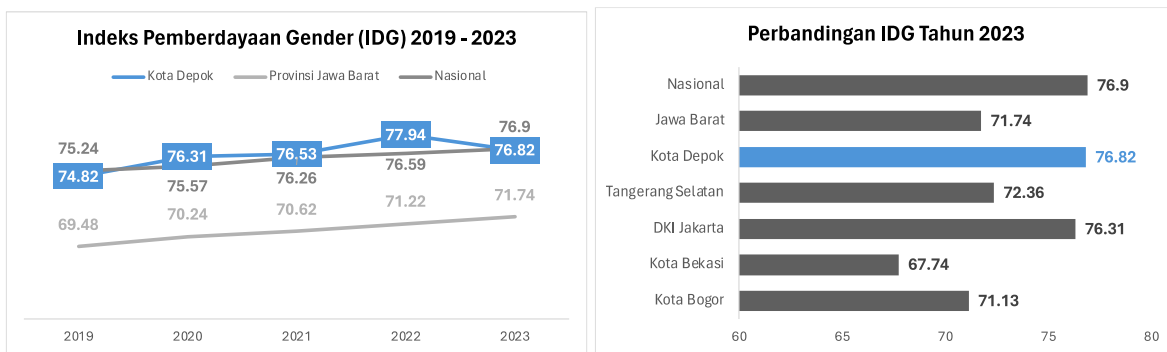
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah sebuah indikator ilmiah yang dirancang untuk memberikan penilaian komprehensif terhadap tingkat keadilan dan kesetaraan gender, khususnya dalam konteks partisipasi politik dan ekonomi. IDG memungkinkan para peneliti dan pembuat kebijakan untuk mengukur dan menganalisis sejauh mana laki-laki dan perempuan memiliki akses yang setara dan kesempatan yang sama dalam berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan politik.

Dalam penggunaannya, IDG mengintegrasikan berbagai variabel yang dapat mencerminkan partisipasi dan pengaruh perempuan dalam bidang ekonomi, pendidikan dan politik. Hal ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada, tingkat kehadiran perempuan dalam posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan, aksesibilitas terhadap sumber daya ekonomi, kesetaraan dalam peluang kerja, serta representasi perempuan dalam lembaga-lembaga politik.

Pengukuran IDG dilakukan dengan menggali data empiris dan statistik yang relevan, termasuk analisis terhadap struktur pekerjaan, pendapatan, serta tingkat partisipasi perempuan dalam pemerintahan dan proses legislatif. Indikator ini menekankan pada pentingnya kesetaraan gender sebagai elemen kunci dalam pembangunan sosial dan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Gambar 2. 23 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Depok



Sumber: LKPJ Walikota Depok 2019-2023; BPS Jawa Barat; BPS Nasional, 2024 (Diolah)

IDG Kota Depok selama 5 tahun menunjukkan bahwa kinerja pemberdayaan gender di Kota Depok relatif stabil, dengan beberapa penurunan dan kenaikan dari tahun ke tahun (76,82 pada tahun 2023). Namun, nilai IDG Kota Depok masih berada di atas rata-rata yang diharapkan dan memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan daerah setara lainnya dan provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Depok masih memiliki potensi untuk meningkatkan kesetaraan gender. Untuk meningkatkan kesetaraan gender, Kota Depok harus terus melakukan upaya yang sistematis dan berterusan untuk meningkatkan akses ke fasilitas pendidikan dan kesempatan kerja untuk perempuan.

Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah sebuah instrumen komprehensif yang dirancang untuk mengukur dan mengevaluasi kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. Alat ukur ini mencakup beberapa domain: pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Setiap domain ini memberikan perspektif penting dalam menilai sejauh mana kebijakan dan program pembangunan pemuda telah berhasil diimplementasikan dan mencapai tujuannya.

Tabel 2. 5 Indikator Penyusun IPP Kota Depok

Kota	Domain 1. Pendidikan			Domain 2. Kesehatan dan Kesejahteraan		Domain 3. Kesempatan dan Lapangan Kerja	Domain 4. Gender dan Diskriminasi	
	Rata-Rata Lama Sekolah	APK Sekolah Menengah	APK Perguruan Tinggi	Angka Kesakitan Pemuda	Pemuda yang Merokok	TPT Pemuda	Pemuda Perempuan yang Sedang Menempuh Pendidikan Tingkat SMA ke Atas	Pemuda Perempuan yang Bekerja di Sektor Formal
Depok	12,0	9,44	43,1	5,2	21,2	14,0	49,3	40,3

Sumber: Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia 2019 (Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Kementerian PP/Bappenas)

Data tersebut memberikan gambaran tentang berbagai indikator pembangunan pemuda di Kota Depok, yang terbagi dalam empat domain utama: Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan, Kesempatan dan Lapangan Kerja, serta Gender dan Diskriminasi. Analisis setiap domain untuk memahami kondisi pemuda di Kota Depok sebagai berikut:

Domain Pendidikan

- Rata-rata Lama Sekolah: Rata-rata lama sekolah di Kota Depok adalah 12 tahun, yang mengindikasikan bahwa mayoritas pemuda menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah.
- APK (Angka Partisipasi Kasar) Sekolah Menengah: Angka ini sebesar 9,44, menunjukkan bahwa tingkat partisipasi untuk pendidikan menengah kurang dari 10 dari 100 orang yang berada dalam usia sekolah menengah bersekolah.
- APK Perguruan Tinggi: Dengan APK 43,1, ini menunjukkan bahwa sekitar 43 dari 100 orang yang berada dalam usia perguruan tinggi mengikuti pendidikan tinggi, angka yang cukup tinggi dan menandakan akses yang baik ke pendidikan tinggi.

Domain Kesehatan dan Kesejahteraan

- Angka Kesakitan Pemuda: Tingkat kesakitan pemuda sebesar 5,2% menunjukkan bahwa sebagian kecil pemuda mengalami masalah kesehatan.

- Pemuda yang Merokok: Dengan 21,2% pemuda yang merokok, terdapat kebutuhan untuk intervensi kesehatan masyarakat untuk mengurangi penggunaan tembakau di kalangan muda.

Domain Kesempatan dan Lapangan Kerja

- TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) Pemuda: Angka 14,0% menunjukkan tingkat pengangguran yang cukup tinggi di kalangan pemuda, yang menandakan perlunya program penciptaan lapangan kerja dan pelatihan keterampilan.

Domain Gender dan Diskriminasi

- Pemuda Perempuan yang Sedang Menempuh Pendidikan Tingkat SMA ke Atas: Sebesar 49,3%, ini menunjukkan hampir setengah dari pemuda perempuan berusia SMA ke atas sedang menempuh pendidikan, angka yang positif untuk pendidikan perempuan.
- Pemuda Perempuan yang Bekerja di Sektor Formal: Dengan 40,3% pemuda perempuan bekerja di sektor formal, ini menunjukkan bahwa ada partisipasi yang baik dari perempuan muda dalam tenaga kerja formal, namun masih ada peluang untuk peningkatan kesetaraan gender di tempat kerja.

Data ini menunjukkan bahwa Kota Depok memiliki beberapa kekuatan dalam hal akses pendidikan dan partisipasi pemuda perempuan dalam pendidikan dan tenaga kerja formal. Namun, tantangan masih ada, terutama dalam mengurangi tingkat pengangguran di kalangan pemuda dan masalah kesehatan seperti merokok. Peningkatan di domain-domain tertentu seperti transisi pendidikan menengah dan kesehatan masyarakat dapat membantu mengoptimalkan potensi pembangunan pemuda di Depok.

Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) dirancang sebagai alat pengukuran yang penting untuk menggambarkan kemajuan dalam sektor kebudayaan. Alat ukur ini berperan sebagai dasar penting dalam pembentukan kebijakan kebudayaan dan menjadi titik acuan strategis dalam koordinasi antar-sektor terkait pemajuan kebudayaan. Dalam pengembangannya, IPK disusun melalui kolaborasi antara berbagai *stakeholder* kebijakan dan analisis data yang mendalam mengenai aspek-aspek pembangunan kebudayaan nasional.

Capaian IPK Provinsi Jawa Barat tahun 2022 sebesar 53,678. Angka ini lebih tinggi dibandingkan IPK tahun 2021 sebesar 50,78. Namun capaian Jawa Barat lebih rendah dibandingkan IPK Nasional sebesar 55,13. Indeks Pembangunan Kebudayaan hanya diukur sampai level provinsi, sehingga tidak ditemukan data terkait Indeks Pembangunan Kebudayaan untuk Kota Depok.

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan aspek penting yang mencerminkan kemampuan Kota Depok dalam menghasilkan barang dan jasa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Daya saing ini tidak hanya diukur dari kapasitas ekonomi, tetapi juga meliputi ketersediaan dan kualitas infrastruktur, kondisi yang kondusif untuk berinvestasi, serta tingkat dan kualitas sumber daya manusia. Aspek-aspek ini menjadi fokus dalam strategi pembangunan daerah, dimana penguatan di setiap area ini diharapkan dapat membawa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan bagi warga Kota Depok.

2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

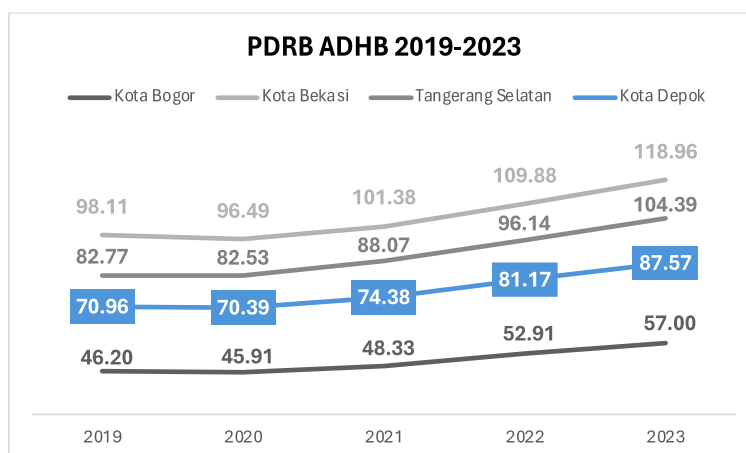
Pembahasan mengenai indikator ekonomi seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB Per Kapita, Indeks Ekonomi Inklusif, dan Rasio Kewirausahaan memegang peranan penting dalam menganalisis dan memahami daya saing ekonomi suatu daerah. PDRB memberikan gambaran mengenai total nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah, yang mencerminkan skala ekonomi regional tersebut. Sedangkan PDRB Per Kapita, yang merupakan PDRB dibagi dengan jumlah penduduk, memberikan ukuran rata-rata pendapatan atau output ekonomi per individu, yang berguna untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di daerah. Indeks Ekonomi Inklusif mengukur seberapa baik ekonomi suatu daerah dalam menyediakan kesempatan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Indikator ini penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi juga diikuti dengan peningkatan kualitas hidup yang inklusif, tanpa meninggalkan segmen masyarakat tertentu. Rasio Kewirausahaan, yang mengukur jumlah usaha atau wirausaha dalam suatu wilayah dibandingkan dengan jumlah penduduk, menjadi indikator penting dalam menilai kesehatan ekonomi daerah tersebut. Rasio yang tinggi menandakan adanya iklim yang kondusif bagi pertumbuhan bisnis dan inovasi, yang merupakan aspek penting dalam daya saing ekonomi.

Dengan demikian, indikator-indikator ini tidak hanya memberikan gambaran umum tentang kondisi ekonomi Kota Depok, tetapi juga menjadi alat penting dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan ekonomi untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan PDRB (*Product Domestic Regional Bruto*)

Kemampuan ekonomi suatu wilayah seringkali tercermin dari peningkatan produktivitas dalam sektor-sektor yang membentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data PDRB Kota Depok dari tahun 2019 hingga 2023, yang dilaporkan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan diukur dalam triliun rupiah, menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang konsisten selama periode tersebut.

Gambar 2. 24 PDRB ADHB Kota Depok 2019-2023 (Rp Triliun)



Sumber: BPS Jawa Barat 2024

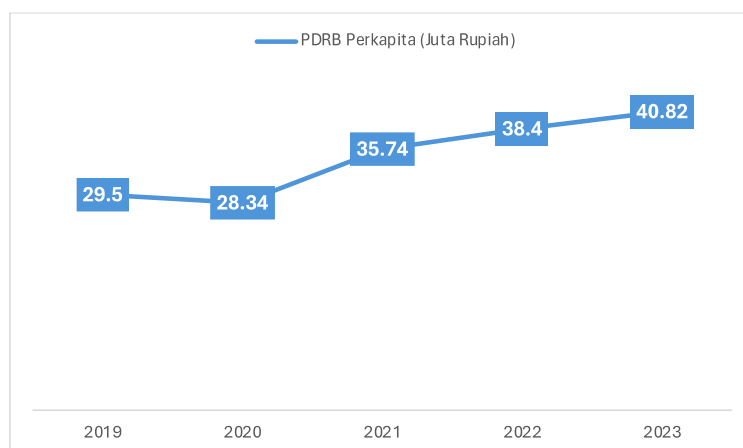
PDRB ADHB Kota Depok menunjukkan tren yang dinamis dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, PDRB ADHB tercatat sebesar Rp 70,96 triliun. Namun, pada tahun 2020, terjadi penurunan menjadi Rp 70,39 triliun, yang disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang melanda secara global. Memasuki tahun 2021, PDRB ADHB meningkat kembali menjadi Rp 74,37 triliun seiring dengan upaya pemulihan ekonomi yang mulai membuahkan hasil. Tren peningkatan ini berlanjut pada tahun 2022 dengan PDRB ADHB mencapai Rp 81,17 triliun, dan semakin menguat pada tahun 2023 dengan nilai PDRB ADHB sebesar Rp 85,57 triliun. Peningkatan bertahap ini mencerminkan pemulihan ekonomi yang solid dan pertumbuhan yang berkelanjutan di Kota Depok.

Dibandingkan dengan daerah lain yang setara, PDRB ADHB Kota Depok lebih tinggi dibanding Kota Bogor (Rp 57 triliun) tetapi lebih rendah dibanding Kota Bekasi (Rp 118,96 triliun) dan Tangerang Selatan (Rp 104,39 triliun).

PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita Kota Depok merupakan indikator ekonomi yang mengukur total nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh Kota Depok dalam satu tahun dibagi dengan jumlah penduduknya. Indikator ini memberikan gambaran tentang rata-rata output ekonomi yang dihasilkan per orang di Kota Depok. PDRB Per Kapita digunakan sebagai salah satu tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan ekonomi suatu daerah. Dengan mengetahui PDRB Per Kapita, dapat diukur seberapa besar kontribusi ekonomi rata-rata yang dihasilkan setiap individu, yang membantu dalam analisis kebijakan ekonomi dan pembangunan daerah. Indikator ini juga penting untuk memahami distribusi kekayaan dan tingkat kehidupan masyarakat di Kota Depok, serta sebagai pedoman dalam merumuskan strategi pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 2. 25 PDRB per kapita Kota Depok, 2019-2023



Sumber: LKPJ Walikota Depok 2019-2023

PDRB per kapita Kota Depok dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan dinamika yang signifikan, mencerminkan perubahan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2019, PDRB per kapita tercatat sebesar Rp 29,50 juta. Namun, pada tahun 2020, PDRB per kapita menurun menjadi Rp 28,34 juta akibat dampak pandemi COVID-19 yang memperlambat aktivitas ekonomi. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan yang signifikan dengan PDRB per kapita mencapai Rp 35,74 juta, menandakan pemulihan ekonomi yang kuat. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2022, di mana PDRB per kapita meningkat menjadi Rp 38,40 juta. Pada tahun 2023, PDRB per kapita terus bertambah, mencapai Rp 40,82 juta. Peningkatan bertahap dalam PDRB per kapita selama periode ini menunjukkan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kota Depok, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Indeks Ekonomi Hijau

Indeks Ekonomi Hijau memiliki peran penting dalam pembangunan berkelanjutan karena bisa digunakan untuk menilai sejauh mana pertumbuhan ekonomi diintegrasikan dengan prioritas lingkungan. Indeks ini mengukur kinerja ekonomi suatu negara atau wilayah berdasarkan efisiensi sumber daya, pengurangan emisi polutan, dan upaya pelestarian lingkungan. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi kemajuan dan area yang memerlukan perbaikan dalam transisi menuju ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan. Dengan demikian, indeks ekonomi hijau memberikan panduan penting untuk kebijakan yang mempromosikan pertumbuhan ekonomi sambil menjaga keseimbangan ekologis. Data performa Kota Depok dalam aspek-aspek kunci ekonomi hijau tahun 2013, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 6 Indeks Ekonomi Hijau Kota Depok Tahun 2023

Pilar	No	Indikator	Unit	2023	
Lingkungan	1	Tutupan Lahan	%		
	2	Bauran Energi Terbarukan	%		
	3	Kualitas Air Permukaan (Parameter BOD)	mg/L	65,33	
	4	Kualitas udara (Parameter NO2)	µg/m3	28,18	
	5	Persentase Pengurangan Emisi GHG	%		
	6	Penurunan Tutupan Lahan Gambut	%		
Ekonomi	7	Intensitas Emisi	Ton CO2e/2010 IDR miliar		
	8	Intensitas Energi Akhir	BOE/2010 IDR Milliar		
	9	Produk domestik regional bruto (PDRB)/kapita	ADHB juta/kapita	39,66	
	10	Produktivitas Pertanian			
		a. Produktivitas Padi	Ton/hektar/tahun	27,50	
		b. Produktivitas Kelapa Sawit	Ton/hektar/tahun		
		c. Produktivitas Akuakultur (Perikanan)	Ton/hektar/tahun	759,06	
11	Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri	IDR juta/orang	82,08		
12	Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Jasa	IDR juta/orang	18,36		
Sosial	13	Rata-Rata Tahun Sekolah	Tahun	95,80	
	14	Angka Harapan Hidup	Tahun	100,00	
	15	Tingkat Kemiskinan	%	81,69	
	16	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	66,92	
Skor			Lingkungan	46,75	
			Ekonomi	100	
			Sosial	86,10	
			Skor Indeks GEI	70,60	

Sumber: Bappeda Depok, 2024

Kategori skor GEI:

0,00 - 25,00	: Kurang
25,01 - 37,50	: Sedang Tier 1
37,51 - 50,00	: Sedang Tier 2
50,01 - 62,50	: Baik Tier 1
62,51 - 75,00	: Baik Tier 2
75,01 - 100,00	: Sangat Baik

Dari tabel diatas, pada pilar lingkungan, skor lingkungan: 46,75 (ambang max 40), Kota Depok perlu upaya untuk menurunkan konsentrasi BOD dan konsentrasi NO2 karena semakin kecil nilainya semakin bagus (Indikator penilaiannya adalah Kualitas Air Permukaan dan Kualitas Udara).

Pada pilar ekonomi, skor ekonomi: semula 185,33, dengan nilai standar maksimal 100, skor yang diperoleh lebih dari (>) 100 maka dapat digantikan langsung dengan skor 100.

Pada pilar social, skor sosial: 86,10. Kota Depok perlu menurunkan angka kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

Perhitungan skor GEI (*Green Economy Index*) tahun 2023 yaitu:

Indeks Ekonomi Hijau = (Skor Lingkungan x 0,5) + (Skor Ekonomi x 0,3) + (Skor Sosial x 0,2)
= (46,75*0,5)+(100*0,3)+(86,10*0,2) = 70,60, dengan kategori Baik Tier 2.

Rasio Kewirausahaan

Di tengah upaya nasional Indonesia untuk meningkatkan rasio kewirausahaan menjadi 12 persen guna mencapai status negara maju pada 2045, Kota Depok memiliki peran yang tidak dapat diabaikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Sebagai sebuah wilayah yang strategis, Kota Depok berpotensi besar untuk mengembangkan kewirausahaan yang bersandar pada pemanfaatan jasa secara berkelanjutan dan inovatif. Saat ini, secara nasional rasio kewirausahaan masih berada pada angka 3,47%, masih sangat jauh dari target nasional.

Berdasarkan data dari satudata.depok.go.id, sampai tahun 2022, persentase wirausaha baru yang dirilis oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok sebesar 2,18%. Angka ini masih berada di bawah rasio nasional. Dengan rasio kewirausahaan sebesar 2,18%, Kota Depok memiliki ruang yang luas untuk mengembangkan sektor ini. Ini bukan hanya tentang memperbaiki angka tetapi juga tentang menciptakan ekosistem yang mendukung yang dapat memaksimalkan potensi kewirausahaan untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

PDRB Ekonomi Kreatif

Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian dan meningkatkan daya saing guna tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Produk dan jasa di sektor ekonomi kreatif yang merupakan hasil inovasi dan kreativitas berperan penting dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing output wilayah.

Sektor ekonomi kreatif di Kota Depok mengalami kemajuan yang cukup pesat. Hal ini terlihat dari nilai PDRB setiap sub sektor ekonomi kreatif menunjukkan tren peningkatan selama periode 2018-2022, kecuali pada tahun 2020 yang mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2019, nilai PDRB Ekonomi Kreatif Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 10.934,66 miliar dibanding tahun 2018 yaitu sebesar Rp 9.895,59 milyar. Sementara itu pada tahun 2020 mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19 menjadi sebesar Rp 10.925,43 milyar, dan kembali meningkat pada tahun 2021 dan 2022 seiring dengan pemulihan ekonomi menjadi masing-masing sebesar Rp 11.220,73 milyar dan Rp 12.019,18 milyar.

Sementara itu nilai PDRB Ekonomi Kreatif Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2022 juga mengalami peningkatan seiring dengan adanya pemulihan ekonomi wilayah akibat pandemi Covid-19 di tahun 2020. PDRB Ekonomi Kreatif tahun 2022 sebesar Rp 7.770,09 miliar meningkat dibanding tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp 7.368,60 miliar atau tumbuh sebesar 5,45 persen. Sementara itu PDRB Ekonomi Kreatif tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 6.675,26 milyar dan Rp 7.385,20 milyar. Kondisi ini menggambarkan prospek perkembangan sektor ekonomi kreatif di Kota Depok cukup menjanjikan, meski mengalami kontraksi tahun 2020 akibat pandemi Covid-19.

2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia

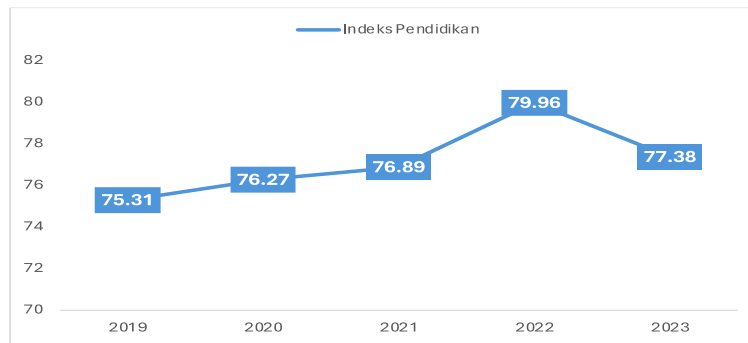
Sumber Daya Manusia (SDM) diakui sebagai salah satu faktor penting dalam menggerakkan perekonomian daerah. Indeks-indikator yang dijadikan acuan meliputi Indeks Pendidikan, Indeks Literasi/Numerasi, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, Indeks Literasi Digital, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan Angka Ketergantungan. Kondisi SDM di Kota Depok, yang tercermin dari indikator-indikator tersebut, menunjukkan tingkat pendidikan, kemampuan literasi dan numerasi, serta kemampuan literasi digital yang terus meningkat. Partisipasi angkatan kerja yang aktif dan angka ketergantungan yang terkendali menjadi indikasi potensi SDM dalam mendukung perekonomian daerah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada peningkatan kompetensi dan keterampilan digital menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan ekonomi Kota Depok.

Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan di Kota Depok menunjukkan tren positif selama periode 2018-2022, berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Indeks ini merupakan ukuran penting yang menggambarkan kualitas dan akses pendidikan di suatu wilayah. Menggunakan dua komponen utama, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), indeks ini memberikan gambaran menyeluruh tentang status pendidikan di Kota Depok.

Indeks Pendidikan memberikan nilai yang mencerminkan kombinasi dari aspirasi pendidikan masa depan dan realitas pendidikan masa lalu, memberikan pandangan yang seimbang dan mendalam tentang kualitas dan akses pendidikan di Kota Depok.

Gambar 2. 26 Indeks Pendidikan Kota Depok



Sumber: Dinas Pendidikan Jawa Barat, 2023

Indeks Pendidikan Kota Depok menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2019 hingga 2023, meski sempat mengalami penurunan. Pada tahun 2019, Indeks Pendidikan berada di angka 75,31. Angka ini meningkat menjadi 76,27 pada tahun 2020 dan terus mengalami kenaikan pada tahun 2021 dengan nilai 76,89. Tren positif ini berlanjut dan mencapai puncaknya pada tahun 2022 dengan nilai 79,96 lalu mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 77,38. Tren peningkatan ini mencerminkan upaya yang berhasil dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Depok.

Angka Literasi/Numerasi

Indeks literasi merupakan fondasi yang krusial untuk pembangunan berkelanjutan. Sebagai ukuran kemampuan membaca dan menulis, serta pemahaman terhadap teks dan konteks, indeks literasi memberikan gambaran tentang sejauh mana penduduk suatu wilayah dapat mengakses, memproses, dan memanfaatkan informasi. Hal ini penting karena literasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan individu untuk berkomunikasi dan berpartisipasi dalam aktivitas sosial dan ekonomi, tetapi juga merupakan instrumen dalam pemahaman dan penerapan konsep-konsep penting yang berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan. Salah satu indikator yang dapat mengukur tingkat literasi dan numerasi peserta didik di Kota Depok adalah Indeks Pencapaian SPM Pendidikan yang tertuang dalam Rapor Pendidikan Kota Depok Tahun 2024. Salah satu komponen utama yang diukur dalam indeks ini adalah tingkat literasi dan numerasi peserta didik, di mana Skor Indeks pencapaian SPM Kota Depok adalah 78,39 dengan predikat capaian Tuntas Pratama.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Laporan Kajian Indeks Pembangunan Literasi

Masyarakat (IPLM) Kota Depok Tahun 2023, IPLM Kota Depok tercatat skor 74,80, masuk dalam kategori sedang dengan unsur pembangun sebagai berikut:

Tabel 2. 7 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Depok 2023

No	Unsur (UPLM)	Skor
1	Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1)	0,0024
2	Pemerataan Koleksi Perpustakaan (IPLM2)	30,9685
3	Pemerataan Tenaga Perpustakaan (UPLM3)	0,0055
4	Tingkat Kunjungan Pemustaka (UPLM4)	0,1168
5	Perpustakaan Ber-SNP (UPLM5)	3,3856
6	Keterlibatan Masyarakat Dalam Sosialisasi Perpustakaan (UPLM6)	0,3252
7	Jumlah Pemustaka (UPLM7)	1,8490
INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT		74,80

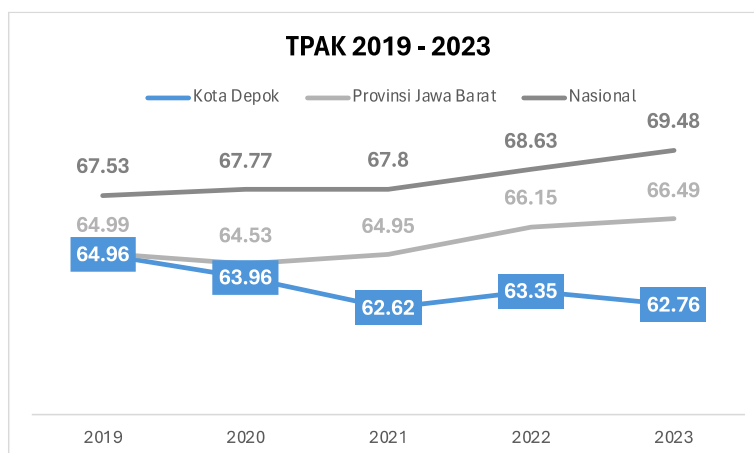
Sumber: Laporan Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Depok Tahun 2023

Angkatan Kerja

Pada tahun 2023, dari total penduduk Kota Depok terdapat sekitar 1.646.296 penduduk usia kerja. Dari jumlah tersebut, angkatan kerja mencapai 62,76 persen, sementara 37,24 persen, merupakan penduduk bukan angkatan kerja. Tingkat pengangguran di Kota Depok pada tahun 2023 tercatat sebesar 6,97 persen. Pengangguran berdasarkan pendidikan yang ditamatkan menunjukkan variasi yang signifikan: 16,43 persen di antara lulusan SD, 12,11 persen di antara lulusan SMP, 53,49 persen di antara lulusan SMA, dan 17,97 persen di antara lulusan perguruan tinggi.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan salah satu indikator dalam menganalisis kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan suatu wilayah atau negara. Indikator ini mengukur sejauh mana penduduk usia kerja terlibat dalam kegiatan ekonomi, termasuk pekerjaan formal, pekerjaan informal, atau mencari pekerjaan baru. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia.

Gambar 2. 27 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Depok 2019-2023



Sumber: BPS Jawa Barat, BPS Nasional 2024

TPAK di Kota Depok mengalami fluktuasi dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, TPAK tercatat sebesar 64,96%, kemudian menurun menjadi 63,96% pada tahun 2020 dan terus turun hingga 62,62% pada tahun 2021. Meskipun sempat mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2022 menjadi 63,35%, angka ini kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 62,76%. Perubahan TPAK ini mencerminkan dinamika pasar tenaga kerja di Kota Depok. Meskipun ada sedikit fluktuasi dari tahun ke tahun, TPAK di Kota Depok tetap di atas 60%, menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia kerja tetap aktif dalam ekonomi.

Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan adalah sebuah parameter demografis yang membandingkan proporsi penduduk yang tidak produktif (yang mencakup individu berusia 0-14 tahun dan yang berusia lebih dari 65 tahun) dengan jumlah penduduk dalam kelompok usia yang produktif (usia 15-64 tahun).

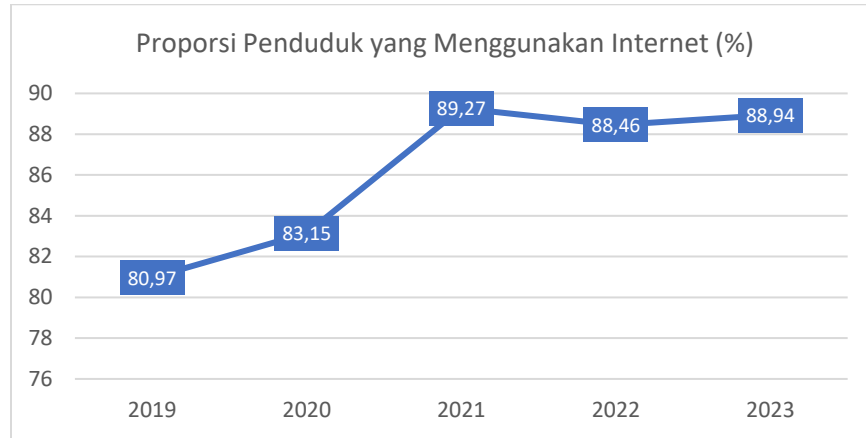
Tingkat ketergantungan penduduk Kota Depok tahun 2023 berdasarkan perhitungan data BPS adalah 40,75%. Angka ini mencerminkan proporsi penduduk yang belum atau tidak lagi bekerja dibandingkan dengan mereka yang berada di usia kerja. Ini berarti bahwa untuk setiap 100 orang yang berada dalam usia produktif, ada sekitar 41 orang yang bergantung pada dukungan mereka, baik itu anak-anak di bawah usia 15 tahun atau lansia di atas usia 65 tahun.

Tingkat ketergantungan yang relatif tinggi ini menunjukkan bahwa beban ekonomi pada penduduk produktif di Depok cukup berat, yang dapat menekan sistem sosial dan ekonomi, seperti kebutuhan akan layanan pendidikan dan kesehatan, serta dukungan sosial.

Proporsi penduduk yang menggunakan internet

Proporsi penduduk yang menggunakan internet merujuk pada persentase jumlah penduduk berumur 5 tahun ke atas yang menggunakan internet dalam 3 bulan terakhir. Hasil survei Susenas menunjukkan tren positif selama periode 2019-2023. Peningkatan signifikan terutama terjadi di tahun 2021 yang mencapai 89,27% dari sebelumnya hanya 83,15 % di tahun 2020 dan 80,97 di tahun 2019. Pembelajaran jarak jauh dan work from home yang diterapkan selama masa pandemic Covid-19 diperkirakan menjadi pemicu peningkatan tersebut. Tren positif ini perlu dipertahankan dan bahkan ditingkatkan karena peran internet yang semakin penting dalam berbagai sektor, termasuk dalam menggerakkan perekonomian daerah. Kemampuan mengakses internet, terutama dengan didukung keterampilan digital, akan membuka peluang lebih besar dalam mengakses lapangan kerja, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, memperluas jangkauan pemasaran, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan.

Gambar 2. 28 Proporsi Penduduk yang Menggunakan Internet Kota Depok 2019-2023



Sumber: Bappeda Kota Depok, data diolah 2024

2.3.3. Daya Saing Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Daya saing fasilitas dan infrastruktur wilayah mendapatkan perhatian khusus sebagai prasyarat utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Fasilitas dan infrastruktur yang memadai akan meningkatkan konektivitas, efisiensi, dan produktivitas, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Kemantapan Jalan

Berdasarkan data capaian realisasi RPJMD 2021-2026 periode tahun 2023, kemantapan jalan Kota di Kota Depok mencapai 70,80%. Pencapaian ini merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam meningkatkan kualitas infrastruktur jalan melalui program perbaikan dan pemeliharaan jalan secara rutin. Kondisi jalan yang mantap berperan penting dalam memperlancar arus lalu lintas, mengurangi waktu tempuh perjalanan, dan meningkatkan keselamatan serta kenyamanan para pengguna jalan. Selain itu, dengan kondisi jalan yang baik, akses ke berbagai layanan publik dan fasilitas menjadi lebih mudah, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Proporsi Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kota Depok mencapai 0,710 berdasarkan realisasi RPJMD 2021-2026 periode tahun 2023. Angka ini menunjukkan bahwa 71% dari total panjang jaringan jalan berada dalam kondisi baik. Pencapaian ini adalah hasil dari berbagai upaya perbaikan dan pemeliharaan jalan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pemerintah kota. Dengan kondisi jalan yang baik, arus transportasi menjadi lebih lancar, waktu tempuh berkurang, dan keselamatan serta kenyamanan pengguna jalan meningkat. Kondisi jalan yang mantap juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dengan memfasilitasi akses yang lebih baik ke berbagai layanan dan fasilitas.

Rasio Jaringan Irigasi

Pada tahun 2023, rasio jaringan irigasi di Kota Depok tercatat sebesar 0,2109. Rasio ini menunjukkan bahwa panjang jaringan irigasi yang tersedia mencakup sekitar 21,09% dari kebutuhan ideal irigasi di Kota Depok. Angka ini mencerminkan tantangan yang masih dihadapi dalam pengelolaan sumber daya air untuk pertanian dan kebutuhan lainnya di Kota Depok.

Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman

Infrastruktur perumahan dan permukiman di Kota Depok merupakan sektor yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian dalam penyediaan akses terhadap pelayanan dasar. Hal ini mencakup penyediaan air minum, sanitasi, dan perumahan yang layak bagi masyarakat. Cakupan pelayanan infrastruktur permukiman ini sebelumnya diukur dengan indikator cakupan pelayanan air minum, air limbah, dan persampahan. Sejak tahun 2021, indikator ini diubah untuk menyesuaikan dengan sasaran Sustainable Development Goals (SDGs) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang kini meliputi akses air minum layak, akses sanitasi layak, dan akses penanganan sampah di perkotaan. Data realisasi capaian Kota Depok untuk periode 2023, persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum perpipaan sebesar 17,56%. Pembuangan aliran air tidak tersumbat mencapai 80,52% dan fasilitas pengurangan sampah di perkotaan sebesar 22,75%.

Indeks Kota Layak Huni

Kota layak huni merupakan kota dengan lingkungan dan suasana yang nyaman sebagai tempat tinggal dan bekerja berdasarkan persepsi masyarakat, yang ditinjau dari aspek fisik seperti fasilitas kota, infrastruktur, dan penataan kota, maupun dari aspek non fisik seperti hubungan sosial antar warganya dan aktivitas ekonomi yang berjalan. Khusus pada aspek infrastruktur sebagai bagian yang diukur dari Indeks Kota Layak Huni tahun 2023, meliputi jaringan telekomunikasi, energi, air bersih, persampahan, transportasi, jaringan drainase, dan perumahan. Hal ini untuk menggambarkan kualitas layanan infrastruktur yang ada di Kota Depok.

Tabel 2. 8 Indeks Kota Layak Huni Kota Depok 2023 pada Aspek Infrastruktur

No.	Kriteria	Nilai Rataan		Gap (%)
		Kepentingan	Kinerja	
1.	Jaringan Telekomunikasi	4,44	3,57 (Layak)	19,6
2.	Energi	4,48	3,59 (Layak)	19,7
3.	Pengelolaan Air Bersih	4,50	3,55 (Layak)	21,1
4.	Pengelolaan Persampahan	4,46	3,17 (Cukup Layak)	30,4
5.	Fasilitas Pejalan Kaki	4,37	3,27 (Cukup Layak)	25,3
6.	Transportasi	4,39	3,10 (Cukup Layak)	29,5
7.	Jaringan Drainase	4,43	3,12 (Cukup Layak)	29,6

No.	Kriteria	Nilai Rataan		Gap (%)
		Kepentingan	Kinerja	
8.	Perumahan	4,35	3,34 (Cukup Layak)	23,3

Sumber: Bappeda Kota Depok Tahun 2023, data diolah

Analisa kesenjangan kinerja dan tingkat kepentingan masyarakat menunjukkan bahwa pengelolaan persampahan, fasilitas pejalan kaki, transportasi, jaringan drainase dan perumahan belum mampu mendekati tingkat kepentingan masyarakat dengan gap yang cukup besar sehingga selanjutnya perlu menjadi prioritas utama. Adapun kinerja pengelolaan air bersih, energi, dan jaringan telekomunikasi sedikit lebih baik walaupun masih terdapat kesenjangan. Pengelolaan persampahan, transportasi, dan jaringan drainase memiliki kesenjangan terbesar yang menunjukkan masih perlunya upaya keras meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana transportasi, pembangunan dan pemeliharaan jaringan drainase, dan pelayanan persampahan secara terintegrasi.

2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

Iklim investasi memegang peranan penting dalam menarik dan mempertahankan investasi yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Kota Depok, dalam menatap arah pertumbuhan ekonominya yang dinamis, telah mengambil langkah strategis untuk memastikan bahwa iklim investasi yang ada tidak hanya kondusif tetapi juga kompetitif di tingkat regional maupun nasional. Saat ini Kota Depok telah menyediakan layanan kemudahan investasi berupa layanan perizinan secara online maupun offline di Mall Pelayanan Publik Kota Depok, selain itu Pemerintahan Kota Depok menyediakan layanan loket helpdesk layanan perizinan dan non perizinan, serta insentif berupa penghapusan dan pengurangan retribusi perizinan. Berikut ini akan diuraikan mengenai berbagai aspek lainnya yang menjadi indikator penting dalam penilaian dan peningkatan iklim investasi di Kota Depok.

Indeks Demokrasi

Indeks Demokrasi, sebagai salah satu indikator, mencerminkan kondisi politik dan kebebasan yang ada di suatu daerah. Provinsi Jawa Barat, termasuk Kota Depok, menunjukkan peningkatan signifikan dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada tahun 2022, dengan menempati skor 83,34 secara nasional, naik dari 79,72 pada tahun 2021. Ini menandakan adanya lingkungan demokratis yang kondusif, yang merupakan faktor penting dalam menarik investasi. Lingkungan politik yang stabil dan demokratis mendorong transparansi dan kepastian hukum, dua faktor kunci yang sering dicari oleh investor.

Pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia saat ini baru dilakukan pada level nasional dan provinsi, belum sampai level kabupaten/kota. Walaupun belum sampai level

kabupaten/kota, nilai indeks di wilayah provinsi bisa digunakan untuk menggambarkan situasi di daerah yang lebih rendah.

Mengingat Indeks Demokrasi tidak sampai level Kabupaten/kota, maka bisa digunakan indeks proksi. Dalam penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2022 yang diadakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kota Depok berhasil meraih posisi ketiga di tingkat nasional. Kota Depok mendapatkan skor 89,05 dan diberi kategori "A", yang mencerminkan prestasi yang sangat baik. Evaluasi ini mencakup berbagai faktor, termasuk kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Kemenkumham dalam menyelaraskan regulasi, kemampuan aparatur sipil negara dalam menyusun perundang-undangan yang efektif, serta upaya deregulasi dan pengelolaan basis data peraturan perundang-undangan.

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

Indeks Kerukunan Umat Beragama memiliki relevansi substansial dalam menjaga daya saing iklim investasi. Tingkat kerukunan yang tinggi mencerminkan adanya toleransi dan harmoni sosial, yang merupakan fondasi bagi stabilitas yang diinginkan oleh investor. Hal ini memungkinkan lingkungan bisnis yang adaptif dan menurunkan risiko konflik yang dapat mengganggu operasional perusahaan. Selain itu, reputasi positif yang ditimbulkan oleh kerukunan beragama berkontribusi pada citra daerah yang terbuka dan inklusif guna menarik minat investasi.

Pada tahun 2023, Kota Depok mencatat peningkatan nilai pada Indeks KUB, mencerminkan hasil positif dari kebijakan dan program yang dirancang untuk meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Pemerintah Kota Depok, melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bekerja sama dengan Lembaga Kajian Kurikulum dan Kajian Pendidikan Universitas Indonesia, terus berupaya memperkuat inisiatif yang mendorong dialog antar agama, pendidikan toleransi, dan partisipasi bersama dalam kegiatan sosial, yang semua ini berkontribusi pada stabilitas sosial dan perdamaian di Depok. Sehingga, Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Depok tahun 2023 mencapai angka 73,43 dan berada dalam kategori "Tinggi".

Indeks Ketenteraman dan Ketertiban

Indeks ketenteraman dan keamanan memainkan peran strategis dalam menentukan daya saing iklim investasi Kota Depok. Jika Kota Depok mampu menunjukkan tingkat ketenteraman dan keamanan tinggi, maka daya Tarik investor terhadap Kota Depok cenderung lebih tinggi karena risiko gangguan operasional bisnis, kerugian akibat kriminalitas, dan ketidakpastian hukum dapat dikurangi. Dengan demikian, investasi lebih terlindungi dan prospek keuntungannya lebih terjamin. Dalam lingkungan yang aman dan

tertib, transaksi ekonomi juga dapat berjalan lancar, tenaga kerja menjadi lebih produktif, dan biaya tidak terduga terkait keamanan dapat ditekan. Sebaliknya, jika indeks ketenteraman dan keamanan rendah, Kota Depok harus berjuang lebih keras untuk menarik investasi asing dan domestik. Investor cenderung menghindari wilayah dengan risiko tinggi terhadap aset dan sumber daya manusianya, yang pada akhirnya mempengaruhi potensi pertumbuhan ekonomi Kota Depok. Data Satpol PP menunjukkan indeks Trantibum Kota Depok pada tahun 2023 sebesar 76,55, seperti dirincikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 9 Indeks Trantibum Kota Depok 2023

Dimensi	Sub Dimensi	Skor
Dimensi Strategi (Skor 14,82)	Sub Dimensi Penegakan Perda	4,47
	Sub Dimensi Penyelenggaraan Trantibum	10,35
Dimensi SDM (Skor: 32,65)	Sub Dimensi Pemberdayaan SDM	12,25
	Sub Dimensi Peningkatan Kapasitas SDM	20,40
Dimensi Sistem (skor: 29,08)	Sub Dimensi Sarana dan Prasarana	6,815
	Sub Dimensi Perencanaan Dan Anggaran	15,59
	Sub Dimensi Akuntabilitas	6,67
Total		76,55

Sumber: Laporan Akhir Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kota Depok Tahun 2023

Indeks Trantibum Kota Depok tahun 2023 diatas menunjukkan hasil perhitungan untuk 3 dimensi yang diukur oleh indeks ini. Di mana masing-masing dimensi ini memiliki bobot yang berbeda yang secara berurutan untuk dimensi strategi, SDM dan Sistem adalah: 19,8; 49; dan 31,2. Dalam dimensi Strategi, skor keseluruhan mencapai angka 14,82 dari skor maksimal 19,8. Skor ini berasal dari sub-dimensi Penegakan Perda sebesar (4,47) dan sub-dimensi Penyelenggaraan Trantibum (10,35). Secara umum, pada dimensi strategi ini tingkat keterpenuhannya dari skor maksimal adalah sebesar 74,8% (14,82/19,8).

Sementara itu, pada dimensi sumber daya manusia (SDM), skor total mencapai 32,65 dari skor maksimal yang dapat diperoleh sebesar 49. Skor ini berasal dari sub-dimensi pemberdayaan SDM (12,25), dan peningkatan kapasitas SDM (20,40). Sehingga angka pemenuhan nilai maksimum dari dimensi SDM ini adalah sebesar 66,63% (32,65/49) Sedangkan untuk dimensi terakhir (Sistem) memperoleh skor 29,08 dari 31,2 skor maksimal yang dapat diraih. Skor ini merupakan agregasi terbobot dari sub dimensi Sarana dan Prasarana (6,815) dan Sub dimensi Akuntabilitas (6,67). Secara tingkat pemenuhan ke skor maksimum aspek ini mencapai 93,2%.

Dari tiga dimensi yang diukur oleh indeks ini, dimensi sistem yang mengukur sarana prasarana dan akuntabilitas penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan keamanan Kota Depok memiliki tingkat keterpenuhan yang paling tinggi, berada diatas 90%. Sementara itu untuk dua dimensi lain yaitu dimensi strategi dan SDM masih memiliki ruang perbaikan yang

cukup besar. Komposisi ini yang membentuk nilai akhir indeks ini sebesar 76,55 yang secara nilai relatif cukup baik namun masih sangat mungkin untuk ditingkatkan.

Indeks Daya Saing Daerah

Analisis terhadap skor Indeks Daya Saing Sektor Daerah (IDSD) untuk Kota Depok mengungkapkan beberapa aspek penting dalam konteks pembangunan dan potensi daerah. Berdasarkan skor yang diperoleh pada berbagai indikator, dapat ditarik beberapa kesimpulan.

Tabel 2. 10 Indeks Daya Saing Daerah Kota Depok 2023

Kota	Lingkungan Pendukung				SDM			Pasar			Ekosistem Inovasi		SKOR IDSD
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Kota Depok	4,28	3,59	5,00	3,31	4,23	4,14	3,30	3,41	2,68	4,84	2,85	3,70	3,78

Sumber: Indeks Daya Saing Daerah 2023, BRIN

Kota Depok menunjukkan kompetensi yang baik dalam semua aspek daya saing daerah menurut IDSD 2023. Walau begitu, terdapat potensi untuk peningkatan lebih lanjut, terutama dalam mengembangkan sumber daya manusia yang lebih terampil dan mendukung inovasi lebih lanjut untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan daya saing di masa depan. Implementasi kebijakan yang tepat untuk mendorong pendidikan dan pelatihan, serta dukungan untuk inovasi dan *start up*, akan penting untuk memanfaatkan potensi penuh dari sumber daya yang ada.

2.4. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan salah satu aspek dalam tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, menentukan kualitas interaksi antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok, aspek pelayanan umum mendapatkan perhatian sebagai indikator kemajuan tata kelola dan administrasi pemerintahan.

Indeks Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) merupakan indikator penting dalam mengukur efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Depok. Data IRB, yang disediakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), merupakan salah satu indikator dalam pembentukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Berdasarkan data yang dikeluarkan Kemenpan RB, Indeks Reformasi Birokrasi Kota Depok tahun 2022 mendapatkan Skor B dan meningkat pada tahun 2023 menjadi A- dengan nilai 82,14.

Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik merupakan sebuah alat ukur atau indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Indeks ini mengukur seberapa efektif dan efisien layanan publik diselenggarakan, serta seberapa baik kepuasan masyarakat terhadap layanan tersebut. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1035 Tahun 2022 Tentang Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kementerian, Lembaga, Dan Pemerintah Daerah Tahun 2022 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 795 Tahun 2023 Tentang Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kementerian, Lembaga, Dan Pemerintah Daerah Tahun 2023, skor yang diperoleh Kota Depok dalam Pelayanan Publik adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 11 Nilai Indeks Pelayanan Publik Kota Depok Tahun 2022- 2023

No	Tahun	OPD	Nilai	Kategori
1	2022	DPM PTSP	4,22	A-
2		Dukcapil	4,39	A-
3	2023	Kecamatan Beji	3,12	B-
4		Dinas Sosial	4,02	A-
5		RSUD Khidmat Sehat Afiat	4,46	A-

Sumber: Keputusan Menteri PAN RB Nomor 1035 Tahun 2022 Tentang Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kementerian, Lembaga, Dan Pemerintah Daerah Tahun 2022 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 795 Tahun 2023 Tentang Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kementerian, Lembaga, Dan Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) merupakan alat ukur yang menggambarkan tingkat kemajuan dan kreativitas dalam pengembangan serta implementasi inovasi di tingkat daerah. Indeks Inovasi Daerah selain menjadi tolak ukur kemajuan teknologi dan inovasi, juga mencerminkan bagaimana inovasi tersebut diintegrasikan ke dalam sistem pemerintahan dan pelayanan publik untuk memperbaiki kualitas hidup warga.

Indeks Inovasi Kota Depok yang tercatat sebesar 51,12 (Inovatif) menunjukkan posisi Kota Depok dalam konteks inovasi nasional. Menurut Kepmendagri No. 400.10.11-6287 Tahun 2023, Kota Depok berada di peringkat ke-46 dari total 93 kota yang dievaluasi di Indonesia. Skor tersebut mencerminkan sejauh mana inovasi telah diintegrasikan dalam berbagai aspek pembangunan di Depok, termasuk dalam pemerintahan, industri, pendidikan, dan masyarakat.

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah sebuah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana implementasi dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan. Indeks ini penting untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan transparansi pemerintah dalam menyediakan layanan kepada masyarakat.

Kota Depok berhasil mendapatkan skor Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan skor 3,7 yang masuk kategori Sangat Baik, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tahun 2024 Tentang Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat Dan Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Indeks Sistem Merit

Indeks Sistem Merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah. Kota Depok telah menerapkan Sistem Merit berprinsip pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Indeks Sistem Merit menjadi indikator sasaran meningkatnya manajemen ASN yang berkualitas dan berintegritas. Pada Tahun 2023 Komisi Aparatur Negara menetapkan tentang kategori, penilaian, dan indeks Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Depok pada kategori III (baik), dengan nilai 283,5 dan indeks 0,69 .

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

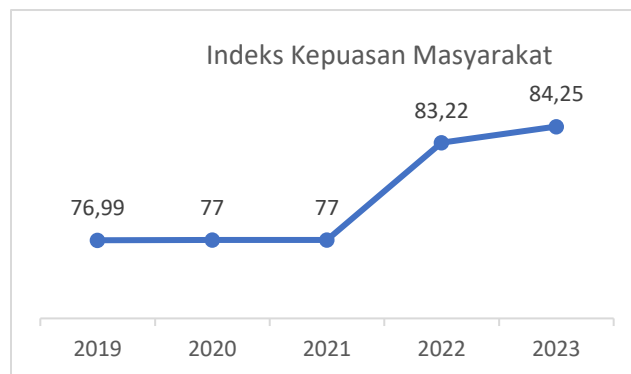
Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Indikator yang ditetapkan untuk mengukur Program Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Opini BPK dengan target WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atau *Unqualified Opinion*. Opini BPK merupakan indikator dari keberhasilan program pengelolaan keuangan daerah dalam hal penyusunan perencanaan anggaran, pengelolaan kas dan perbendaharaan, pengelolaan akuntansi dan pelaporan. Sampai dengan Tahun 2023 Kota Depok telah 13 kali mendapatkan Opini WTP, hal tersebut menunjukkan bahwasannya laporan keuangan Pemerintah Kota Depok yang diperiksa, telah menyajikan secara wajar dalam semua hal meliputi aspek material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Pengukuran IKM bertujuan untuk mengetahui perkembangan kinerja unit pelayanan di lingkungan instansi pemerintah yang dilaksanakan secara periodik. Hasil pengukuran IKM dapat juga digunakan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Pengukuran IKM juga dipandang sebagai upaya *continuous improvement* dari suatu instansi pemerintahan sehingga *good governance* dapat tercapai sesuai dengan harapan masyarakat.

Gambar 2. 29 Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019-2023

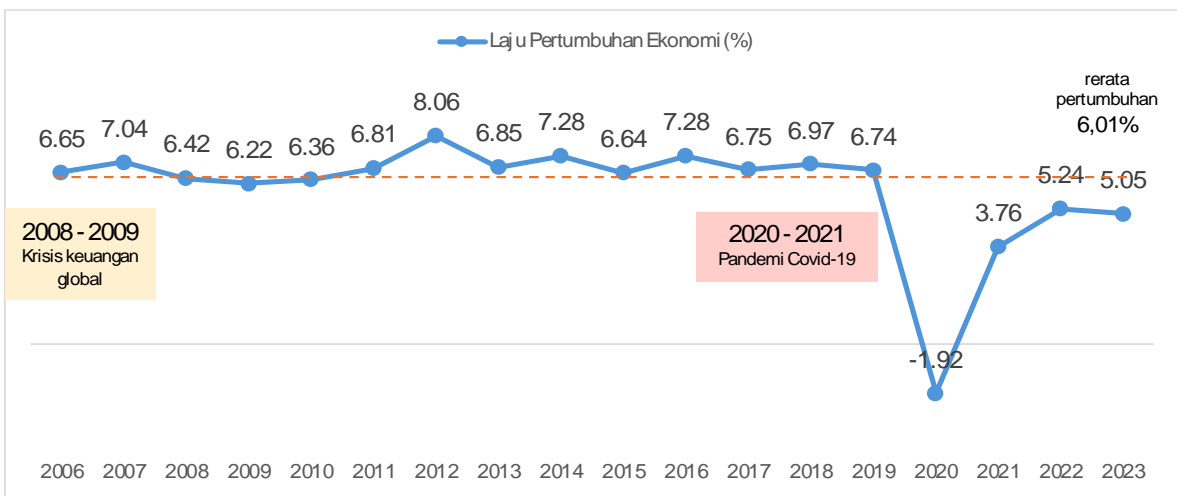


Nilai persepsi IKM Pemerintah Kota Depok dari tahun 2019 sampai tahun 2023 adalah 3 (tiga) dengan mutu pelayanannya B yang artinya kinerja unit pelayanan di Kota Depok sudah “**Baik**” dalam melayani kebutuhan sesuai harapan masyarakat.

2.5. Evaluasi RPJPD Kota Depok Tahun 2006-2025

Selama periode 2006 hingga 2025, Kota Depok telah mencapai kemajuan signifikan dalam berbagai aspek pembangunan. Ini mencakup area seperti ekonomi, sumber daya manusia, pengurangan kemiskinan dan ketimpangan, serta peningkatan di bidang pendidikan dan kesehatan.

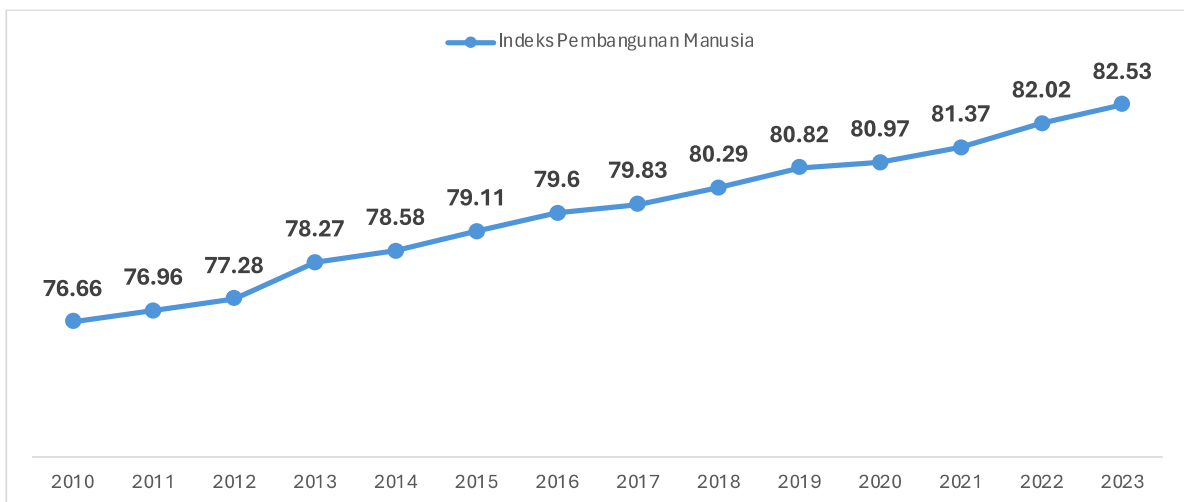
Gambar 2. 30 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok Tahun 2006-2023



Sumber: LKPJ Walikota Depok 2019-2023

Pada periode sebelumnya, tahun 2006-2023, Kota Depok telah mencatat laju pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan rerata LPE 6,01%, sebuah pencapaian yang menandakan efektivitas strategi ekonomi yang dijalankan. Meski demikian, sempat terjadi penurunan LPE saat terjadi *shock* eksternal, yakni saat krisis keuangan global (2008-2009) dan mencapai LPE negatif (-1,92%) saat pandemi Covid-19.

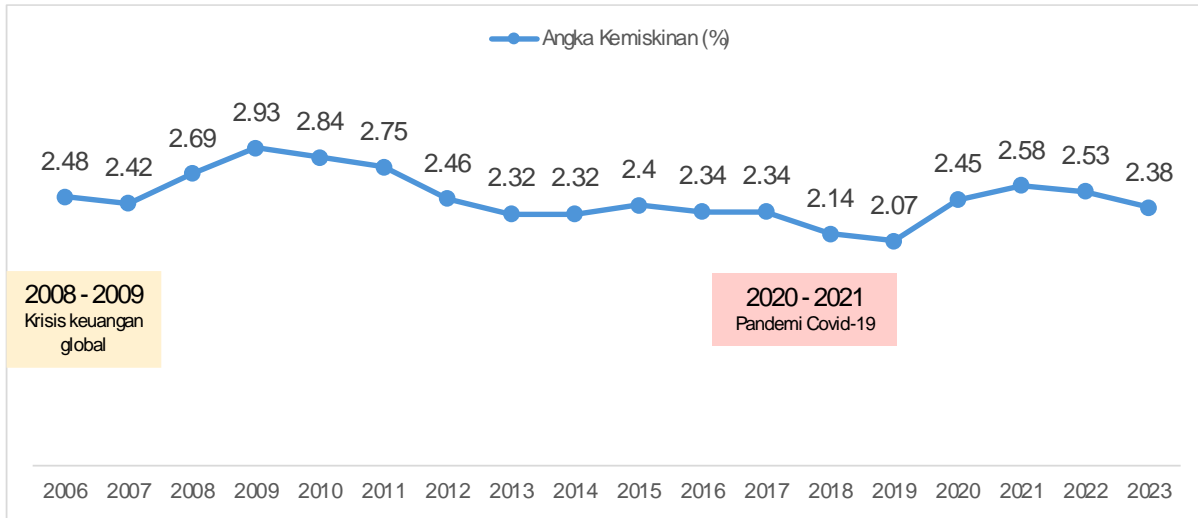
Gambar 2.31 Indeks Pembangunan Manusia Kota Depok Tahun 2010-2023



Sumber: LKPJ Walikota Depok 2019-2023

Selama lebih dari satu dekade, terlihat tren peningkatan pembangunan manusia di Kota Depok, sebagaimana diindikasikan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kota Depok terus mengalami peningkatan pesat, dari 76.66 pada 2010 menjadi 82.53 pada 2023. Peningkatan ini menunjukkan upaya untuk memperbaiki sektor-sektor kunci seperti kesehatan, pendidikan, dan standar hidup.

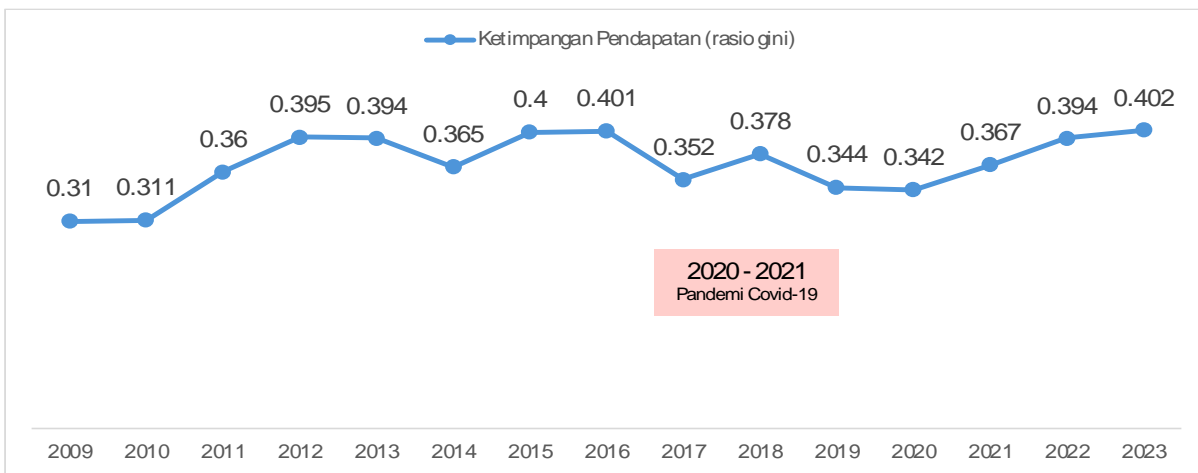
Gambar 2. 32 Persentase Kemiskinan Kota Depok Tahun 2006-2023



Sumber: LKPJ Walikota Depok 2019-2023

Dalam rentang tahun 2006-2023, persentase kemiskinan di Kota Depok relatif stabil di kisaran 2-3%. Secara tren, persentase kemiskinan Kota Depok terus menunjukkan penurunan. Namun, saat terjadi gangguan eksternal seperti saat krisis keuangan global dan pandemi covid-19, persentase kemiskinan mengalami peningkatan.

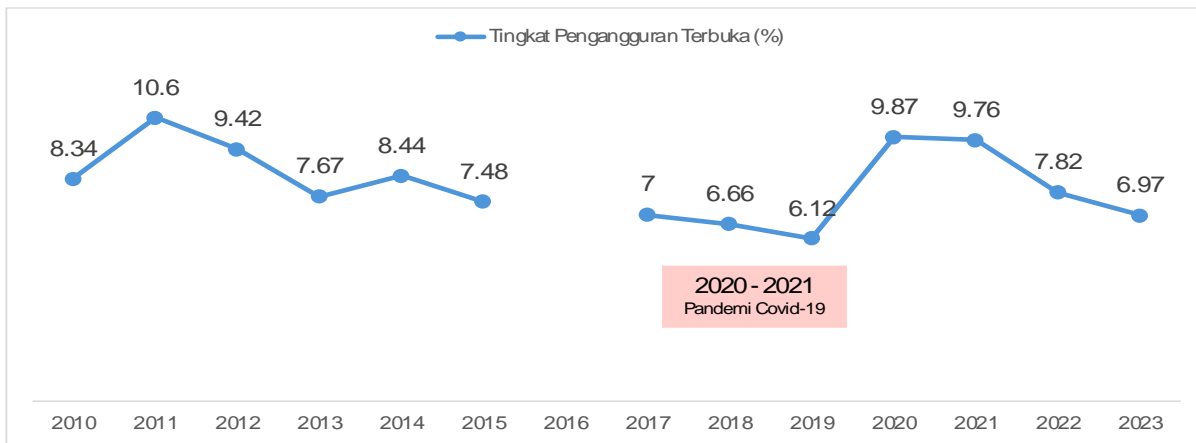
Gambar 2. 33 Ketimpangan Pendapatan Kota Depok Tahun 2009-2023



Sumber: LKPJ Walikota Depok 2019-2023

Ketimpangan pendapatan di Kota Depok, yang diwakili oleh rasio Gini, menunjukkan fluktuasi antara 0,3 dan 0,4 dari tahun 2009 hingga 2023. Selama periode ini, rasio Gini di Kota Depok cenderung menunjukkan tren peningkatan. Hal ini terlihat lebih jelas pasca-pandemi COVID-19, di mana rasio Gini meningkat menjadi 0,402 pada tahun 2023.

Gambar 2. 34 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Depok Tahun 2010-2023



Sumber: LKPJ Walikota Depok 2019-2023
Tahun 2016 BPS Kota Depok tidak menghitung TPT Kota Depok**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Depok dari tahun 2010 hingga 2023 menunjukkan tren penurunan, menandakan peningkatan ketersediaan lapangan kerja. Namun, sejak pandemi Covid-19 di akhir 2019, TPT di Kota Depok mengalami peningkatan yang signifikan, hingga hampir mencapai 10%. Hal ini berkaitan dengan pembatasan aktivitas ekonomi dan peningkatan jumlah PHK di Kota Depok. Walaupun begitu, pemerintah setempat telah berupaya mengurangi dampak pandemi ini melalui pemberian berbagai insentif dan bantuan kepada masyarakat hingga pada tahun 2023 TPT telah turun ke 6,97%.

Dalam aspek lain, Kota Depok telah menjalankan program dalam pendidikan, kesehatan, dan lingkungan untuk meningkatkan kualitas hidup. Ini mencakup peningkatan akses dan kualitas pendidikan, program kesehatan dan peningkatan fasilitas, serta langkah-langkah lingkungan untuk mengelola banjir dan sampah. Kota Depok juga mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama empat periode, menandai pengelolaan keuangan yang baik. Ini menunjukkan komitmen Depok pada pembangunan inklusif dan berkelanjutan, dengan visi menjadi kota yang maju, sejahtera, dan ramah lingkungan.

Rekomendasi tindak lanjut dari evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 menekankan pentingnya serangkaian langkah strategis untuk memajukan pembangunan di berbagai sektor. Untuk memperkuat ekonomi daerah, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengalokasikan investasi pada infrastruktur yang dapat mendukung aktivitas ekonomi, mendorong semangat kewirausahaan serta inovasi melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, serta menyediakan akses ke modal yang memadai. Selain itu, penting untuk memfokuskan upaya pada pengembangan pusat bisnis dan industri yang berpotensi mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi.

Dalam hal memanfaatkan potensi geografis, upaya pengembangan sistem transportasi terintegrasi yang mendukung mobilitas dan distribusi barang menjadi salah satu hal yang perlu difokuskan. Hal ini didukung dengan koordinasi dan harmonisasi kebijakan antar wilayah untuk memaksimalkan pemanfaatan geografis yang dimiliki oleh Kota Depok. Selanjutnya, pembangunan sumber daya manusia juga mendapat prioritas tinggi dengan penerapan program pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar dan revitalisasi pasar rakyat untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro dan kecil.

Untuk sarana dan prasarana kota, rekomendasi yang diberikan meliputi pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan yang efisien untuk memastikan kelancaran kegiatan ekonomi. Sedangkan dalam aspek tata kelola pemerintahan, ditekankan pentingnya memperkuat sistem administrasi pemerintahan dengan membentuk gugus tugas kepatuhan internal dan mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna meningkatkan efisiensi layanan publik. Melalui serangkaian rekomendasi tindak lanjut ini, diharapkan Kota Depok dapat meraih kemajuan signifikan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang 2025-2045.

2.6. Analisa Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2025-2045, dinamika demografi menjadi salah satu faktor dalam pengembangan infrastruktur pelayanan publik. Sebagai salah satu kawasan urban dan bagian dari kawasan aglomerasi yang berkembang pesat, Kota Depok menghadapi tantangan dan peluang yang unik dalam penyediaan sarana dan prasarana umum. Analisis ini mencakup pengamatan terhadap data demografi, tren pertumbuhan penduduk, struktur usia, dan penyebaran geografis penduduk, yang semuanya berperan penting dalam merancang kebijakan dan strategi pengembangan infrastruktur yang responsif dan berkelanjutan.

Pendekatan terintegrasi ini bertujuan untuk merespons kebutuhan infrastruktur sosial dan ekonomi Kota Depok, dengan menyesuaikan perencanaan perkotaan agar dapat mengakomodasi pertumbuhan penduduk serta perubahan komposisi demografinya. Dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara komprehensif, diupayakan penciptaan sistem layanan publik yang berkeadilan, yang tidak hanya mendukung kehidupan sosial dan ekonomi yang dinamis, akan tetapi juga memastikan ketersediaan layanan kesehatan dan sosial yang memadai.

Gambaran dan analisis ini diharapkan akan menjadi dasar bagi pembentukan kebijakan yang mendukung pengembangan tata ruang dan sistem transportasi yang inklusif, serta pembangunan infrastruktur pelayanan publik yang berkelanjutan. Ini akan

berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Depok, menjadikannya Kota Depok yang lebih tanggap terhadap tantangan urbanisasi dan perubahan demografis.

2.6.1. Analisis Proyeksi Kependudukan

Analisis proyeksi kependudukan menjadi fondasi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2025-2045. Proyeksi ini memiliki peranan penting dalam mengidentifikasi kebutuhan akan infrastruktur, pelayanan publik, serta pengembangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Melalui proyeksi ini, kemampuan perencanaan infrastruktur menjadi lebih akurat.

Pertumbuhan penduduk Kota Depok saat ini juga selain dipengaruhi oleh tingkat kelahiran, kematian, migrasi juga dipengaruhi oleh kebijakan dan perkembangan nasional dan regional. Pemerintah Daerah Khusus Jakarta telah mengusulkan kebijakan untuk menonaktifkan KTP warga Jakarta yang tinggal di luar kota. Kebijakan ini memberikan dampak terhadap migrasi dan keputusan penduduk untuk pindah domisili sehingga mempengaruhi demografi di kawasan penyangga seperti Depok.

Disisi lain, Pemerintah Indonesia telah memulai proses untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur. Tujuan dari pemindahan ini, salah satunya adalah untuk mengurangi beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi. Banyak pejabat pemerintah dan pegawai negeri dijadwalkan akan pindah ke IKN dalam beberapa tahun mendatang, yang dapat mengurangi jumlah penduduk yang bekerja di sektor pemerintahan di Jakarta dan sekitarnya, termasuk Depok. Pemindahan Ibukota ini tidak hanya akan mengalihkan fokus administratif tapi juga berpotensi mempengaruhi kegiatan ekonomi dan sosial di Jakarta dan kawasan sekitarnya yang berdampak pada Depok, di mana banyak penduduknya bekerja di sektor pemerintahan.

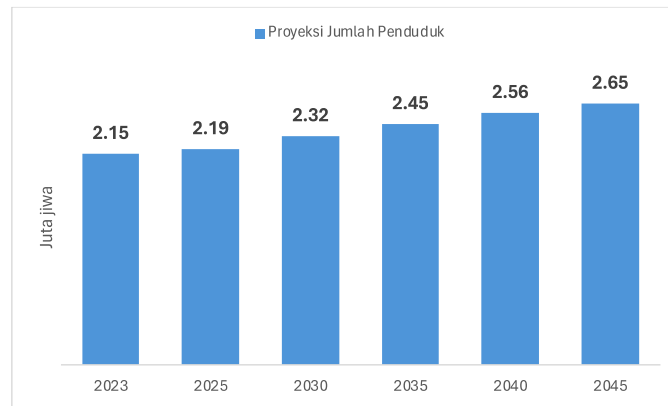
Meskipun Depok akan mengalami beberapa perubahan demografis akibat perpindahan ini, Jakarta tetap menjadi pusat kegiatan ekonomi di Indonesia. Ini termasuk sektor perdagangan besar dan ritel, akomodasi dan makanan minuman, serta industri proses yang masih akan berkonsentrasi di Jakarta. Apalagi, dengan perpindahan ibu kota, Jakarta juga berpotensi mengembangkan sektor-sektor baru yang berfokus pada teknologi tinggi dan layanan keuangan, yang bisa menarik tenaga kerja dari kawasan sekitarnya termasuk Depok.

Jumlah Total Penduduk

Memahami kondisi demografis suatu wilayah adalah aspek penting dalam merencanakan pembangunan yang efektif. Data jumlah penduduk Kota Depok memberikan wawasan krusial untuk menganalisis perkembangan pembangunan daerah. Informasi ini berperan tidak hanya sebagai dasar dalam proses pengolahan dan analisis data perkembangan, tetapi

juga sebagai referensi yang sangat penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Akses terhadap informasi demografis memungkinkan pemerintah Kota Depok untuk merancang program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan nyata penduduk, memastikan alokasi sumber daya yang efisien, dan membantu dalam merumuskan strategi pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan dan inklusif.

Gambar 2. 35 Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Depok 2023-2045 (juta jiwa)



Sumber: Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Depok 2022-2045

Berdasarkan proyeksi yang disusun dalam Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Depok 2022-2045, jumlah penduduk Kota Depok diperkirakan akan terus meningkat secara signifikan dari tahun 2023 hingga 2045. Pada tahun 2023, jumlah penduduk Kota Depok mencapai 2.145.400 jiwa. Angka ini diperkirakan akan naik menjadi 2.191.834 jiwa pada tahun 2025, dan terus meningkat menjadi 2.324.360 jiwa pada tahun 2030. Pertumbuhan penduduk ini berlanjut dengan jumlah penduduk yang diproyeksikan mencapai 2.449.317 jiwa pada tahun 2035, 2.559.759 jiwa pada tahun 2040, dan akhirnya mencapai 2.652.562 jiwa pada tahun 2045.

Jumlah Penduduk Berdasar Kelompok Umur

Analisis demografi berdasarkan kelompok umur adalah studi tentang struktur populasi yang membagi penduduk ke dalam berbagai kelompok usia untuk memahami distribusi dan dinamika populasinya. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi berapa banyak orang yang berada dalam setiap kelompok umur, seperti anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Data ini sangat penting karena masing-masing kelompok umur memiliki kebutuhan yang berbeda dalam hal pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan layanan sosial.

Tabel 2. 12 Proyeksi Penduduk Kota Depok Berdasar Kelompok Umur

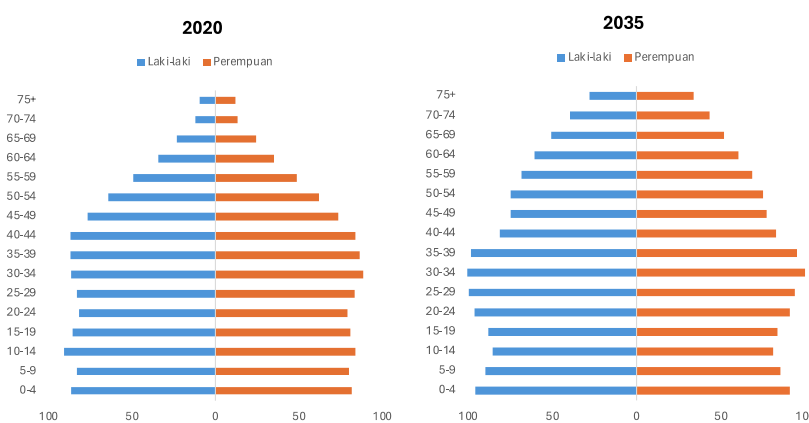
No	Kelompok Umur	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
1.	0 – 14	506.840 (23%)	510.828 (22%)	527.921 (22%)	542.012 (21%)	549.000 (21%)
2.	15 – 64	1.546.152 (71%)	1.622.902 (70%)	1.674.118 (68%)	1.713.838 (67%)	1.754.612 (66%)

No	Kelompok Umur	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
3.	65+	138.842 (6%)	190.630 (8%)	247.277 (10%)	303.909 (12%)	348.949 (13%)

Sumber: Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Depok 2022-2045

Proyeksi kelompok umur di Kota Depok mengindikasikan penurunan persentase jumlah anak-anak (usia 0-14) dari tahun 2025 hingga 2045. Demikian juga dengan penduduk usia produktif (15-64) menunjukkan penurunan persentase meskipun kecil. Namun, kelompok usia 65 tahun ke atas mengalami peningkatan signifikan, mencerminkan tren penuaan penduduk yang akan berdampak pada rasio ketergantungan di masa mendatang.

Gambar 2. 36 Piramida Penduduk Kota Depok 2020 dan 2035 (ribu jiwa)



Sumber: Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Depok 2022-2045

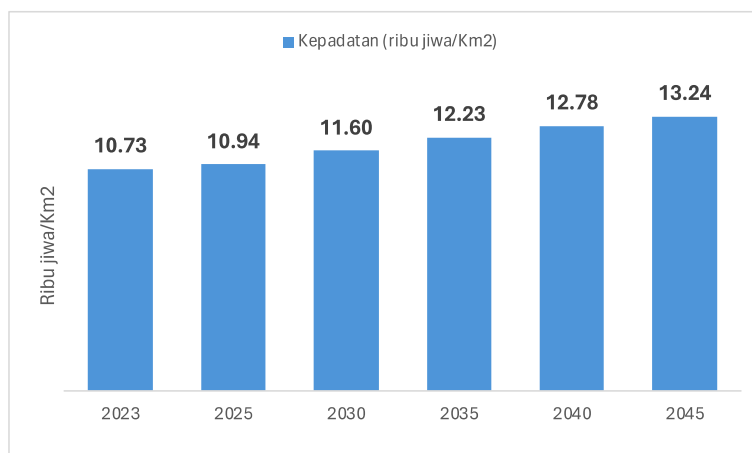
Analisis piramida penduduk Kota Depok untuk tahun 2020 dan 2035 menunjukkan tren demografis penting. Piramida penduduk Kota Depok perlahan berubah dari bentuk piramida tradisional menjadi piramida terbalik. Perubahan ini menunjukkan bahwa akan ada perubahan struktur usia yang signifikan dalam beberapa tahun mendatang. Implikasi penting dari ini terkait dengan perencanaan pembangunan di sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Depok harus mempertimbangkan tren demografis ini saat merumuskan kebijakan dan program untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif bagi semua penduduk.

Analisis Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah ukuran jumlah penduduk yang tinggal dalam satu satuan luas wilayah tertentu, biasanya dinyatakan dalam jumlah jiwa per kilometer persegi. Ini merupakan indikator penting dalam demografi yang menunjukkan seberapa padat atau renggangnya populasi di suatu area. Pembahasan mengenai kepadatan penduduk ini penting untuk mengidentifikasi bagaimana sumber daya alam, infrastruktur, dan layanan publik dapat disesuaikan dan diperluas untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang bertumbuh,

serta untuk merencanakan pengembangan wilayah dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan di Kota Depok.

Gambar 2. 37 Kepadatan Penduduk Kota Depok



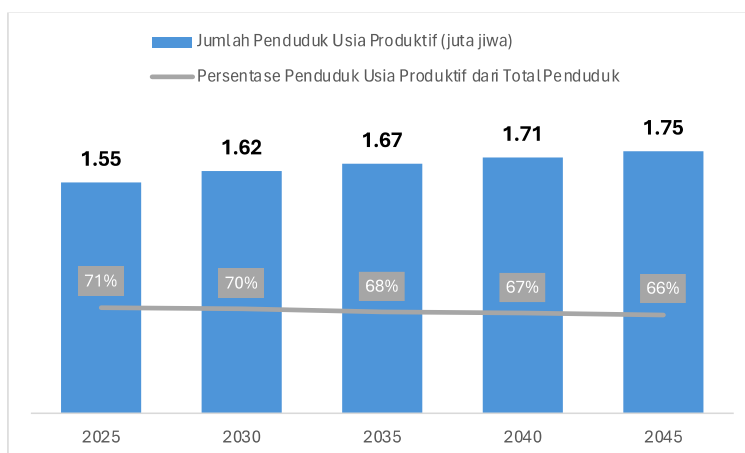
Sumber: Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Depok 2022-2045

Berdasarkan data kepadatan penduduk Kota Depok dari tahun 2023 hingga 2045, terlihat adanya tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2023, kepadatan penduduk tercatat sebesar 10.732 jiwa per kilometer persegi. Proyeksi menunjukkan peningkatan bertahap, dengan kepadatan mencapai 10.943 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2025, dan terus meningkat menjadi 11.604 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2030. Tren ini berlanjut hingga mencapai 12.228 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2035 dan 12.780 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2040. Pada tahun 2045, kepadatan penduduk diproyeksikan mencapai 13.243 jiwa per kilometer persegi. Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan populasi yang berkelanjutan di Kota Depok. Tren peningkatan kepadatan ini menekankan pentingnya perencanaan kota yang matang untuk mengakomodasi peningkatan populasi dan menjaga kualitas hidup warga.

Penduduk Usia Produktif

Kelompok usia 15 hingga 64 tahun, yang dikenal sebagai kelompok usia produktif, memegang peranan penting dalam mendorong perkembangan ekonomi dan sosial suatu kota. Informasi tentang populasi usia produktif ini sangat penting untuk memahami berbagai aspek terkait dengan kelompok ini, termasuk kapasitas tenaga kerja, kontribusi mereka dalam ekonomi, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pembangunan Kota Depok

Gambar 2. 38 Proyeksi Penduduk Usia Produktif 2025-2045



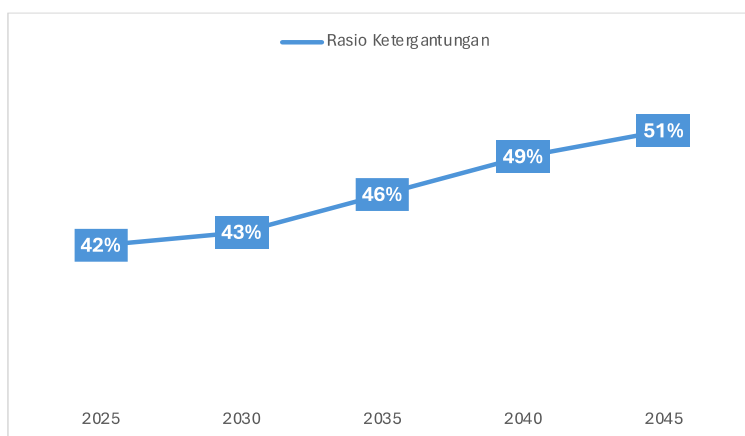
Sumber: Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Depok 2022-2045

Berdasarkan data proyeksi penduduk Kota Depok untuk kelompok umur 15-64 tahun dari tahun 2025 hingga 2045, terlihat bahwa penduduk dalam kelompok usia produktif ini terus meningkat secara jumlah meskipun persentasenya terhadap total populasi sedikit menurun. Pada tahun 2025, jumlah penduduk usia 15-64 tahun diperkirakan mencapai 1.546.152 orang atau 71% dari total populasi. Angka ini meningkat menjadi 1.622.902 orang (70%) pada tahun 2030, dan terus bertambah menjadi 1.674.118 orang (68%) pada tahun 2035. Pada tahun 2040, jumlah penduduk usia produktif mencapai 1.713.838 orang (67%), dan diproyeksikan mencapai 1.754.612 orang (66%) pada tahun 2045. Penurunan persentase ini menunjukkan adanya peningkatan proporsi penduduk di kelompok usia lansia, yang membutuhkan perhatian khusus dalam perencanaan kebijakan sosial dan ekonomi, termasuk dalam penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, serta program kesejahteraan sosial.

Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan merupakan indikator penting dalam analisis demografis, yaitu mengukur proporsi antara penduduk yang dianggap tidak produktif (yang berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun) terhadap penduduk yang produktif (berusia 15 hingga 64 tahun). Indikator ini memberikan gambaran tentang potensi beban ekonomi yang harus ditanggung oleh kelompok usia produktif dalam mendukung kelompok usia non-produktif.

Gambar 2. 39 Proyeksi Angka Ketergantungan Depok 2025-2045



Sumber: Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Depok 2022-2045

Data proyeksi rasio ketergantungan Kota Depok dari tahun 2025 hingga 2045 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2025, rasio ketergantungan tercatat sebesar 42%, yang berarti terdapat 42 individu non-produktif (anak-anak dan lansia) untuk setiap 100 individu produktif. Rasio ini meningkat menjadi 43% pada tahun 2030, kemudian naik lebih tajam menjadi 46% pada tahun 2035. Tren ini berlanjut hingga mencapai 49% pada tahun 2040 dan 51% pada tahun 2045. Peningkatan rasio ketergantungan ini mengindikasikan bahwa proporsi penduduk non-produktif semakin besar dibandingkan dengan penduduk produktif.

Bonus Demografi

Bonus demografi merujuk pada kondisi di mana jumlah penduduk usia kerja atau usia produktif (15-64 tahun) lebih mendominasi dibandingkan jumlah penduduk usia muda (0-14 tahun) dan usia tua (65 tahun ke atas). Perubahan struktur umur penduduk ini, yang dipengaruhi oleh tingkat kelahiran dan kematian, berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama yang dikenal sebagai transisi demografi.

Bonus demografi yang ditandai dengan meningkatnya jumlah individu usia produktif memberikan berbagai dampak positif. Pertama, membuka peluang besar bagi dunia usaha untuk menemukan kandidat yang kompeten, sehingga menguntungkan tenaga kerja produktif. Kedua, bonus demografi mendorong perkembangan ekonomi dengan semakin banyaknya individu yang mendapatkan pekerjaan dan berkontribusi pada pertumbuhan investasi. Ketiga, bonus demografi juga meningkatkan sektor pembangunan lainnya, seperti pendidikan, dengan adanya bonus demografi, pemerintah bisa merancang sistem pendidikan yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, jika tidak dipersiapkan dengan baik, bonus demografi bisa membawa dampak negatif, seperti meningkatnya angka pengangguran jika peluang kerja tidak tersedia, dan ketidakseimbangan kualitas sumber daya manusia jika pendidikan tidak memadai. Selain itu, terdapat risiko populasi yang menua (*aging population*), di mana peningkatan jumlah lansia

dapat mendominasi dan mempengaruhi kemajuan negara jika peluang ini tidak dimanfaatkan dengan baik.

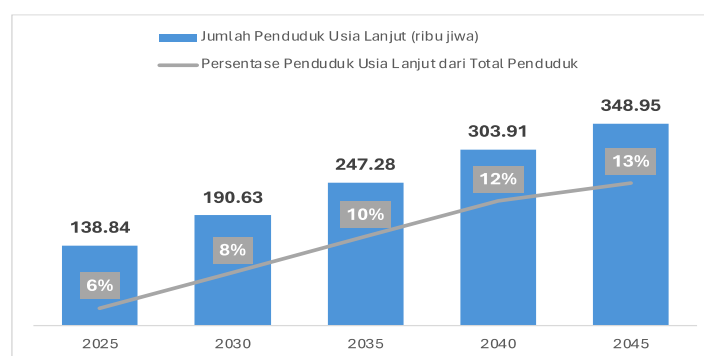
Berdasarkan data proyeksi demografis Kota Depok dari tahun 2025 hingga 2045, terlihat bahwa Kota Depok sedang dan akan terus menikmati bonus demografi, dengan proporsi terbesar penduduk berada dalam kelompok usia produktif (15-64 tahun). Pada tahun 2025, kelompok usia produktif mencakup 71% dari total populasi, dengan jumlah 1.546.152 jiwa. Meskipun persentasenya menurun menjadi 70% pada tahun 2030, 68% pada tahun 2035, 67% pada tahun 2040, dan 66% pada tahun 2045, jumlah absolut penduduk usia produktif terus meningkat, mencapai 1.754.612 jiwa pada tahun 2045.

Selama periode ini, proporsi penduduk usia muda (0-14 tahun) dan lanjut usia (65+) menunjukkan tren yang berbeda. Penduduk usia muda sedikit menurun dari 23% pada tahun 2025 menjadi 21% pada tahun 2045. Fenomena penuaan penduduk ini tidak hanya terjadi di Kota Depok, tetapi juga terlihat pada tingkat nasional dan daerah-daerah lainnya. Pada tahun 2045, jumlah penduduk lanjut usia (lansia) di Kota Depok diperkirakan mencapai 348.949 jiwa, atau 13 persen dari total populasi yang diproyeksikan sebesar 2.652.562 jiwa, mengalami kenaikan dari 6% atau 138.840 pada tahun 2023.

Penduduk Usia Lanjut

Data demografis menunjukkan bahwa Kota Depok mengalami peningkatan jumlah penduduk usia lanjut yang sangat signifikan, suatu fenomena perlu mendapat perhatian serius dari dinamika penduduk kota. Perubahan ini menuju kepada struktur usia yang lebih tua dapat dihubungkan dengan faktor-faktor seperti peningkatan angka harapan hidup dan penurunan tingkat kelahiran.

Gambar 2. 40 Proyeksi Penduduk Usia Lanjut Kota Depok 2025-2045



Sumber: Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Depok 2022-2045

Berdasarkan data proyeksi demografis Kota Depok dari tahun 2025 hingga 2045, jumlah penduduk usia lanjut (65+) menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2025, jumlah penduduk lanjut usia diperkirakan mencapai 138.842 orang atau 6% dari total populasi. Angka ini meningkat menjadi 190.630 orang (8%) pada tahun 2030, dan terus

bertambah menjadi 247.277 orang (10%) pada tahun 2035. Pada tahun 2040, jumlah penduduk usia lanjut diproyeksikan mencapai 303.909 orang (12%), dan pada tahun 2045, angka ini meningkat menjadi 348.949 orang (13%). Peningkatan proporsi penduduk lanjut usia ini menggambarkan pentingnya perencanaan yang matang dalam penyediaan layanan kesehatan, sosial, dan kesejahteraan yang memadai untuk mendukung kebutuhan populasi yang menua. Kondisi ini juga menekankan perlunya strategi untuk mengatasi tantangan ekonomi dan sosial yang terkait dengan populasi yang menua, sambil memastikan bahwa kelompok usia ini tetap dapat menjalani kehidupan yang produktif dan bermakna.

2.6.2. Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana

Dalam konteks pembangunan Kota Depok, perencanaan sarana dan prasarana perkotaan memerlukan metode yang sistematis berlandaskan pada analisis dinamika pertumbuhan penduduk dan kebutuhan infrastruktur yang sesuai. Perencanaan ini dilakukan dengan mengikuti standar nasional, namun juga menyesuaikan diri dengan situasi dan perkembangan. Perencanaan sarana dan prasarana di Kota Depok mencakup kebutuhan atas perumahan yang memadai, infrastruktur kesehatan, pendidikan yang berkualitas, penyediaan air bersih, kebutuhan energi listrik, serta infrastruktur persampahan.

Proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana yang efektif menuntut analisis yang mendalam terkait dengan dinamika pertumbuhan penduduk dan dampaknya terhadap kebutuhan infrastruktur perkotaan, mengingat karakteristik penduduk Kota Depok sebagai wilayah urban. Sesuai dengan prinsip-prinsip yang dijabarkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Perumahan Perkotaan, perencanaan ini harus dapat menyesuaikan diri dengan dinamika penduduk yang berubah-ubah, memastikan kecukupan ruang dan fasilitas yang diperlukan oleh warga, termasuk perencanaan perkotaan yang fleksibel dan adaptif yang mampu menanggapi tren demografis saat ini dan prediksi masa depan, serta memprioritaskan pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Selain SNI, proyeksi kebutuhan sarana prasarana juga menggunakan pendekatan akademis, dengan menggunakan metodologi analisis yang mendalam.

Proyeksi Hunian Tempat Tinggal

Kebutuhan hunian tempat tinggal di Kota Depok bisa diproyeksikan sesuai dengan perkembangan penduduk sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 2. 13 Proyeksi Kebutuhan Hunian Tempat Tinggal Kota Depok 2025-2045

	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk		2.191.834	2.324.360	2.449.317	2.559.759	2.652.562
Jumlah rumah (unit)*	4	547.959	581.090	612.329	639.940	663.141
Luas lahan untuk rumah (m2)**	36	19.726.506	20.919.240	22.043.853	23.037.831	23.873.058

Acuan: BKKBN (1 KK ideal adalah 4 orang)* dan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan**

Dengan asumsi, satu keluarga terdiri atas 4 jiwa sesuai dengan standar BKKBN, maka kebutuhan perumahan di Kota Depok menunjukkan tren peningkatan jumlah rumah dari 547.959 unit pada tahun 2025 menjadi 663.141 unit pada tahun 2045, dengan luas lahan yang dibutuhkan untuk perumahan juga meningkat dari 19.726.506 m² pada tahun 2025 menjadi 23.873.058 m² pada tahun 2045. Pertumbuhan ini menggambarkan peningkatan permintaan tempat tinggal yang diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk.

Namun, dengan karakteristik keterbatasan lahan dan wilayah yang dimiliki oleh Kota Depok, strategi perencanaan dan pengembangan perumahan vertikal seperti apartemen dan rumah susun menjadi solusi yang sangat relevan dan perlu diterapkan. Perumahan vertikal menawarkan beberapa keuntungan, terutama dalam konteks keterbatasan lahan:

1. Efisiensi Lahan: Perumahan vertikal memungkinkan penggunaan lahan yang lebih efisien, memaksimalkan jumlah unit hunian yang dapat dibangun dalam area terbatas. Ini sangat penting di kota-kota dengan lahan yang terbatas seperti Depok.
2. Penghematan Infrastruktur: Dengan memusatkan banyak penghuni dalam satu bangunan, pengembangan infrastruktur seperti saluran air, gas, listrik, dan transportasi dapat dilakukan dengan lebih efisien. Ini mengurangi biaya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur per kapita.
3. Dukungan terhadap Perkembangan Ekonomi dan Sosial: Perumahan vertikal sering kali terletak di atau dekat pusat kota, memudahkan akses ke fasilitas publik, tempat kerja, dan pusat kegiatan komunitas. Ini mendukung pengembangan ekonomi lokal dan memperkuat jaringan sosial.
4. Pelestarian Ruang Terbuka: Dengan mengurangi ekspansi horizontal, perumahan vertikal membantu melestarikan ruang terbuka dan area hijau, yang penting untuk keseimbangan ekologis dan kualitas hidup warga kota.

Mengingat faktor-faktor tersebut, pemerintah Kota Depok perlu mengintegrasikan rencana pembangunan perumahan vertikal dalam strategi perencanaan urban. Ini termasuk mengatur zonasi yang memungkinkan pembangunan vertikal, memberikan insentif untuk

pengembangan perumahan vertikal yang berkelanjutan dan terjangkau, serta memastikan bahwa perumahan vertikal dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kesejahteraan penghuninya.

Pengembangan perumahan vertikal sebagai respons terhadap keterbatasan lahan dan kebutuhan perumahan yang meningkat di Kota Depok merupakan langkah yang strategis. Hal ini tidak hanya menjawab tantangan ketersediaan lahan, tetapi juga mendukung penciptaan lingkungan hidup yang lebih berkelanjutan dan kualitas hidup yang lebih baik bagi penduduknya.

Proyeksi Kebutuhan Air Bersih

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan Kota Depok, analisis terhadap kebutuhan infrastruktur dasar seperti pasokan air bersih menjadi sangat krusial, terutama mengingat laju pertumbuhan kota yang cepat. Mengacu pada proyeksi pertumbuhan penduduk Kota Depok dari tahun 2025 hingga 2045, terdapat perkiraan peningkatan signifikan dalam permintaan air bersih yang sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk. Perkiraan ini menggarisbawahi pentingnya perencanaan yang cermat dan strategis untuk memastikan ketersediaan sumber daya air yang cukup dan berkelanjutan bagi penduduk yang berkembang.

Kota Depok, sebagai salah satu kawasan urban dengan pertumbuhan penduduk yang dinamis, menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan air bersih penduduknya. Peningkatan populasi tidak hanya meningkatkan permintaan terhadap air bersih untuk keperluan domestik, tetapi juga untuk keperluan industri, komersial, dan fasilitas publik lainnya. Ketersediaan air bersih yang terbatas, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan berbagai masalah sosial dan lingkungan, seperti kelangkaan air, penurunan kualitas kesehatan masyarakat, dan konflik penggunaan air.

Tabel 2. 14 Kebutuhan Air Bersih 2025-2045

	Standar	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk		2.191.834	2.324.360	2.449.317	2.559.759	2.652.562
Kebutuhan air bersih-Kota Metropolitan (liter)	150 liter/hari/kapita	120.002.91 1.500	127.258.71 0.000	134.100.10 5.750	140.146.80 5.250	145.227.76 9.500
Kebutuhan kran umum air bersih** (unit)	1 buah/250 jiwa	8.767	9.297	9.797	10.239	10.610

Acuan: Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum (2001)* dan SNI 03-2399-1991 tentang Tata Cara Perencanaan Bangunan MCK Umum**

Dengan pertumbuhan penduduk Kota Depok yang diperkirakan akan terus meningkat dari tahun 2025 hingga 2045, kebutuhan akan air bersih juga akan mengalami peningkatan yang

signifikan. Perhitungan kebutuhan air bersih berdasarkan proyeksi jumlah penduduk menunjukkan peningkatan volume air bersih dari sekitar 120 miliar liter pada tahun 2025 menjadi sekitar 145,2 miliar liter pada tahun 2045 untuk memenuhi kebutuhan pokok setiap individu untuk akses air bersih yang memadai, sebesar 150 liter per hari per kapita sesuai dengan standar Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum.

Selain itu, analisis terhadap kebutuhan kran umum yang dihitung berdasarkan standar SNI, yang menetapkan kebutuhan satu unit kran umum untuk setiap 250 jiwa, juga menunjukkan peningkatan dari 8.677 unit pada tahun 2025 menjadi 10.610 unit pada tahun 2045.

Menghadapi tantangan ini, Kota Depok harus memprioritaskan pengembangan dan peningkatan infrastruktur air bersih, yang mencakup tidak hanya pembangunan fasilitas pengolahan air baru dan perluasan jaringan distribusi, tetapi juga strategi pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk tidak hanya mengatasi peningkatan permintaan tetapi juga memastikan ketersediaan sumber daya air bersih untuk generasi mendatang.

Selain itu, program edukasi untuk masyarakat tentang pentingnya penghematan air dan pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan akan menjadi komponen penting dalam strategi penyediaan air bersih. Upaya ini akan membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama yaitu ketersediaan air bersih yang aman dan berkelanjutan bagi semua penduduk Kota Depok.

Proyeksi Kebutuhan Energi Listrik

Dalam konteks Kota Depok, analisis kebutuhan listrik bagi rumah tangga dan sektor lainnya menjadi sangat penting untuk mendukung proyeksi pertumbuhan penduduk yang berlangsung dari tahun 2025 hingga 2045. Pertumbuhan penduduk di Kota Depok meningkatkan permintaan terhadap energi listrik. Dengan kondisi ini, pemerintah Kota Depok perlu mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang mendukung penggunaan energi terbarukan dan efisiensi energi.

Pemanfaatan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan biomassa, bersama dengan penerapan teknologi hemat energi dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan menghasilkan pengurangan emisi karbon. Hal ini juga memperkuat ketahanan energi Kota Depok, mengurangi biaya energi untuk rumah tangga dan sektor industri, serta mendorong inovasi dan penciptaan lapangan kerja dalam ekonomi hijau.

Tabel 2. 15 Proyeksi Kebutuhan Listrik Kota Depok 2025-2045

		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk		2.191.834	2.324.360	2.449.317	2.559.759	2.652.562
Konsumsi Listrik Per Kapita (Skenario Minimum)	KWH	1.620	2.308	2.837	3.529	4.259
Total Konsumsi Listrik Per Kapita (Skenario Minimum)	KWH	3.550.771.080	5.364.622.880	6.948.712.329	9.033.389.511	11.297.261.558
Total KWH		3.550.771.080	5.364.622.880	6.948.712.329	9.033.389.511	11.297.261.558

Acuan: SNI 04-8287.603-2002 tentang Istilah kelistrikan dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional 2023-2060.

Proyeksi kebutuhan listrik Kota Depok untuk periode 2025 hingga 2045 menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam konsumsi energi. Berdasarkan data dari Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional 2023-2060, konsumsi listrik per kapita dalam skenario minimum secara nasional diproyeksikan mengalami peningkatan yang tajam. Pada tahun 2025, konsumsi listrik per kapita diperkirakan sebesar 1.620 KWH dan akan meningkat menjadi 4.259 KWH pada tahun 2045. Peningkatan konsumsi ini disebabkan oleh perubahan gaya hidup, perkembangan teknologi, dan peningkatan standar hidup yang mendorong penggunaan energi yang lebih besar.

Secara keseluruhan, total konsumsi listrik untuk seluruh penduduk dalam skenario minimum diproyeksikan meningkat dari 3.550.771.080 KWH pada tahun 2025 menjadi 11.297.261.558 KWH pada tahun 2045. Data ini menunjukkan adanya peningkatan hampir tiga kali lipat dalam total konsumsi listrik di 20 tahun kedepan.

Proyeksi Persampahan

Analisis kebutuhan pengelolaan sampah yang berlandaskan pada proyeksi pertumbuhan penduduk dari tahun 2025 hingga 2045 menjadi sangat penting untuk mengantisipasi dan mengatasi tantangan dalam pengelolaan limbah perkotaan.

Tabel 2. 16 Kebutuhan Infrastruktur Sampah Kota Depok 2025-2045

	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk		2.191.834	2.324.360	2.449.317	2.559.759	2.652.562
Timbulan sampah (Kg)*	0,5 kg/org/hari	400.009.705	424.195.700	447.000.353	467.156.018	484.092.565
Tong sampah rumah**	5	438.367	464.872	489.863	511.952	530.512
TPS lingkungan**	2.500	877	930	980	1.024	1.061
TPS kawasan**	30.000	73	77	82	85	88
TPA lokal**	120.000	18	19	20	21	22
TPA wilayah**	480.000	5	5	5	5	6

Acuan: SNI 3242: 2008 tentang Pengelolaan sampah di permukiman * dan SNI 19-2454-2002 mengenai Tata cara teknik operasional pengolahan sampah perkotaan**

Analisis kebutuhan pengelolaan sampah di Kota Depok menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam volume timbulan sampah dengan pertumbuhan penduduk dari tahun 2025 hingga 2045. Dengan estimasi produksi sampah sebesar 0,5 kg per orang per hari, total timbulan sampah per tahun diperkirakan meningkat dari sekitar 400,01 juta kg pada tahun 2025 menjadi sekitar 484,09 juta kg pada tahun 2045. Peningkatan ini mencerminkan tantangan yang semakin besar dalam pengelolaan sampah kota, menuntut strategi yang efektif dan berkelanjutan untuk mengatasinya.

Dalam konteks infrastruktur pengelolaan sampah, kebutuhan akan tong sampah rumah, Tempat Pengumpulan Sementara (TPS) lingkungan, TPS kawasan, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) lokal, dan TPA wilayah juga bertambah. Di sisi lain, pemerintah Pusat telah mengeluarkan kebijakan penghentian pembangunan TPA baru mulai tahun 2030 dalam upaya mengurangi emisi gas metana dari sampah dan limbah yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Untuk menghadapi tantangan ini, Kota Depok perlu melakukan pendekatan pengelolaan sampah yang komprehensif dan berkelanjutan. Beberapa yang dapat dilakukan diantaranya mendorong pengurangan produksi sampah melalui edukasi dan kampanye pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, integrasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, pengembangan fasilitas daur ulang yang dapat meningkatkan proses pemilahan dan pengolahan sampah, penerapan teknologi pengolahan sampah yang inovatif untuk mengurangi volume sampah yang harus dibuang ke TPA. Selain itu, dengan berlakunya UU DKJ, dimana Depok menjadi salah satu wilayah aglomerasi, bekerja sama dengan daerah lain dalam kawasan aglomerasi dalam tata kelola persampahan perlu dipertimbangkan.

Keterlibatan dan partisipasi aktif dari masyarakat juga menjadi penting dalam menyukseskan program pengelolaan sampah di Kota Depok. Pendekatan yang holistik dan partisipatif dari semua stakeholder dalam pengelolaan sampah akan mendukung pembangunan Kota Depok yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup warga.

Proyeksi Sarana Kesehatan

Dari data proyeksi jumlah penduduk Kota Depok dari tahun 2025 hingga 2045, terlihat bahwa terjadi peningkatan penduduk yang signifikan. Pertumbuhan ini berdampak langsung terhadap kebutuhan fasilitas kesehatan, termasuk Posyandu, Balai Pengobatan Warga, BKIA/Klinik Bersalin, Puskesmas Pembantu, Puskesmas, Tempat Praktik Dokter, dan Apotek. Kenaikan jumlah penduduk mengharuskan peningkatan jumlah dan kapasitas fasilitas kesehatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat.

Tabel 2. 17 Kebutuhan Infrastruktur Kesehatan Kota Depok 2025-2045

	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk		2.191.834	2.324.360	2.449.317	2.559.759	2.652.562
Posyandu	1.250	1.753	1.859	1.959	2.048	2.122
Balai Pengobatan warga	2.500	877	930	980	1.024	1.061
BKIA/Klinik bersalin	30.000	73	77	82	85	88
Puskesmas	120.000	18	19	20	21	22
Tempat praktik dokter	5.000	438	465	490	512	531
Apotik	30.000	73	77	82	85	88

Sumber acuan: SNI 03-1733-2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan

Posyandu, sebagai salah satu fasilitas kesehatan primer di tingkat komunitas, menunjukkan peningkatan kebutuhan dari 1.753 unit pada tahun 2025 menjadi 2.122 unit pada tahun 2045. Ini menggambarkan pentingnya layanan kesehatan dasar yang mudah diakses oleh warga, khususnya untuk ibu dan anak.

Balai Pengobatan Warga dan Tempat Praktik Dokter juga mengalami peningkatan yang dibutuhkan sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Hal ini menandakan kebutuhan yang bertambah untuk akses ke layanan pengobatan dasar dan spesialisasi. Kemudian untuk fasilitas kesehatan yang lebih spesifik seperti BKIA/Klinik Bersalin dan Puskesmas, proyeksi menunjukkan penambahan jumlah yang diperlukan untuk mengakomodir kebutuhan layanan kesehatan reproduksi dan pelayanan kesehatan primer yang lebih luas. Peningkatan ini merefleksikan kebutuhan akan infrastruktur kesehatan yang mampu menanggapi dinamika kependudukan dan kebutuhan kesehatan yang beragam. Di sisi lain, apotek sebagai fasilitas penunjang dalam penyediaan obat-obatan dan konsultasi kesehatan dasar juga menunjukkan kebutuhan akan peningkatan jumlah untuk memastikan ketersediaan dan aksesibilitas obat bagi masyarakat.

Keberadaan Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu) di Kota Depok sangat penting dalam mendukung kesehatan masyarakat, terutama dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular (PTM). Dengan proyeksi peningkatan populasi lanjut usia yang signifikan, POSBINDU berperan penting dalam melakukan deteksi dini dan pemantauan faktor risiko PTM seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung. Melalui kegiatan rutin yang melibatkan pemeriksaan kesehatan, konseling, dan edukasi, POSBINDU membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gaya hidup sehat dan deteksi dini.

Mengingat proyeksi peningkatan populasi lanjut usia (lansia) di Kota Depok yang diperkirakan mencapai 348.949 jiwa atau 13 persen dari total populasi pada tahun 2045, sangat penting untuk menyediakan layanan khusus untuk lansia. Layanan ini memberikan perawatan kesehatan, aktivitas sosial, dan dukungan emosional yang dibutuhkan. Dengan populasi lansia yang semakin besar, inisiatif seperti ini menjadi penting untuk memastikan kualitas hidup yang baik bagi warga lanjut usia. Selain itu, fasilitas khusus lansia ini dapat berperan dalam menjaga kesejahteraan lansia dengan menyediakan lingkungan yang mendukung kesehatan fisik dan mental mereka, sehingga mereka dapat menjalani masa tua dengan bahagia.

Proyeksi Sarana Pendidikan

Dari proyeksi jumlah penduduk Kota Depok yang terus bertumbuh dari tahun 2025 hingga 2045, tergambar bahwa kebutuhan terhadap fasilitas pendidikan dasar dan menengah diprediksi akan meningkat. Perhitungan kebutuhan jumlah sarana dan prasarana sekolah, mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standard Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.

Tabel 2. 18 Proyeksi Sarana Pendidikan Kota Depok 2025-2045

Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Total Penduduk		2.191.834	2.324.360	2.449.317	2.559.759	2.652.562
Jumlah Penduduk Usia PAUD (0-4)		170.780	180.421	186.434	188.817	187.646
Kebutuhan PAUD	1.250	137	144	149	151	150
Jumlah Penduduk Usia SD (5-9)		168.669	169.254	175.055	180.073	182.579
kebutuhan SD	1.600	105	106	109	113	114
Jumlah Penduduk Usia SMP (10-14)		167.390	161.152	166.432	173.122	178.775
Kebutuhan SMP	4.800	35	34	35	36	37

Sumber acuan: SNI 03-1733-2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan

Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk di Kota Depok dari tahun 2025 hingga 2045, terlihat bahwa jumlah total penduduk terus mengalami peningkatan signifikan. Penduduk usia PAUD (0-4 tahun) diproyeksikan meningkat dari 170.780 jiwa pada tahun 2025 menjadi 187.646 jiwa pada tahun 2045, dengan kebutuhan PAUD yang bertambah dari 137 unit menjadi 150 unit. Jumlah penduduk usia SD (5-9 tahun) juga meningkat dari 168.669 jiwa pada tahun 2025 menjadi 182.579 jiwa pada tahun 2045, yang mendorong kebutuhan SD bertambah dari 105 unit menjadi 114 unit. Sementara itu, penduduk usia SMP (10-14 tahun)

diproyeksikan meningkat dari 167.390 jiwa pada tahun 2025 menjadi 178.775 jiwa pada tahun 2045, dengan kebutuhan SMP yang bertambah dari 35 unit menjadi 37 unit. Data ini menunjukkan bahwa Kota Depok perlu terus mengembangkan fasilitas pendidikan untuk mengakomodasi pertumbuhan penduduk dan memastikan akses pendidikan yang memadai bagi seluruh penduduk usia sekolah.

2.7. Identifikasi dan Analisis Pusat Pertumbuhan Wilayah

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan di Kota Depok, perlu dilakukan identifikasi dan analisis pusat pertumbuhan wilayah. Identifikasi dan analisis ini bersumber dari dokumen Perda No. 09 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok 2022-2042. Melalui analisis yang mendalam terhadap karakteristik setiap wilayah, RTRW berupaya menentukan pusat-pusat pertumbuhan yang strategis, yang akan memandu arah pengembangan kota dan menjamin keberlanjutan pembangunan yang harmonis antara kebutuhan pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

2.7.1. Struktur Ruang

Struktur Ruang merupakan konfigurasi terorganisir dari berbagai pusat permukiman dan jaringan prasarana serta sarana yang vital, yang berperan sebagai tulang punggung berbagai aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam struktur ini, setiap elemen dirancang dan ditempatkan secara hierarkis, mengikuti urutan pentingnya, sehingga membentuk suatu sistem yang efisien. Hal ini memastikan bahwa semua komponen dapat berfungsi secara optimal, mendukung interaksi sosial, pertumbuhan ekonomi, dan mobilitas penduduk, serta memenuhi kebutuhan dasar dan pengembangan kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian, struktur ruang tidak hanya mengatur tata letak fisik kota, tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Sistem Pusat Pelayanan

Rencana struktur ruang Kota Depok diatur dengan tujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pengembangan wilayah dan pelestarian lingkungan. Ini meliputi pengembangan sistem pusat pelayanan, jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan infrastruktur perkotaan yang terpadu. Detailnya terangkum dalam tabel berikut.

Tabel 2. 19 Sistem Pusat Pelayanan Kota Depok

No.	Rencana Struktur Tata Ruang	Tujuan dan Arah Pengembangan
1.	Pusat Pelayanan Kota (PPK)	<ul style="list-style-type: none"> PPK Margonda: Berfungsi sebagai distrik bisnis utama, mencakup pusat perdagangan dan jasa regional, perumahan, hunian vertikal, kawasan pendidikan tinggi, kawasan pemerintahan dan

No.	Rencana Struktur Tata Ruang	Tujuan dan Arah Pengembangan
		<p>konservasi budaya, Ruang Terbuka Hijau (RTH), serta pengembangan <i>transit oriented development</i> (TOD).</p> <ul style="list-style-type: none"> • PPK Bojongsari: Ditujukan sebagai pusat pariwisata dan rekreasi, perdagangan dan jasa regional, fasilitas perumahan dan hunian vertikal, serta ruang terbuka hijau. • PPK Tapos: Dikembangkan sebagai sentra mobilitas pintar (<i>Smart Mobility</i>) dengan fasilitas umum transportasi, area industri dan pergudangan, perumahan dan hunian vertikal, perdagangan jasa, RTH, serta mendukung konsep transit oriented development (TOD). • PPK Cipayung: Diarahkan menjadi pusat ekonomi hijau (<i>Green Economy Center</i>), yang mengintegrasikan perumahan, hunian vertikal, perdagangan dan jasa, RTH, dan TOD, serta mendukung industri kecil dan ekonomi kreatif.
2.	Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK)	<ul style="list-style-type: none"> • SPPK Cisalak: Fokus perumahan, hunian vertikal, perdagangan, jasa, wisata perkotaan, agrowisata, industri dan RTH, serta TOD. • SPPK Cimanggis: Fokus pada pengembangan perumahan, perdagangan, jasa, dan ruang terbuka hijau. • SPPK Sukmajaya: Menyediakan fasilitas perumahan, perdagangan, jasa, kawasan pendidikan skala internasional, dan RTH. • SPPK Cilodong: Berorientasi pada perumahan, perdagangan, jasa, perkantoran pemerintah, pertahanan keamanan skala kota, dan RTH. • SPPK Sukatani: Mendukung perumahan, perdagangan, jasa, industri, pergudangan dan logistik, konservasi situ, dan RTH. • SPPK Limo: Terfokus pada perumahan, perdagangan, jasa, pariwisata, layanan sosial dan umum, serta RTH. • SPPK Cinere: Menekankan pada perumahan, perdagangan, jasa, infrastruktur ketenagalistrikan, dan RTH. • SPPK Sawangan: Diutamakan untuk agrowisata, perdagangan, jasa, perumahan, industri kecil, dan ekonomi kreatif, dan RTH.

Sumber: Perda No. 09 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok 2022-2042

Setiap PPK dan SPPK dirancang untuk mendukung karakteristik dan kebutuhan spesifik wilayahnya, yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan kota yang terintegrasi dan

berkelanjutan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang seimbang dengan pelestarian lingkungan.

Sistem Jaringan Transportasi

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok, sistem jaringan transportasi mendapat penekanan khusus sebagai tulang punggung infrastruktur perkotaan, yang mencakup sistem jaringan jalan dan sistem jaringan kereta api. Detail dari setiap komponen tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2. 20 Sistem Jaringan Transportasi Kota Depok

No.	Jaringan Transportasi	Komponen Sistem
1.	Sistem Jaringan Jalan	<ul style="list-style-type: none"> Jalan Umum: Ini mencakup jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan, dimana setiap jenis jalan memainkan peran penting dalam menyediakan aksesibilitas dan konektivitas di seluruh kota. Jalan Arteri: Dibagi menjadi arteri primer dan sekunder, jalan-jalan ini menghubungkan kawasan utama kota, seperti ruas Gandaria-Cilodong dan Margonda Raya, menyediakan rute utama bagi transportasi regional dan interkota. Jalan Kolektor: Fungsinya sebagai penghubung antara jalan arteri dan jalan lokal, membantu mendistribusikan lalu lintas dan memfasilitasi akses ke daerah permukiman dan komersial.
2.	Jalan Tol dan Terminal Penumpang	<ul style="list-style-type: none"> Termasuk dalam sistem jaringan jalan, jalan tol seperti Jalan Tol Depok-Antasari dan JORR II, mempercepat pergerakan antar wilayah metropolitan, sementara terminal penumpang, termasuk Terminal Jatijajar dan Terminal Depok, mendukung transportasi publik dan integrasi moda transportasi.
3.	Sistem Jaringan Kereta Api	<ul style="list-style-type: none"> Jalur Kereta Api: meliputi jaringan KA antar kota Bogor-Jakarta, Parung Panjang – Citayam, dan Nambo-Citayam-Depok-Manggarai, serta jaringan LRT yang berperan vital dalam mendukung mobilitas penduduk dan mengurangi kemacetan jalan raya. Stasiun Kereta Api: setiap stasiun KA dan LRT dirancang untuk mengoptimalkan akses dan kenyamanan pengguna, dengan beberapa stasiun diintegrasikan dalam konsep <i>Transit Oriented Development</i> (TOD) untuk mendukung penggunaan transportasi publik.

Detail dari sistem jaringan jalan dituangkan dalam peta skala 1:25.000 sebagai bagian dari lampiran Peraturan Daerah, menunjukkan komitmen Kota Depok dalam mengembangkan

infrastruktur transportasi yang terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan. Seluruh rencana ini dirancang untuk mendukung pertumbuhan kota yang dinamis, memfasilitasi mobilitas warga, dan meningkatkan kualitas hidup perkotaan.

Sistem Jaringan Energi

Rencana sistem jaringan energi di Kota Depok, sebagaimana termuat dalam Pasal 18 RTRW, mencakup dua komponen utama: jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, serta jaringan infrastruktur ketenagalistrikan. Berikut adalah penjabaran detail dari kedua komponen tersebut:

Jaringan Distribusi Minyak dan Gas Bumi: yang menyalurkan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan, dan selanjutnya dari kilang pengolahan ke konsumen. Jaringan dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan melintasi Kelurahan Sukatani, Curug, Cisalak, Baktijaya, Mekarjaya, Kemiri Muka, Beji Timur, Kukusan, Tanah Baru, dan Krukut. Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen terdapat di Kelurahan Tugu, Mekarsari, Cisalak Pasar, Harjamukti, Abadijaya, Baktijaya, Curug, Sukamaju Baru, Cilangkap, Jatijajar, Cilodong, dan Sukamaju.

Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik: Meliputi gardu listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem.

Gardu Listrik: Tersebar di berbagai kelurahan seperti Gandul, Rangkapan Jaya, Beji, Jatijajar, dan Bojongsari Baru. Gardu listrik ini berperan penting dalam distribusi dan regulasi pasokan listrik ke wilayah-wilayah tersebut.

Jaringan Transmisi Tenaga Listrik: Meliputi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), yang membentang di berbagai kelurahan, seperti Serua, Pondok Petir, Kedaung, Cinangka, Pengasinan, Bedahan, Pasir Putih, Gandul, dan banyak lainnya. Saluran ini memungkinkan transmisi listrik skala besar antara wilayah produksi dan konsumsi.

Rencana sistem jaringan energi ini diilustrasikan dalam peta skala 1:25.000 yang menunjukkan lokasi infrastruktur energi secara rinci. Tujuannya adalah untuk Sistem jaringan energi bertujuan mengoptimalkan distribusi energi dan memastikan ketersediaan dan keandalan pasokan energi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan aktivitas masyarakat.

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Berdasarkan RTRW Kota Depok 2022-2042, sistem jaringan sumber daya air mencakup:

Sistem Jaringan Irigasi

Berupa jaringan irigasi sekunder yang terdiri dari Sungai Binong, Sungai Angke, Saluran Parakanjati, Saluran Kranji Kanan, dan Sungai Ciliwung. Jaringan ini menyediakan air untuk irigasi, mendukung pertanian, dan memelihara keseimbangan ekologis.

Sistem Pengendalian Banjir

Sistem Pengendalian banjir di Kota Depok memanfaatkan:

- Jaringan pengendalian banjir yang mencakup Sungai Ciliwung, Sungai Sunter, Sungai Krukut, Sungai Cikeas, Sungai Pesanggrahan, dan Sungai Angke.
- Bangunan pengendalian banjir, termasuk waduk retensi dan situ, yang berlokasi di berbagai kelurahan dan berperan dalam menampung air berlebih untuk mencegah banjir.

Sistem Infrastruktur Perkotaan

RTRW Kota Depok menetapkan komponen infrastruktur perkotaan yang penting untuk mendukung kehidupan masyarakat urban dan pembangunan berkelanjutan, meliputi:

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

SPAM terdiri dari jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan. Jaringan perpipaan mencakup unit air baku, jaringan air baku, unit produksi, dan unit distribusi. Dalam rencana tata ruang wilayah, unit air baku berupa reservoir tersebar di kelurahan Depok Jaya, Pancoran Mas, Mekarjaya, Cislak Pasar, Serua, Bedahan, Cinere, Grogol, Cipayung, Jatimulya, dan Cilangkap. Proses produksi air dilakukan di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Angke, Legong, Citayam, Pesanggrahan, Ciliwung, Kemiri Muka, Pancoran Mas, dan Cikeas, dengan wilayah pelayanan yang terbagi dua, yaitu wilayah barat dan wilayah timur. Adapun SPAM bukan jaringan perpipaan merupakan instalasi sumur air tanah dalam (*deepwell*) yang tersebar di beberapa kelurahan.

Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)

SPAL Kota Depok berfokus pada pengelolaan air limbah domestik dengan infrastruktur yang mencakup Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di kelurahan Curug, Tapos, Kalimulya, Bojongsari, Cinere, Gandul, Pancoran Mas, Bojong Pondok Terong, Pondok Jaya, Tanah Baru, Depok, Mekarjaya, Abadijaya, Mekarsari, dan Jatijajar.

Sistem Jaringan Persampahan

Termasuk Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). TPS3R berupa unit pengelolaan sampah yang tersebar di kelurahan seperti Pondok Petir, Sukatani, Tugu, Cipayung, Bojong Pondok Terong, Ratu Jaya, Beji, dan lainnya, sedangkan TPA berlokasi di Kelurahan Cipayung.

Sistem Jaringan Evakuasi Bencana

Meliputi tempat dan jalur evakuasi bencana, yang diatur untuk menanggapi kejadian bencana alam dengan tempat evakuasi di lokasi strategis seperti lapangan Kantor Wali Kota, GOR Ratu Jaya, Gedung Balairung UI, Stadion Merpati, dan fasilitas lainnya.

Sistem Drainase Kota

Sistem drainase kota terdiri dari jaringan drainase primer, sekunder, dan tersier, dengan fokus pada pengelolaan aliran air hujan dan pencegahan banjir. Sungai utama seperti Ciliwung, Krukut, Angke, dan Pesanggrahan berperan sebagai drainase primer, sementara drainase sekunder dan tersier digunakan untuk mengelola air di tingkat lokal.

Sistem Jaringan Pejalan Kaki

Mengembangkan jaringan untuk pejalan kaki yang aman dan nyaman, yang menjangkau jalan kolektor primer dan sekunder di seluruh kecamatan, memfasilitasi akses pejalan kaki dan meningkatkan mobilitas urban. Setiap sistem ini, direpresentasikan dalam peta dengan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 sebagai bagian dari dokumen perencanaan, menggambarkan komitmen Kota Depok dalam menyediakan infrastruktur perkotaan yang komprehensif untuk mendukung keberlanjutan dan kualitas hidup yang lebih baik bagi warga Kota Depok.

2.7.2. Pola Ruang

Pola Ruang merupakan konsep yang mengatur distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah, yang secara strategis menentukan lokasi dan ekstensi area yang digunakan untuk berbagai fungsi. Dalam konteks ini, pola ruang terbagi menjadi dua kategori utama: peruntukan ruang untuk *fungsi lindung* dan peruntukan ruang untuk *fungsi budidaya*. Fungsi lindung berkaitan dengan area yang ditetapkan untuk konservasi alam, perlindungan ekosistem, dan pengendalian risiko bencana, seperti badan air, sempadan sungai dan situ, kawasan konservasi, dan ruang terbuka hijau yang semuanya penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan mengurangi dampak negatif pembangunan terhadap kehidupan manusia serta biodiversitas. Di sisi lain, fungsi budidaya mencakup area yang dialokasikan untuk kegiatan ekonomi, seperti pertanian, perikanan, industri, dan permukiman, yang dirancang untuk mendukung kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat. Kedua fungsi ini harus diintegrasikan dalam perencanaan tata ruang yang holistik, memastikan bahwa penggunaan lahan diatur sedemikian rupa untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, meminimalkan konflik pemanfaatan ruang, dan mendukung keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi masa depan.

Rencana pola ruang yang disebutkan mengacu pada pengaturan yang sistematis dan terstruktur dari penggunaan lahan dalam suatu wilayah, yang dituangkan dalam bentuk peta dengan skala yang sangat detail, yaitu 1:25.000. Skala ini menunjukkan bahwa satu unit pengukuran pada peta setara dengan 25.000 unit yang sama di lapangan, memungkinkan visualisasi yang akurat dari perencanaan ruang. Peta ini menggambarkan dengan jelas batasan antara area yang dialokasikan untuk fungsi lindung, seperti kawasan konservasi, hutan lindung, dan taman nasional, serta area untuk fungsi budidaya, termasuk lahan pertanian, perkebunan, area industri, dan permukiman. Detail geometris dan informasi peta pada skala ini memfasilitasi pemahaman yang mendalam tentang distribusi spasial dan hubungan fungsional antara berbagai penggunaan lahan, memastikan bahwa perencanaan dan pengelolaan ruang dapat dilaksanakan dengan efektif untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan pembangunan sosial-ekonomi wilayah.

Kawasan Lindung

Rencana kawasan lindung yang dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a mencakup empat kategori utama yang direncanakan untuk perlindungan dan pelestarian lingkungan di wilayah tersebut. Kategori-kategori tersebut adalah Badan Air, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Konservasi, Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Badan Air

Badan air di wilayah yang dipertimbangkan mencakup area seluas kurang lebih 248 hektar. Area ini melibatkan berbagai situ dan sungai yang tersebar di berbagai kelurahan dan kecamatan, dijelaskan sebagai berikut:

Situ-Situ Utama:

- Situ Bahar terletak di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong.
- Situ Krukut di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo.
- Situ Cinere, yang berada di Kelurahan Pangkalan Jati dan Cinere, Kecamatan Cinere.
- Situ Pangarengan di Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya.
- Berbagai Situ lain seperti Situ Pancoran Mas, Situ Pondok Cina, Situ Universitas Indonesia (1, 2, dan 3), Situ Cilangkap, dan seterusnya, menyebar di kelurahan dan kecamatan seperti Tugu, Cimanggis, Tapos, Sawangan, dan Beji.

Sungai-Sungai Utama:

- Sungai Angke, yang mengalir melalui kelurahan di Kecamatan Bojongsari seperti Pondok Petir, Curug, Duren Seribu, dan Duren Mekar.
- Sungai Pesanggrahan, melewati kelurahan-kelurahan di Kecamatan Cinere, Limo, Sawangan, Pancoran Mas, dan Cipayung.
- Sungai Ciliwung, yang melintasi kelurahan di Kecamatan Cimanggis, Sukmajaya, Beji, Pancoran Mas, dan Cipayung.

- Sungai Sunter dan Sungai Grogol, mengalir di Kecamatan Tapos dan Cinere.

Rincian ini menggambarkan distribusi dan luas area yang ditetapkan untuk badan air, menegaskan pentingnya konservasi dan pengelolaan sumber daya air di Kota Depok.

Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan Perlindungan Setempat menunjukkan bahwa area yang ditargetkan untuk perlindungan mencakup sekitar 553 hektar. Fokus perlindungan ini terutama pada:

Sempadan Sungai: Kawasan ini mencakup area sepanjang sungai yang penting untuk keseimbangan ekosistem dan perlindungan lingkungan, termasuk:

- Sungai Angke,
- Sungai Cipinang-Sunter,
- Sungai Ciliwung,
- Sungai Pesanggrahan,
- Sungai Cikeas-Cileungsi,
- Serta anak-anak sungai yang berhubungan dengan sungai-sungai utama.

Sempadan Situ: Meliputi area di sekitar situ yang memiliki nilai ekologis dan lingkungan penting, seperti:

- Situ Bahar di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong,
- Situ Krukut di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo,
- Situ Cinere yang berada di Kelurahan Pangkalan Jati dan Cinere, Kecamatan Cinere,
- Dan berbagai situ lainnya termasuk Situ Pengarengan, Situ Pitara/Pancoran Mas, Situ Pondok Cina, hingga Situ Tipar/Cicadas yang tersebar di berbagai kelurahan dan kecamatan.

Kedua jenis sempadan ini, baik sungai maupun situ, ditetapkan sebagai bagian kritis dari kawasan perlindungan setempat untuk menjaga kualitas air, mencegah bahaya erosi, mendukung keanekaragaman hayati, dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Kawasan ini diarahkan untuk mendukung kelestarian alam dan memastikan keberlanjutan sumber daya air bagi generasi mendatang.

Kawasan Konservasi

Kawasan konservasi di Kota Depok berupa Taman Hutan Raya yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas. Area ini memiliki luas yang diperkirakan sekitar 7 hektar. Taman Hutan Raya ini berfungsi sebagai area konservasi yang penting untuk melestarikan keanekaragaman hayati, menyediakan ruang hijau untuk rekreasi publik, serta berkontribusi pada upaya penelitian dan edukasi lingkungan. Kawasan ini mendukung

kelestarian ekosistem lokal dan memberikan manfaat ekologis yang signifikan bagi wilayah sekitarnya, termasuk berfungsi sebagai penyerap polutan dan penyedia oksigen.

Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) dijelaskan dalam Pasal 33 sebagai area yang direncanakan seluas kurang lebih 842 hektar. RTH ini terbagi dalam tiga kategori utama:

Taman Kota: Ini meliputi area-area hijau yang lebih besar dan seringkali berfungsi sebagai paru-paru kota dan zona rekreasi bagi masyarakat. Beberapa lokasi taman kota meliputi:

- Kelurahan Pondok Petir dan Serua di Kecamatan Bojongsari,
- Kelurahan Kedaung dan Cinangka di Kecamatan Sawangan,
- Kelurahan Curug dan Bojongsari di Kecamatan Bojongsari,
- Serta kelurahan lainnya seperti Sawangan, Pasir Putih, dan Bojong Pondok Terong.

Taman Kelurahan: Merujuk pada area-area hijau yang lebih kecil dan tersebar di banyak kelurahan, berfungsi untuk memberikan ruang terbuka hijau yang mudah diakses oleh warga setempat. Ini termasuk kelurahan-kelurahan di Beji, Pancoran Mas, Cipayung, Sukmajaya, Cimanggis, Tapos, dan Sawangan.

Pemakaman: Termasuk dalam kategori RTH karena berkontribusi pada ruang hijau dan area teduh, di samping fungsinya sebagai tempat peristirahatan terakhir. Kawasan ini mencakup pemakaman di kelurahan seperti Pondok Petir, Pengasinan, Bedahan, dan Sawangan Baru. Rencana untuk Ruang Terbuka Hijau ini, termasuk lokasi dan peruntukannya, diilustrasikan dalam peta detil dengan skala 1:25.000 sebagai bagian dari dokumentasi perencanaan wilayah.

Kawasan Budi Daya

Kawasan Budi Daya merupakan wilayah yang telah ditentukan berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sumber daya buatan yang ada. Fungsi utama dari kawasan ini adalah untuk melakukan kegiatan budidaya, yang dapat mencakup pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, atau industri yang memanfaatkan secara optimal potensi yang tersedia. Tujuan dari penetapan kawasan Budi Daya adalah untuk memaksimalkan penggunaan lahan dan sumber daya yang ada, mendukung pengembangan ekonomi lokal, serta menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Badan Jalan

Badan jalan yang ada mencakup area seluas kurang lebih 170 hektar, yang tersebar di seluruh kelurahan. Area ini mencakup jalan-jalan utama, jalan sekunder, dan jalan lingkungan yang membentang di berbagai bagian kota, menghubungkan satu kelurahan

dengan kelurahan lainnya. Keberadaan badan jalan ini penting untuk mendukung mobilitas penduduk, aksesibilitas layanan, dan kegiatan ekonomi di setiap kelurahan. Dengan luas yang signifikan, jaringan jalan ini merupakan infrastruktur kunci yang memainkan peran vital dalam perencanaan kota dan pengembangan wilayah, memastikan kelancaran transportasi dan komunikasi antar area di Kota Depok.

Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian, yang diatur dalam Pasal 36, ditujukan untuk kegiatan agrikultur dengan total luas sekitar 69 hektar. Kawasan ini dibagi menjadi dua segmen utama:

Kawasan Tanaman Pangan: Dalam kategori ini, terdapat Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang mencakup area seluas 5,84 hektar. KP2B ini terletak di Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, dan dirancang untuk mendukung praktik pertanian yang berkelanjutan, memaksimalkan efisiensi penggunaan sumber daya alam, dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Kawasan Hortikultura: berfungsi sebagai area untuk budidaya tanaman buah, sayuran, dan tanaman hias, kawasan hortikultura ini tersebar di berbagai kelurahan, termasuk Pondok Petir, Bojongsari Baru, Curug di Kecamatan Bojongsari; Cinangka, Kedaung, Sawangan, Pengasinan, Bedahan, dan Pasir Putih di Kecamatan Sawangan; serta Meruyung, Grogol di Kecamatan Limo, dan Rangkapan Jaya serta Rangkapan Jaya Baru di Kecamatan Pancoran Mas.

Kawasan-kawasan ini ditetapkan untuk mengoptimalkan potensi lokal dalam produksi pangan dan hortikultura, menyediakan kebutuhan masyarakat akan bahan pangan dan produk hortikultura, memperkuat ketahanan pangan, serta mendorong pengembangan pertanian yang berkelanjutan.

Kawasan Perikanan

Kawasan perikanan, khususnya untuk kegiatan budi daya, ditentukan seluas sekitar 15 hektar dan terlokasi di beberapa kelurahan di Kecamatan Bojongsari dan Sawangan. Rincian lokasinya adalah sebagai berikut:

- a. Kecamatan Bojongsari: Kelurahan Bojongsari, Kelurahan Bojongsari Baru, Kelurahan Curug, Kelurahan Duren Mekar,
- b. Di Kecamatan Sawangan: Kelurahan Pengasinan, Kelurahan Sawangan Baru.

Area ini diarahkan untuk mengembangkan sektor perikanan budi daya, yang mencakup kegiatan pemeliharaan dan produksi ikan serta biota air lainnya. Dengan memanfaatkan potensi sumber daya air yang ada, kawasan ini ditujukan untuk meningkatkan produksi perikanan, mendukung kebutuhan pangan lokal, dan memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat.

Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri diatur untuk memiliki luas sekitar 341 hektar, mencakup berbagai kelurahan di beberapa kecamatan, dengan tujuan utama untuk mengembangkan aktivitas industri. Berikut adalah daftar kelurahan dan kecamatan di mana kawasan industri ini berada:

- Kecamatan Bojongsari: Kelurahan Serua
- Kecamatan Sawangan: Kelurahan Kedaung
- Kecamatan Limo: Kelurahan Limo
- Kecamatan Cimanggis: Kelurahan Tugu, Kelurahan Mekarsari, Kelurahan Cisalak Pasar, Kelurahan Curug Pasar
- Kecamatan Tapos: Kelurahan Sukamaju Baru, Kelurahan Cilangkap, Kelurahan Cimpaeun
- Kecamatan Cilodong: Kelurahan Cilodong, Kelurahan Sukamaju
- Kecamatan Sukmajaya: Kelurahan Sukmajaya, Kelurahan Abadijaya

Kawasan ini didesain untuk menjadi pusat kegiatan industri, mendukung pertumbuhan ekonomi regional melalui peningkatan produksi, inovasi, dan penciptaan lapangan kerja. Pengembangan kawasan industri di lokasi-lokasi ini bertujuan untuk menyediakan infrastruktur yang memadai bagi berbagai jenis industri, baik skala kecil maupun besar, serta untuk memfasilitasi hubungan yang efisien dengan jaringan distribusi dan pemasaran.

Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman direncanakan memiliki luas sekitar 16.015 hektar, terbagi menjadi dua kategori utama:

1. Kawasan Perumahan:

Kawasan ini mencakup area perumahan yang tersebar di seluruh kelurahan. Penyediaan kawasan perumahan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi penduduk, dengan berbagai tipe hunian yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan ekonomi masyarakat setempat.

2. Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial:

Kawasan ini mencakup fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, pusat perbelanjaan, taman, dan fasilitas sosial lainnya yang mendukung kehidupan komunal. Kawasan fasilitas umum dan sosial ini terdapat di beberapa kelurahan, termasuk Kukusan dan Pondok Cina di Kecamatan Beji, Cisalak di Kecamatan Sukmajaya, serta Pasir Gunung Selatan dan Tugu di Kecamatan Cimanggis, dan Kemiri Muka di Kecamatan Beji.

Mekanisme pengembangan, penyediaan, dan pengelolaan perumahan serta kawasan fasilitas umum dan sosial akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota, guna memastikan terciptanya lingkungan permukiman yang layak, nyaman, dan berkelanjutan.

Ini mencakup perencanaan yang matang untuk memastikan aksesibilitas, ketersediaan layanan dasar, dan integrasi dengan infrastruktur kota secara keseluruhan.

Kawasan Perdagangan dan Jasa

Kawasan perdagangan dan jasa yang direncanakan mempunyai luas sekitar 1.495 hektar dan mencakup berbagai kelurahan di beberapa kecamatan, diantaranya:

- Kecamatan Beji: Kelurahan Beji, Kelurahan Beji Timur, Kelurahan Kemiri Muka, Kelurahan Pondok Cina, Kelurahan Kukusan, Kelurahan Tanah Baru.
- Kecamatan Pancoran Mas: Kelurahan Pancoran Mas, Kelurahan Depok, Kelurahan Depok Jaya, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kelurahan Mampang.
- Kecamatan Cipayung: Kelurahan Ratu Jaya, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kelurahan Pondok Jaya.
- Kecamatan Sukmajaya: Kelurahan Sukmajaya, Kelurahan Mekarjaya, Kelurahan Baktijaya, Kelurahan Abadijaya, Kelurahan Tirtajaya, Kelurahan Cisalak.
- Kecamatan Cilodong: Kelurahan Sukamaju, Kelurahan Cilodong, Kelurahan Kalibaru, Kelurahan Kalimulya, Kelurahan Jatimulya.
- Kecamatan Limo: Kelurahan Limo, Kelurahan Meruyung, Kelurahan Grogol, Kelurahan Krukut.
- Kecamatan Cinere: Kelurahan Cinere, Kelurahan Gandul, Kelurahan Pangkalan Jati, Kelurahan Pangkalan Jati Baru.
- Kecamatan Cimanggis: Kelurahan Cisalak Pasar, Kelurahan Mekarsari, Kelurahan Tugu, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kelurahan Harjamukti, Kelurahan Curug.
- Kecamatan Tapos: Kelurahan Tapos, Kelurahan Leuwinanggung, Kelurahan Sukatani, Kelurahan Sukamaju Baru, Kelurahan Jatijajar, Kelurahan Cilangkap, Kelurahan Cimpaeun.
- Kecamatan Sawangan: Kelurahan Sawangan, Kelurahan Kedaung, Kelurahan Cinangka, Kelurahan Sawangan Baru, Kelurahan Pengasinan, Kelurahan Pasir Putih.
- Kecamatan Bojongsari: Kelurahan Bojongsari, Kelurahan Bojongsari Baru, Kelurahan Serua, Kelurahan Pondok Petir, Kelurahan Curug, Kelurahan Duren Mekar, Kelurahan Duren Seribu.

Kawasan ini diarahkan untuk mendukung kegiatan perdagangan dan jasa, berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan berbagai produk dan layanan.

Kawasan Perkantoran

Kawasan perkantoran yang direncanakan, khususnya untuk perkantoran pemerintah, memiliki luas sekitar 19 hektar. Area ini terletak di dua kelurahan yaitu Kelurahan Depok di Kecamatan Pancoran Mas dan Kelurahan Kalimulya di Kecamatan Cilodong.

Perencanaan ini menetapkan lokasi-lokasi sebagai pusat aktivitas administrasi dan layanan pemerintah, dengan tujuan untuk memfasilitasi penyediaan layanan publik yang efisien dan efektif kepada masyarakat. Kawasan ini diharapkan dapat mendukung kegiatan operasional pemerintah dan menjadi titik sentral bagi berbagai kegiatan administratif dan pelayanan masyarakat.

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan pertahanan dan keamanan direncanakan memiliki luas sekitar 209 hektar dan terlokasi di beberapa kawasan strategis, yaitu:

- Kawasan Pendidikan dan Latihan Brigade Mobil/BRIMOB: Berada di Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis. Tempat ini digunakan untuk kegiatan pendidikan dan latihan pasukan BRIMOB.
- Kawasan Divisi I Komando Strategi Angkatan Darat/KOSTRAD: Terletak di Kelurahan Cilodong, Kecamatan Cilodong. Kawasan ini merupakan pusat aktivitas Divisi I KOSTRAD, yang merupakan salah satu elemen utama dalam struktur pertahanan negara.
- Brigif - 17/Kostrad: Juga berada di Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, merupakan bagian dari kekuatan strategis TNI AD dalam struktur KOSTRAD.
- Satsikmil Den Mabasad: Terletak di Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, digunakan untuk kegiatan pendukung dan administrasi militer TNI AD.
- Kawasan Sat Radar 207 Angkatan Udara Republik Indonesia/AURI: Terdapat di Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, fokus pada pengoperasian dan pemeliharaan sistem radar untuk kebutuhan pertahanan udara negara.

Kawasan ini penting untuk mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan negara, menyediakan infrastruktur yang memadai untuk kegiatan militer, dan memastikan kesiapsiagaan dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional.

Kawasan Transportasi

Kawasan transportasi yang direncanakan, dengan luas sekitar 6 hektar, secara khusus terletak di Kawasan Terminal Jatijajar, Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos. Area ini ditujukan untuk mengembangkan infrastruktur transportasi yang memadai, melayani kebutuhan mobilitas penduduk dan mendukung efisiensi pergerakan barang serta jasa di wilayah tersebut. Terminal Jatijajar merupakan terminal tipe A yang merupakan infrastruktur penting dalam jaringan transportasi di Kota Depok, yang memfasilitasi akses ke berbagai wilayah di dalam kota, antar kota dalam provinsi, dan antar kota antar provinsi

2.7.3. Kawasan Strategis Daerah

Kawasan Strategis Kota (KSK) di Depok merupakan area yang strategis dalam perencanaan dan pengembangan kota, di mana penataan ruangnya mendapatkan prioritas

tinggi karena peran krusial yang dimilikinya dalam mendukung dan memajukan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan di kota tersebut. KSK ini mencakup kawasan yang berpotensi besar untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi lokal, seperti pusat perdagangan, industri, dan bisnis yang menjadi lokomotif aktivitas ekonomi di Depok.

Dari perspektif sosial, KSK berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum yang memadai, sehingga mendukung pembangunan manusia yang holistik. Budaya juga menjadi pertimbangan penting dalam penataan KSK, di mana kawasan ini dapat menjadi pusat pelestarian dan promosi warisan budaya lokal, memperkuat identitas kota, dan mendorong pariwisata budaya.

Sementara itu, dari segi lingkungan, KSK di Depok dirancang untuk mengintegrasikan aspek keberlanjutan, seperti penghijauan, konservasi sumber daya alam, dan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. Ini mencakup pengembangan ruang terbuka hijau, kawasan konservasi, dan inisiatif ramah lingkungan lainnya yang mendukung keseimbangan ekologis dan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, KSK di Kota Depok diarahkan untuk menciptakan sinergi antara pembangunan ekonomi, kemajuan sosial, pelestarian budaya, dan kelestarian lingkungan, sehingga mampu mendorong transformasi Depok.

Kawasan strategis kota Depok difokuskan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menetapkan beberapa area utama. Arahannya pengembangan dalam konteks Kota Depok mencakup pengembangan kawasan-kawasan strategis seperti Koridor Margonda, Simpang Bojongsari, Terminal Jatijajar, dan Stasiun Citayam, dengan fokus utama pada integrasi fungsi dan peningkatan infrastruktur. Detail arahan pengembangan untuk masing-masing kawasan dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 2. 21 Kawasan Strategis Kota Depok

No.	Kawasan Strategis	Fungsi	Arahan Pengembangan
1.	Kawasan Koridor Margonda	<ul style="list-style-type: none"> Berfungsi sebagai <i>Center Business District</i> (CBD), mencakup Kelurahan Pondok Cina, Kukusan, Kemiri Muka, Beji, Beji Timur, dan Tanah Baru di Kecamatan Beji, serta Kelurahan Depok dan Depok Jaya di Kecamatan Pancoran Mas. 	<ul style="list-style-type: none"> Integrasi antara fungsi hunian dengan fasilitas penunjang untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kehidupan sehari-hari. Integrasi tempat kerja dengan fasilitas pendukung untuk memfasilitasi kebutuhan profesional dan bisnis. Integrasi area rekreasi dan wisata dengan fasilitas

No.	Kawasan Strategis	Fungsi	Arahan Pengembangan
		<ul style="list-style-type: none"> Kawasan ini menjadi pusat kegiatan bisnis, perdagangan, dan layanan, berperan vital dalam perekonomian kota dengan keberadaan mal, hotel, kantor, dan institusi pendidikan. 	<p>penunjang, memudahkan akses dan meningkatkan pengalaman pengunjung.</p>
2.	Kawasan Pertigaan Simpang Bojongsari	<ul style="list-style-type: none"> Diidentifikasi sebagai <i>Tourism and Recreation Center</i>, meliputi Kelurahan Pondok Petir, Serua di Kecamatan Bojongsari, Kedaung, Cinangka di Kecamatan Sawangan, serta Kelurahan Curug, Bojongsari Baru, Bojongsari di Kecamatan Bojongsari, dan Sawangan dan Sawangan Baru di Kecamatan Sawangan. Kawasan ini direncanakan untuk pengembangan pariwisata dan rekreasi yang dapat meningkatkan kunjungan dan aktivitas ekonomi lokal. 	<ul style="list-style-type: none"> Integrasi pusat perbelanjaan dengan titik transit, mendukung aksesibilitas dan mobilitas pejalan kaki. Pengembangan <i>community mall</i> yang bersinergi dengan usaha lokal, mendukung ekonomi masyarakat. Pemeliharaan prasarana jalan dan pengembangan infrastruktur hijau untuk mendukung keberlanjutan lingkungan. Penyediaan jalur sepeda dan fasilitas pendukung lain, meningkatkan opsi transportasi ramah lingkungan. Pembangunan Terminal Tipe C yang terjangkau bagi pejalan kaki, meningkatkan efisiensi dan kenyamanan transportasi publik.
3.	Kawasan Terminal Jatijajar	<ul style="list-style-type: none"> Difungsikan sebagai <i>Smart Mobility (Multi-Mode System)</i>, mencakup Kelurahan Cimpaeun, Cilangkap, Jatijajar, Tapos, dan Leuwinanggung di Kecamatan Tapos. Terminal ini diharapkan menjadi pusat transportasi multimoda yang mendukung konektivitas dan mobilitas yang efisien di kota Depok dan area sekitarnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Integrasi berbagai kegiatan dan pusat aktivitas ke titik transit, menciptakan kawasan yang dinamis dan terkoneksi. Densifikasi aktivitas di sekitar kawasan terminal untuk meningkatkan kepadatan dan efisiensi penggunaan lahan. Pengembangan layanan transportasi publik yang didukung sarana prasarana lengkap. Peningkatan kualitas jalan dan trotoar, mendukung aksesibilitas dan mobilitas di kawasan. Adopsi pendekatan <i>green development</i> untuk infrastruktur, menjamin keberlanjutan lingkungan.

No.	Kawasan Strategis	Fungsi	Arahan Pengembangan
4.	Kawasan Stasiun Citayam	<ul style="list-style-type: none"> Bertindak sebagai <i>Green Economy Center</i>, termasuk Kelurahan Cipayung, Cipayung Jaya, Ratu Jaya, Pondok Jaya, dan Bojong Pondok Terong di Kecamatan Cipayung. Kawasan ini ditargetkan untuk mengembangkan ekonomi hijau melalui inisiatif berkelanjutan dan ramah lingkungan, yang mendukung konservasi sumber daya dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> Integrasi kegiatan dengan sarana dan prasarana sub wilayah, menciptakan ekosistem yang terkoordinasi. Meningkatkan konektivitas kendaraan dan pejalan kaki, memastikan akses yang mudah dan aman. Penyediaan transportasi publik yang terjangkau, efisien, dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang terintegrasi, mendukung fungsi kawasan secara keseluruhan. Pengembangan fasilitas <i>mix-use</i> yang terintegrasi, mendukung diversifikasi penggunaan dan fungsi lahan.

Dengan pendekatan ini, Kota Depok bertujuan untuk menciptakan kawasan yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi tetapi juga meningkatkan kualitas hidup, keberlanjutan lingkungan, dan integrasi sosial bagi penduduk Kota Depok.



Permasalahan dan Isu Strategis

Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kota Depok

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan merupakan langkah awal dalam proses perumusan kebijakan pembangunan. Proses ini berguna untuk mengenali, mendalami dan sekaligus merumuskan permasalahan perkotaan secara mendasar dan permasalahan yang terjadi di masyarakat masyarakat. Dengan merumuskan permasalahan, sumber daya kota dapat dialokasikan secara efektif dan solutif dalam menjawab akar masalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu identifikasi permasalahan juga berguna untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan secara fokus dan tepat sasaran. Dalam dokumen ini, identifikasi permasalahan pembangunan Kota Depok akan diuraikan dalam beberapa aspek: geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, dan pelayanan umum.

3.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Gambar 3. 1 Permasalahan Geografi Kota Depok



Sumber: Hasil analisis Bappeda Kota Depok, 2024

Geografi

Permasalahan pada aspek geografi meliputi tingkat kerawanan bencana, kualitas lingkungan hidup, ruang terbuka hijau, pengelolaan sampah integrasi tata ruang dan pembangunan kawasan Jabodetabekjur.

Masih tingginya tingkat kerawanan banjir dan bencana alam lainnya. Wilayah Kota Depok memiliki potensi rawan terhadap beberapa jenis bencana, seperti banjir dan longsor. Daerah yang rentan terhadap banjir mencakup pemukiman di dataran rendah yang tersebar di seluruh wilayah Kota Depok. Faktor penyebab banjir meliputi tingginya durasi dan intensitas curah hujan yang juga dipengaruhi oleh perubahan iklim, meluapnya sungai karena saluran kecil dan kapasitas aliran yang tidak memadai, serta sistem drainase yang kurang optimal. Sementara daerah rawan longsor terletak di sepanjang Sungai Ciliwung, Sungai Pesanggrahan, dan Situ Pedongkelan.

Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2022, Kota Depok mengalami 42 kejadian bencana alam, termasuk banjir, longsor, angin puting beliung, kebakaran, dan gempa bumi. Kota Depok, dengan skor Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) sebesar 76,53 menurut BNPB (2022), termasuk dalam kategori daerah dengan tingkat risiko bencana sedang. Hal ini menunjukkan potensi bencana yang cukup tinggi sehingga diperlukan upaya penanggulangan yang lebih baik untuk mengurangi dampak bencana alam terhadap masyarakat dan infrastruktur kota. Bencana alam yang terjadi di Kota Depok tidak hanya menimbulkan dampak fisik dan materiil, tetapi juga dampak psikologis dan sosial bagi masyarakat yang terdampak. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif, mitigasi dan memperkuat manajemen *disaster* untuk mengurangi risiko bencana alam di Kota Depok.

Kualitas lingkungan hidup masih relatif rendah. Meningkatnya pencemaran air, udara, dan tanah menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan di Kota Depok. Pencemaran air terutama disebabkan oleh tingginya volume air limbah yang dibuang ke badan air dari berbagai aktivitas masyarakat dan industri, sehingga menurunkan kualitas air dan mengancam kesehatan masyarakat. Masih rendahnya akses aman sanitasi dan sumber air bersih yang masih mengandalkan air tanah, khususnya pada kawasan pemukiman yang padat, berkontribusi pada bertambahnya luas pemukiman kumuh. Selain itu, kualitas udara di Kota Depok kadang-kadang memburuk akibat polusi yang berasal dari berbagai sumber, terutama emisi kendaraan bermotor.

Minimnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti keterbatasan lahan, alih fungsi lahan dan urbanisasi serta belum optimalnya keterlibatan sektor swasta dan partisipasi masyarakat. Ruang Terbuka Hijau (RTH) memegang peran utama dalam memperbaiki kualitas hidup dan menjaga keseimbangan ekologis kota. RTH tidak hanya menjadi tempat untuk rekreasi dan olahraga bagi warga, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan perkotaan, mengurangi polusi udara, memperbaiki kualitas udara, serta mengatur tata air dan mitigasi banjir.

Jika dilihat dari pasal 29 ayat 2, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota, dengan rincian 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Akan tetapi hal ini masih menjadi tantangan di Kota Depok, dimana capaian terhadap target 20% RTH publik belum terpenuhi. Luas RTH di Kota Depok menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun akibat meningkatnya pembangunan kawasan perumahan. Implementasi dalam penyediaan RTH juga seringkali menghadapi kendala terkait pembebasan lahan. Selain itu, terdapat banyak lahan di Kota Depok yang statusnya lahan tidur dengan kepemilikan swasta atau pribadi. Perencanaan dan implementasi tata ruang yang cermat dan ketat sesuai dengan regulasi yang ada, diperlukan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan, menjaga daya dukung lahan dan memastikan pertumbuhan kota yang terkendali. Selain itu, sektor swasta khususnya sektor perumahan juga perlu didorong untuk berkontribusi dalam pengembangan RTH.

Pengelolaan sampah yang belum optimal berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Peningkatan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi berakibat pada peningkatan laju timbulan sampah. Total produksi sampah di Kota Depok mencapai 1.260 ton per hari, dengan rata-rata setiap warga menghasilkan 0,59 kilogram sampah per hari.

Saat ini, Kota Depok masih menerapkan sistem *open dumping* dimana sampah hanya ditampung di satu tempat pembuangan akhir terbuka, belum menerapkan *controlled landfill* (sampah dipadatkan) atau *sanitary landfill* (sampah diuruk). Saat ini, ketinggian gunung sampah di TPA Cipayung sudah mencapai 30 meter, sementara batas tinggi maksimal adalah 10 meter. Hal ini menunjukkan bahwa TPA Cipayung telah kelebihan muatan (*overload*). Jumlah sampah yang terus meningkat tidak seimbang dengan ketersediaan dan kapasitas tempat pembuangan akhir. TPA Cipayung juga menjadi masalah sosial yang mengganggu kenyamanan masyarakat dan kesehatan lingkungan.

Berbagai permasalahan lainnya seperti fasilitas daur ulang, pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan kawasan belum memadai sehingga pengelolaan sampah di Kota Depok belum terpadu secara merata dari hulu ke hilir.

Belum terintegrasinya tata ruang dan pembangunan Kawasan Jabodetabekjur

Kawasan aglomerasi adalah kawasan yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi sebagai satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional berskala global. Dengan demikian, terdapat hubungan timbal balik yang saling membutuhkan antara DKJ sebagai kota global dengan wilayah lainnya di Kawasan Jabodetabekjur. Integrasi kebijakan tata ruang kawasan aglomerasi

Jabodetabekjur dan implementasinya diperlukan untuk menyinkronkan dan menyelaraskan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan pada kawasan.

Wilayah administrasi yang tergabung dalam kawasan Jabodetabekjur menghadapi permasalahan perkotaan yang sama, seperti banjir, kepadatan lalu lintas, polusi, dan persampahan. Namun saat ini terdapat kesenjangan yang sangat besar antara DKJ dengan wilayah lainnya di Kawasan Jabodetabekjur. Hal ini tergambar antara lain dari besarnya kesenjangan fiskal dan ketimpangan ketersediaan infrastruktur. Layanan transportasi yang belum terintegrasi antar wilayah, khususnya antara DKJ dan wilayah sekitarnya, menjadi salah satu penyebab tingginya angka kemacetan. Hasil survey Komuter Jabodetabek 2023 menunjukkan setiap harinya terdapat 4,4 juta komuter di Jabodetabek. Dari jumlah tersebut 79 persennya menggunakan kendaraan pribadi. Di Kota Depok sendiri, terdapat 485 ribu orang penduduk yang berkegiatan di luar kota Depok, dimana 422.920 orang di antaranya adalah pekerja.

Penyediaan air bersihpun masih diwarnai dengan “perebutan” hak atas izin pemanfaatan air permukaan lintas provinsi seperti Sungai Ciliwung, Sungai Angke, dan Sungai Pesanggrahan. Pencegahan dan penanganan banjir yang harus dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga ke hilir tidak dapat dinafikan. Namun peran wilayah hulu dan tengah DAS dalam pencegahan banjir di DKJ belum diimbangi dengan insentif pengendalian ruang dalam konteks kawasan. Untuk menyelesaikan permasalahan perkotaan di Kawasan diperlukan sinkronisasi dan integrasi mulai tahap perencanaan hingga implementasi yang pada gilirannya akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas ekonomi, kualitas hidup masyarakat, serta mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Gambar 3. 2 Permasalahan Demografi Kota Depok



Sumber: Hasil analisis Bappeda Kota Depok, 2024

Demografi

Permasalahan aspek demografi mencakup tingginya imigrasi masuk dibandingkan imigrasi keluar dan persebaran penduduk

Tingginya migrasi masuk dibandingkan migrasi keluar Faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi masuk diantaranya posisi Kota Depok yang berbatasan langsung dengan Jakarta, sebagai pusat perekonomian Indonesia sehingga mempengaruhi pesatnya

pertumbuhan Kota Depok sebagai daerah pemukiman. Selain itu, Depok sebagai kota jasa pendidikan, yang dicirikan dengan berdirinya beberapa perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, berpengaruh pada kenaikan jumlah penduduk. Tren perpindahan penduduk dari Jakarta ke Kota Depok juga terjadi akibat program penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta bagi warga yang memiliki KTP dan KK Jakarta namun tidak menetap di Jakarta. Pada tahun 2023, tercatat adalah sebesar 20.59 per 1.000 jiwa penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 21 orang yang masuk ke Kota Depok dari 1.000 jiwa penduduk. Sedangkan Angka migrasi keluar di Kota Depok pada tahun 2023 sebesar 15,09 per 1.000 jiwa penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 15 orang yang keluar Kota Depok dari 1.000 jiwa penduduk. Beberapa kecamatan juga menunjukkan angka migrasi neto positif seperti di Kecamatan Beji, Pancoran Mas, Cipayang, Cilodong, Limo, Tapos, Sawangan, dan Bojongsari. Di antara kecamatan-kecamatan tersebut, Kecamatan Sawangan memiliki angka migrasi neto positif tertinggi sebesar 16,77 per 1.000 jiwa penduduk, menunjukkan bahwa Kecamatan Sawangan mengalami peningkatan jumlah penduduk yang signifikan dari migrasi masuk dibandingkan migrasi keluar.

Tingginya angka migrasi masuk ke Kota Depok ini membawa berbagai implikasi bagi Kota Depok, termasuk meningkatnya kebutuhan akan infrastruktur dan layanan publik seperti transportasi, pendidikan, kesehatan dan keterbatasan lapangan pekerjaan. Selain itu, tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan juga semakin besar sehingga menuntut upaya perencanaan dan pengelolaan kota yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Persebaran penduduk yang belum merata. Hal ini tercermin dari variasi distribusi kepadatan penduduk di 11 kecamatan yang ada di Kota Depok. Kecamatan Cipayang mencatat kepadatan tertinggi dengan 16.265 orang per kilometer persegi. Sementara itu, Kecamatan Sawangan dan Bojongsari memiliki kepadatan terendah, yaitu sebesar 7.563 orang per kilometer persegi. Kondisi ini dapat menimbulkan beberapa implikasi yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dan pembangunan kota, termasuk kesenjangan akses terhadap fasilitas umum, perbedaan kualitas hidup antar wilayah, serta potensi masalah sosial dan tekanan lingkungan di wilayah yang lebih padat.

3.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Gambar 3. 3 Permasalahan Kesejahteraan Ekonomi Kota Depok



Sumber: Hasil analisis Bappeda Kota Depok, 2024

Kesejahteraan Ekonomi

Permasalahan kesejahteraan masyarakat dalam aspek ekonomi meliputi beberapa isu seperti biaya hidup, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi.

Tingginya Biaya Hidup Masyarakat. Hal ini terlihat dari Hasil Survei Biaya Hidup Tahun 2022 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). BPS menempatkan Kota Depok sebagai salah satu dari 25 kota dengan biaya hidup tertinggi di Indonesia dan berada di peringkat keempat kota dengan biaya hidup tertinggi setelah Jakarta, Surabaya, dan Bekasi. Hal ini diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran per kapita di beberapa wilayah. Hasil Survei BPS tersebut menunjukkan total rata-rata pengeluaran per kapita di Kota Depok adalah sebesar Rp 3.424.560. Total tersebut meliputi pengeluaran untuk konsumsi sebesar Rp2.883.035 dan biaya non konsumsi Rp591.525. Sedangkan total rata-rata pengeluaran rumah tangganya adalah sebesar Rp 13.355.786. Total biaya tersebut terdiri dari kebutuhan makanan untuk seluruh anggota keluarga sebesar Rp11.048.838 dan non konsumsi Rp2.306.946. Tingginya biaya hidup ini menjadi masalah yang harus menjadi perhatian dan perlu dilakukan tindakan strategis untuk memastikan biaya hidup yang terjangkau bagi seluruh warga.

Tingkat Pengangguran yang masih tinggi. Hal ini disebabkan oleh *mismatch* antara *supply* dan *demand* dalam pasar tenaga kerja. Pertumbuhan angkatan kerja produktif tidak seimbang dengan permintaan pasar kerja. Kota Depok telah memasuki masa bonus demografi di mana *dependency ratio* berada pada level yang rendah. Namun demikian, peningkatan jumlah angkatan kerja belum diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Di sisi lain, kualifikasi yang diharapkan oleh dunia usaha atas tenaga kerja belum

sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki pencari kerja. Mayoritas pengangguran di Kota Depok tahun 2023 adalah lulusan SMA/SMK, yaitu sebesar 53,49% dari total pengangguran.

Salah satu penyebab *mismatch* ini adalah kesulitan dalam pengelolaan SMA/SMK karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pengelolaannya diselenggarakan oleh pemerintah provinsi. Rentang kendali atas jarak yang terlalu jauh antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Depok, serta dinamika masyarakat urban Kota Depok yang tinggi, menjadikan pengaturan tersebut tidak efektif dan tidak efisien, khususnya berkaitan dengan penyesuaian peserta didik, kurikulum yang berorientasi pasar kerja, hingga keterhubungan antara dunia pendidikan dan dunia usaha-dunia industri (DUDI). Secara kewilayahan, saat ini tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Depok per tahun 2023 sebesar 6,97% lebih rendah dibandingkan dengan TPT Provinsi Jawa Barat yang mencatatkan angka 7,44%. Namun demikian, angka ini masih lebih tinggi apabila dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 5,32%.

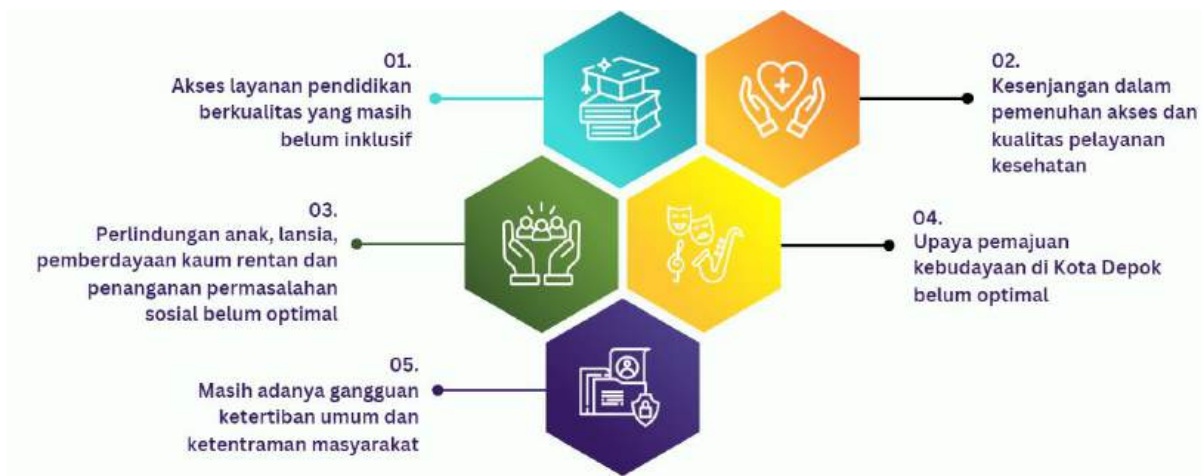
Ketimpangan ekonomi yang semakin melebar. Meskipun kemajuan ekonomi Kota Depok telah tumbuh pesat sejak Kota Depok menjadi daerah otonom di tahun 1999, namun kesejahteraan masyarakat belum terdistribusikan secara merata. Di satu sisi, terdapat individu-individu terutama kelompok menengah keatas yang terus meningkat, sedangkan di sisi lain banyak diantara warga yang masih dalam kategori miskin. Kesenjangan diantara strata sosial berpotensi menimbulkan konflik sosial dan menghambat kemajuan ekonomi secara keseluruhan. Pada tahun 2023, ketimpangan pendapatan yang diukur dengan Indeks Gini di Kota Depok tercatat sebesar 0,402 dan masuk dalam kategori ketimpangan sedang. Bila dibandingkan dengan Indeks Gini pada tahun 2020 (0,344), 2021 (0,367) dan 2022 (0,394) menurut data BPS, maka Indeks Gini Kota Depok mengalami kenaikan pada setiap tahun.

Selama tahun 2013 hingga 2022, Kota Depok mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, dengan angka pertumbuhan selalu melebihi 6% dari tahun 2013 hingga 2019, melebihi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat dan nasional. Namun, pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kota Depok mengalami penurunan drastis menjadi -1,92% akibat dampak pandemi COVID-19, sejalan dengan kondisi mayoritas kota di Indonesia yang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Depok mulai naik kembali dengan angka 3,76%, yang kemudian meningkat menjadi 5,24% pada tahun 2022.

Namun demikian, tingginya pertumbuhan ekonomi Kota Depok selama rentang waktu tersebut masih diiringi oleh ketimpangan ekonomi, ditandai dengan terus meningkatnya angka Indeks Gini. Hal ini mengindikasikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang

tinggi cenderung dinikmati oleh golongan ekonomi menengah ke atas, atau belum tersebar merata di semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan di Kota Depok perlu memprioritaskan pembangunan yang lebih inklusif, dimana seluruh komponen masyarakat dapat merasakan manfaat positif dari pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh.

Gambar 3. 4 Permasalahan Kesejahteraan Sosial Budaya Kota Depok



Sumber: Hasil analisis Bappeda Kota Depok, 2024

Kesejahteraan Sosial Budaya

Permasalahan kesejahteraan masyarakat dalam aspek kesejahteraan sosial budaya meliputi beberapa isu: akses dan kualitas layanan pendidikan, akses dan kualitas layanan kesehatan, perlindungan sosial bagi anak dan lansia, pemajuan kebudayaan, serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Akses layanan pendidikan berkualitas yang masih belum inklusif. Terbatasnya kapasitas daya tampung sekolah negeri di tingkat SMP, SMA, dan SMK menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh Kota Depok. Pada tahun ajaran 2022-2023, SD Negeri (SDN) dan swasta Kota Depok meluluskan 34.000 orang. Namun jumlah ini tidak sebanding dengan daya tampung di SMP negeri yang ada di Kota Depok. Kapasitas sekolah negeri yang tidak memadai terlihat dari jumlahnya yang terbatas dan menyerupai piramida yaitu semakin tinggi jenjang sekolah, semakin sedikit kapasitasnya. Saat ini, di Kota Depok terdapat 214 SD Negeri, 34 SMP Negeri, 15 SMA Negeri, dan hanya 4 SMK Negeri.

Salah satu indikator pendidikan yang penting adalah memastikan anak usia sekolah mendapatkan pendidikan formal selama 12 tahun (SD, SMP, dan SMA). Akan tetapi, infrastruktur sarana pembelajaran penunjang pendidikan yang berkualitas belum merata pada seluruh sekolah di Kota Depok, seperti perpustakaan, laboratorium, dan media

pembelajaran lainnya. Beragam permasalahan ini menjadi tantangan yang harus direspon secara terencana, karena saat ini jumlah penduduk usia produktif di Kota Depok yang cukup tinggi belum diimbangi dengan akses dan kualitas pendidikan yang cukup.

Kesenjangan dalam pemenuhan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Penyediaan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu adalah tantangan yang harus dijawab seiring dengan terus meningkatnya jumlah penduduk. Saat ini, pelayanan kesehatan dasar di Kota Depok masih belum merata di seluruh wilayah kelurahan. Jumlah layanan Puskesmas di Depok belum mempertimbangkan antara luas wilayah dengan jumlah penduduk yang dilayani. Dengan jumlah penduduk sebesar 2,14 juta jiwa, saat ini baru tersedia 38 Puskesmas di seluruh Kota Depok.

Beberapa tantangan lain yang dihadapi dalam sektor kesehatan di Kota Depok adalah rasio angka kematian ibu yang masih fluktuatif. Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan maternal. Pada tahun 2019, jumlah kematian ibu mencapai 37 kasus, kemudian mengalami penurunan menjadi 26 kasus pada tahun 2020. Namun, pada tahun 2021, angka kematian ibu naik tajam menjadi 65 kasus, sebelum akhirnya kembali menurun menjadi 24 kasus pada tahun 2022. Fluktuasi ini menunjukkan pentingnya pemantauan dan intervensi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesehatan ibu di Kota Depok.

Selain itu, tingginya tingkat migrasi di Kota Depok menimbulkan implikasi serius terhadap penyebaran penyakit menular seperti DBD, Diare, ISPA, HIV/AIDS, dan TBC. Peningkatan angka kematian bayi selama periode tahun 2020-2022 juga memerlukan evaluasi mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya dan merancang strategi intervensi yang efektif guna mengurangi angka kematian bayi di masa mendatang. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga harus didorong melalui upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif. Dengan permasalahan ini, diperlukan langkah-langkah kolaboratif dan kongkrit untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Perlindungan anak, lansia dan kelompok rentan belum optimal. Masih adanya kasus kekerasan pada anak seperti yang ditunjukkan dalam data kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan dan ditangani oleh Unit Pengelola Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Depok selama periode 2017-2023. Selama tujuh tahun terakhir, kasus kekerasan pada anak mengalami fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2017, terdapat 96 kasus yang dilaporkan. Jumlah ini meningkat pada tahun 2018 menjadi 101 kasus, namun mengalami penurunan pada tahun 2019 dengan 88 kasus. Kemudian, data tahun 2020 menunjukkan peningkatan drastis dengan adanya 121 kasus. Kemudian, pada tahun 2021,

jumlah kasus menurun menjadi 107 kasus. Angka kasus kembali meningkat pada tahun 2022 dengan 138 kasus dan sedikit menurun pada tahun 2023 dengan 132 kasus. Data ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak masih merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian terus-menerus dan strategi pencegahan yang efektif. Karenanya, upaya pencegahan dan perlindungan harus diperluas dan ditingkatkan agar dapat menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak.

Fenomena *aging population* yang ditandai dengan bertambahnya penduduk pada kelompok umur 60 tahun keatas atau pada lanjut usia (lansia), yang akan menimbulkan terjadinya peningkatan kebutuhan layanan kesehatan, ekonomi, dan sosial. Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Tahun 2023, jumlah lansia di Kota Depok sebanyak 156.512 orang dengan rincian laki-laki sebanyak 78.283 orang dan perempuan sebanyak 78.229 orang, Lansia pada umumnya membutuhkan suasana hidup yang nyaman, dikelilingi keluarga, serta merasakan relaksasi dari proses hidupnya. Jika hal tersebut tidak terpenuhi akan terjadi beberapa gangguan pada lansia seperti penyakit baik fisik maupun kejiwaan. Oleh karenanya perlu peningkatan pelayanan kesehatan, ekonomi, sosial dan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas dan kemandirian para lansia.

Kelompok rentan adalah mereka yang memiliki kerentanan dan mengalami keterbatasan fisik, mental, dan sosial sehingga tidak mampu mengakses layanan dasar dan membutuhkan bantuan khusus dari negara atau komunitas lainnya. Kelompok rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Beberapa hak yang harus dimiliki kelompok rentan adalah akses untuk kebutuhan hidup sehari-hari, pekerjaan dan upah yang layak, akses ke pelayanan Kesehatan, kesempatan mengakses Pendidikan, lingkungan hidup yang bersih dan nyaman, akses ke keadilan dan hukum dan fasilitas publik yang tepat guna. Kelompok rentan meliputi penyandang disabilitas, fakir miskin, perempuan, dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS). Berdasarkan data yang dilaporkan, kejadian kekerasan pada perempuan di Kota Depok pada tahun 2020 terdapat 79 kasus, angka ini meningkat pada tahun 2021 yakni sebanyak 99 kasus. Pada Tahun 2022 data kejadian kekerasan pada perempuan melonjak menjadi 119 kasus dan pada tahun 2023 kejadian kekerasan mengalami penurunan menjadi 106 kasus. Data tersebut menunjukkan bahwa perempuan sebagai bagian dari kelompok rentan, masih mengalami kekerasan yang menjadi masalah serius, sehingga memerlukan perhatian dan strategi pencegahan yang efektif. Selain pencegahan, upaya perlindungan, kemudahan terhadap akses pelayanan dasar, ketersediaan fasilitas, bantuan hukum dan rasa keadilan harus terus ditingkatkan agar dapat menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman sehingga kelompok rentan di Kota Depok dapat berinteraksi dengan baik.

Upaya pemajuan kebudayaan di Kota Depok belum optimal. Hal ini terlihat dari banyaknya kawasan cagar budaya yang berpotensi menjadi destinasi wisata namun belum digali secara maksimal. Kota Depok perlu melakukan pendataan ulang terhadap bangunan dan situs bersejarah yang ada untuk memastikan pelestariannya. Banyak cagar budaya yang membutuhkan intervensi nyata secara terintegrasi dan komprehensif. Selain itu, kekayaan warisan kesenian, tradisi dan budaya yang dimiliki masyarakat Kota Depok seperti Gong Sibolong, Rebut Dandang, Tari Topeng Cisalak yang bercirikan budaya Melayu Betawi dan Tari Merak yang bercirikan budaya Sunda, serta warisan budaya nusantara yang ada di Kota Depok juga memerlukan perhatian dalam pelestarian dan promosi. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi daya tarik wisata yang dapat menggerakkan roda perekonomian daerah, memperkuat identitas budaya dan kebanggaan masyarakat, serta mendukung keberlanjutan tradisi dan budaya lokal untuk generasi mendatang.

Tingginya alih fungsi lahan pertanian dan perlunya peningkatan kualitas keamanan pangan dalam pemenuhan ketersediaan pangan yang baik. Tren konsumsi pangan penduduk di Kota Depok bervariasi antar kelompok pangan, namun cenderung mengalami penurunan, kecuali untuk kelompok pangan hewani, gula, sayur dan buah, dan lain-lain. Persentase penurunan terbesar pada kelompok buah/biji berminyak, sedangkan persentase peningkatan terbesar terjadi pada kelompok pangan hewani. Sementara itu, rata-rata pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan penduduk per kapita untuk kelompok padi-padian, umbi-umbian, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan dan kelompok lain-lain mengalami tren penurunan. Sementara itu, sebagai wilayah perkotaan lahan pertanian di Kota Depok semakin berkurang akibat tingginya alih fungsi lahan menjadi kawasan industri, perumahan, dan infrastruktur. Dampaknya ketergantungan pada hasil pertanian pedesaan semakin tinggi. Di sisi lain, dalam aspek ketahanan pangan bahwa selain keterjangkauan dan pemanfaatan pangan di Kota Depok, kuantitas ketersediaan pangan yang memadai belum dapat menjamin kualitas ketersediaan pangan yang baik, oleh karenanya perlu ditingkatkan kualitas keamanan pangan

Masih adanya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Hal ini merupakan masalah serius yang perlu segera ditangani. Bangunan liar yang berdiri di lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum hampir berada di seluruh wilayah kota. Tingkat kriminalitas yang cukup tinggi juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, mengingat posisi Kota Depok sebagai poros Jabodetabek dan merupakan daerah lintasan. Jumlah kasus kejahatan yang dilaporkan di Polres Metro Kota Depok meningkat, pada tahun 2023 dengan 395 kasus sedangkan di tahun 2022 sebanyak 389 kasus. Kasus-kasus tersebut meliputi berbagai jenis kejahatan, termasuk kekerasan, pembunuhan, pencurian, penipuan, penggelapan, dan kasus lainnya. Semua ini menuntut tindakan tegas dan terkoordinasi serta

partisipasi aktif masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh warga Kota Depok.

3.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

Gambar 3. 5 Permasalahan Daya Saing Ekonomi Kota Depok



Sumber: Hasil analisis Bappeda Kota Depok, 2024

Daya Saing Ekonomi

Permasalahan daya saing ekonomi di Kota Depok meliputi pertumbuhan ekonomi, penciptaan wirausaha baru, dan kapasitas dan daya saing IKM/UMKM.

Pertumbuhan ekonomi belum berkualitas. Laju pertumbuhan PDRB Kota Depok cenderung mengalami peningkatan selama 2005-2023. Bahkan, pada periode sebelum pandemi Covid-19, yakni 2005-2019, pertumbuhan ekonomi tercatat di atas 6%, melebihi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) nasional yang berkisar di 5% pada periode yang sama. Namun, pertumbuhan ekonomi yang diperoleh ini belum sepenuhnya mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas karena belum diiringi dengan pemerataan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang optimal.

Penciptaan wirausaha baru belum optimal. Penciptaan wirausaha baru adalah elemen penting dalam memperkuat perekonomian suatu daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Wirausaha baru tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga mendorong inovasi, kreativitas, dan daya saing daerah. Namun, penciptaan wirausaha baru di Kota Depok saat ini belum optimal. Rasio kewirausahaan Kota Depok baru mencatatkan angka 2,18% dan masih berada di bawah rasio kewirausahaan nasional. Upaya untuk mendorong penciptaan wirausaha baru di Kota Depok masih menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya akses terhadap modal, infrastruktur pendukung yang belum memadai, serta kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan peluang bisnis. Rendahnya rasio kewirausahaan juga dilatarbelakangi oleh banyaknya warga yang memilih untuk berwirausaha karena kondisi yang terpaksa akibat tidak berhasil memperoleh pekerjaan di sektor formal. Desain pembinaan, pelatihan dan pendampingan harus dibenahi

jika Kota Depok ingin meningkatkan penciptaan wirausaha baru secara signifikan, termasuk mengoptimalkan upaya peningkatan wirausaha baru yang berasal dari Perempuan Kepala Keluarga (Pekka).

Kapasitas dan daya saing IKM/UMKM masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor yang meliputi permodalan yang terbatas, teknologi yang belum optimal, kendala dalam memenuhi legalitas usaha, serta akses yang terbatas dalam pemasaran. Selain itu, tantangan juga muncul dari kompetensi sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan. Upaya untuk mengatasi kendala-kendala ini menjadi kunci dalam memperkuat kapasitas dan daya saing IKM/UMKM di masa depan agar UMKM dapat optimal berperan sebagai tulang punggung ekonomi lokal dan pilar penting dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan roda ekonomi, serta mendukung distribusi pendapatan yang lebih merata.

Daya Saing Manusia

Gambar 3. 6 Permasalahan Daya Saing Manusia Kota Depok



Sumber: Hasil analisis Bappeda Kota Depok, 2024

Daya saing manusia

Permasalahan daya saing manusia di Kota Depok meliputi pendidikan dan kompetensi tenaga kerja serta *mismatch* pendidikan.

Masih rendahnya pendidikan dan kompetensi tenaga kerja. Pendidikan yang merupakan faktor kunci penyediaan tenaga kerja terampil harus menjadi prioritas untuk meningkatkan daya saing kota ke depan. Sampai saat ini, kualitas tenaga kerja di Kota Depok secara umum masih rendah. Profil angkatan kerja di Depok masih didominasi oleh tenaga kerja lulusan pendidikan menengah ke bawah. Data dari BPS menunjukkan hanya 30% tenaga kerja di Depok yang memiliki pendidikan Diploma/Universitas. Hal ini menyebabkan banyak tenaga kerja yang tidak memiliki pengetahuan dan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja saat ini. Selain itu, pelatihan kerja yang belum optimal juga menjadi kendala dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

Ketika pasar tenaga kerja diisi oleh tenaga kerja yang berpendidikan rendah dan *unskilled*, dunia usaha merasa sulit memberikan nilai kompensasi yang lebih tinggi karena harus ada keseimbangan antara kualitas, produktivitas, dan kompensasi. Hal inilah yang seringkali menjadi alasan bagi pengusaha untuk menekan upah pekerja. Faktor ini juga seringkali menjadi pemicu terjadinya perselisihan hubungan industrial (PHI) berupa benturan antara tenaga kerja dan pengusaha karena masalah pengupahan. Dengan demikian, perbaikan dalam pendidikan, peningkatan kompetensi tenaga kerja, dan optimalisasi pelatihan kerja menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, daya saing, dan kesejahteraan tenaga kerja di Depok.

Mismatch antara lulusan pendidikan dengan dunia kerja Hal ini diindikasikan oleh tingkat pengangguran terbuka yang paling banyak bersumber dari lulusan SMA/SMK sederajat sebesar 53,49%. Angka ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara keterampilan yang diajarkan di sekolah atau pendidikan vokasi dengan yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Kurikulum pendidikan yang belum adaptif dengan kebutuhan pasar kerja menjadi salah satu penyebab utama masalah ini. Pembaruan kurikulum yang lebih responsif terhadap dinamika pasar kerja, serta peningkatan kolaborasi antara institusi pendidikan dan dunia usaha, harus didorong agar siswa memiliki keterampilan yang relevan dan siap bersaing di pasar tenaga kerja yang semakin kompetitif.

Gambar 3. 7 Permasalahan Daya Saing Infrastruktur Kota Depok



Sumber: Hasil analisis Bappeda Kota Depok, 2024

Daya Saing Infrastruktur

Permasalahan daya saing infrastruktur di Kota Depok meliputi pemenuhan infrastruktur dasar dan transportasi publik.

Pemenuhan infrastruktur dasar belum optimal. Pembangunan infrastruktur dasar seperti saluran air, jalan, jembatan, drainase dan penyediaan air minum perpipaan adalah hal yang sangat penting agar sebuah wilayah dapat meningkatkan kualitas hidup penduduknya, memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan produktif. Saat ini, Kota Depok menghadapi berbagai tantangan terkait infrastruktur dasar, termasuk kerusakan jalan yang signifikan, sistem drainase yang tidak

optimal, masalah dalam penyediaan air minum perpipaan, serta masalah pengelolaan air limbah yang belum optimal.

Kota Depok memiliki kewenangan atas jalan sepanjang 1.957 kilometer. Namun, pada tahun 2022, sebanyak 115 kilometer jalan kota masih tercatat dalam kondisi rusak dan 97,98 kilometer mengalami kerusakan berat. Berbagai faktor menyebabkan kondisi ini, termasuk muatan kendaraan yang berlebih, ketidaksesuaian standar pembangunan jalan, kurangnya penerapan teknologi baru dalam pemeliharaan jalan, serta minimnya kegiatan pemeliharaan. Dalam aspek infrastruktur dasar lainnya, cakupan sistem sanitasi di Kota Depok telah mencapai target 99.13%, namun masih ada kekurangan dalam keamanan buangan limbahnya. Sementara cakupan air minum perpipaan dan non-perpipaan juga belum optimal karena rendahnya cakupan pelayanan perpipaan sehingga menyebabkan sebagian besar penduduk kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Masalah lainnya adalah sistem drainase yang belum optimal yang mengakibatkan banjir dan genangan air merendam beberapa ruas jalan.

Transportasi publik yang belum memadai. Transportasi publik memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung mobilitas penduduk dan pertumbuhan kota secara keseluruhan. Dengan penduduk yang terus bertambah, kebutuhan akan sistem transportasi yang efisien dan terintegrasi semakin meningkat. Transportasi publik tidak hanya menjadi sarana untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tetapi juga membantu mengurangi kemacetan, polusi udara, dan kepadatan lalu lintas di jalan raya. Selain itu, transportasi publik yang baik juga memberikan aksesibilitas yang lebih luas bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak memiliki kendaraan pribadi atau tidak mampu menggunakan transportasi pribadi secara reguler. Ketersediaan transportasi publik juga akan memudahkan warga yang berkomuter ke luar kota, khususnya Jakarta. Terlebih, Kota Depok merupakan penyumbang komuter terbesar menuju Jakarta sebanyak 296.000 jiwa atau 14,7 persen dari total komuter (BPS, 2019).

Namun saat ini, salah satu tantangan utama yang justru dihadapi Kota Depok adalah kemacetan lalu lintas yang merupakan dampak dari keterbatasan layanan transportasi umum yang berkualitas. Beberapa daerah yang sering mengalami kemacetan adalah Jalan Margonda Raya, Jalan Raya Sawangan, Jalan Raya Mochtar, Jalan Raya Kartini, Jalan Tanah Baru, dan Jalan Raya Cipayung.

Angkutan kota (angkot) sebagai salah satu angkutan umum yang sudah lama beroperasi di Kota Depok, jumlahnya semakin menyusut. Menurut BPS Kota Depok, pada tahun 2012 terdapat 2.884 angkot, namun pada tahun 2023 hanya terdapat 1.548 angkot yang beroperasi. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari kecenderungan masyarakat untuk memilih

kendaraan pribadi seperti mobil dan sepeda motor daripada memanfaatkan angkutan umum yang dinilai tidak nyaman, tidak tepat waktu, dan tidak terawat dengan baik.

Gambar 3. 8 Permasalahan Daya Saing Iklim Investasi Kota Depok



Sumber: Hasil analisis Bappeda Kota Depok, 2024

Daya Saing Iklim Investasi

Permasalahan daya saing iklim investasi di Kota Depok meliputi kualitas penyajian data dan informasi serta kualitas pelayanan perizinan.

Belum optimalnya kualitas penyajian data dan informasi potensi dan peluang investasi

Hal ini menjadi tantangan dalam meningkatkan daya saing iklim investasi di Kota Depok. Investor potensial membutuhkan data yang akurat, lengkap, dan mudah diakses untuk membuat keputusan yang tepat. Data dan informasi yang disajikan terkadang kurang terperinci sehingga menyulitkan calon investor dalam menilai potensi dan peluang investasi yang sebenarnya. Dibutuhkan upaya serius dalam meningkatkan kualitas penyajian data dan informasi untuk dapat menarik lebih banyak investasi. Dokumen informasi yang akurat dan dokumen perencanaan pendukung investasi seperti *masterplan*, *feasibility study*, dan *business plan*, harus tersedia secara memadai.

Kualitas pelayanan perizinan yang belum optimal. Iklim investasi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kepastian hukum dan regulasi, kondisi demografi, keamanan dan ketertiban masyarakat, serta kemudahan dan kenyamanan investor dalam mengurus proses perizinan. Kualitas pelayanan perizinan yang belum optimal menjadi tantangan yang harus dijawab untuk meningkatkan daya saing iklim investasi di Kota Depok. Pelayanan perizinan belum optimal karena adanya beberapa jenis perizinan yang waktu penyelesaiannya belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), atau sering kali melebihi waktu yang telah ditentukan. Hal ini menciptakan ketidakpastian dan dapat memperlambat proses investasi. Selain itu, belum optimalnya sarana sistem teknologi informasi dalam mendukung perizinan berbasis *online* turut menjadi faktor yang berpengaruh terhadap daya saing iklim investasi. Perbaikan signifikan dalam efisiensi penyelesaian perizinan dan pengembangan sistem yang lebih andal dan *user-friendly* menjadi prioritas untuk dilakukan intervensi.

3.1.4. Aspek Pelayanan Umum

Gambar 3. 9 Permasalahan Pelayanan Umum Kota Depok



Sumber: Hasil analisis Bappeda Kota Depok, 2024

Pelayanan Umum

Tata kelola pemerintahan yang efektif memainkan peran sentral dalam kemajuan dan keberlanjutan Kota Depok. Sebagai kota yang terus berkembang dan memiliki kompleksitas yang semakin meningkat, tata kelola pemerintahan yang efektif adalah kunci dalam menyelaraskan berbagai kepentingan masyarakat, mengelola sumber daya secara optimal, serta menyediakan pelayanan publik secara paripurna. Namun, masih terdapat sejumlah permasalahan dalam penyediaan layanan publik di Kota Depok seperti permasalahan dalam digitalisasi pelayanan publik, penanganan pengaduan masyarakat, SDM yang belum memiliki kapasitas pelayanan dan kurangnya kerja sama dan belum optimalnya efektivitas kerja sama.

Digitalisasi pelayanan publik belum optimal. Meski Kota Depok berhasil meningkatkan capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada tahun 2023 menjadi 3,7 dan memperoleh predikat “Sangat Baik”, digitalisasi layanan pemerintahan di Kota Depok masih menghadapi beberapa tantangan. Pertama, belum meratanya pemahaman Perangkat Daerah dalam implementasi SPBE, yang menyebabkan disparitas dalam penerapan teknologi digital di berbagai sektor pelayanan. Kedua, terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM dalam implementasi SPBE yang menjadi hambatan serius dalam memaksimalkan potensi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Selain itu, belum optimalnya strategi diseminasi atau promosi aplikasi dan layanan seperti Depok Single Window dan SIGAP, mengakibatkan belum optimalnya tingkat *awareness* masyarakat terhadap fungsi dan manfaat layanan tersebut. Dengan demikian perbaikan tata kelola harus terus dilakukan agar Kota Depok dapat mengoptimalkan implementasi *e-government* untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh.

Tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat belum optimal. Penanganan pengaduan dan keluhan masyarakat adalah elemen penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjaga kepercayaan warga terhadap pemerintah. Namun hingga saat

ini, masih terdapat keluhan bahwa sebagian laporan pengaduan dari masyarakat belum ditindaklanjuti secara optimal. Perbaikan serius harus dilaksanakan agar setiap warga dapat dengan mudah mengadukan keluhan atau permasalahan mereka kepada Pemerintah Kota Depok dan mendapatkan tanggapan yang cepat serta solusi yang tepat. Peningkatan transparansi dalam proses penanganan pengaduan serta pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi langkah signifikan untuk mempercepat respons dan memastikan setiap keluhan direspon dengan cepat, tepat dan sesuai kebutuhan.

SDM layanan belum seluruhnya berorientasi pelayanan prima Hal ini menjadi salah satu hal yang menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan publik yang memuaskan bagi masyarakat. Meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, masih banyak petugas pelayanan yang kurang terlatih dan belum memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya pelayanan yang responsif dan proaktif. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi menyeluruh, pengembangan kompetensi SDM dan membangun budaya organisasi yang memprioritaskan pelayanan prima.

Kurangnya kerja sama dan belum optimalnya efektivitas kerja sama. Untuk memastikan keberlanjutan pelayanan dasar, pemenuhan SPM, dan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, Pemerintah Kota Depok telah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi lainnya, Pemerintah kabupaten/kota lain, serta pihak lainnya, dan menandatangani Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerjasama, Nota Kesepakatan, dan Rencana Kerja Tahunan yang masih berlanjut hingga saat ini. Kerjasama-kerjasama tersebut diantaranya adalah:

1. Kerjasama Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum melalui Kegiatan National Urban Water Supply (NUWSP) dengan Kementrian PUPR;
2. Kerjasama di bidang Kualitas Udara, Pembangunan dan pengelolaan ruang terbuka hijau dengan Provinsi DKI Jakarta;
3. Kerjasama di bidang penelitian dan pengembangan pengkajian penerapan teknologi serta invensi teknologi dan inoasi yang terintegrasi di Kota Depok dengan Badan Riset dan Invoasi Nasional;
4. Kerjasama Penyelenggaraan pemerintah, Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah dengan beberapa pemerintah daerah seperti Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Sumedang;
5. Kerjasama di bidang pelayanan publik;
6. Kerjasama di bidang Kesehatan dengan BPJS Kesehatan dan beberapa RS yang ada di Kota Depok dan sekitarnya.
7. Kerjasama di bidang Penanganan Masalah Hukum Bidang Datun dengan Kejaksaan Negeri Depok;

8. Kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat di Kota Depok dengan beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Universitas Pancasila, STT Nurul Fikri, dan lain-lain;
9. Kerjasama di Bidang Seni, Budaya dan Bahasa di Kota Depok;
10. Kerjasama di bidang Pengelolaan Sampah menjadi Sumber Energi Listrik Yang Ramah Lingkungan di Kota Depok;

Kerjasama yang sudah ada saat ini dirasa masih belum optimal dalam pelaksanaannya karena belum seluruh MoU atau Nota Kesepahaman yang ada telah ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama, serta perlu ditingkatkan kerjasama dengan berbagai pihak terutama dalam bidang Pendidikan, perhubungan, komunikasi dan informatika, dan keamanan informasi.

3.1.5 Permasalahan Kota dalam KLHS RPJPD

Isu pembangunan berkelanjutan dalam KLHS RPJPD dirumuskan melalui tahapan penjarangan isu melalui desk study dokumen perencanaan Kota Depok, diskusi dengan internal tim pokja, konsultasi publik dan FGD dengan OPD terkait, serta pembobotan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2016. Dari rangkaian panjang perumusan tersebut dihasilkan tujuh isu prioritas pembangunan berkelanjutan yang mewakili empat pilar utama pembangunan berkelanjutan, yaitu: 1) Pilar ekonomi, 2) Pilar hukum dan tata kelola, 3) Pilar lingkungan, dan 4) Pilar sosial. Ketujuh isu prioritas pembangunan berkelanjutan tersebut adalah:

1. Banjir dan perubahan iklim.
2. Permukiman kumuh
3. Pengelolaan sampah dan pencemaran lingkungan
4. Kemacetan lalu lintas
5. Tingginya pengangguran dan kemiskinan
6. Permasalahan sosial masyarakat
7. Reformasi birokrasi

Berdasarkan analisa keterkaitan (cross cutting) isu prioritas tersebut dengan indikator TPB, diperoleh keterkaitan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Keterkaitan isu prioritas pembangunan berkelanjutan dengan TPB

No.	Isu strategis	Keterkaitan dengan TPB
1	Banjir dan perubahan iklim	TPB 1 ; TPB 6 ; TPB 11 ; TPB 13
2	Belum optimalnya perbaikan permukiman kumuh	TPB 6
3	Belum optimalnya pengelolaan sampah, pencemaran dan perbaikan lingkungan hidup	TPB 6 ; TPB 11 ; TPB 12 ; TPB 15

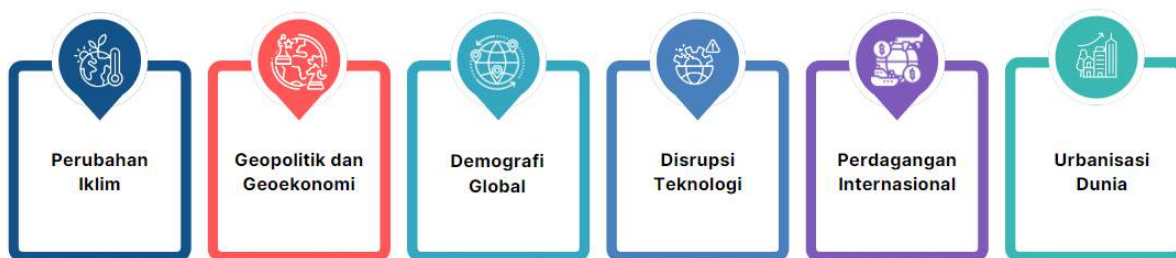
No.	Isu strategis	Keterkaitan dengan TPB
4	Belum optimalnya layanan infrastruktur (kemacetan, lalu lintas, air bersih dan kelayakan sanitasi)	TPB 1 ; TPB 2 ; TPB 3 ; TPB 4 ; TPB 8 ; TPB 9 ; TPB 10
5	Rendahnya kualitas SDM, tingginya pengangguran dan kemiskinan	TPB 1 ; TPB 2 ; TPB 3 ; TPB 4 ; TPB 8 ; TPB 9 ; TPB 10
6	Permasalahan sosial dan ketimpangan masyarakat	TPB 1 ; TPB 4 ; TPB 5 ; TPB 8 ; TPB 10 ; TPB 16
7	Reformasi birokrasi dan penegakan hukum	TPB 1 ; TPB 16 ; TPB 17

Sumber : Bappeda Kota Depok, data diolah

3.2. Isu Sesuai Konteks

3.2.1 Isu Global

Gambar 3. 10 Ringkasan Isu Global



Sumber: Hasil analisis Bappeda Kota Depok, 2024

Perubahan Iklim. Hal ini menjadi salah satu tantangan paling mendesak di abad ke-21, dengan dampak yang dirasakan di seluruh dunia. Peningkatan suhu global, cuaca ekstrem, pencairan es di kutub, dan naiknya permukaan air laut menimbulkan ancaman serius bagi kehidupan manusia, keanekaragaman hayati, dan ekosistem. Tahun 2015-2022 tercatat sebagai delapan tahun terpanas dalam sejarah. Laju kenaikan permukaan air laut juga meningkat dua kali lipat sejak tahun 1993.

Kesadaran dunia akan pentingnya mengatasi perubahan iklim sudah dimulai sejak tahun 1987 dengan munculnya dokumen *Our Common Future*, yang menggarisbawahi pentingnya pembangunan berkelanjutan, termasuk dalam sektor iklim. Sejak itu, dunia telah mengambil berbagai inisiatif untuk mengatasi masalah ini. Kemudian, muncul komitmen lanjutan untuk memonitor progres perubahan iklim per tahunnya dalam bentuk *United Nations Climate Change Conference* atau *Conference of the Parties (COP)* di bawah UNFCCC. Tujuan dari penyelenggaraan COP adalah untuk meninjau progres upaya menekan perubahan iklim dan menjadi forum negosiasi perjanjian iklim internasional.

Indonesia, sebagai salah satu negara yang berkomitmen dalam upaya global ini, telah menetapkan target ambisius. Indonesia berencana mencapai nol emisi karbon (*net zero emission*) pada tahun 2060, menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 31,89% pada tahun

2030, serta mencapai target bauran energi terbarukan sebesar 44% pada tahun 2030. Oleh karena itu, perubahan iklim menjadi isu strategis yang harus mendapat perhatian penuh dalam perencanaan pembangunan kedepan.

Geopolitik dan Geoekonomi. Hal ini merupakan isu yang menciptakan dinamika global yang kompleks dan berpengaruh terhadap stabilitas perekonomian negara-negara di dunia. Konflik yang saat ini berlangsung di kawasan Timur Tengah, Eropa Timur, dan Laut Cina Selatan-Indo Pasifik mempengaruhi stabilitas internasional dan memiliki implikasi secara langsung dan tidak langsung dalam skala global. Ketegangan antara negara-negara besar, seperti persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, serta konflik di berbagai wilayah, mempengaruhi perdagangan, investasi, dan aliansi politik. Dalam jangka panjang, situasi ini akan mendorong deglobalisasi, di mana setiap negara berupaya membangun kemandirian dan ketahanan. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko dari potensi krisis yang dapat menyebar melalui jalur perdagangan, keuangan internasional, dan komoditas dalam rantai pasok global.

Demografi Global. Proyeksi Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan bahwa populasi global akan mencapai 8,5 miliar pada tahun 2030 dan 9,5 miliar pada tahun 2045. Pertumbuhan ini disebabkan oleh penurunan angka kematian dan peningkatan angka harapan hidup saat lahir. Struktur demografi, seperti peningkatan jumlah penduduk usia tua dan tingginya jumlah penduduk usia muda, akan menimbulkan tantangan dalam penyediaan perlindungan sosial dan penciptaan lapangan pekerjaan. Menurut UNDP, dua pertiga populasi dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2050, dengan 95 persen dari pertumbuhan ini terjadi di negara-negara dengan ekonomi berkembang. Penduduk perkotaan di Asia juga diprediksi akan mengalami peningkatan sebesar 1,7 kali lipat.

Disrupsi Teknologi. Hal ini terus mengubah lanskap ekonomi dan sosial global. Inovasi dalam bidang seperti kecerdasan buatan, robotika, dan *internet of things* menimbulkan tantangan besar seperti ketimpangan digital, privasi data, dan penurunan permintaan tenaga kerja dalam jenis-jenis pekerjaan manusia yang dapat digantikan oleh teknologi. Namun, disrupsi teknologi juga menciptakan peluang dan potensi besar dalam berbagai lini kehidupan, termasuk dalam perbaikan tata kelola pemerintahan. Teknologi memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pemerintahan, misalnya melalui penggunaan kecerdasan buatan dan analitik data, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Perdagangan Internasional. Peningkatan jumlah kelas menengah di seluruh dunia akan mengakibatkan peningkatan permintaan produk dan peningkatan perdagangan internasional. Di tengah kompleksitas dinamika ekonomi global, pemerintah daerah

memiliki peran penting dalam memfasilitasi perdagangan internasional, mempromosikan ekspor produk lokal, dan menjaga keberlangsungan hubungan perdagangan dengan mitra luar negeri. Langkah-langkah kebijakan yang proaktif dan inklusif, seperti menyediakan infrastruktur perdagangan yang memadai, memberikan dukungan bagi pelaku usaha lokal untuk meningkatkan daya saing produk, serta membangun jejaring kerja sama internasional, menjadi kunci dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam perdagangan internasional.

3.2.2 Isu Nasional

Gambar 3. 11 Ringkasan Isu Nasional



Sumber: Hasil analisis Bappeda Kota Depok, 2024

Bonus Demografi Indonesia. Bonus Demografi merupakan periode yang menjanjikan untuk dapat mengubah status Indonesia dari negara berpendapatan menengah menjadi negara maju. Dalam kurun waktu sepuluh tahun mendatang, penduduk usia produktif (15-64 tahun) diperkirakan akan menyumbang lebih dari 60 persen dari total jumlah penduduk. Hal ini mengindikasikan bahwa rasio ketergantungan akan semakin rendah, yang artinya beban terhadap penduduk usia produktif akan semakin ringan. Dengan makin besarnya proporsi penduduk yang mampu menghasilkan barang dan jasa, diharapkan nilai tambah yang dihasilkan semakin besar pula. Bonus demografi menjadi modal penting bagi Indonesia untuk menjadi negara maju.

Bonus Demografi Indonesia adalah kesempatan emas yang harus dimanfaatkan dengan baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial. Namun, untuk mengoptimalkan potensi ini, diperlukan investasi yang besar khususnya dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Bila tidak dipersiapkan dengan baik, bonus demografi yang seharusnya menjadi aset berharga dapat berubah menjadi bencana demografi yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Ekonomi Hijau. Pemerintah Indonesia telah menetapkan penerapan ekonomi hijau sebagai prioritas dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan. Dengan memfokuskan pada praktik ekonomi yang ramah lingkungan, Indonesia berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sambil mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Terlebih, Data World Economy Forum menyebutkan, separuh dari total produk domestik bruto (PDB) dunia dihabiskan untuk membiayai perbaikan kerusakan lingkungan akibat kegiatan industri. Penerapan ekonomi hijau tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki kondisi lingkungan, tetapi juga sebagai sumber pertumbuhan baru bagi ekonomi Indonesia. Salah satu cara untuk mencapai ini adalah dengan meningkatkan peluang kerja melalui investasi hijau dan pengembangan produk-produk hijau. Investasi dalam sektor energi terbarukan, pertanian organik, dan teknologi ramah lingkungan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Pengembangan produk-produk hijau juga memberikan peluang untuk meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global yang semakin memperhatikan keberlanjutan.

Konektivitas dan Infrastruktur Dasar. Konektivitas dan infrastruktur dasar memainkan peran penting dalam pengembangan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, pemerintah menempatkan peningkatan konektivitas dan infrastruktur dasar sebagai salah satu prioritas utama dalam rencana pembangunan jangka panjang. Infrastruktur yang baik, seperti jaringan transportasi yang efisien dan akses yang mudah ke sumber daya vital seperti air bersih dan listrik, menjadi fondasi penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Peningkatan konektivitas antar wilayah juga dapat membuka peluang investasi baru, memfasilitasi perdagangan, dan mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah. Selain itu, investasi dalam infrastruktur dasar juga membantu meningkatkan daya saing suatu negara dalam pasar global dengan memperbaiki rantai pasok dan mempercepat distribusi barang.

Perubahan Iklim, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta ketahanan bencana. Perubahan iklim membawa dampak signifikan terhadap ekosistem, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat, seperti kenaikan suhu global, perubahan pola curah hujan, dan peningkatan frekuensi bencana alam yang mengancam sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan. Perubahan iklim juga berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi secara signifikan. Selain itu, degradasi lingkungan akibat deforestasi, urbanisasi, dan pencemaran telah mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan, mengancam kesehatan masyarakat dan mengurangi produktivitas sumber daya alam. Terletak di kawasan cincin api Pasifik, Indonesia juga menghadapi risiko bencana geologis seperti gempa bumi dan tsunami, serta bencana hidrometeorologis seperti banjir dan kekeringan. Komitmen yang kuat dan strategi yang komprehensif diperlukan agar dampak perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan risiko bencana dapat diatasi dengan baik.

Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Desentralisasi dan otonomi daerah menjadi pijakan penting dalam pembangunan Indonesia sejak era reformasi. Melalui desentralisasi, kekuasaan dan tanggung jawab pemerintahan yang semula terpusat dialihkan ke pemerintah daerah, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih responsif dan relevan

dengan kebutuhan lokal. Otonomi daerah memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan kebijakan sesuai dengan karakteristik, potensi, dan tantangan masing-masing wilayah. Hal ini diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan mempercepat pembangunan di tingkat lokal. Namun, beberapa tantangan dalam implementasi desentralisasi dan otonomi daerah perlu menjadi fokus perhatian seperti masalah kapasitas dan keterbatasan sumber daya manusia di tingkat daerah, ketidaksetaraan antar wilayah dalam hal pendapatan dan pelayanan publik, serta komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan diperkirakan akan menurunkan pertumbuhan ekonomi Kota Depok. Untuk melihat dampak perpindahan IKN ini secara teknis dapat dilakukan dengan cara mensimulasikan perekonomian nasional dan masing-masing provinsi dengan skenario perpindahan IKN ini. Salah satu penelitian terbaru yang melakukan analisis ini adalah Yusuf et al., (2023). Dalam penelitian tersebut, diprediksi perpindahan IKN sedikit banyak akan mempengaruhi kondisi Kota Depok sebagai kota penyangga DKI Jakarta. Turunnya pengeluaran pemerintah Pusat di DKI Jakarta dapat mengakibatkan penurunan pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jakarta. Konsekuensinya, belanja masyarakat di Jakarta juga terpengaruh. Sebagai kota penyangga, belanja masyarakat Kota Depok yang bekerja di instansi pemerintah pusat akan mengalami penurunan signifikan. Sementara itu, penurunan belanja pemerintah pusat di Depok akan berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi lokal. Sektor konstruksi, yang seringkali bergantung pada proyek-proyek pemerintah, juga diperkirakan akan terdampak. Akibatnya, PDRB Kota Depok, baik dari belanja masyarakat maupun investasi pemerintah, akan diprediksi mengalami penurunan.

Penelitian tersebut memperkirakan efek negatif perpindahan IKN ke Kalimantan Timur disimulasikan akan menurunkan PDRB DKI Jakarta sekitar 7%. Dengan keterkaitan antara PDRB Kota Depok yang kuat dengan PDRB DKI Jakarta maka efek negatif ini juga akan dirasakan oleh Kota Depok walaupun dengan level yang kemungkinan lebih rendah. Dengan demikian, dalam menghadapi dampak perpindahan Ibu Kota Negara (IKN), Pemerintah Kota Depok perlu mengambil langkah-langkah strategis yang proaktif dan berkesinambungan. Penting bagi Pemerintah Kota Depok untuk mempertimbangkan skenario-skenario yang mungkin terjadi serta dampaknya terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan.

3.2.3 Isu Provinsi Jawa Barat

Gambar 3. 12 Ringkasan Isu Provinsi Jawa Barat



Sumber: Hasil analisis Bappeda Kota Depok, 2024

Green dan Blue Economy serta pembangunan inklusif. *Green dan Blue Economy* merupakan paradigma pembangunan yang menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan ramah lingkungan, baik di daratan (*green*) maupun di perairan (*blue*). Konsep ini tidak hanya mengedepankan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keseimbangan lingkungan dan inklusi sosial. Sedangkan pembangunan inklusif merupakan pembangunan yang tidak hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga mengedepankan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Kualitas dan daya saing sumber daya manusia adalah kunci utama dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya yang mencakup kualifikasi pendidikan dan keterampilan, derajat kesehatan, produktivitas, dan karakter sosial budaya. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dapat dicapai melalui pendidikan yang relevan, pelatihan keterampilan, internalisasi nilai dan karakter sosial budaya, dan pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja modern.

Kesenjangan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar. Kesenjangan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar ditunjukkan oleh adanya disparitas dalam tingkat kemajuan antara wilayah utara dan selatan Jawa Barat serta antara perkotaan dan pedesaan di wilayah Jawa Barat. Disparitas ini menyebabkan ketimpangan dalam pertumbuhan ekonomi dan akses terhadap layanan dasar. Wilayah utara yang lebih berkembang cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap infrastruktur dan fasilitas publik, sementara wilayah selatan dan daerah pedesaan sering kali tertinggal.

Keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan mengacu pada kemampuan lingkungan untuk terus mendukung kehidupan dan aktivitas manusia secara berkelanjutan tanpa mengalami penurunan kualitas. Inovasi teknologi dalam pemanfaatan sumber daya menjadi penting dalam mencapai keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Keberlanjutan Penataan Ruang. Keberlanjutan penataan ruang mengacu pada pengelolaan dan pengaturan penggunaan lahan yang mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan manusia dengan keberlangsungan ekosistem alam, penggunaan teknologi dan inovasi dalam perencanaan, penggunaan lahan yang adaptif terhadap perubahan iklim, serta pengembangan transportasi yang ramah lingkungan.

Kualitas Tata Kelola Pemerintahan. Kualitas tata kelola pemerintahan adalah faktor penting dalam menentukan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, kolaborasi, partisipasi publik, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Tata kelola pemerintahan yang berkualitas membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

3.3. Isu Strategis Kota Depok

Isu strategis daerah Kota Depok diidentifikasi dengan mempertimbangkan pada permasalahan pembangunan, lingkungan strategis (global, nasional, provinsi, maupun regional), dan potensi yang dapat dikembangkan oleh Kota Depok yang relevan dan menjadi tantangan dalam pembangunan daerah dua puluh tahun ke depan hasil penjarangan aspirasi masyarakat. Berbagai isu yang diperhatikan dalam perumusan isu strategis daerah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Hubungan Isu Strategis Global, Nasional, dan Daerah

No.	Permasalahan Pembangunan	Rumusan Isu Strategis Kota Depok	Isu Global	Isu Nasional (RPJPN)	Isu Provinsi Jawa Barat	Isu KLHS
1	Kesejahteraan Sosial Budaya	Kualitas Manusia	Perkembangan demografi global	Bonus demografi	Kualitas dan Daya Saing SDM	Rendahnya Kualitas SDM, Tingginya Pengangguran dan masih adanya Kemiskinan
	Akses layanan pendidikan berkualitas yang masih belum inklusif	a. Kualitas Pendidikan				
	Masih rendahnya pendidikan dan kompetensi tenaga kerja					
	Mismatch antara lulusan pendidikan dengan dunia kerja					
	Kesenjangan dalam pemenuhan akses dan kualitas pelayanan kesehatan	b. Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan				
2	Kesejahteraan Sosial Budaya	Kesejahteraan Sosial dan Ketahanan Kota	Urbanisasi Dunia	Konflik Sosial	Kesenjangan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar	Permasalahan Sosial & Ketimpangan Masyarakat
	Perlindungan anak, lansia, pemberdayaan kaum rentan dan penanganan permasalahan sosial belum optimal	a. Kualitas Keluarga				
		b. Perlindungan Lansia				
		c. Pemberdayaan Kaum Rentan dan Penanganan Permasalahan Sosial				
	Tingginya migrasi masuk dibandingkan migrasi keluar	d. Kependudukan yang Berkualitas				
Persebaran penduduk tidak merata						
Tingginya alih fungsi lahan pertanian dan perlunya peningkatan kualitas keamanan pangan dalam pemenuhan ketersediaan pangan yang baik	e. Peningkatan Ketahanan Pangan					

No.	Permasalahan Pembangunan	Rumusan Isu Strategis Kota Depok	Isu Global	Isu Nasional (RPJPN)	Isu Provinsi Jawa Barat	Isu KLHS
	Masih adanya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	f. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Kota				
3	Daya Saing Ekonomi, Manusia dan Iklim Investasi, Kesejahteraan Ekonomi	Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi	Perdagangan internasional	Ekonomi hijau dan biru	Green dan blue economy serta pembangunan inklusif	Rendahnya Kualitas SDM, Tingginya Pengangguran dan masih adanya Kemiskinan
	Belum optimalnya kualitas penyajian data dan informasi potensi dan peluang investasi	a. Peningkatan Perbaikan Iklim Investasi				
	Kualitas pelayanan perizinan yang belum optimal					
	Pertumbuhan ekonomi belum berkualitas	b. Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja				
	Tingginya biaya hidup masyarakat					
	Tingkat Pengangguran yang masih tinggi					
	Ketimpangan ekonomi yang semakin melebar					
	Kapasitas dan daya saing IKM/UMKM masih terbatas	c. Pengembangan dan Penguatan Inovasi dan Kreativitas Daerah				
Penciptaan wirausaha baru belum optimal	d. Penguatan Peran UMKM dalam Perekonomian					
Upaya pemajuan kebudayaan di Kota Depok belum optimal	e. Pengembangan Pariwisata dan Fasilitas Rekreasi					
4	Aspek Geografi	Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan Kota yang Berkelanjutan	Perubahan Iklim	Perubahan iklim, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta ketahanan bencana	Keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Belum optimalnya Layanan Infrastruktur (kemacetan lalu lintas, air bersih dan kelayakan sanitasi)
	Transportasi publik yang belum memadai	a. Pengembangan Sistem Transportasi dan				

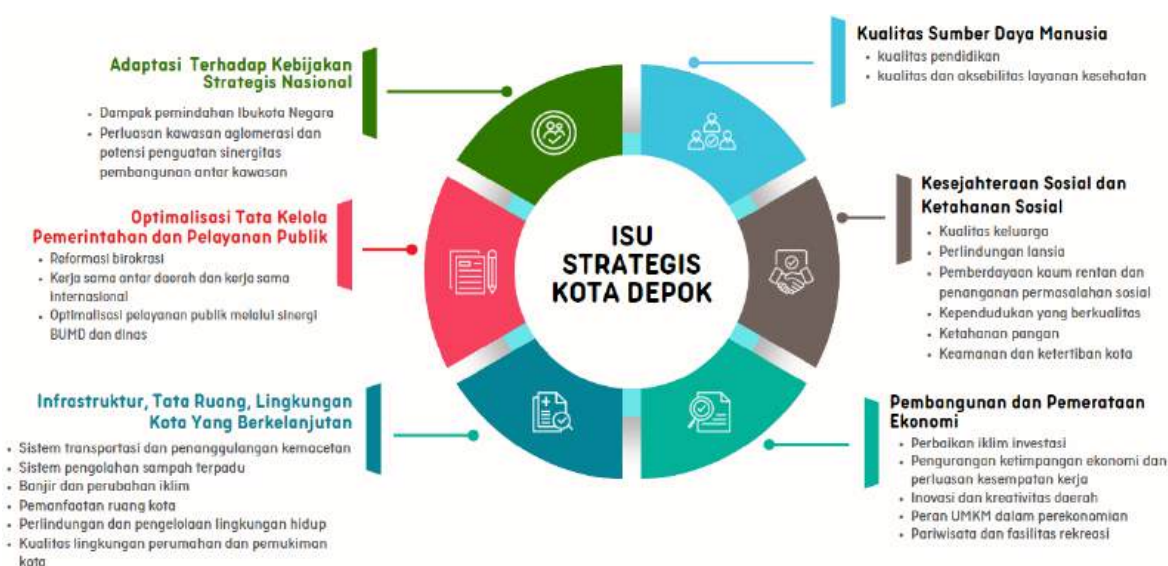
No.	Permasalahan Pembangunan	Rumusan Isu Strategis Kota Depok	Isu Global	Isu Nasional (RPJPN)	Isu Provinsi Jawa Barat	Isu KLHS
		Penanggulangan Kemacetan				
	Pengelolaan sampah yang belum optimal	b. Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu				Belum optimalnya pengelolaan sampah, pencemaran dan perbaikan lingkungan hidup
	Masih tingginya tingkat kerawanan banjir dan bencana alam lainnya	c. Banjir dan Perubahan Iklim				Banjir & Perubahan Iklim
	Minimnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau,	d. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota	Peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam		Keberlanjutan Penataan Ruang	Belum optimalnya pengelolaan sampah, pencemaran dan perbaikan lingkungan hidup
	Kualitas lingkungan hidup masih relatif rendah	e. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				
	Pemenuhan infrastruktur dasar belum optimal	f. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kota				
5	Aspek pelayanan umum	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Disrupsi teknologi	Desentralisasi dan otonomi daerah	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi dan Penegakan Hukum
	Digitalisasi pelayanan publik belum optimal	a. Reformasi Birokrasi				
	SDM layanan belum seluruhnya berorientasi pelayanan prima					
	Tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat belum optimal	b. Optimalisasi Pelayanan Publik melalui Sinergi BUMD dan Dinas				
	Kurangnya kerja sama dan belum optimalnya efektivitas kerja sama	c. Pengembangan Kerja sama Antar Daerah dan Kerja sama Internasional				

No.	Permasalahan Pembangunan	Rumusan Isu Strategis Kota Depok	Isu Global	Isu Nasional (RPJPN)	Isu Provinsi Jawa Barat	Isu KLHS
6	Belum terintegrasinya implementasi kebijakan tata ruang Kawasan Jabodetabekjur	Adaptasi terhadap Kebijakan Strategis Nasional a. Dampak Pemindahan Ibukota Negara b. Perluasan kawasan aglomerasi dan potensi penguatan sinergitas pembangunan antar kawasan	Peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam dan Perubahan Iklim	Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN)	Keberlanjutan Penataan Ruang	Belum optimalnya pengelolaan sampah, pencemaran dan perbaikan lingkungan hidup

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kota Depok, 2024

Penentuan isu-isu strategis pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Depok dilakukan berdasarkan hasil telaah beberapa kebijakan isu-isu strategis di tingkat global, nasional, maupun provinsi. Isu-isu strategis tersebut menggambarkan isu pembangunan yang sedang berkembang dan mempengaruhi pembangunan di Kota Depok karena adanya keterkaitan dengan pembangunan pada tingkatan lainnya. Secara garis besar, telaahan isu-isu strategis tersebut dikelompokkan berdasarkan permasalahan pembangunan yang dibagi menjadi 6 (enam) kelompok, Penetapan isu strategis Kota Depok RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045 akan dijelaskan secara rinci , jelas dan terstruktur dibawah ini.

Gambar 3. 13 Ringkasan Isu Strategis Kota Depok



Sumber: Hasil analisis Bappeda Kota Depok, 2024

3.3.1. Peningkatan Kualitas Manusia

A. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Pembangunan sektor pendidikan merupakan usaha yang harus diupayakan dengan terus menerus agar setiap individu memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Melalui pendidikan berkualitas, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan diri secara optimal dan berkontribusi secara signifikan dalam berbagai bidang kehidupan. Pendidikan adalah kunci bagi terbukanya berbagai kesempatan dan peluang di masa depan. Indeks Pendidikan di Kota Depok pada tahun 2023 berada pada nilai 77.38 menurun jika dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 79.96.

Untuk mewujudkan tingkat dan kualitas Pendidikan yang semakin baik, diperlukan berbagai upaya dari mulai meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, meningkatkan kualitas tenaga pendidik, menyusun kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, dan

memastikan aksesibilitas pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Diperlukan upaya kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat dan sektor swasta untuk bersama-sama menciptakan pendidikan yang inklusif, inovatif, dan berdaya saing.

B. Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan.

Peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan menjadi agenda penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Depok. Akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu adalah kunci untuk meningkatkan kualitas hidup setiap warga. Akses kesehatan yang memadai mencakup kemampuan warga untuk mendapatkan layanan kesehatan yang diperlukan, termasuk fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga medis yang kompeten. Sementara itu, kualitas pelayanan kesehatan yang baik menjamin setiap warga dapat menerima layanan kesehatan secara mudah, aman dan berkualitas. Kota Depok saat ini mempunyai 38 Puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah di Kota Depok, akan tetapi masih belum merata di seluruh kelurahan. Jumlah layanan Puskesmas di Kota Depok belum mempertimbangkan antara luas wilayah dengan jumlah penduduk yang dilayani.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan meliputi peningkatan infrastruktur kesehatan, peningkatan kualitas tenaga medis, dan perluasan layanan kesehatan yang terjangkau bagi semua warga. Sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting untuk mendorong terwujudnya Kota Depok yang dapat memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh warganya.

3.3.2. Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Ketahanan Kota

A. Peningkatan Kualitas Keluarga

Pembangunan keluarga merupakan elemen penting dalam perencanaan kota yang berkelanjutan dan inklusif. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat dan memiliki peran sentral dalam membentuk struktur sosial, ekonomi, dan budaya sebuah kota. Dalam perencanaan kota harus memperhatikan kebutuhan dan aspirasi keluarga dalam hal pemukiman, pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial. Pembangunan keluarga yang baik akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan anggota keluarga, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, pembangunan keluarga juga berdampak positif pada stabilitas sosial, kohesi komunitas dan keselarasan antar generasi.

Selama ini, ketahanan keluarga telah menjadi fokus dan prioritas utama pembangunan Kota Depok. Upaya untuk menguatkan ketahanan keluarga telah diamanatkan melalui Peraturan Daerah (Perda), bahkan Depok menjadi kota pertama yang memiliki Perda

Ketahanan Keluarga, yaitu Perda Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga. Melalui regulasi ini, Pemerintah Kota Depok mengambil langkah strategis untuk memberdayakan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat, sehingga dapat memberikan perlindungan, dukungan, dan kesejahteraan yang optimal bagi seluruh anggotanya. Selain itu, Pemerintah Kota Depok juga telah mengesahkan Perda No. 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA), Perda No. 4 Tahun 2022 tentang Pembangunan Kepemudaan, serta menginisiasi pendirian Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), yang menyelenggarakan layanan konsultasi gratis oleh psikolog dan konselor terkait isu-isu anak dan keluarga. Indeks Ketahanan Keluarga (IKK) Kota Depok sejak tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif, dengan nilai yang berada dalam kategori tinggi, yaitu antara 0.8 hingga 1.0. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketahanan keluarga Kota Depok sangat Baik

Ketahanan keluarga merupakan isu strategis yang tidak dapat diabaikan dalam perencanaan pembangunan kota yang berkelanjutan dan inklusif. Melalui perhatian yang diberikan terhadap kebutuhan dan aspirasi keluarga dalam berbagai aspek kehidupan, suatu kota dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan seluruh anggota masyarakat. Dalam hal tersebut, Kota Depok telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memprioritaskan ketahanan keluarga, sebagaimana tercermin dalam berbagai regulasi, program, dan inisiatif yang telah diimplementasikan. Dengan terus menerus memperkuat upaya ini, diharapkan dapat membawa dampak positif bagi kualitas hidup masyarakat Kota Depok secara keseluruhan.

B. Penguatan Perlindungan Lansia

Perubahan struktur demografi penduduk Kota Depok mulai terlihat terutama pada kelompok lansia (60 tahun ke atas). Proyeksi demografis Kota Depok memperlihatkan adanya penurunan jumlah anak-anak (0-14 tahun) dari tahun 2025 hingga 2045, serta peningkatan yang sangat kecil pada jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun). Namun, proyeksi tersebut menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada kelompok usia 65 tahun ke atas, mencerminkan adanya tren penuaan penduduk/*aging population* yang berpotensi mempengaruhi rasio ketergantungan di masa depan.

Menurut analisis data yang telah disusun, proyeksi jumlah penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) di Kota Depok menunjukkan kecenderungan pertumbuhan yang signifikan, dari 137.270 individu pada tahun 2025 menjadi 345.060 individu pada tahun 2045. Pertumbuhan populasi usia lanjut ini memiliki implikasi yang penting dalam perencanaan perkotaan, termasuk peningkatan kebutuhan akan pelayanan kesehatan dan infrastruktur sosial.

Dinamika demografi pada periode penuaan penduduk memerlukan perhatian yang khusus, terutama dari segi kesehatan. Telah menjadi suatu fakta yang diterima secara luas bahwa semakin lanjut usia seseorang, semakin tinggi pula kerentanannya terhadap berbagai penyakit. Hasil Susenas Maret 2020 menunjukkan sebesar 48,14 persen lansia di Indonesia mengalami keluhan kesehatan. Hal ini menjadi alarm bagi pemerintah untuk terus meningkatkan mutu layanan kesehatan dan memberikan perlindungan kesehatan yang memadai bagi kaum lansia.

Fenomena *aging population* harus dihadapi secara terencana untuk memastikan bahwa lansia dapat hidup mandiri dan sejahtera. Selain itu harus memastikan bahwa beragam bantuan khusus untuk lansia yang memerlukan bantuan sosial dapat disalurkan secara tepat sasaran dan tepat guna. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa berbagai fasilitas umum yang tersedia di seluruh Kota Depok telah ramah lansia.

C. Pengelolaan Kependudukan yang Berkualitas

Berdasarkan proyeksi yang disusun dalam Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Depok 2022-2045, jumlah penduduk Kota Depok diperkirakan akan terus meningkat secara signifikan dari tahun 2023 hingga 2045. Pada tahun 2023, jumlah penduduk Kota Depok mencapai 2.145.400 jiwa. Angka ini diperkirakan akan naik mencapai 2.652.562 jiwa pada tahun 2045.

Pengelolaan kependudukan yang berkualitas adalah isu strategis dalam pembangunan Kota Depok. Dengan pertumbuhan populasi yang terus berlangsung, penataan kependudukan menjadi faktor penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Faktor-faktor seperti urbanisasi, migrasi, dan distribusi penduduk yang memengaruhi dinamika kependudukan menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh Kota Depok. Migrasi penduduk adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kesempatan kerja, pendidikan, dan sebagainya.

Dalam menghadapi fenomena ini, Kota Depok perlu mengambil langkah-langkah strategis yang meliputi peningkatan infrastruktur, penyediaan layanan dasar, peningkatan kualitas tenaga kerja, serta pengembangan kelembagaan dan regulasi yang memadai. Sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat juga menjadi kunci dalam menciptakan pengelolaan kependudukan yang berkualitas bagi Kota Depok.

D. Peningkatan Ketahanan Pangan

Peningkatan ketahanan pangan menjadi isu strategis yang tidak bisa diabaikan dalam perencanaan pembangunan daerah. Ketahanan pangan adalah wujud kapasitas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan konsumsi pangan bagi setiap warga. Hal ini mengacu pada upaya untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup, berkualitas, aman, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Ketahanan pangan perlu menjangkau seluruh wilayah agar semua warga dapat hidup lebih sehat dan produktif.

Data ketahanan pangan Kota Depok menunjukkan peningkatan skor untuk ketahanan pangan berbasis indeks dari tahun 2022 ke 2023. Pada tahun 2022, skor keterjangkauan adalah 95,97 dan pemanfaatan adalah 76,15, dengan nilai komposit sebesar 85,07. Di tahun 2023, terjadi peningkatan pada setiap aspek, keterjangkauan menjadi 98,46 pemanfaatan menjadi 82,11, sehingga nilai komposit naik menjadi 89,47.

Oleh karena itu, diperlukan berbagai langkah strategis seperti peningkatan produksi pangan, diversifikasi sumber daya pangan, penguatan rantai pasok pangan, serta promosi pola konsumsi pangan yang sehat dan berkelanjutan. Selain itu, kemandirian pangan lokal dan pengembangan *urban farming* perlu didorong dalam memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan bagi Kota Depok.

E. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Kota

Keamanan, ketenteraman, dan ketertiban kota adalah hal esensial yang diperlukan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan setiap warga. Keamanan dan ketertiban kota juga merupakan fondasi penting dalam pembangunan kota secara menyeluruh. Indeks Trantibum Kota Depok tahun 2023 sebesar 76,55, yang dihitung berdasarkan 3 dimensi yaitu dimensi strategi dengan nilai 19,8, dimensi SDM sebesar 49 dan dimensi sistem sebesar 31,2.

Suasana yang aman, tertib, dan kondusif memungkinkan semua elemen masyarakat dapat terlibat untuk memberikan kontribusi yang produktif dalam berbagai sektor pembangunan kota. Untuk mencapai hal tersebut, agar dipastikan bahwa lingkungan kota terhindar dari berbagai gangguan keamanan dan konflik sosial. Penegakan hukum dan pengendalian keamanan dan ketertiban harus dilakukan secara konsisten. Kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat juga penting untuk diperkuat sehingga dapat menciptakan suasana kota yang tenteram dan tertib.

F. Pemberdayaan Kaum Rentan dan Penanganan Permasalahan Sosial

Pemberdayaan kaum rentan dan penanganan permasalahan sosial adalah isu strategis yang harus mendapatkan perhatian penting dalam upaya menciptakan inklusi sosial dan kesejahteraan yang merata di Kota Depok. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan, bantuan, dan dukungan kepada kelompok-kelompok rentan seperti kelompok disabilitas, penderita yang telah terinfeksi HIV/AIDS, dan kelompok rentan lainnya. Pemerintah harus memberikan perlindungan dan kesempatan yang setara bagi setiap warga termasuk kelompok rentan melalui berbagai program pemberdayaan, pelatihan, dan advokasi. Kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan Kota Depok yang inklusif untuk semua.

3.3.3. Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi

A. Peningkatan Perbaikan Iklim Investasi

Perbaikan iklim investasi adalah agenda penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kota Depok. Dengan menciptakan lingkungan yang kondusif dan menarik bagi investor, Kota Depok dapat mengalami lonjakan investasi yang berpotensi menggerakkan roda perekonomian, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan per kapita, dan memperluas basis ekonomi lokal.

Beberapa langkah yang perlu dilakukan adalah menghadirkan kepastian hukum dan konsistensi kebijakan, penyederhanaan proses perizinan, peningkatan infrastruktur yang mendukung, pengembangan manusia yang terampil dan berdaya saing, serta promosi inovasi dan teknologi. Komitmen yang kuat dalam memperbaiki iklim investasi akan mendorong Kota Depok memiliki peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

B. Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja

Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama pembangunan daerah. Karenanya, upaya pemerataan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja harus menjadi prioritas dalam agenda pembangunan Kota Depok.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Depok tahun 2023 mencapai 62,76 persen, menurun jika dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 63,35 persen. Sedangkan Rasio Gini Kota Depok pada tahun 2023 memiliki nilai 0.402 dengan klasifikasi ketimpangan moderat dan terdapat tren peningkatan ketimpangan pendapatan setiap tahunnya.

Pemerintah harus berupaya mewujudkan pembangunan berkeadilan agar ketimpangan ekonomi di Kota Depok tidak semakin melebar. Untuk mencapai hal tersebut, langkah-langkah strategis harus dilakukan dari mulai menurunkan beban pengeluaran masyarakat melalui stabilisasi bahan pokok dan bantuan sosial hingga memberdayakan masyarakat dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan ekonomi lokal, perbaikan pranata sosial dan infrastruktur untuk penguatan UMKM dan pelatihan vokasi, serta membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan yang masif dan berkelanjutan sesuai dengan tantangan kerja masa depan. Dengan demikian, diharapkan setiap warga Depok dapat memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan taraf hidupnya.

C. Pengembangan dan Penguatan Inovasi dan Kreativitas Daerah

Berdasarkan Kepmendagri No. 400.10.11-6287 Tahun 2023, Indeks Inovasi Kota Depok tercatat sebesar 51.12 (invoatif). Kota Depok berada di peringkat ke-46 dari total 93 kota yang dievaluasi di Indonesia. Skor tersebut mencerminkan sejauh mana inovasi telah diintegrasikan dalam berbagai aspek pembangunan di Depok, termasuk dalam pemerintahan, industri, pendidikan, dan masyarakat.

Inovasi dan kreativitas daerah adalah salah satu faktor kunci yang dapat mendukung kinerja pemerintah daerah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui dukungan terhadap inovasi dan kreativitas lokal, potensi ekonomi kota dapat dioptimalkan dengan mengembangkan produk-produk lokal unggulan yang memiliki nilai tambah tinggi. Penguatan produk lokal juga dapat memberikan dampak positif terhadap pengembangan industri kreatif, pariwisata, dan pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Inovasi dan kreativitas daerah juga diperlukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

D. Penguatan Peran UMKM dalam Perekonomian

Penguatan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus menjadi salah satu fokus utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Kota Depok. UMKM adalah salah satu pilar kekuatan ekonomi yang memiliki peran penting dalam mendorong pengembangan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan menciptakan kesempatan untuk pengembangan keterampilan dalam kewirausahaan dan bisnis. Berbagai program dan kebijakan yang mendukung UMKM diperlukan untuk menjawab berbagai kebutuhan UMKM mulai dari pendaftaran, pelatihan, pendampingan, perizinan, permodalan, pemasaran, hingga pelaporan keuangan.

Pemberdayaan dan pengembangan UMKM sebagai salah satu motor penggerak dalam pemulihan ekonomi Kota Depok, selain karena kontribusinya terhadap PDRB juga kemampuannya menyerap tenaga kerja. Tercatat hingga tahun 2023, terdapat 3.524 orang WUB/*Start Up* dan 700 orang Perempuan Pengusaha hasil program Penciptaan Pengusaha/*Start Up* Baru dan Perempuan Pengusaha. Kota Depok terus mendorong tumbuhnya wirausaha rintisan baru dibidang industri kreatif.

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, perlu adanya stimulus dan dorongan bagi UMKM agar dapat berkembang secara signifikan. Langkah-langkah strategis seperti penyediaan akses pembiayaan, penyederhanaan proses perizinan, dan peningkatan kapasitas serta kualitas produk UMKM dapat menjadi intervensi yang diharapkan untuk mendukung UMKM naik kelas (*scaling up*). Dengan berbagai intervensi tersebut, diharapkan UMKM dapat menjadi tulang punggung ekonomi lokal yang kuat, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Depok secara keseluruhan.

E. Pengembangan Pariwisata dan Fasilitas Rekreasi

Pengembangan pariwisata dan fasilitas rekreasi merupakan langkah penting dalam meningkatkan potensi ekonomi dan menarik investasi ke Kota Depok. Kota Depok memiliki empat potensi wisata yaitu wisata alam, wisata budaya, wisata buatan, dan wisata pendidikan. Dengan memanfaatkan berbagai potensi ini, Kota Depok memiliki kesempatan untuk menjadi destinasi yang menarik bagi wisatawan dari berbagai daerah. Upaya pengembangan yang dapat dilakukan meliputi peningkatan aksesibilitas menuju tempat wisata, pembangunan infrastruktur pendukung, serta peningkatan kualitas layanan bagi para pengunjung. Pemanfaatan potensi wisata di Kota Depok diharapkan dapat menciptakan peluang ekonomi baru, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan daerah.

Selain itu, perlu penyediaan fasilitas rekreasi dan ruang publik yang mudah diakses oleh warga. Ini mencakup pembangunan taman, hutan kota, lapangan olahraga, pusat kebugaran, dan area rekreasi lainnya yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan menyediakan fasilitas tersebut, tidak hanya memberikan ruang untuk rekreasi dan aktivitas fisik, tetapi juga menciptakan ruang interaksi sosial yang dapat membangun harmoni sosial antar warga di Kota Depok.

3.3.4. Pengembangan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan Kota yang Berkelanjutan

A. Pengembangan Sistem Transportasi dan Penanggulangan Kemacetan

Sebagai salah satu kota satelit yang terintegrasi dengan wilayah Jakarta dan sekitarnya, Kota Depok menghadapi tantangan mobilitas yang semakin kompleks. Perkembangan ekonomi dan pertumbuhan populasi di Kota Depok menghadirkan tekanan yang signifikan terhadap infrastruktur transportasi. Kemacetan menjadi rutinitas yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat perkotaan. Oleh karena itu, pengembangan sistem transportasi adalah agenda penting yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah. Data BPS Kota Depok menunjukkan bahwa pada tahun 2012 terdapat 2.884 angkot yang beroperasi di Kota Depok, namun pada tahun 2023 hanya terdapat 1.548 angkot yang beroperasi.

Revitalisasi angkutan massal, pengembangan jalur sepeda dan pejalan kaki yang ramah lingkungan, serta sinergi dengan wilayah sekitar seperti Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi adalah langkah strategis yang harus ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan kemacetan lalu lintas. Dengan merumuskan sistem transportasi yang lebih efisien, terkoordinasi, dan inklusif, diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan transportasi publik, mengurangi kemacetan, dan memberikan aksesibilitas yang lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakat.

B. Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu

Pengelolaan sampah di Kota Depok masih menerapkan sistem open dumping dimana sampah hanya ditampung di satu tempat pembuangan akhir terbuka. Saat ini, ketinggian gunung sampah di TPA Cipayung sudah mencapai 30 meter, sementara batas tinggi maksimal adalah 10 meter. Total produksi sampah di Kota Depok mencapai 1.260 ton per hari, dengan rata-rata setiap warga menghasilkan 0,59 kilogram sampah per hari.

Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu adalah isu strategis yang membutuhkan rumusan strategi dalam perencanaan pembangunan. Dengan pertumbuhan populasi dan perkembangan perkotaan yang pesat, volume sampah di Kota Depok terus meningkat, menghadirkan tantangan besar dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, langkah-langkah yang terencana dan terpadu dalam manajemen sampah menjadi sangat penting untuk menjaga kebersihan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Berkaitan hal diatas diperlukan pendekatan yang holistik untuk dapat membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif dan efisien. Hal ini meliputi strategi pengumpulan,

pengolahan, dan daur ulang sampah, serta menggalakkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengurangan sampah dan praktik daur ulang. Pemanfaatan teknologi juga diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong utama dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Kota Depok.

C. Antisipasi Banjir dan Genangan

Antisipasi terhadap banjir dan genangan harus menjadi prioritas utama dalam penanganan bencana di Kota Depok. Berdasarkan data dari Dinas PUPR Kota Depok (2021) luasan wilayah rawan bencana banjir dan genangan air yaitu 163,76 Ha. Ancaman ini berasal dari beberapa faktor seperti tingginya durasi dan intensitas curah hujan, meluapnya sungai karena saluran kecil dan kapasitas aliran yang tidak memadai, serta sistem drainase yang kurang optimal. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya pendekatan yang komprehensif.

Upaya pencegahan harus meliputi pembenahan infrastruktur drainase dan jaringan pengendalian banjir yang mencakup beberapa sungai utama, pembangunan tanggul atau bangunan pengaman lainnya, perbaikan saluran air, serta sistem informasi untuk peringatan dini. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan peran aktif dalam upaya pencegahan juga sangat diperlukan. Melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, sektor swasta, dan partisipasi aktif masyarakat, Kota Depok diharapkan dapat meningkatkan ketahanan wilayahnya terhadap banjir dan genangan, serta mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana ini.

D. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota

Pengendalian pemanfaatan ruang kota menjadi salah satu aspek penting dalam perencanaan pembangunan Kota Depok yang dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang dan memastikan bahwa pemanfaatan ruang telah sesuai dengan ketentuan. Sehubungan hal tersebut perlu dioptimalkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang sehingga ruang kota dapat berkembang secara berkelanjutan dan berkualitas. Konsistensi dan komitmen dalam penegakan hukum juga diperlukan agar ketentuan mengenai pemanfaatan ruang dapat dipatuhi secara efektif.

Melalui pengendalian yang ketat, Kota Depok diharapkan dapat terhindar dari masalah tata ruang yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan, mobilitas masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan. Dengan demikian, Kota Depok diharapkan dapat menciptakan ruang kota yang nyaman dan berdaya dukung tinggi bagi penduduk serta perkembangan wilayahnya secara keseluruhan.

E. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus menjadi satu kesatuan dalam setiap agenda pembangunan di Kota Depok. Pembangunan Kota Depok harus memperhatikan kapasitas ekologi seperti daya dukung dan daya tampung lingkungan yang dimilikinya. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Depok merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup kota yang merupakan generalisasi dari Indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Kota Depok. IKLH merepresentasikan kualitas media lingkungan hidup yang terwakili dari kualitas air, air laut, udara, dan lahan. Nilai IKLH Kota Depok di Tahun 2023 adalah 57.23 atau masuk dalam kategori sedang, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 58,61 maka realisasi tahun 2023 mengalami penurunan.

Untuk mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Depok, diperlukan adanya berbagai langkah strategis yang mengintegrasikan aspek ekonomi dan ekologi secara seimbang seperti pengendalian pencemaran lingkungan, perlindungan kawasan lindung dan konservasi, promosi penggunaan energi terbarukan, pengembangan transportasi ramah lingkungan, investasi dalam infrastruktur hijau, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Selanjutnya perlu didorong pencapaian target ruang terbuka hijau yang mencakup 30 persen dari luas kota untuk memastikan adanya lingkungan yang sehat dan berkelanjutan bagi penduduk Kota Depok. Dengan komitmen yang kuat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Kota Depok dapat mengarahkan pembangunannya menuju masa depan yang berkelanjutan dan lestari.

F. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kota

Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kota merupakan aspek penting dalam pembangunan Kota Depok. Seiring dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang pesat, terciptanya lingkungan perumahan dan permukiman yang berkualitas menjadi kebutuhan mendesak. Peningkatan jumlah penduduk menimbulkan tantangan tersendiri dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tata kelola daerah yang berkualitas yang didukung oleh sumber daya manusia, organisasi, dan tata kelola pemerintahan yang profesional diperlukan untuk dapat menjawab beragam permasalahan kota seperti adanya kawasan permukiman kumuh, rumah tidak layak huni, dan keterbatasan akses air bersih. Kerja sama dan sinergitas antara Pemerintah Kota Depok, sektor swasta, dan masyarakat melalui berbagai agenda pemberdayaan masyarakat juga diperlukan guna memastikan implementasi yang efektif dan berkelanjutan.

3.3.5. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

A. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi di Kota Depok merupakan upaya penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pelayanan publik yang berkualitas. Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih baik, diperlukan restrukturisasi berupa pengurangan tumpang tindih birokrasi, penyederhanaan prosedur, dan optimalisasi implementasi teknologi informasi untuk mempercepat proses administratif. Berdasarkan data yang dikeluarkan Kemenpan RB, Indeks Reformasi Birokrasi Kota Depok tahun 2022 mendapatkan Skor B dan meningkat pada tahun 2023 menjadi A- dengan nilai 82,14

Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dengan mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan akses informasi yang lebih luas kepada masyarakat. Reformasi birokrasi yang holistik di Kota Depok diharapkan dapat berkontribusi positif dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas.

B. Pengembangan Kerja sama Antar Daerah dan Kerja sama Internasional

Pengembangan kerja sama antar daerah dan kerja sama internasional memegang peran penting dalam memperluas potensi pembangunan Kota Depok. Kerja sama antar daerah memungkinkan pertukaran pengalaman dan praktik terbaik dalam pengelolaan sumber daya, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, kerja sama internasional membuka peluang untuk mendapatkan investasi asing, bantuan teknis, dan akses pasar global bagi produk-produk lokal. Kerja sama antar daerah dan internasional juga dapat memperluas cakupan program pembangunan yang dilaksanakan di Kota Depok. Melalui upaya ini, Kota Depok dapat menghadapi tantangan pembangunan dengan lebih efektif dan berkelanjutan. Kerja sama antar daerah dan kerja sama internasional diharapkan dapat membawa manfaat yang besar bagi kemajuan Kota Depok serta kesejahteraan masyarakatnya dalam jangka panjang.

C. Optimalisasi Pelayanan Publik melalui Sinergi BUMD dan Dinas

Sinergi antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan Organisasi Perangkat Daerah merupakan salah satu faktor penting dalam memperkuat ekosistem pelayanan publik yang berkualitas. BUMD dan Organisasi Perangkat Daerah memiliki peran strategis dalam menyediakan beragam layanan yang memengaruhi langsung kehidupan sehari-hari masyarakat Kota Depok. BUMD yang didirikan dengan tujuan untuk ikut serta melaksanakan pembangunan daerah dapat berperan dalam peningkatan produksi, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan daerah. Di sisi lain, Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola berbagai sektor khusus dalam pembangunan

daerah memastikan tersedianya layanan yang esensial seperti kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan, dan lainnya. Peningkatan mutu layanan dan kinerja, penerapan *good corporate governance*, dan penguatan sinergi antara BUMD dan Organisasi Perangkat Daerah harus dilakukan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam penyediaan layanan publik yang berkualitas bagi masyarakat Kota Depok.

3.3.6. Adaptasi terhadap Kebijakan Strategis Nasional

A. Dampak Pemindahan Ibukota Negara

Depok merupakan kota penyangga yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta dan merupakan bagian dari wilayah metropolitan Jabodetabek. Dengan demikian, perkembangan ekonomi dan pembangunan di Kota Depok secara keseluruhan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan pembangunan di Jakarta. Langkah pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) secara langsung akan berdampak pada kehidupan ekonomi, sosial, dan lingkungan di Kota Depok, meskipun dampaknya mungkin bervariasi.

Untuk menganalisis lebih lanjut dampak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), beberapa poin penting perlu ditekankan sebagai landasan analisis. Pertama, faktor utama yang berpengaruh terhadap dampak perpindahan IKN terhadap DKI Jakarta dan wilayah sekitarnya adalah pengurangan belanja pemerintah pusat di DKI Jakarta. Kedua, mobilisasi penduduk, terutama ASN pemerintah pusat dan keluarga mereka yang akan pindah ke IKN, juga dapat memberikan dampak negatif terhadap ekonomi Jakarta. Dan ketiga, dalam jangka panjang, mobilisasi penduduk dari atau ke Jakarta akan sangat dipengaruhi oleh daya tarik yang dimiliki IKN dan daya tawar yang dimiliki oleh Jakarta. Keempat, Dampak lingkungan Perubahan iklim akibat peningkatan suhu global telah berdampak pada meningkatnya kejadian bencana kekeringan, kegagalan panen, banjir, maupun longsor. Di Indonesia sendiri bencana akibat perubahan iklim berpotensi menyebabkan kerugian rata-rata Rp 22.8 triliun per tahun. Upaya global menahan laju perubahan iklim direspon Pemerintah Indonesia pada Paris Agreement dengan komitmen mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) hingga 31,89% di tahun 2030, dengan target pengurangan emisi terbesar dari sektor energi, dan mencapai nol emisi karbon pada tahun 2060. Kota-kota besar memainkan peran penting dalam memenuhi komitmen tersebut karena kota merupakan kontributor utama emisi nasional dari sektor energi dan transportasi. Berdasarkan laporan inventarisasi GRK Kota Depok tahun 2023, emisi gas rumah kaca dari sektor energi (permukiman, industri dan transportasi) mencapai 90,56% dari total emisi Kota Depok. Upaya pembangunan rendah karbon perlu dilakukan untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan secara bersamaan menekan emisi GRK.

Analisis terhadap poin-poin ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implikasi pemindahan IKN terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan di wilayah sekitarnya, termasuk Kota Depok.

B. Perluasan Kawasan Aglomerasi dan Potensi Penguatan Sinergitas Pembangunan Antar Kawasan

Dalam perencanaan pembangunan Kota Depok, integrasi dengan kawasan aglomerasi menjadi sangat penting untuk mengarahkan arus pembangunan secara berkelanjutan. Ini menjadi semakin relevan dengan disahkannya Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKI) sebagai inisiatif DPR. Dalam UU tersebut, salah satu aspek yang diatur adalah tentang kawasan aglomerasi. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pembangunan Daerah Khusus Jakarta akan disinkronkan dengan wilayah aglomerasi. Kawasan tersebut meliputi Jakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi.

Jika dijalankan dengan optimal, integrasi Kota Depok dengan kawasan aglomerasi tersebut tidak hanya memberikan manfaat secara ekonomi, tetapi juga dalam hal pengelolaan lingkungan, transportasi, serta pemerataan pembangunan. Secara ekonomi, kerja sama antar kawasan memungkinkan adanya sinergi antara berbagai sektor ekonomi yang ada di masing-masing kota, menciptakan peluang investasi yang lebih luas, dan meningkatkan daya saing wilayah secara keseluruhan. Selain itu, dengan adanya integrasi ini, pengelolaan lingkungan dapat dilakukan secara terkoordinasi, meminimalisir dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan hidup dan ekosistem yang ada di sekitar Kota Depok dan kawasan aglomerasi lainnya.

Dalam hal transportasi, integrasi antar kawasan memungkinkan penyediaan infrastruktur transportasi yang lebih efisien dan terintegrasi, seperti jalur kereta api, jalan raya, jalan tol, dan sistem transportasi massal yang saling terhubung antar kota dan kabupaten di seluruh kawasan aglomerasi. Ini dapat mengurangi kemacetan dan memperlancar mobilitas penduduk serta barang, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.



Visi dan Misi Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2025 - 2045

BAB IV

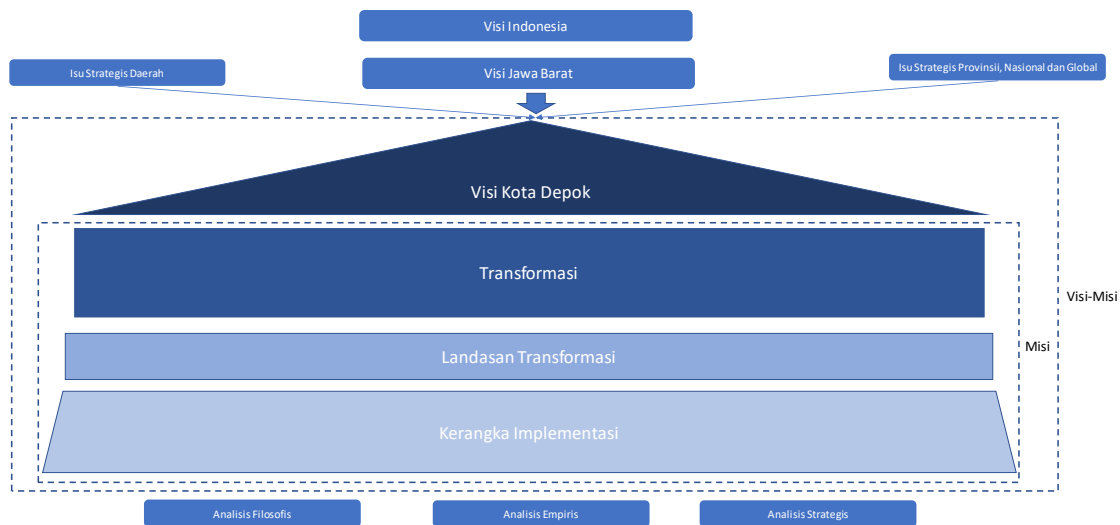
VISI DAN MISI DAERAH

Sebagai sub sistem dari sistem perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah disusun dan diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang berkontribusi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, yang diformulasikan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek (RPJPD).

Dalam merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok 2025-2045, paradigma harapan dalam bentuk *statement* visi merupakan sebuah target bersama, yang secara kolaboratif diarahkan untuk mewujudkan tujuan pemerintahan dan pembangunan yaitu kesejahteraan masyarakat. Visi yang disusun merupakan hasil dari sebuah proses perumusan kebijakan publik dengan menggunakan *tools analysis*, dengan memperhatikan aspek filosofis, aspek empiris dan aspek strategis, serta masalah dan potensi, dari semua dimensi pembangunan baik sosial, ekonomi, politik dan tata kelola pemerintahan, hukum, lingkungan hidup, ketentraman dan ketertiban. Demikian pula dengan memperhatikan isu strategis daerah, provinsi, nasional dan global.

Sebagai sebuah konstruksi perencanaan jangka panjang yang multidimensi dan sebagai implementasi prinsip-prinsip otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), RPJPD Kota Depok 2025-2045 merujuk pada RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045 dan RPJPN 2025-2045. RPJPN memuat visi dan agenda pembangunan nasional yang komprehensif dan terintegrasi dengan tiga agenda transformasi utama yaitu transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. Agenda transformasi pembangunan ini menjadi landasan dalam menyusun visi misi RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045 dan menjadi fokus utama pembangunan. Selanjutnya kerangka berpikir visi misi RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045 sebagaimana tersaji pada gambar 4.1 berikut ini :

Gambar 4. 1 Kerangka Berpikir Visi Misi RPJPD Kota Depok 2025-2045



Sumber: Hasil analisis Bappeda Kota Depok, 2024

4.1 VISI

4.1.1. Visi Indonesia Emas 2045

Dalam RPJPN Tahun 2025-2045, visi Indonesia Emas 2045 sebagai **Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan**. Penentuan visi ini berlandaskan pada : kekuatan modal dasar yang dimiliki Indonesia, meliputi kependudukan, modal sosial dan budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim, perkembangan megatren global dan pencapaian pembangunan periode sebelumnya. Visi ini menggambarkan cita-cita Indonesia yang tidak hanya ingin menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat, tetapi juga maju dan berkelanjutan. Visi ini merupakan turunan dari visi Abadi Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negeri kepulauan besar yang terletak antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Pada tahun 2045, diharapkan menjadi negara tangguh dengan kekuatan geopolitik, militer, dan geoekonomi yang signifikan, serta memiliki peradaban maritim yang besar di kancah dunia. Kekuatan geopolitik Indonesia akan semakin kokoh melalui pemanfaatan sumber daya dan pengelolaan wilayah maritim secara efektif, serta menjalin kerjasama dengan negara-negara lain di tingkat regional dan internasional.

Selanjutnya, Indonesia juga diharapkan memiliki kekuatan militer yang kuat di seluruh matra, yang mampu melindungi wilayah Indonesia dari ancaman asing, mengamankan jalur pelayaran dan perbatasan, mengontrol perairan strategis, dan melaksanakan operasi militer besar. Selain itu, Indonesia perlu memanfaatkan sumber daya ekonomi maritim, memperkuat perekonomian domestik, dan posisinya dalam perdagangan

internasional. Ini mencakup pengembangan industri dan jasa maritim, peningkatan produktivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya alam, serta memperkuat hubungan perdagangan dengan negara lain.

Budaya maritim Indonesia akan tetap dipertahankan dan dikembangkan, mencakup nilai-nilai, tradisi, seni, dan budaya bahari, yang menjadi aset penting dalam memperkuat identitas budaya dan daya saing bangsa di tingkat regional dan internasional.

Pada tahun 2045, Indonesia diharapkan menjadi negara berdaulat dengan kemandirian penuh untuk mengatur semua aspek kehidupan. Sebagai negara maju, perekonomiannya diproyeksikan mencapai posisi kelima terbesar di dunia, berbasis pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Indonesia akan menjadi negara modern, tangguh, inovatif, dan adil, dengan daya saing tinggi di tingkat domestik dan global, serta ketahanan ekonomi yang kuat terhadap perubahan global. Peran Indonesia dalam forum internasional akan semakin penting.

Sebagai negara yang berkomitmen pada prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam, kualitas lingkungan hidup, dan tata kelola yang baik. Kualitas hidup masyarakat akan meningkat dengan kesejahteraan yang merata, kesehatan dan pendidikan yang prima, serta lingkungan yang asri dan lestari. Lingkungan permukiman akan nyaman dan layak, bebas dari polusi udara, air, suara, dan sampah, serta hutan, sungai, danau, dan laut yang terjaga dengan baik.

Dihadapkan hal di atas, maka arahan visi RPJPN menjadi salah satu acuan utama dalam menyusun RPJPD Kota Depok. Dengan demikian Kota Depok bersama daerah-daerah lainnya di Indonesia akan berupaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing tinggi, selaras dengan cita-cita besar untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas Tahun 2045.

Visi ini diuraikan dalam 5 (lima) sasaran visi, 8 (delapan) misi (agenda), 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan, dan 45 indikator utama pembangunan. Penjelasan Visi Indonesia Emas 2045 dalam RPJPN 2025-2045 dibagi menjadi tiga klaster utama. *Pertama*, transformasi Indonesia, yang mencakup aspek-aspek sosial, ekonomi, dan tata kelola. *Kedua*, landasan transformasi, yang mencakup supremasi hukum, stabilitas diplomasi, dan ketahanan sosial budaya serta ekologi. *Ketiga*, kerangka implementasi transformasi, dengan fokus pada pembangunan yang merata dan berkeadilan, infrastruktur ramah lingkungan, dan kesinambungan pembangunan.

Proses pembangunan menuju visi ini diuraikan dalam empat tahapan, yaitu Penguatan Fondasi Transformasi, Akselerasi Transformasi, Ekspansi Global, dan Perwujudan Indonesia Emas. Melalui tahapan ini, Indonesia diharapkan dapat membangun fondasi yang kuat, mempercepat transformasi, menjangkau panggung global, dan akhirnya mencapai visi sebagai negara yang gemilang pada tahun 2045.

4.1.2. Visi Jawa Barat 2045

Sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045, Visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2045 adalah **Provinsi Jawa Barat Termaju, Berdaya Saing Dunia, dan Berkelanjutan**. Visi ini akan menjadi komitmen dan kesepakatan bersama seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan yang berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Barat.

Pada tahun 2045, Jawa Barat diharapkan menjadi provinsi dengan tingkat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang tinggi. Jawa Barat diharapkan akan menjadi pusat industri canggih, mendorong pertumbuhan ekonomi dengan infrastruktur modern, kawasan sains dan teknologi, dan pemanfaatan optimal sumber daya lokal. Jawa Barat juga akan menjadi penopang pangan nasional, meningkatkan produktivitas pertanian, ketahanan air dan pangan, serta adaptasi perubahan iklim dengan teknologi modern.

Selain itu, Jawa Barat bercita-cita akan memiliki keunggulan kompetitif dalam ekonomi, teknologi, inovasi, sumber daya manusia, dan infrastruktur pada tahun 2045. Keunggulan ini ditunjukkan melalui perdagangan luar negeri yang tinggi, produk berkualitas, kerja sama internasional, serta kemampuan dalam menciptakan, mengadopsi, dan mengelola teknologi secara efisien dan inovatif. Sumber daya manusia Jawa Barat akan unggul, kreatif, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat global.

Dari aspek lingkungan, pada tahun 2045 Jawa Barat diharapkan akan mencapai pembangunan berkelanjutan dengan kelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup yang baik. Masyarakat akan menerapkan perilaku ramah lingkungan, menciptakan permukiman yang layak dan nyaman, serta membangun infrastruktur hijau. Pengelolaan limbah dan daur ulang akan menjadi prioritas, dan energi terbarukan akan dimanfaatkan secara maksimal. Fungsi hutan, sungai, danau, serta laut akan tetap terjaga. Pembangunan berkelanjutan juga mencakup ekonomi hijau dan biru, dengan pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim dan produktivitas akan meningkat tanpa mengorbankan ekosistem.

Visi Jawa Barat 2045 ini akan dijadikan salah satu acuan utama dalam penyusunan RPJPD Kota Depok. Dengan mengacu pada visi Jawa Barat ini, Kota Depok akan berupaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing tinggi, selaras dengan cita-cita besar Provinsi Jawa Barat 2045.

Sasaran Visi, Struktur Misi, Arah Pembangunan, dan Sasaran Pokok dari RPJPD Provinsi Jawa Barat juga mengikuti kerangka yang sama dengan RPJPN. Visi dan misi RPJPN dan RPJPD Jawa Barat ini menjadi dasar utama dalam penyusunan RPJPD Kota Depok. Arah RPJPN 2025-205 dan RPJPD Provinsi Jawa Barat akan disesuaikan dengan isu strategis Kota Depok, serta potensi dan karakteristik wilayah yang dimiliki Kota Depok.

4.1.3. Visi Depok Emas 2045

Visi Depok Emas 2045 dirumuskan dengan mengacu pada kerangka berpikir pembangunan dalam penyusunan RPJPD dan melandaskan analisis pada: i) isu strategis yang dimiliki oleh Kota Depok, ii) keunggulan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dimiliki, iii) capaian pembangunan yang telah dilakukan, iv) visi dan arah kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Barat, serta v) Perda RTRW Kota Depok dan dilakukan analisis secara tematik, holistik, integratif dan spasial.

Pembangunan Kota Depok Tahun 2025-2045 adalah dalam rangka mendukung pencapaian cita-cita besar Bangsa Indonesia dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 sebagaimana tertuang dalam RPJPN Tahun 2025-2045, dengan visi Indonesia tahun 2045 yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan, serta Provinsi Jawa Barat dengan visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2045 yaitu Provinsi Jawa Barat Termaju, Berdaya Saing Dunia dan Berkelanjutan.

Berdasarkan kerangka berpikir Pembangunan jangka Panjang dengan mempertimbangkan pencapaian pembangunan daerah periode sebelumnya, potensi daerah, permasalahan pembangunan daerah, isu strategis daerah, tantangan global, serta penjabaran visi Indonesia Emas 2045 dan visi Provinsi Jawa Barat Tahun 20245 maka visi Kota Depok Tahun 2025-2045 menjadi **Visi Depok Emas Tahun 2045 : Kota Peradaban yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan.**

Gambar 4.2 Kerangka Pikir Pembangunan



Sumber: Hasil analisis Bappeda Kota Depok, 2024

Visi Depok Emas 2025 juga memperhatikan tujuan penataan ruang wilayah Kota Depok yaitu mewujudkan kota hunian, pendidikan, dan perdagangan jasa yang berkelanjutan, nyaman, unggul dan ramah. Dengan penataan ruang wilayah diharapkan terwujud kota Depok yang tangguh terhadap resiko bencana dan perubahan iklim. Hal ini menjadi dasar pilar Berkelanjutan pada visi kota. Pilar Maju selaras dengan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana dasar dan layanan perkotaan, penyediaan infrastruktur strategis yang handal dan berkualitas yang menunjang kegiatan ekonomi untuk mewujudkan kota Depok sebagai salah satu daerah dengan daya tarik ekonomi. Pilar Sejahtera selaras dengan kebijakan tata ruang untuk meningkatkan kenyamanan melalui penyediaan ruang publik, pelestarian nilai keagamaan dan warisan budaya, serta penyediaan lingkungan hunian yang inklusif.

Pemilihan visi ini relevan dengan arah pembangunan nasional maupun Provinsi Jawa Barat. Dalam RPJPN 2045 Wilayah Jawa diarahkan sebagai Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan. Secara spesifik Provinsi Jawa Barat pada tahun 2045 diarahkan sebagai pusat *cutting-edge industry*, dan Pendidikan *Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics* (STEAM) bertaraf global serta penumpu ketahanan pangan nasional. Dilihat lebih detail dalam arah kebijakan kewilayahan Provinsi Jawa Barat, Bodebekpunjur diarahkan untuk meningkatkan prioritas fasilitasi pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju cita-cita yang diinginkan tanpa mengabaikan fungsi lingkungan yang harus dijaga. Secara spesifik untuk Kota Depok yang merupakan bagian dari KSN Jabodetabekpunjur diarahkan untuk mendorong pengembangan PKN Kawasan perkotaan Jabodetabek yang menjadi simpul pelayanan dan jasa perkotaan serta mengembangkan sektor perdagangan, jasa dan industri padat karya. Dari arahan pembangunan ini dapat dilihat Visi Depok Emas 2045 sebagai Kota Peradaban yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan sangat selaras dengan arah pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat.

Gambar 4. 3 Rancang Bangun Visi Depok Emas Tahun 2025-2045

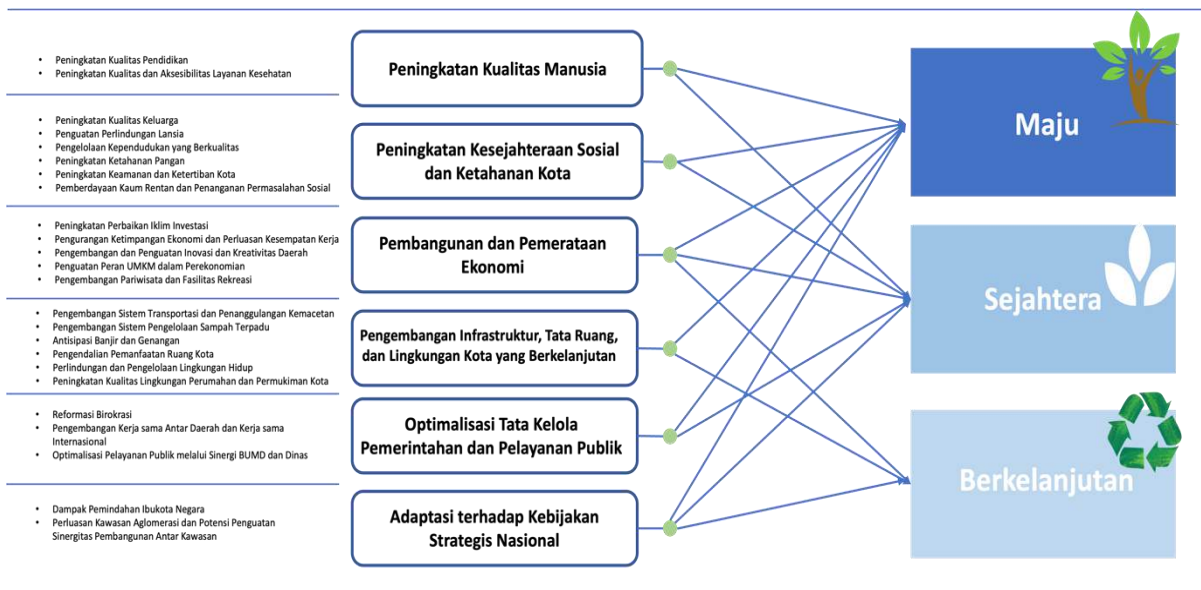


Sumber: Hasil analisis Bappeda Kota Depok, 2024

Kota Depok sebagai kota yang berbatasan langsung dengan Daerah Khusus Jakarta dan berada pada poros Jabodetabek, memiliki peran penting dalam pembangunan di Jawa Barat dan nasional. Dengan memperhatikan lokasinya yang sangat strategis, keunggulan dan potensi, kondisi yang sedang dihadapi, serta arah pembangunan regional dan nasional kedepan, maka visi Kota Depok yang ditetapkan dalam periode pembangunan jangka panjang selama dua puluh tahun adalah sebagai **Kota Peradaban**. Kota peradaban diartikan sebagai kota yang dapat menghadirkan harmoni dan kemajuan bagi penduduknya, berbasis ketahanan keluarga, serta adaptif terhadap perkembangan dunia dan teknologi, dengan tetap menjunjung tinggi keragaman suku, agama dan budaya. Visi Kota Depok sebagai Kota Peradaban ditandai dengan tiga kondisi (karakter) utama yaitu Kota yang **Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan**.

Selain itu, Visi Depok Emas 2045 juga dirumuskan berdasarkan isu strategis pembangunan Kota Depok yang dijelaskan dalam Bab III. Enam isu strategis utama dengan 26 sub isunya mendasari 3 pilar visi Kota Depok 2045. Keterkaitan antara isu strategis dan pilar visi Kota Depok tersebut tersaji dalam gambar di bawah.

Gambar 4. 4 Keterkaitan antara isu strategis dan pilar visi Kota Depok



Sumber: Hasil analisis Bappeda Kota Depok, 2024

Lebih lanjut pemahaman terhadap pilar Visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Maju** adalah cerminan Kota Depok sebagai kota peradaban yang tergambar pada aspek transformasi ekonomi dan tata kelola, yang ditunjukkan oleh tiga pilar utama yaitu **Modern, Kreatif dan Berdaya Saing**. Maju ditandai dengan meningkatnya aksesibilitas dan kualitas kehidupan ekonomi, pemukiman, transportasi dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan. Maju juga menggambarkan tata kelola pemerintahan daerah berkelas dunia dengan birokrasi yang melayani, adaptif dan *agile*, berintegritas, berbasis teknologi informasi dan berdaya saing.
- Sejahtera** adalah cerminan Kota Depok sebagai kota peradaban yang tergambar pada aspek transformasi sosial yang ditunjukkan oleh enam pilar utama yaitu **madani, adil, makmur, aman, tangguh dan berbudaya**. Madani mencerminkan kemajuan kota dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kebudayaan, harmoni dalam keberagaman, serta moral dan etika dalam masyarakat. Adil mencerminkan pembangunan yang inklusif, merata dan berkualitas, dengan memperhatikan aspek keadilan ekologis dan sosial secara bersamaan. Makmur menggambarkan kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhannya dari seluruh aspek kehidupan. Aman mencerminkan masyarakat yang sejahtera secara lahir bathin dan terbebas dari rasa takut. Tangguh menunjukkan ketahanan masyarakat yang kuat dari sisi ketahanan keluarga, ekonomi dan sosial. Berbudaya adalah cerminan kehidupan masyarakat Kota Depok yang multikultural penuh harmoni dan inklusif, dengan menjunjung tinggi budaya lokal.
- Berkelanjutan** adalah cerminan Kota Depok sebagai kota peradaban yang tergambar pada pembangunan kota berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kelestarian,

keasrian dan keseimbangan lingkungan hidup untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan hidup generasi masa kini dan masa depan. Kemajuan kota yang berkelanjutan juga harus selaras antara pembangunan sosial, ekonomi dan tata kelola dengan pembangunan lingkungan hidup, sehingga terwujud ekosistem pembangunan kota yang terjaga dengan baik dan digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran masyarakat.

Visi Depok Emas 2045 ini juga diturunkan ke dalam beberapa *positioning* pembangunan Kota Depok untuk dua puluh tahun ke depan. *Positioning* ini akan memberikan arahan yang lebih kongkrit terkait fokus Kota Depok sebagai kota peradaban. Terdapat 5 *positioning* yang dapat diambil oleh Kota Depok dalam hal ini yaitu: i) Kota Religius dan Ramah Keluarga, ii) Kawasan Pemukiman yang Sehat dan Mandiri Bagi Semua, iii) Kota Wisata Edukasi, Kesehatan, dan Lingkungan, iv) Pusat Pendidikan Bertaraf Internasional, dan v) Pusat Industri Digital dan Ekonomi Kreatif. Lima *positioning* Kota Depok ini sangat relevan dengan keunggulan dan potensi yang dimiliki oleh Kota Depok, tema pembangunan untuk Jawa Barat secara nasional dan fokus pembangunan untuk wilayah Bodebekjur dalam perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat.

Gambar 4. 5 *Positioning* Kota Depok



Sumber: Hasil analisis Bappeda Kota Depok, 2024

4.1.4. Sasaran Visi

Visi Depok Emas 2045 untuk menjadi Kota Peradaban yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan membutuhkan gambaran kongkrit yang dapat diukur dan diterjemahkan kedalam bentuk rencana yang lebih implementatif. Gambaran kongkrit dari visi ini dituangkan dalam sasaran visi. Sasaran visi ini juga selaras dengan sasaran visi RPJPN dan

RPJPD Jawa Barat. Lima sasaran visi tersebut adalah peningkatan pendapatan per kapita, Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan, Peningkatan Peran Kota Depok Dalam Pembangunan Provinsi, Nasional dan Global, Daya saing sumber daya manusia meningkat dan Kehidupan harmoni berbasis ketahanan keluarga, dan Penurunan Emisi GRK menuju Net Zero Emission.

Gambar 4. 6 Sasaran Utama Visi Depok Emas 2025-2045



Sumber: Hasil analisis Bappeda Kota Depok, 2024

Kelima sasaran visi ini dilengkapi dengan indikator capaian. Masing-masing indikator capaian ini diselaraskan dengan indikator capaian RPJPN dan RPJPD Jawa Barat dengan beberapa penyesuaian sebagaimana tersaji dalam tabel 4.1.

Tabel 4. 1 Sasaran Visi RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045

No	RPJPN 2025-2045				RPJPD JABAR 2025-2045				RPJPD KOTA DEPOK 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
1	Pendapatan per kapita setara negara maju	a. GNI Per Kapita (US\$)	5,500	30,300	Peningkatan Pendapatan per kapita	a. PDRB per kapita (Rp Juta)	57,14-57,77	273,17 - 325,25	Peningkatan Pendapatan per kapita	a. PDRB per kapita (Rp Juta)	44.04 - 44.4	77.95 - 130.03
		b. Kontribusi PDB Maritim (%)	7.6	15		b. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	48,19	186,06		b. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	28.52	26.53
		c. Kontribusi PDB Manufaktur (%)	20.8	28		c. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	41,87-42,00	46,43 - 47,60				
2	Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	a. Tingkat Kemiskinan (%)	6,0 - 7,0	0,5 - 0,8	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	a. Tingkat Kemiskinan (%)	5,85-6,46	0,09 - 0,59	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	a. Tingkat Kemiskinan (%)	1.79 - 1.98	0.03 - 0.18
		b. Rasio Gini (indeks)	0,379 - 0,382	0,377 - 0,320		b. Rasio gini (Indeks)	0,383-0,390	0,357 - 0,380		b. Rasio gini (Indeks)	0.391 - 0.398	0.366 - 0.389
		c. Kontribusi PDRB KTI (%)	21,5 (2022)	28.5		c. Kontribusi PDRB Provinsi (%)	12,72	10,77		c. Kontribusi PDRB Kota (%)	3.3	3.33
						d. Pertumbuhan ekonomi	4,96-5,37	5,07-6,27		d. Pertumbuhan ekonomi	5.11 - 6.61	5.40 - 6.31
3	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	<i>Global Power Index</i> (peringkat)	34 (2023)	15 besar	Kepemimpinan daerah di dunia internasional meningkat	Indeks Daya Saing Daerah (poin)	3.87	5	Peningkatan Peran Kota Depok Dalam Pembangunan Provinsi, Nasional dan Global	Indeks Daya Saing Daerah	3,78 (2023)	5
4	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Modal Manusia (indeks)	0,54 (2022)	0.73	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Modal Manusia	0.55	0.72	Daya saing sumber daya manusia meningkat dan Kehidupan harmoni berbasis	a. Indeks Pembangunan Manusia	83.44	96.47
										b. Indeks Ketahanan Keluaga**	88.7	92,02 - 95,99

No	RPJPN 2025-2045				RPJPD JABAR 2025-2045				RPJPD KOTA DEPOK 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
5	Intensitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38.6	93.5	Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	6,61	75.84	ketahanan keluarga Penurunan Emisi GRK menuju Net Zero Emission	Penurunan Intensitas Emisi GRK (Ton CO2eq/2010 IDR Milyar)	1.07	8.37
						Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	64,06	72,08		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	57.87	62.91

Sumber: RPJPN 2025-2045, RPJPD Jawa Barat Tahun 2025-2045, Hasil analisis Bappeda Kota Depok 2024 (diolah)

Untuk mewujudkan Visi Kota Depok Emas Tahun 2045 yang ditetapkan sebagai Kota Peradaban yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan secara operasional dirumuskan sasaran pokok yang menggambarkan rincian kinerja visi, dan secara terstruktur dan terukur dirumuskan dalam misi dan arah pembangunan, dengan target yang digambarkan pada Indikator Utama Pembangunan.

4.2. MISI

Dalam upaya mencapai visi Kota Depok sebagai Kota Peradaban tahun 2045, Kota Depok menetapkan delapan misi pembangunan jangka panjang, yang merupakan arahan dalam kerangka pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jawa Barat.

Kerangka pemikiran pembangunan yang digunakan dalam RPJPN dan RPJPD menggunakan pendekatan transformasi pembangunan. Dalam pendekatan transformasi, agenda pembangunan dikelompokkan kedalam 3 kelompok agenda utama yaitu langkah transformasi (transformasi Indonesia dan transformasi Jawa Barat), landasan transformasi dan kerangka implementasi transformasi. Kerangka ini menjadi basis dalam menurunkan 8 (delapan) misi (agenda) RPJPN maupun RPJPD. Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ditetapkan tiga agenda transformasi yaitu: transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola, yang ditopang oleh dua agenda landasan transformasi yaitu: supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia yang meliputi: ketahanan sosial, budaya dan ekologi, yang diimplementasikan secara menyeluruh melalui 3 (tiga) agenda kerangka implementasi transformasi yang terdiri atas: pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, serta kesinambungan pembangunan.

Dengan merujuk RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat, untuk mencapai visi Kota Depok sebagai Kota Peradaban tahun 2045, misi pembangunan jangka panjang Kota Depok dibagi menjadi tiga langkah transformasi yang menjadi kunci untuk mencapai perubahan yang substansial dan terarah, yaitu: i) Mewujudkan Transformasi Sosial yang Inklusif, Sehat dan Cerdas; ii) Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Kreatif, Inovatif dan Bertumpu Pada Ekonomi Hijau; dan iii) Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Berbasis Digital, dan Berkelas Dunia.

Selanjutnya, untuk memastikan bahwa ketiga transformasi tersebut dapat berjalan sesuai dengan target yang direncanakan, maka diperlukan adanya rumusan ekosistem misi yang dapat dijadikan fondasi. Berkaitan hal tersebut, selain ketiga misi diatas maka dirumuskan dua misi strategis, yaitu: i) Mewujudkan Kota Yang Aman Dan Tertib Serta Menjaga Stabilitas Ekonomi Daerah; dan ii) Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi Yang Berkelanjutan, Inklusif, dan Berbasis Ketahanan Keluarga. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa proses transformasi tersebut sejalan dengan visi, nilai, dan prinsip pembangunan Kota Depok yang inklusif dan berkelanjutan, dirumuskan tiga misi terakhir yang berkaitan dengan kerangka implementasi transformasi, meliputi: i) Meningkatkan Pembangunan Wilayah Yang Merata Dan Berkeadilan; ii) Mengembangkan Sarana Dan

Prasarana Pelayanan Dasar Yang Berkualitas Dan Ramah Lingkungan; dan iii) Mewujudkan Pembangunan Yang Berkesinambungan.

Dengan gambaran misi RPJPD Kota Depok diatas maka dapat memberikan arah yang jelas dan terstruktur mengenai cara untuk mewujudkan visi RPJPD Kota Depok. Dengan landasan yang kokoh dan ekosistem misi yang terarah, diharapkan tujuan pembangunan Kota Depok tahun 2025-2045 dapat terwujud dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Rancangan Misi Pembangunan Jangka Panjang Kota Depok 2025-2045 tersaji dalam gambar 4.6.

Gambar 4. 7 Rancang Bangun Misi Kota Depok Tahun 2025-2045



sumber: Hasil analisis Bappeda Kota Depok, 2024

Misi 1: Mewujudkan Transformasi Sosial yang Inklusif, Sehat dan Cerdas

Misi transformasi sosial yang inklusif merupakan komitmen Kota Depok sebagai kota inklusif yang mendorong partisipasi dan kolaborasi semua lapisan masyarakat dalam pembangunan kota. Memastikan akses kesetaraan terhadap layanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan infrastruktur bagi semua warga, termasuk perlindungan sosial bagi kelompok rentan seperti anak, disabilitas, perempuan dan lansia. Secara kolaboratif memberikan jaminan keamanan bagi semua penduduk, dengan peningkatan keamanan lingkungan, perlindungan terhadap kekerasan dan ancaman terhadap keselamatan warga. Misi transformasi sosial yang sehat mengarahkan upaya untuk membangun serta mengembangkan sistem kesehatan untuk semua dan dapat dijangkau oleh masyarakat, termasuk membangun fasilitas kesehatan yang memadai, memasarkan pola hidup bersih dan sehat, serta memastikan aksesibilitas layanan kesehatan yang merata dan berkualitas. Kemudian pada misi transformasi sosial yang cerdas diarahkan pada peningkatan kapasitas dan daya saing masyarakat, dengan fokus pada upaya membangun dan mengembangkan pendidikan untuk semua dan dapat dijangkau oleh masyarakat, dengan pengembangan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan yang merata, serta sistem pendidikan yang

inovatif dan berkualitas sesuai dengan perkembangan dunia.

Misi 2: Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang kreatif, Inovatif dan bertumpu pada Ekonomi Hijau

Mewujudkan transformasi ekonomi yang kreatif dan inovatif dengan mengarahkan pola pembangunan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, mengelola potensi ekonomi daerah yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memiliki nilai tambah tinggi, serta mengembangkan diversifikasi ekonomi yang berkelanjutan. Transformasi ekonomi ini menekankan pada pengembangan sektor unggulan daerah, investasi daerah, industri ekonomi kreatif, potensi pariwisata, pengembangan ekonomi berbasis digital, peningkatan daya saing tenaga kerja, serta peningkatan ekonomi kerakyatan lainnya.

Misi ini juga menekankan bahwa transformasi ekonomi Kota Depok berbasis ekonomi hijau, melalui upaya menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan sosial dan kelestarian lingkungan. Selain itu, implementasi ekonomi hijau dapat dilakukan melalui pengembangan transportasi publik yang ramah lingkungan, efisiensi penggunaan energi dan pengembangan energi terbarukan, serta pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, termasuk penggunaan teknologi yang ramah lingkungan.

Misi 3: Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Berbasis Digital dan Berkelas Dunia

Pada misi ini, Kota Depok berkomitmen untuk memberikan pelayanan pemerintahan yang berdaya saing global dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dalam hal melayani, Kota Depok berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, melalui penyediaan layanan prima berbasis teknologi dalam kerangka sistem pemerintahan digital, yang berdampak pada kemudahan akses dan kesejahteraan masyarakat. Demikian pula upaya mewujudkan pemerintahan kolaboratif dengan meningkatkan partisipasi warga dalam perumusan kebijakan melalui platform digital.

Selanjutnya dikembangkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memastikan konektivitas layanan secara cepat dan stabil di seluruh wilayah kota, dengan akses internet yang merata berbasis komunitas. Demikian pula portal pemerintahan digital, aplikasi pelayanan publik dan integrasi sistem informasi diterapkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas layanan publik sebagai implementasi *e-government*.

Dalam upaya merespon perubahan dunia, baik perubahan teknologi, dinamika sosial maupun tantangan global, maka tata kelola pemerintahan di Kota Depok juga diarahkan

berkelas dunia. Dengan demikian Kota Depok perlu membentuk dan mengembangkan SDM pemerintahan yang adaptif dan *agile*, serta melaksanakan kebijakan SDM yang inovatif melalui meritokrasi. Kota Depok juga perlu mengembangkan *sister city* dalam tata kelola pemerintahan, yang dapat membuka peluang kolaborasi dengan entitas global, sehingga terintegrasi didalam jaringan pemerintahan dan kota global, yang maju dan berdaya saing tinggi.

Dari uraian transformasi tata kelola diatas, Kota Depok berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, berbasis digital dan berkelas dunia, sehingga mampu memberikan pelayanan prima dan paripurna, yang dapat meningkatkan kepuasan masyarakat serta menjadikan Depok sebagai kota yang maju dan kompetitif di tingkat internasional.

Misi 4: Mewujudkan Kota yang Aman dan Tertib Serta Menjaga Stabilitas Ekonomi Daerah

Pada misi ini, Kota Depok berkomitmen untuk memastikan bahwa hukum dan keadilan menjadi landasan utama dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Dalam misi ini juga mengarahkan pentingnya lingkungan yang aman, serta terciptanya kehidupan yang tertib, tenteram dan terwujudnya perilaku masyarakat yang disiplin, taat asas dan hukum. Peningkatan perilaku masyarakat yang disiplin, taat asas dan hukum dilakukan melalui upaya pembinaan kesadaran hukum dan ketertiban masyarakat, serta penguatan penegakan disiplin dan hukum. Selanjutnya dalam hal mewujudkan keamanan, ketertiban dan rasa keadilan masyarakat diantaranya dilakukan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga masyarakat merasa memiliki kotanya, bangga dengan kotanya dan berkebutuhan untuk menjaga kotanya.

Selain itu, dalam mendukung kemajuan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan, perlu didukung aspek lingkungan dan stabilitas ekonomi daerah. Selain itu, untuk memastikan kondisi ekonomi makro yang terkendali, maka stabilitas ekonomi daerah perlu didukung oleh regulasi yang ramah investasi, memotong *high cost economy*, memiliki kepastian hukum dan memberikan kesempatan kerja yang luas bagi seluruh masyarakat. Disamping itu seluruh model kerjasama seperti kerjasama pusat-daerah, kerjasama provinsi-kota, kerjasama antar daerah dan antar kota, kerjasama pemerintah daerah-perguruan tinggi, kerjasama pemerintah-non pemerintah, serta kerjasama lainnya yang menguntungkan bagi kemajuan kota, menjadi sebuah kebutuhan.

Misi 5: Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi yang Berkelanjutan, inklusif dan Berbasis Ketahanan Keluarga

Misi ini diarahkan untuk memastikan bahwa transformasi pembangunan di Kota Depok sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berbasis ketahanan keluarga. Dalam misi ini menegaskan pentingnya membangun ketahanan sosial budaya dan ekologi, melalui pembangunan sosial, pemberdayaan masyarakat, optimalisasi potensi dan kelestarian budaya, pembangunan yang menjaga kelestarian lingkungan, serta adaptif terhadap bencana dan perubahan iklim. Dalam penguatan ketahanan ini harus dilaksanakan secara inklusif, dimana setiap tindakan dan kebijakan pembangunan harus membawa manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat Depok secara keseluruhan. Dalam kaitan ini, sebagai sebuah pendekatan pembangunan yang bersumber dari kekhasan Kota Depok, pendekatan pembangunan berbasis ketahanan keluarga menjadi faktor fundamental dalam mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi berkelanjutan di Kota Depok.

Misi 6: Meningkatkan Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan

Misi ini diarahkan pada upaya membangun Kota Depok secara merata dan berkeadilan berbasis kewilayahan. Dalam pembangunan wilayah yang merata, dilakukan dengan mengalokasikan sumber daya pembangunan secara adil di seluruh wilayah kota, dan memastikan setiap wilayah Kota Depok berkembang seimbang sesuai arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok. Pemerataan pembangunan juga harus menjamin akses yang sama bagi semua warga terhadap peluang dan sumber daya pembangunan. Dengan demikian, pembangunan kota harus dapat menghadirkan kesetaraan, keadilan dan kesempatan yang sama bagi seluruh warga, baik dalam aspek pelayanan pemerintahan maupun pembangunan perkotaan, baik layanan dasar maupun non pelayanan dasar, serta aspek pembangunan lainnya.

Selanjutnya pemerataan pembangunan harus tergambar dalam kuantitas dan kualitas pembangunan di seluruh wilayah kota. Selain itu pemerataan pembangunan diharapkan dapat memudahkan akses masyarakat, terutama dari wilayah Barat-Timur Kota Depok dan sebaliknya, serta memastikan wilayah-wilayah perbatasan dengan daerah lain menerima layanan pembangunan yang sama dan meminimalisir *gap* pembangunan dengan daerah yang berbatasan.

Misi 7: Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan ramah lingkungan

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kapasitas dan kualitas hidup masyarakat, serta mendorong pertumbuhan dan perkembangan wilayah secara berkelanjutan, sehingga memberi dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai wilayah perkotaan yang sedang berkembang, dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi dan tingkat migrasi tinggi, sarana dan prasarana pelayanan dasar perkotaan menjadi kebutuhan dasar masyarakat perkotaan. Demikian pula pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana layanan dasar untuk kelompok marjinal dan kelompok masyarakat menengah kebawah diarahkan untuk mewujudkan kehidupan yang layak. Dengan demikian diharapkan terwujud Kota Depok sebagai kota metropolitan modern, yang nyaman untuk bermukim dan dikunjungi, serta mendukung masyarakat untuk berkembang secara sosial dan ekonomi.

Misi 8: Mewujudkan Pembangunan yang Berkesinambungan

Pembangunan yang berkesinambungan diarahkan untuk menjamin keberlanjutan dari sebuah proses pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap, sehingga menjadi sebuah rangkaian proses yang terus menerus dari satu tahapan ke tahapan berikutnya. Dalam misi ini memastikan bahwa proses pembangunan Kota Depok harus dilaksanakan dalam sebuah kerangka sistem, untuk mencapai target yang ditentukan secara tepat waktu dan tepat sasaran, dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Selanjutnya dalam melaksanakan pembangunan kota harus memperhatikan manajemen risiko, untuk menjamin keamanan dalam setiap tahapan pembangunan. Selain itu, dalam misi ini dikembangkan juga evaluasi setiap tahapan pembangunan, mulai dari tahap penguatan fondasi pembangunan, akselerasi pembangunan, pemantapan pembangunan sampai perwujudan visi Depok Emas 2045, untuk menjamin kesinambungan pembangunan.

Keselarsan Misi RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045 dengan misi RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 maupun RPJPN Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada gambar di bawah.

Gambar 4. 8 Keselarasan Misi RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045 dengan Misi RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045



Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Jawa Barat Tahun 2025-2045, Hasil analisis Bappeda Kota Depok 2024 (diolah)



Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2025 - 2045

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

Dalam menjawab tantangan zaman yang terus berkembang, Kota Depok bertekad untuk menjadi kota peradaban yang memiliki kekhasan ketahanan keluarga. Visi ini mengisyaratkan sebuah komitmen untuk menjadikan Kota Depok sebagai model pembangunan kota berkelanjutan dan inklusif. Untuk mencapai visi kota peradaban, perlu disusun kebijakan dan penetapan sasaran pembangunan secara fokus, holistik dan mampu merespon dinamika lokal, nasional dan global.

Untuk menjalankan visi, Kota Depok menggunakan pendekatan transformasi sebagai landasan utama pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam RPJPN Tahun 2025-2045, yaitu transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola. Ketiga dimensi transformasi ini saling berkaitan dan berpengaruh satu sama lain, sehingga kebijakan dan sasaran pembangunan harus mampu mengintegrasikan ketiga agenda transformasi.

Penguatan transformasi di Kota Depok memerlukan fondasi yang kuat dari semua dimensi pembangunan serta adaptif terhadap perubahan lingkungan. Dengan demikian keterkaitan hubungan sistemik antara visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan pembangunan kota.

Dalam bab ini, akan diuraikan secara rinci arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan. Selain itu sebagai target pencapaian diakhir periode perencanaan, masing-masing arah pembangunan direpresentasikan dengan sasaran pokok yang akan dicapai. Masing-masing sasaran pokok ini memiliki indikator utama pembangunan yang dapat dijadikan patokan pencapaian dan evaluasi proses pembangunan selama periode dua puluh tahun. Selain itu, dalam bab ini akan diuraikan arah kebijakan berdasarkan tahapan pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045, yang akan digunakan sebagai basis penyusunan kebijakan pembangunan 5 tahunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan kerangka ini diharapkan dapat memastikan kesinambungan dan kematangan strategi pencapaian tujuan pembangunan Kota Depok.

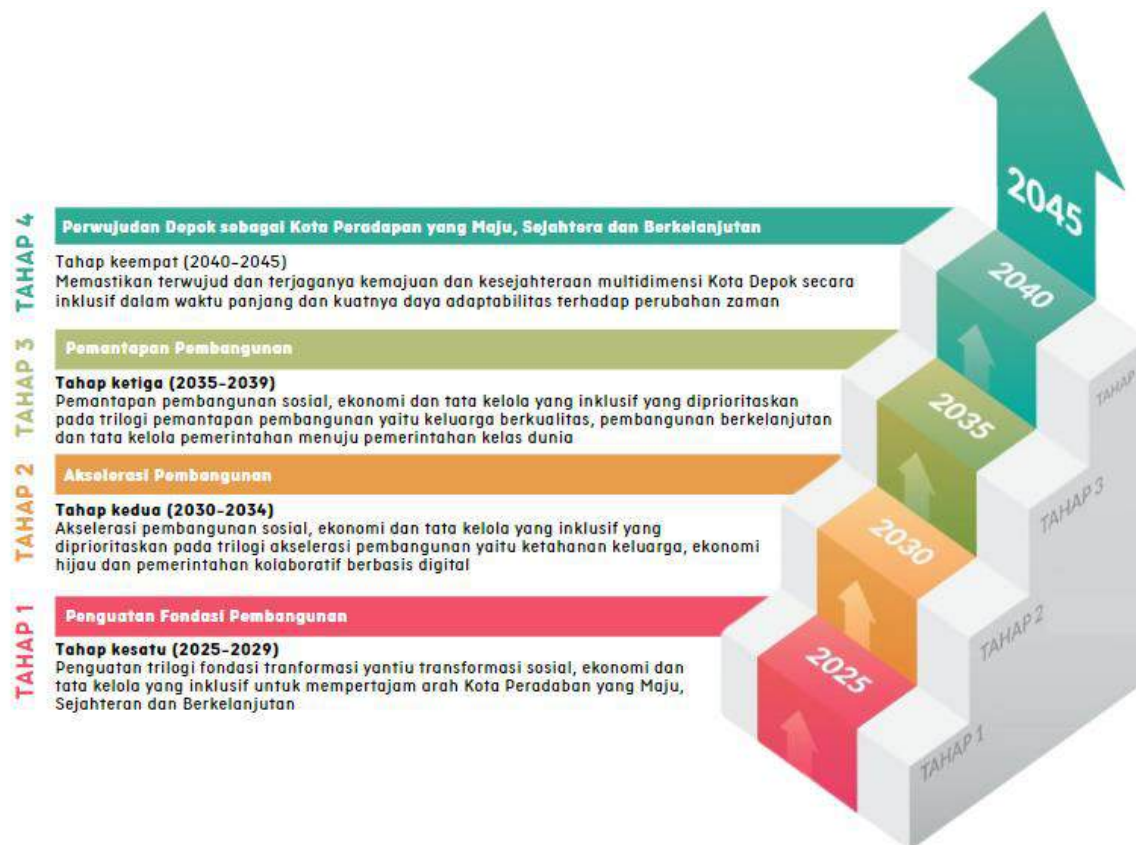
5.1. Arah Kebijakan

Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2025-2045, pembangunan direncanakan melalui empat tahapan mengikuti pedoman dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan prinsip-prinsip umum penyusunan RPJPD. Setiap tahap merupakan periode pembangunan lima tahunan yang dimulai sejak tahun 2025, dengan fokus pada langkah-langkah menuju visi Kota Depok 2045 sebagai Kota Peradaban yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan. Melalui tahapan ini,

diharapkan kebijakan yang dirumuskan dapat menjabarkan arahan misi secara lebih terarah dan terstruktur.

Tahapan pembangunan Kota Depok, terdiri dari: i) **Penguatan Fondasi Pembangunan**, ii) **Akselerasi Pembangunan**, iii) **Pemantapan Pembangunan** iv) **Perwujudan Visi Kota Depok Emas 2045**. Masing-masing tahapan tersebut tersaji pada Gambar 5.1.

Gambar 5. 1 Tahapan dan Tema Pembangunan 5 Tahunan Kota Depok



Sumber: Hasil analisis Bappeda Kota Depok, 2024

Dalam merumuskan Pentahapan Arah Kebijakan Pembangunan telah memperhatikan kesinambungan pembangunan untuk visi Kota Depok Emas Tahun 2045 terutama dalam penyelesaian isu strategis yang sudah ditetapkan. Untuk menjamin kesinambungan telah ditetapkan arah kebijakan pada setiap tahapan yaitu Evaluasi pada tahapan fondasi pembangunan 2025-2029, Evaluasi pada tahapan akselerasi pembangunan 2030-2034, Evaluasi pada tahapan Pemantapan pembangunan 2035 -2039 dan Evaluasi pada tahapan pencapaian Visi Depok sebagai Kota Peradaban yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan.

Tahap 1: Penguatan Fondasi (2025-2029)

Tahapan ini merupakan periode lima tahun pertama dalam RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045. Seperti yang diamanatkan dalam RPJPN Periode ini dititikberatkan pada penguatan trilogi fondasi transformasi yaitu transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola yang inklusif untuk mempertajam arah kota peradaban. Upaya penguatan fondasi ini meliputi:

1. Memenuhi Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan, dan Jaminan Sosial untuk seluruh masyarakat tanpa terkecuali
2. Memperkuat ekonomi dengan pemetaan, penyediaan infrastruktur, dan peningkatan produktivitas ekonomi daerah
3. Meningkatkan kapasitas pemerintahan digital dan memastikan keandalan infrastruktur dan tata kelola transformasi digital
4. Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas ekosistem ekonomi daerah
5. Membangun ketahanan sosial budaya dan ekologi secara kolaboratif, inklusif dan berkelanjutan berbasis ketahanan keluarga
6. Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah
7. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan dasar secara merata dan ramah lingkungan
8. Memperkuat kesinambungan pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata Kelola pemerintahan

Tahap 2: Akselerasi Transformasi (2030-2034)

Tahapan ini merupakan periode lima tahun kedua dalam RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045. Periode ini diarahkan pada akselerasi pembangunan sosial, ekonomi dan tata kelola yang inklusif yang diprioritaskan pada trilogi akselerasi pembangunan yaitu ketahanan keluarga, ekonomi hijau dan pemerintahan kolaboratif melalui:

1. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Layanan Dasar Kesehatan, Pendidikan dan Jaminan Sosial yang inklusif dengan melibatkan peran serta masyarakat secara optimal
2. Menyediakan sumber daya dan infrastruktur untuk menjadi pusat industri digital dan kreatif, serta memaksimalkan penggunaan teknologi
3. Melakukan transformasi kompetensi dan peran, serta mendorong kemudahan layanan, kemandirian dan kolaborasi masyarakat sipil
4. Memantapkan supremasi hukum dan stabilitas ekosistem ekonomi yang berkeadilan dan demokratis
5. Meningkatkan ketahanan sosial budaya dan ekologi secara kolaboratif, inklusif dan berkelanjutan berbasis ketahanan keluarga
6. Mempercepat pemerataan pembangunan wilayah
7. Mempercepat penyediaan sarana dan prasarana dasar yang merata dan ramah lingkungan
8. Meningkatkan kesinambungan pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan

Tahap 3: Pemantapan (2035-2039)

Tahapan ini merupakan periode lima tahun ketiga dalam RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045. Periode ini diarahkan pada pemantapan pembangunan sosial, ekonomi dan tata kelola yang inklusif yang diprioritaskan pada trilogi pemantapan pembangunan yaitu keluarga berkualitas, pembangunan berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan menuju pemerintahan kelas dunia melalui:

1. Menciptakan Nilai Tambah Sektor Sosial untuk pembangunan berkelanjutan yang berdaya saing
2. Mengoptimalkan transformasi ekonomi untuk mencapai pembangunan maksimal yang berdampak pada kehidupan sosial, pemasukan daerah, dan pembangunan terintegrasi
3. Melakukan transformasi tata kelola pemerintahan berkelas dunia
4. Memperkokoh supremasi hukum dan stabilitas ekosistem ekonomi yang berkeadilan dan demokratis
5. Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi secara kolaboratif, inklusif dan berkelanjutan berbasis ketahanan keluarga
6. Mengoptimalkan pembangunan dan pemanfaatan Infrastruktur wilayah secara adil
7. Mengoptimalkan pembangunan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan dasar
8. Memantapkan kesinambungan pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata Kelola pemerintahan

Tahap 4: Perwujudan (2040-2045)

Merupakan tahapan terakhir yang menandai pencapaian visi Kota Depok Emas 2045 sebagai Kota Peradaban yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan. Tahapan ini harus menjamin kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan kota Depok. Upaya perwujudan pembangunan ini meliputi:

1. Mewujudkan peradaban sosial Depok yang inklusif, sehat dan cerdas
2. Melakukan monitoring dan evaluasi strategi transformasi tata kelola digital dan kolaboratif
3. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital dan berkelas dunia
4. Mewujudkan rasa aman dalam kehidupan masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah
5. Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi secara kolaboratif, inklusif dan berkelanjutan berbasis ketahanan keluarga
6. Mewujudkan pembangunan wilayah secara merata dan berkeadilan

7. Mewujudkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan
8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata Kelola pemerintahan

Berdasarkan Visi dan Misi RPJPD Kota Depok diatas, serta prioritas pembangunan pada setiap tahapannya, maka disusun arahan umum kebijakan pembangunan Kota Depok untuk setiap misi. Penetapan arah kebijakan secara periodik memperhatikan sinkronisasi dan kesinambungan arah kebijakan masing-masing transformasi. Selain itu arah kebijakan pembangunan ini, menjadi pedoman dalam menurunkan dan menyusun strategi yang berkesinambungan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok.

5.1.1. Misi Mewujudkan Transformasi Sosial yang Inklusif, Sehat dan Cerdas

Untuk mewujudkan transformasi sosial menuju Depok yang inklusif, sehat dan cerdas serta melindungi semua lapisan masyarakat, dirumuskan arah kebijakan sebagai berikut:

Gambar 5. 2 Tahapan Misi Mewujudkan Transformasi Sosial yang Inklusif, Sehat dan Cerdas



Sumber: Hasil analisis Bappeda Kota Depok, 2024

Tahap 1:

Memenuhi Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan, dan Jaminan Sosial untuk seluruh masyarakat tanpa terkecuali, melalui: *Pertama*, Perubahan prilaku dan penerapan pola hidup bersih dan sehat. *Kedua*, Pemberdayaan masyarakat dan perubahan perilaku dalam pencapaian Open Defecation Free (ODF). *Ketiga*, Peningkatan kualitas pelayanan dan profesionalisme tenaga kesehatan serta penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan. *Keempat*, Percepatan penuntasan kasus stunting dan pencegahan new stunting. *Kelima*, Pengembangan posyandu multi fungsi sebagai center of excellent. *Keenam*, Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta imunisasi dasar lengkap. *Ketujuh*, Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan, dan Jaminan Sosial untuk seluruh masyarakat secara inklusif. *Kedelapan*, Perlindungan kelompok miskin dan kelompok rentan yang berfokus pada pengembangan kemandirian dan ketahanan sosial.

Kesembilan, Peningkatan partisipasi pendidikan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). *Kesepuluh*, Peningkatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta, karakter dan literasi digital. *Kesebelas*, Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana. *Kedua belas*, Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. *Ketiga belas*, Penataan dan pemenuhan infrastruktur layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK bagi kelompok disabilitas. *Keempat belas*, Penguatan dan pengembangan kurikulum sekolah terbuka. *Kelima belas*, Penguatan riset, inovasi dan penyediaan akses pendidikan pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global. *Keenam belas*, Peningkatan kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat rentan. *Ketujuh belas*, Pemberdayaan perempuan, anak, pemuda, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya dalam penguatan kapasitas kemandirian. *Kedelapan belas*, Peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam program jaminan sosial nasional. *Kesembilan belas*, Integrasi bantuan sosial berbasis data terpadu yang mengintegrasikan data daerah kota, provinsi dan nasional. *Kedua puluh*, Penanggulangan kemiskinan perkotaan terpadu.

Tahap 2:

Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Layanan Dasar Kesehatan, Pendidikan dan Jaminan Sosial yang inklusif dengan melibatkan peran serta masyarakat secara optimal, melalui:

Pertama, Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, serta fasilitas komunal pendukung Kesehatan. *Kedua*, Percepatan pemberdayaan masyarakat dan perubahan perilaku dalam pencapaian Open Defecation Free (ODF). *Ketiga*, Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan. *Keempat*, Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan dan peningkatan sarana prasarana kesehatan primer dan rujukan. *Kelima*, Percepatan penuntasan kasus stunting dan pencapaian zero new stunting. *Keenam*, Peningkatan akses pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak. *Ketujuh*, Pemantapan posyandu multi fungsi sebagai center of excellent. *Kedelapan*, Perluasan pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular. *Kesembilan*, Pelaksanaan pembangunan fasilitas olah raga, rekreasi dan pariwisata yang terintegrasi dengan literasi kesehatan dan peningkatan kesehatan mental masyarakat. *Kesepuluh*, Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan perlindungan sosial dengan kolaborasi antar pihak. *Kesebelas*, Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). *Kedua belas*, Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta karakter dan literasi digital. *Ketiga*

belas, Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah. *Keempat belas*, Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas. *Kelima belas*, Perluasan dan pemerataan infrastruktur layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK bagi kelompok disabilitas. *Keenam belas*, Akselerasi pendidikan sekolah terbuka yang berdaya saing. *Ketujuh belas*, Peningkatan akses pendidikan pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics). *Kedelapan belas*, Percepatan peningkatan kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat rentan. *Kesembilan belas*, Percepatan perluasan keikutsertaan masyarakat dalam program jaminan sosial nasional. *Kedua puluh*, Perluasan dan peningkatan integrasi bantuan sosial berbasis data terpadu dan penyaluran tepat sasaran. *Kedua puluh satu*, Peningkatan penanggulangan kemiskinan perkotaan terpadu.

Tahap 3:

Menciptakan Nilai Tambah Sektor Sosial untuk pembangunan berkelanjutan yang berdaya saing, melalui: *Pertama*, Pemantapan pola hidup bersih dan sehat dalam semua tatanan kehidupan masyarakat. *Kedua*, Peningkatan akses pelayanan kesehatan universal yang terjangkau dan berkualitas serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat. *Ketiga*, Pengendalian zero new stunting dari hulu ke hilir baik intervensi spesifik maupun sensitive serta peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat. *Keempat*, Pemantapan posyandu multi fungsi sebagai center of excellent. *Kelima*, Pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan. *Keenam*, Pemantapan dan perluasan layanan kesehatan mental masyarakat. *Ketujuh*, Penguatan dan pengembangan sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial berbasis digital. *Kedelapan*, Pemantapan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). *Kesembilan*, Penguatan pendidikan berbasis pengembangan talenta, karakter dan literasi digital. *Kesepuluh*, Peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah. *Kesebelas*, Penguatan pemasukan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan. *Kedua belas*, Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK bagi kelompok disabilitas. *Ketiga belas*, Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. *Keempat belas*, Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan atau berprestasi. *Kelima belas*, Pemantapan riset, inovasi dan akses pendidikan serta pengembangan *hub* pendidikan pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics). *Keenam belas*, Pemantapan dukungan ekosistem sosial untuk peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kemandirian masyarakat rentan. *Ketujuh belas*, Pemantapan integrasi bantuan

sosial berbasis data terpadu dan penyaluran tepat sasaran. *Kedelapan belas*, Pemantapan penanggulangan kemiskinan perkotaan terpadu.

Tahap 4:

Mewujudkan peradaban sosial Depok yang inklusif, sehat dan cerdas, melalui: Pertama, Perwujudan kesadaran pribadi dan kolektif, serta menjadikan pola hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup. *Kedua*, Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang paripurna. *Ketiga*, Perwujudan zero new stunting dan keluarga sadar gizi. *Keempat*, Perwujudan posyandu multi fungsi sebagai center of excellent. *Kelima*, Perwujudan Kota yang Sehat dan Tangguh. *Keenam*, Pemeliharaan sistem pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan berskala global serta perlindungan sosial berbasis digital. *Ketujuh*, Perwujudan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). *Kedelapan*, Pemerataan kualitas pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah berdaya saing global. *Kesembilan*, Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan. *Kesepuluh*, Penerapan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK bagi kelompok disabilitas. *Kesebelas*, Perwujudan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. *Kedua belas*, Penguatan pusat-pusat pendidikan, riset dan inovasi berkelas dunia. *Ketiga belas*, Perlindungan sosial adaptif dan inklusif, bagi seluruh kelompok masyarakat terutama bagi kelompok marjinal dan rentan.

5.1.2. Misi Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang kreatif, Inovatif dan bertumpu pada Ekonomi Hijau

Untuk mendorong Transformasi Ekonomi Depok untuk Menjadi Kota Kreatif, Inovatif, dan Bertumpu pada Ekonomi Hijau dirumuskan arah kebijakan sebagai berikut :

Gambar 5. 3 Tahapan Misi Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang kreatif, Inovatif dan bertumpu pada Ekonomi Hijau



Sumber: Hasil analisis Bappeda Kota Depok, 2024

Tahap 1:

*Menguatkan ekonomi dengan pemetaan, penyediaan infrastruktur, dan peningkatan produktivitas sektor prioritas daerah, melalui: Pertama, Penguatan pondasi ekonomi sektor unggulan dan jasa lain yang memiliki nilai tambah tinggi. Kedua, Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan yang inklusif berorientasi pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), serta pemagangan tenaga kerja dalam dan luar negeri. Ketiga, Penyediaan pelayanan transportasi publik dan logistik yang andal, untuk memperlancar distribusi barang jasa dan mendukung perekonomian daerah. Keempat, Peningkatan aksesibilitas transportasi public dan integrasi antar moda untuk mendukung kota yang efisien. Kelima, Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan. Keenam, Penguatan tata kelola perdagangan, dukungan pada produk unggulan dan perlindungan konsumen. Ketujuh, Pengembangan wisata berbasis potensi dan budaya lokal, kedelapan Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang berdaya saing nasional menuju tataran global. Kesembilan, Pemanfaatan bonus demografi dengan peningkatan kualitas-penduduk usia produktif dan angkatan kerja terutama melalui upskilling maupun reskilling. Kesepuluh, Peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha yang mempertimbangkan *link and match* industri besar dengan IKM/UMKM. Kesebelas, Peningkatan kapasitas dan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan ekosistem Ekonomi Digital dan Ekonomi Kreatif. Kedua belas, Pemberian deregulasi dan debirokratisasi kemudahan perizinan terutama investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif, inklusif, ekonomi hijau, energy baru dan terbarukan. Ketiga belas, Penataan dan restrukturisasi BUMD. Keempat belas, Penataan dan penyiapan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau. Kelima belas, Penyiapan dan peningkatan produktivitas pertanian perkotaan yang berkelanjutan melalui smart farming. Keenam belas, Penguatan proses bisnis dan kelembagaan koperasi yang berorientasi ekonomi. Ketujuh belas, Fasilitasi akses terhadap hunian layak dan terjangkau. Kedelapan belas, Penyediaan infrastruktur air baku dan air minum. Kesembilan belas, Pengembangan sanitasi perkotaan. Kedua puluh, Penerapan ekonomi sirkular dalam *smart waste management*. Kedua puluh satu, Peningkatan ketahanan bencana dengan pendekatan *green and grey infrastructure* pada pembangunan kota. Kedua puluh dua, Penguatan kota tahan bencana dengan pendekatan *green and grey infrastructure* pada pembangunan kota. Kedua puluh tiga, Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan yang inklusif, berkelanjutan dan berketahanan. Kedua puluh empat, Penguatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi daerah. Kedua puluh lima, Peningkatan *coverage* dan kecepatan akses internet pada area publik yang mendukung sektor ekonomi. Kedua puluh enam, Perkuatan *city branding* yang mempertegas positioning kota. Kedua puluh tujuh, Penyiapan*

pembangunan ruas jalan baru dan ruas jalan alternatif yang dapat meningkatkan mobilitas dan meningkatkan kinerja ruas jalan. *Kedua puluh delapan*, Pelaksanaan hubungan kemitraan *sister city* dalam rangka pembangunan perkotaan.

Tahap 2:

Menyediakan sumber daya dan infrastruktur untuk menjadi pusat industri digital dan kreatif, serta memaksimalkan penggunaan teknologi, melalui: *Pertama*, Peningkatan kualitas sektor unggulan dan jasa lain yang memiliki nilai tambah tinggi dan berdaya saing. *Kedua*, Akselerasi pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan yang inklusif, bersertifikasi dan pemerataan kualitas pendidikan pelatihan yang terintegrasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), serta perluasan pemagangan dalam dan luar negeri. *Ketiga*, Percepatan penyediaan pelayanan transportasi publik untuk memperlancar distribusi barang jasa dan mendukung perekonomian daerah. *Keempat*, Percepatan penyediaan sarana dan prasarana logistik yang dapat memotong rantai pasok. *Kelima*, Percepatan peningkatan aksesibilitas transportasi public dan integrasi antar moda untuk mendukung kota yang efisiensi. *Keenam*, Pengembangan industri kecil, menengah (IKM) terpadu yang ramah lingkungan. *Ketujuh*, Pengembangan ekonomi mikro, kecil, menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan. *Kedelapan*, Fasilitasi pasar perdagangan dalam dan luar negeri. *Kesembilan*, Peningkatan pariwisata berbasis potensi dan budaya dengan pemenuhan aspek 6A secara paripurna (atraksi, aksesibilitas, amenitas, *ancillary services*, aktivitas, *available packages*). *Kesepuluh*, Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) yang berdaya saing global. *Kesebelas*, Kolaborasi penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. *Kedua belas*, Akselerasi pemanfaatan bonus demografi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling. *Ketiga belas*, Akselerasi iklim investasi dan kemudahan berusaha yang mempertimbangkan *link and match* industri besar dengan IKM/UMKM. *Keempat belas*, Peningkatan kapasitas dan akses UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global. *Kelima belas*, Peningkatan dan pemberdayaan sektor ekonomi kreatif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. *Keenam belas* Pengembangan pusat-pusat inkubasi, pusat kreatif, infrastruktur dasar dan digital, serta perluasan akses terhadap layanan keuangan dan permodalan. *Ketujuh belas*, Akselerasi implementasi kemudahan perizinan terutama investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif, inklusif, ekonomi hijau, energy baru dan terbarukan. *Kedelapan belas*, Peningkatan produktivitas BUMD. *Kesembilan belas*, Peningkatan kualitas ekosistem dan lanskap ekonomi hijau. *Kedua puluh*, Percepatan peningkatan produktivitas pertanian perkotaan yang berkelanjutan melalui smart farming (pertanian, perikanan, peternakan). *Kedua puluh satu*, Penyiapan pusat riset pembibitan dan varietas unggul

pertanian perkotaan. *Kedua puluh dua*, Akselerasi usaha kelembagaan koperasi yang berorientasi ekonomi. *Kedua puluh tiga*, Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, penyediaan hunian vertikal publik, transportasi publik, pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, kota yang tahan bencana, serta sanitasi dan air minum aman. *Kedua puluh empat*, Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan yang inklusif, berkelanjutan dan berketahanan. *Kedua puluh limat*, Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi daerah. *Kedua puluh enam*, Peningkatan ekosistem digital untuk semua pelaku usaha dan masyarakat. *Kedua puluh tujuh*, Pemasaran produk-produk *city branding* untuk meningkatkan citra kota. *Kedua puluh delapan*, Pembangunan ruas jalan alternatif yang dapat meningkatkan mobilitas dan meningkatkan kinerja ruas jalan. *Kedua puluh sembilan*, Peningkatan hubungan kemitraan *sister city* dalam rangka pembangunan perkotaan.

Tahap 3:

Mengoptimalkan transformasi ekonomi untuk mencapai pembangunan maksimal yang berdampak pada kehidupan sosial, pemasukan daerah, dan pembangunan terintegrasi, melalui: *Pertama*, Pemantapan potensi ekonomi sektor unggulan dan jasa lain yang memiliki nilai tambah tinggi serta investasi daerah yang berdaya saing guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. *Kedua*, Peningkatan akses pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan yang berkualitas dan inklusif, termasuk peningkatan cakupan kelompok rentan dan disabilitas pada dunia usaha dan industri. *Ketiga*, Pemantapan fungsi sarana dan prasarana logistik. *Keempat*, Peningkatan layanan transportasi publik dan pengembangan kawasan *Transit Oriented Development (TOD)*. *Kelima*, Optimalisasi industri kecil, menengah (IKM) terpadu yang ramah lingkungan. *Keenam*, Pemantapan ekonomi mikro, kecil, menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan. *Ketujuh*, Peningkatan system jejaring perdagangan dalam dan luar negeri. *Kedelapan*, Pemantapan daya saing pariwisata halal dan berkelanjutan. *Kesembilan*, Perluasan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah untuk mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) yang berdaya saing global. *Kesepuluh*, Pemantapan bonus demografi dengan peningkatan kualitas dan daya saing penduduk usia produktif dan tenaga kerja berdaya saing. *Kesebelas*, Peningkatan kualitas investasi, diversifikasi sektor dan pemerataan lokasi investasi. *Kedua belas*, Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema Kerjasama. *Ketiga belas*, Pemantapan pemberdayaan sektor ekonomi kreatif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. *Keempat belas*, Pemantapan pusat-pusat inkubasi dan pusat kreatif (*Start Up Hub*). *Kelima belas*, Optimalisasi kemudahan perizinan terutama investasi pada sector-sektor ekonomi produktif, inklusif, ekonomi hijau, energi baru dan terbarukan, *Keenam belas*, Pemantapan pengembangan bisnis BUMD yang berdaya saing global. *Ketujuh belas*, Pemantapan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau. *Kedelapan*

belas, Pemantapan produktivitas pertanian perkotaan yang berkelanjutan melalui smart farming dan perluasan akses pembiayaan pertanian perkotaan. *Kesembilan belas*, Pemantapan keterkaitan koperasi pada rantai nilai pasok domestik. *Kedua puluh*, Pemantapan infrastruktur perkotaan yang inklusif, berkelanjutan, berorientasi global dan berketahanan. *Kedua puluh satu*, Pemantapan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan yang inklusif berkelanjutan dan berketahanan melalui kerjasama daerah dan pusat daerah. *Kedua puluh dua*, Pemantapan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi daerah. *Kedua puluh tiga*, Optimalisasi ekosistem industri digital sebagai penggerak ekonomi. *Kedua puluh empat*, Pemantapan *city branding* untuk meningkatkan citra, investasi, dan pariwisata kota. *Kedua puluh lima*, Pembangunan ruas jalan yang dapat meningkatkan akses Barat-Timur Kota Depok. *Kedua puluh enam*, Pemantapan hubungan kemitraan *sister city* dalam rangka pembangunan perkotaan.

Tahap 4:

Melakukan monitoring dan evaluasi strategi transformasi tata kelola digital dan kolaboratif, melalui: *Pertama*, Perwujudan ekonomi unggulan kota yang berbasis ekonomi hijau, bernilai tambah tinggi dan berdaya saing global. *Kedua*, Perwujudan tenaga kerja yang memiliki daya saing dan mampu masuk pasar kerja di dalam dan luar negeri. *Ketiga* Perwujudan sarana dan prasarana logistik yang dapat mendukung pengendalian inflasi. *Keempat*, Percepatan perwujudan pengembangan kawasan *Transit Oriented Development* (TOD). *Kelima*, Perwujudan sentra industri kecil, menengah (IKM) terpadu yang ramah lingkungan. *Keenam*, Perwujudan ekonomi mikro, kecil, menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan. *Ketujuh*, Perwujudan produk unggulan masuk ke dalam pasar global. *Kedelapan*, Perwujudan daya saing pariwisata halal dan berkelanjutan. *Kesembilan*, Perwujudan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah yang mendukung Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) nasional berdaya saing global. *Kesepuluh*, Perwujudan pemanfaatan bonus demografi dengan capaian penduduk usia produktif dan tenaga kerja yang berdaya saing global. *Kesebelas*, Perwujudan Kota Depok sebagai kota yang ramah investasi dengan penyerapan tenaga kerja lokal yang tinggi. *Kedua belas*, Perwujudan UMKM dan ekonomi kreatif berdaya saing global untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. *Ketiga belas*, Perwujudan investasi yang efisien pada sektor-sektor ekonomi produktif, inklusif, ekonomi hijau, energy baru dan terbarukan. *Keempat belas*, Optimalisasi BUMD yang berdaya saing global. *Kelima belas*, Perwujudan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau. *Keenam belas*, Perwujudan pertanian perkotaan yang berkelanjutan. *Ketujuh belas*, Perwujudan modernisasi koperasi. *Kedelapan belas*, Perwujudan *city beautification* dalam rangka membangun citra wajah kota yang berkarakter dan memiliki prestise sebagai kota peradaban, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata perkotaan. *Kesembilan belas*, Perwujudan pengelolaan kawasan perkotaan yang terintegrasi. *Kedua puluh*, Perwujudan

penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi daerah. *Kedua puluh satu*, Perwujudan Kota Depok sebagai pusat perkembangan industri digital nasional dan global. *Kedua puluh dua* Perwujudan *city branding* Kota Depok sebagai Kota Peradaban yang dapat meningkatkan ekonomi daerah. *Kedua puluh tiga*, Pembangunan ruas jalan yang dapat meningkatkan akses Barat-Timur Kota Depok. *Kedua puluh empat*, Perwujudan *sister city* yang berdampak pada kemajuan kota.

5.1.3. Misi Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Berbasis Digital dan Berkelas Dunia

Untuk mewujudkan Tata Kelola Depok Yang Digital, Adaptif, Dan Melayani dirumuskan arah kebijakan sebagai berikut:

Gambar 5. 4 Tahapan Misi Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Berbasis Digital dan Berkelas Dunia



Sumber: Hasil analisis Bappeda Kota Depok, 2024

Tahap 1:

Meningkatkan kapasitas pemerintahan digital dan memastikan keandalan infrastruktur dan tata kelola transformasi digital, melalui: *Pertama*, Penataan kelembagaan dan penyederhanaan regulasi berbasis riset dan inovasi daerah. *Kedua*, Peningkatan kualitas SDM aparatur dan kapasitas pemerintahan digital (*digital governance*). *Ketiga*, Penataan kelembagaan yang adaptif dan pengembangan karir SDM aparatur daerah berbasis meritokrasi. *Keempat*, Penguatan infrastruktur digital dan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan agile. *Kelima*, Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan pengaduan masyarakat. *Keenam*, Penguatan hubungan pusat daerah dan kerjasama antar daerah. *Ketujuh*, Penguatan Sinergitas Perencanaan Partisipatif Pembangunan (SAPA SABA), peningkatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen resiko, serta memperkuat hubungan pemerintah pusat dan daerah.

Tahap 2:

Melakukan transformasi kompetensi dan peran serta mendorong kemudahan layanan, kemandirian dan kolaborasi masyarakat sipil, melalui: *Pertama*, Peningkatan kualitas kelembagaan dan penyederhanaan regulasi berbasis teknologi informasi. *Kedua*,

Peningkatan kompetensi SDM aparatur berbasis *collaborative governance*, berorientasi layanan, profesional dan bebas korupsi. *Ketiga*, Penguatan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan yang adaptif dan pengembangan karir SDM aparatur daerah berbasis meritokrasi. *Keempat*, Peningkatan infrastruktur digital dan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan agile. *Kelima*, Percepatan digitalisasi layanan publik dan system pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). *Keenam*, One stop service layanan publik dan pengaduan masyarakat. *Ketujuh*, Peningkatan hubungan pusat daerah dan kerjasama antar daerah. *Kedelapan*, Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah dan perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen resiko.

Tahap 3:

Melakukan transformasi tata kelola pemerintahan berkelas dunia, melalui: *Pertama*, Pemantapan kelembagaan, penyederhanaan regulasi dan tata kelola berbasis teknologi informasi. *Kedua*, Peningkatan kompetensi SDM aparatur berbasis *collaborative governance*, berorientasi layanan, profesional, bebas korupsi dan berdaya saing global. *Ketiga*, Pemantapan sistem meritokrasi dalam manajemen kepegawaian. *Keempat*, Pemantapan infrastruktur digital dan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan agile. *Kelima*, Pemantapan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah, pelayanan publik dan pengaduan masyarakat. *Keenam*, Pemantapan hubungan pusat daerah dan kerjasama antar daerah. *Ketujuh*, Pemantapan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah dan perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen resiko.

Tahap 4:

Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital dan berkelas dunia, melalui: *Pertama*, Perwujudan kelembagaan dan kapasitas aparatur yang berorientasi layanan, profesional, bebas korupsi dan berdaya saing global. *Kedua*, Perwujudan tata kelola dan layanan pemerintahan berbasis digital dan berkelas dunia. *Ketiga*, Perwujudan hubungan pusat daerah dan kerjasama antar daerah yang mendukung pembangunan kota berkelas dunia. *Keempat*, Perwujudan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah dan perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen resiko.

5.1.4. Misi Mewujudkan Kota yang Aman dan Tertib Serta Menjaga Stabilitas Ekonomi Daerah

Untuk mewujudkan Ekosistem Sosial, Ekonomi, Hukum dan Birokrasi yang Aman, Adil dan Demokratis dirumuskan arah kebijakan sebagai berikut:

Gambar 5. 5 Tahapan Misi Mewujudkan Kota yang Aman dan Tertib Serta Menjaga Stabilitas Ekonomi Daerah



Sumber: Hasil analisis Bappeda Kota Depok, 2024

Tahap 1:

Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas ekosistem daerah, melalui: *Pertama*, Pembentukan produk hukum yang berkualitas dengan proses yang dialogis, dialektis, dan kritis. *Kedua*, Peningkatan kesadaran hukum masyarakat. *Ketiga*, Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat. *Keempat* Penyelenggaraan transformasi kelembagaan dan tata kelola, lternat, politik, hukum dan keamanan daerah. *Kelima*, Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat dan dinamis. *Keenam*, Penguatan pengendalian inflasi daerah. *Ketujuh*, Kemudahan layanan perijinan dan non perijinan. *Kedelapan*, Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, serta penguatan potensi pembiayaan alternatif. *Kesembilan*, Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Kesepuluh*, Kerjasama daerah dalam pengelolaan wilayah perbatasan.

Tahap 2:

Memantapkan supremasi hukum dan stabilitas ekosistem ekonomi yang berkeadilan dan demokrasi, melalui: *Pertama*, Penegakan hukum dengan penuh kepastian dan keadilan. *Kedua*, Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat. *Ketiga*, Peningkatan ketahanan daerah dan integrasi sosial. *Keempat*, Peningkatan budaya politik masyarakat yang sehat dan dinamis. *Kelima*, Akselerasi pengendalian inflasi daerah. *Keenam*, Akselerasi kapasitas fiskal daerah dan penguatan potensi pembiayaan alternatif daerah. *Ketujuh*, Peningkatan kerjasama daerah dalam pengelolaan wilayah perbatasan.

Tahap 3:

Memperkokoh supremasi hukum dan stabilitas ekosistem ekonomi yang berkeadilan dan demokrasi, melalui: *Pertama*, Pemantapan penegakan hukum dengan penuh kepastian dan keadilan. *Kedua*, Pemantapan keamanan dan ketertiban masyarakat. *Ketiga*, Pemantapan ketahanan daerah dan integrasi sosial. *Keempat*, Pemantapan budaya politik masyarakat yang sehat dan dinamis. *Kelima*, Pemantapan pengendalian inflasi daerah. *Keenam*,

Pemantapan kapasitas fiskal daerah dan pembiayaan alternatif daerah. *Ketujuh*, Pemantapan kerjasama daerah dalam pengelolaan wilayah perbatasan.

Tahap 4:

Mewujudkan rasa aman dalam kehidupan masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah, melalui: *Pertama*, Perwujudan penegakan hukum dengan penuh kepastian dan keadilan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. *Kedua*, Perwujudan ketahanan daerah dan integrasi sosial. *Ketiga*, Perwujudan budaya politik masyarakat yang sehat dan dinamis. *Keempat*, Perwujudan stabilitas ekonomi daerah. *Kelima*, Perwujudan kemandirian fiskal daerah. *Keenam*, Perwujudan kerjasama daerah dalam pengelolaan wilayah perbatasan.

5.1.5. Misi Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi yang berkelanjutan, inklusif dan Berbasis Ketahanan Keluarga

Untuk membangun Ketahanan Sosial, Ekologi dan Budaya untuk Depok yang Maslahat, Kekeluargaan, Inklusif, dan Berkelanjutan dirumuskan arah kebijakan sebagai berikut:

Gambar 5. 6 Tahapan Misi Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi yang Berkelanjutan, inklusif dan Berbasis Ketahanan Keluarga



Sumber: Hasil analisis Bappeda Kota Depok, 2024

Tahap 1:

Membangun ketahanan sosial budaya dan ekologi secara kolaboratif, inklusif dan berkelanjutan berbasis ketahanan keluarga, melalui: *Pertama*, Pemberdayaan komunitas dalam melestarikan dan mengembangkan warisan budaya. *Kedua*, Menjamin kebebasan beragama bagi seluruh masyarakat, serta penguatan karakter dan jati diri bangsa. *Ketiga*, Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, lansia dan kelompok rentan lainnya. *Keempat*, Pemberdayaan perempuan, anak, pemuda, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya dalam penguatan kapasitas, kemandirian dan partisipasi Pembangunan. *Kelima*, Pembangunan keluarga berkualitas berbasis ketahanan keluarga. *Keenam*, Pemberdayaan potensi olahraga Masyarakat dan prestasi. *Ketujuh*, Pengembangan upaya pelestarian lingkungan hidup dan ekosistem alami yang berkelanjutan. *Kedelapan*, Kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam

pengendalian pencemaran lingkungan. *Kesembilan*, Penurunan emisi gas rumah kaca dengan penanaman dan perlindungan pohon, penataan transportasi, pengolahan sampah serta efisiensi konsumsi listrik rumah tangga dan komersial. *Kesepuluh*, Penyediaan infrastruktur energi terbarukan dan jaringan gas rumah tangga dan komersial. *Kesebelas*, Peningkatan sanitasi aman perkotaan. *Kedua belas*, Penguatan kelembagaan persampahan, pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat dan penanganan sampah melalui penggunaan teknologi. *Ketiga belas*, Penguatan kelembagaan persampahan, pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat dan penanganan sampah melalui penggunaan teknologi. *Keempat belas*, Kerja sama pengelolaan sampah melalui fasilitas pengolahan regional Jawa Barat (TPPASR Lulut Nambo). *Kelima belas*, Pengelolaan susut dan sisa pangan (*food waste*). *Keenam belas*, Pengelolaan risiko bencana dan kerusakan lingkungan. *Ketujuh belas*, Penguatan kebudayaan lokal dan kerukunan masyarakat multikultural. *Kedelapan belas*, Pemanfaatan energi terbarukan melalui pemanfaatan teknologi di sektor publik. *Kesembilan belas*, Penguatan pondasi ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. *Kedua puluh*, Pengendalian kerawanan serta peningkatan kewaspadaan pangan dan gizi. *Kedua puluh satu*, Pembangunan Community Center, pembangunan taman, penataan ruang terbuka hijau, Kawasan wisata terpadu dan Masjid Raya Kota.

Tahap 2:

Meningkatkan ketahanan sosial budaya dan ekologi secara kolaboratif, inklusif dan berkelanjutan berbasis ketahanan keluarga, melalui: *Pertama*, Akselerasi nilai-nilai luhur kebudayaan dan identitas budaya dalam sendi kehidupan masyarakat berasaskan Pancasila. *Kedua*, Peningkatan kerukunan antar etnis, agama dan golongan. *Ketiga*, Penguatan perlindungan anak, pengarusutamaan gender, lansia, kelompok rentan dan inklusi sosial dalam Pembangunan. *Keempat*, Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis budaya, *Kelima*, Peningkatan potensi olahraga masyarakat dan prestasi. *Keenam*, Peningkatan upaya pelestarian lingkungan hidup dan ekosistem alami yang berkelanjutan. *Ketujuh* Peningkatan pengendalian pencemaran udara dan air serta peningkatan ketahanan air. *Kedelapan*, Peningkatan upaya penurunan emisi gas rumah kaca dengan penanaman dan perlindungan pohon, penataan transportasi, pengolahan sampah serta efisiensi konsumsi listrik rumah tangga dan komersial, serta membangun kemitraan dan Kerjasama. *Kesembilan*, Percepatan peningkatan sanitasi aman perkotaan. *Kesepuluh*, Penanganan sampah melalui penggunaan teknologi dan pengelohan residu sampah secara inovatif menuju Depok Zero Waste. *Kesebelas*, Optimalisasi kerja sama pengelolaan sampah melalui fasilitas pengolahan regional Jawa Barat (TPPASR Lulut Nambo). *Kedua belas*, Pengelolaan susut dan sisa pangan (*food waste*). *Ketiga belas*, Penyediaan infrastruktur lingkungan dan penguatan mitigasi bencana untuk mengatasi kegawatdaruratan dan kebencanaan. *Keempat belas*, Peningkatan eksistensi kebudayaan lokal dan kerukunan masyarakat multikultural.

Kelima belas, Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan melalui pemanfaatan teknologi di sektor publik. *Kenam belas*, Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan serta keamanan pangan. *Ketujuh belas*, Peningkatan pengendalian kerawanan serta peningkatan kewaspadaan pangan dan gizi. *Kedelapan belas*, Pembangunan ruang kota dan penyediaan ruang publik yang multi fungsi berbasis green dan smart city. *Kesembilan belas*, Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis.

Tahap 3:

Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi secara kolaboratif, inklusif dan berkelanjutan berbasis ketahanan keluarga, melalui: *Pertama*, Pelestarian dan pemantapan kebudayaan dan tradisi masyarakat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. *Kedua*, Pemantapan kerukunan antar etnis, agama dan golongan. *Ketiga*, Pemantapan perlindungan anak, pengarusutamaan gender, lansia, kelompok rentan dan inklusi sosial dalam Pembangunan. *Keempat*, Pemantapan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis budaya. *Kelima*, Pemantapan potensi olahraga Masyarakat dan prestasi. *Keenam*, Pemantapan upaya pelestarian lingkungan hidup dan ekosistem alami yang berkelanjutan. *Ketujuh*, Pemantapan pengendalian pencemaran udara dan air serta peningkatan ketahanan air. *Kedelapan*, Pemantapan upaya penurunan emisi gas rumah kaca dengan kemitraan dan Kerjasama. *Kesembilan*, Optimalisasi sanitasi aman perkotaan. *Kesepuluh*, Pemantapan penanganan sampah melalui penggunaan teknologi dan pengolahan residu sampah secara inovatif menuju Depok *Zero Waste*. *Kesebelas*, Pengendalian susut dan sisa pangan (*food waste*). *Kedua belas*, Pemantapan upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kolaborasi antar pemangku kepentingan. *Ketiga belas*, Pemantapan eksistensi kebudayaan lokal dan kerukunan masyarakat multikultural. *Keempat belas*, Pemantapan pemanfaatan energi terbarukan melalui pemanfaatan teknologi di sektor publik dan privat. *Kelima belas*, Pemantapan ketahanan pangan perkotaan. *Keenam belas*, Pemantapan pengendalian kerawanan serta peningkatan kewaspadaan pangan dan gizi. *Ketujuh belas*, Pemantapan pembangunan ruang kota berbasis green dan smart city. *Kedelapan belas*, Peningkatan upaya pelestarian kawasan konservasi dan ekosistem alami.

Tahap 4:

Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi secara kolaboratif, inklusif dan berkelanjutan berbasis ketahanan keluarga, melalui: *Pertama*, Penguatan nilai-nilai luhur budaya berasaskan Pancasila. *Kedua*, Perwujudan Depok sebagai kota inklusif antar etnis, agama dan golongan. *Ketiga*, Perwujudan Depok sebagai kota ramah lansia, anak, perempuan, dan disabilitas. *Keempat*, Perwujudan pembangunan keluarga berkualitas. *Kelima*, Potensi olahraga Masyarakat dan prestasi. *Keenam*, Perwujudan upaya pelestarian lingkungan hidup dan ekosistem alami yang berkelanjutan. *Ketujuh*, Perwujudan

pengendalian pencemaran udara dan air serta peningkatan ketahanan air, *Kedelapan*, Perwujudan penurunan emisi gas rumah kaca dengan kemitraan dan Kerjasama. *Kesembilan*, Pemantapan sanitasi aman perkotaan. *Kesepuluh*, Perwujudan Depok *zero waste city* dengan pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat serta kerjasama fasilitas pengelolaan sampah regional Jawa Barat. *Kesebelas*, Pengendalian susut dan sisa pangan (*food waste*). *Kedua belas*, Perwujudan kolaborasi pemangku kepentingan untuk mengendalikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. *Ketiga belas*, Perwujudan eksistensi kebudayaan lokal dan kerukunan masyarakat multikultural. *Keempat belas*, Pemanfaatan energi terbarukan melalui pemanfaatan teknologi di sektor publik, privat dan komunitas. *Kelima belas*, Perwujudan sistem ketahanan pangan yang kokoh berbasis perkotaan. *Keenam belas*, Perwujudan pembangunan ruang kota berbasis green dan smart city. *Ketujuh belas*, Perwujudan pelestarian kawasan konservasi dan ekosistem alami.

5.1.6. Misi Meningkatkan Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan

Untuk meningkatkan Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan, dirumuskan arah kebijakan sebagai berikut:

Gambar 5. 7 Tahapan Misi Meningkatkan Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan



Sumber: Hasil analisis Bappeda Kota Depok, 2024

Tahap 1:

Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah, melalui: *Pertama*, Penyediaan dan penataan basis data perencanaan pengadaan dan pencadangan tanah untuk kegiatan strategis Pembangunan. *Kedua*, Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas jalan antara wilayah Barat – Timur Kota Depok. *Ketiga*, Pembangunan dan perluasan *coverage* sarana-prasarana pelayanan transportasi publik rendah emisi yang saling terintegrasi di wilayah metropolitan Jabodetabek. *Keempat*, Penyediaan infrastruktur energi terbarukan dan jaringan gas perkotaan. *Kelima*, Pembangunan ekosistem digital dalam rangka transformasi digital di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan. *Keenam*, Penataan dan pengembangan *coverage* dan kecepatan akses internet pada area – area weak coverage dan blankspot. *Ketujuh*, Peningkatan kapasitas tampung dan jaringan infrastruktur sumber daya air.

Kedelapan, Pemerataan pembangunan wilayah dan pengembangan pusat pertumbuhan baru di Pusat Pelayanan Kota (PPK): Bojongsari, Tapos, Cipayung, *Kesembilan*, Penyediaan transportasi umum yang inklusif secara merata ke seluruh wilayah kota. *Kesepuluh*, Penguatan aksesibilitas antar wilayah serta peningkatan sarana dan prasarana perkotaan secara merata.

Tahap 2:

Mempercepat pemerataan pembangunan wilayah, melalui: *Pertama*, Pengadaan dan pencadangan tanah (*Land Banking*) untuk kegiatan strategis Pembangunan. *Kedua*, Akselerasi konektivitas dan aksesibilitas jalan antara wilayah Barat – Timur Kota Depok. *Ketiga*, Peningkatan pembangunan dan perluasan *coverage* sarana-prasarana pelayanan transportasi publik rendah emisi yang saling terintegrasi di wilayah metropolitan Jabodetabek. *Keempat*, Percepatan penyediaan infrastruktur energi terbarukan dan jaringan gas perkotaan. *Kelima*, Peningkatan ekosistem digital untuk percepatan transformasi digital di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan. *Keenam*, Peningkatan *coverage* dan kecepatan akses internet pada area – area weak coverage dan blankspot. *Ketujuh*, Akselerasi kapasitas tampung dan jaringan infrastruktur sumber daya air. *Kedelapan*, Percepatan pengembangan pusat pertumbuhan baru di Pusat Pelayanan Kota (PPK): Bojongsari, Tapos, Cipayung. *Kesembilan*, Pembangunan dan pemeliharaan ITS (intelligent Transportation System) di seluruh kawasan Kota Depok. *Kesepuluh* Percepatan pemerataan aksesibilitas antar wilayah serta peningkatan sarana dan prasarana perkotaan.

Tahap 3:

Mengoptimalkan pembangunan dan pemanfaatan Infrastruktur wilayah secara adil meliputi upaya: Pertama, Pemantapan pengadaan dan pencadangan tanah (*Land Banking*) untuk kegiatan strategis Pembangunan. *Kedua*, Pemantapan konektivitas dan aksesibilitas jalan antara wilayah Barat – Timur Kota Depok. *Ketiga*, Pemantapan pembangunan dan perluasan *coverage* sarana-prasarana pelayanan transportasi publik rendah emisi yang saling terintegrasi di wilayah metropolitan Jabodetabek. *Keempat*, Pemantapan penyediaan energi terbarukan dan jaringan gas perkotaan. *Kelima*, Pemantapan ekosistem digital untuk percepatan transformasi digital di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan. *Keenam*, Pemantapan *coverage* dan kecepatan akses internet pada area – area weak coverage dan blankspot. *Ketujuh*, Pemantapan kapasitas tampung dan jaringan infrastruktur sumber daya air. *Kedelapan*, Percepatan pengembangan pusat pertumbuhan baru di Pusat Pelayanan Kota (PPK): Tapos, Cipayung, Bojongsari. *Kesembilan*, Pemantapan transportasi umum yang terintegrasi dengan ITS (intelligent Transportation System). *Kesepuluh*, Pemantapan pemerataan aksesibilitas antar wilayah serta peningkatan sarana dan prasarana perkotaan.

Tahap 4:

Perwujudan pembangunan wilayah secara merata dan berkeadilan meliputi upaya:

Pertama Perwujudan pengadaan dan pencadangan tanah (*Land Banking*) untuk kegiatan strategis Pembangunan. *Kedua*, Perwujudan konektivitas dan aksesibilitas jalan antara wilayah Barat – Timur Kota Depok, *Ketiga*, Perwujudan pembangunan dan perluasan *coverage* sarana-prasarana pelayanan transportasi publik rendah emisi yang saling terintegrasi di wilayah metropolitan Jabodetabek. *Keempat*, Perwujudan penyediaan energi terbarukan dan jaringan gas perkotaan. *Kelima*, Perwujudan ekosistem digital untuk percepatan transformasi digital di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan. *Keenam*, Perwujudan *coverage* dan kecepatan akses internet pada area – area weak coverage dan blankspot. *Ketujuh*, Perwujudan kapasitas tampung dan jaringan infrastruktur sumber daya air. *Kedelapan*, Percepatan pengembangan pusat pertumbuhan baru di Pusat Pelayanan Kota (PPK): Cipayang, Tapos, Bojongsari. *Kesembilan*, Perwujudan transportasi umum yang terintegrasi dengan ITS (*intelligent Transportation System*). *Kesepuluh*, Perwujudan pemerataan aksesibilitas antar wilayah serta peningkatan sarana dan prasarana perkotaan

5.1.7. Misi Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Untuk Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan ramah lingkungan, dirumuskan arah kebijakan sebagai berikut:

Gambar 5. 8 Tahapan Misi Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan



Sumber: Hasil analisis Bappeda Kota Depok, 2024

Tahap 1:

Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan dasar secara merata dan ramah lingkungan melalui upaya: Pertama, Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar secara merata dan ramah lingkungan. *Kedua*, Fasilitasi penyediaan akses rumah tangga terhadap hunian layak di Kawasan kumuh. *Ketiga*, Pengembangan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi. *Keempat*, Peningkatan akses pelayanan air minum jaringan perpipaan. *Kelima*, Penguatan fondasi arah kota peradaban dengan mempertajam dimensi kota cerdas (*smart*

city), kota kreatif (creative city) dan kota hijau (green city). Keenam, Peningkatan fungsi sungai dan setu sebagai sumber air baku dan jaringan untuk melakukan pencegahan bencana banjir.

Tahap 2:

Mempercepat penyediaan sarana dan prasarana dasar yang merata dan ramah lingkungan melalui upaya: Pertama, Percepatan penyediaan sarana dan prasarana dasar yang merata dan ramah lingkungan. *Kedua*, Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di Kawasan kumuh dan atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan. *Ketiga*, Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi aman. Keempat, Penyelarasan arah kota peradaban dengan peningkatan kota cerdas (smart city) dan kota kreatif (creatif city) berbasis teknologi informasi dan Pembangunan berkelanjutan. Kelima, Pengembangan kebijakan yang mendorong penggunaan energi terbarukan dan efisiensi energi di seluruh kota. Keenam, Pengembangan kebijakan untuk pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Tahap 3:

Mengoptimalkan pembangunan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan dasar melalui upaya: Pertama, Optimalisasi pembangunan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan dasar. *Kedua*, Pemantapan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di Kawasan kumuh dan atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu Kawasan perkotaan. *Ketiga*, Pemantapan akses layanan air minum dan sanitasi aman. *Keempat*, Pemantapan arah kota peradaban dengan peningkatan kota hijau (green city) berbasis teknologi informasi dengan pembangunan berkelanjutan. *Kelima*, Pemanfaatan teknologi hijau dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur kota. Keenam, Peningkatan ketahanan air melalui konservasi dan efisiensi pemanfaatan air.

Tahap 4:

Perwujudan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan melalui upaya: Pertama, Perwujudan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan. *Kedua*, Perwujudan hunian layak di kawasan kumuh. *Ketiga*, Perwujudan akses layanan air minum dan sanitasi aman, *Keempat*, Perwujudan Depok sebagai Kota peradaban. *Kelima*, Perwujudan dimensi green city dalam pembangunan kota berkelanjutan. Keenam, Perwujudan ketahanan air melalui konservasi dan efisiensi pemanfaatan air.

5.1.8. Misi Mewujudkan Pembangunan yang Berkesinambungan

Untuk Mewujudkan Pembangunan yang Berkesinambungan, dirumuskan arah kebijakan sebagai berikut:

Gambar 5. 9 Tahapan Misi Mewujudkan Pembangunan yang Berkesinambungan



Sumber: Hasil analisis Bappeda Kota Depok, 2024

Tahap 1:

Menguatkan kesinambungan pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata Kelola pemerintahan melalui upaya: Pertama, Penguatan pengendalian pemanfaatan ruang yang berkelanjutan. Kedua, Penguatan kesinambungan pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata Kelola pemerintahan. Ketiga, Kerjasama dan koordinasi antar daerah dalam mengatasi permasalahan perkotaan dan pengelolaan potensi antar wilayah, Keempat, Penguatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko. Kelima, Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kota. Keenam, Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah. Ketujuh, Evaluasi pada tahapan fondasi pembangunan 2025-2029.

Tahap 2:

Meningkatkan kesinambungan pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan melalui upaya: Pertama, Akselerasi pengendalian pemanfaatan ruang dan struktur ruang. Kedua, Peningkatan kesinambungan pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan. Ketiga, Penguatan kemitraan yang kuat antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan sektor swasta. Keempat, Percepatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko. Kelima, Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan Pusat dan Daerah. Keenam, Evaluasi pada tahapan akselerasi pembangunan 2030-2034.

Tahap 3:

Memantapkan kesinambungan pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata Kelola pemerintahan melalui upaya: Pertama, Optimalisasi pemanfaatan ruang dan struktur ruang. Kedua, Pemantapan kesinambungan pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata Kelola pemerintahan. Ketiga, Pemantapan kerjasama dan koordinasi antar daerah dalam

mengatasi permasalahan perkotaan dan pengelolaan potensi antar wilayah. *Keempat*, Pemantapan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko. *Kelima*, Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan Pusat dan Daerah. *Keenam*, Evaluasi pada tahapan Pemantapan pembangunan 2035 -2039.

Tahap 4:

Mewujudkan kesinambungan pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata Kelola pemerintahan melalui upaya: Pertama, Perwujudan pemanfaatan ruang dan struktur ruang. *Kedua*, Perwujudan kesinambungan pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata Kelola pemerintahan. *Ketiga*, Perwujudan kerjasama dan koordinasi antar daerah dalam mengatasi permasalahan perkotaan dan pengelolaan potensi antar wilayah, *Keempat*, Perwujudan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko. *Kelima*, Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan Pusat dan Daerah. *Keenam*, Evaluasi pada tahapan pencapaian Visi Depok sebagai Kota Peradaban yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Tabel 5. 1 Arah Kebijakan RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
		Penguatan Fondasi Pembangunan	Akselerasi Pembangunan	Pemantapan Pembangunan	Perwujudan Depok Sebagai Kota Peradaban
1	2	3	4	5	6
Visi Depok Emas 2045 Kota yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan*	Misi 1 Mewujudkan Transformasi Sosial yang Inklusif, Sehat dan Cerdas	Memenuhi Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan, dan Jaminan Sosial untuk seluruh masyarakat tanpa terkecuali	Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Layanan Dasar Kesehatan, Pendidikan dan Jaminan Sosial yang inklusif dengan melibatkan peran serta masyarakat secara optimal	Menciptakan Nilai Tambah Sektor Sosial untuk pembangunan berkelanjutan yang berdaya saing	Mewujudkan peradaban sosial Depok yang inklusif, sehat dan cerdas
		Perubahan prilaku dan penerapan pola hidup bersih dan sehat	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, serta fasilitas komunal pendukung kesehatan	Pemantapan pola hidup bersih dan sehat dalam semua tatanan kehidupan masyarakat	Perwujudan kesadaran pribadi dan kolektif, serta menjadikan pola hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup
		Pemberdayaan masyarakat dan perubahan perilaku dalam mempertahankan Open Defecation Free (ODF)	Percepatan Pemberdayaan masyarakat dan perubahan perilaku dalam mempertahankan		

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
		Penguatan Fondasi Pembangunan	Akselerasi Pembangunan	Pemantapan Pembangunan	Perwujudan Depok Sebagai Kota Peradaban
1	2	3	4	5	6
			Open Defecation Free (ODF)		
		<u>Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan dan profesionalisme tenaga kesehatan serta penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan (GC)</u>	Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan dan peningkatan sarana prasarana kesehatan primer dan rujukan	Peningkatan akses pelayanan kesehatan universal yang terjangkau dan berkualitas serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang paripurna
		Percepatan penuntasan kasus stunting dan pencegahan new stunting	<u>Percepatan penuntasan kasus stunting dan pencapaian zero new stunting (GC)</u> Peningkatan akses pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak	Pengendalian zero new stunting dari hulu ke hilir baik intervensi spesifik maupun sensitive serta peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat	Perwujudan zero new stunting dan keluarga sadar gizi

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
		Penguatan Fondasi Pembangunan	Akselerasi Pembangunan	Pemantapan Pembangunan	Perwujudan Depok Sebagai Kota Peradaban
1	2	3	4	5	6
		Pengembangan posyandu multi fungsi sebagai center of excellent	Peningkatan posyandu- multi fungsi sebagai center of excellent	Pemantapan posyandu multi fungsi sebagai center of excellent	Perwujudan posyandu multi fungsi sebagai center of excellent
		Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta imunisasi dasar lengkap	Perluasan pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta penyehatan lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan	Perwujudan Kota yang Sehat dan Tangguh
			Pelaksanaan pembangunan fasilitas olah raga, rekreasi dan pariwisata yang terintegrasi dengan literasi kesehatan dan peningkatan kesehatan mental masyarakat	Pemantapan dan perluasan layanan kesehatan mental masyarakat	
		Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan, dan Jaminan Sosial untuk seluruh masyarakat secara inklusif	Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan perlindungan sosial dengan kolaborasi antar pihak	Penguatan dan pengembangan sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial berbasis digital	Pemeliharaan sistem pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan berskala global serta perlindungan social berbasis digital

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
		Penguatan Fondasi Pembangunan	Akselerasi Pembangunan	Pemantapan Pembangunan	Perwujudan Depok Sebagai Kota Peradaban
1	2	3	4	5	6
		Perlindungan kelompok miskin dan kelompok rentan yang berfokus pada pengembangan kemandirian dan ketahanan sosial			
		Peningkatan partisipasi pendidikan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)	<u>Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) (GC)</u>	Pemantapan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)	Perwujudan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)
		Peningkatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta, karakter dan literasi digital	<u>Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta, karakter dan literasi digital</u>	<u>Penguatan pendidikan berbasis pengembangan talenta, karakter dan literasi digital (GC)</u>	<u>Pemerataan kualitas pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah berdaya saing global</u>
		<u>Peningkatan dan pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan</u>	<u>Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia</u>	Peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah	

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
		Penguatan Fondasi Pembangunan	Akselerasi Pembangunan	Pemantapan Pembangunan	Perwujudan Depok Sebagai Kota Peradaban
1	2	3	4	5	6
		dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana	dini, dasar, dan menengah		
		Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan	Pemberdayaan masyarakat local untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas	Penguatan pemasukan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan	Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan
		Penataan dan pemenuhan infrastruktur layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK bagi kelompok disabilitas	Perluasan dan pemerataan infrastruktur layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK bagi kelompok disabilitas	Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK bagi kelompok disabilitas	Penerapan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK bagi kelompok disabilitas
		Penguatan dan pengembangan kurikulum sekolah terbuka	Akselerasi pendidikan sekolah terbuka yang berdaya saing	Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan	Perwujudan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
		Penguatan Fondasi Pembangunan	Akselerasi Pembangunan	Pemantapan Pembangunan	Perwujudan Depok Sebagai Kota Peradaban
1	2	3	4	5	6
				Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan atau berprestasi	
		Penguatan riset, inovasi dan penyediaan akses pendidikan pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global	<u>Peningkatan akses pendidikan pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) (GC)</u>	Pemantapan riset, inovasi dan akses pendidikan serta pengembangan <i>hub</i> pendidikan pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics)	Penguatan pusat-pusat pendidikan, riset dan inovasi berkelas dunia
		Peningkatan kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat rentan	Percepatan peningkatan kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat rentan	Pemantapan dukungan ekosistem sosial untuk peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kemandirian masyarakat rentan	<u>Perlindungan sosial adaptif dan inklusif, bagi seluruh kelompok masyarakat terutama bagi kelompok</u>
		Pemberdayaan perempuan, anak,			

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
		Penguatan Fondasi Pembangunan	Akselerasi Pembangunan	Pemantapan Pembangunan	Perwujudan Depok Sebagai Kota Peradaban
1	2	3	4	5	6
		<p>pemuda, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya dalam penguatan kapasitas kemandirian</p> <p>Peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam program jaminan sosial nasional</p> <p>Integrasi bantuan sosial berbasis data terpadu yang mengintegrasikan data daerah kota, provinsi dan nasional</p>	<p>Percepatan perluasan keikutsertaan masyarakat dalam program jaminan sosial nasional</p> <p>Perluasan dan peningkatan integrasi bantuan sosial berbasis data terpadu dan penyaluran tepat sasaran</p>	<p>Pemantapan integrasi bantuan sosial berbasis data terpadu dan penyaluran tepat sasaran</p>	<u>marjinal dan rentan (GC)</u>
		<p>Penanggulangan kemiskinan perkotaan terpadu</p>	<p>Peningkatan penanggulangan kemiskinan perkotaan terpadu</p>	<p>Pemantapan penanggulangan kemiskinan perkotaan terpadu</p>	
	<p>Misi 2 Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang</p>	<p>Menguatkan ekonomi dengan pemetaan, penyediaan infrastruktur, dan</p>	<p>Menyediakan sumber daya dan infrastruktur untuk menjadi pusat industri digital dan</p>	<p>Mengoptimalkan transformasi ekonomi untuk mencapai pembangunan</p>	

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
		Penguatan Fondasi Pembangunan	Akselerasi Pembangunan	Pemantapan Pembangunan	Perwujudan Depok Sebagai Kota Peradaban
1	2	3	4	5	6
	<p>kreatif, Inovatif dan bertumpu pada Ekonomi Hijau</p>	<p>peningkatan produktivitas sektor prioritas daerah</p>	<p>kreatif, serta memaksimalkan penggunaan teknologi</p>	<p>maksimal yang berdampak pada kehidupan sosial, pemasukan daerah, dan pembangunan terintegrasi</p>	<p>kelola digital dan kolaboratif</p>
		<p>Penguatan pondasi ekonomi sektor unggulan dan jasa lain yang memiliki nilai tambah tinggi</p>	<p>Peningkatan kualitas sektor unggulan dan jasa lain yang memiliki nilai tambah tinggi dan berdaya saing</p>	<p>Pemantapan potensi ekonomi sektor unggulan dan jasa lain yang memiliki nilai tambah tinggi serta investasi daerah yang berdaya saing guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat</p>	<p>Perwujudan ekonomi unggulan kota yang berbasis ekonomi hijau, bernilai tambah tinggi dan berdaya saing global</p>
		<p>Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan yang inklusif berorientasi pada Dunia Usaha dan Dunia</p>	<p>Akselerasi pendidikan dan pelatihan pelatihan ketenagakerjaan yang inklusif, bersertifikasi dan pemerataan kualitas pendidikan pelatihan yang terintegrasi dengan</p>	<p>Peningkatan akses pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan yang berkualitas dan inklusif, termasuk peningkatan cakupan kelompok rentan dan disabilitas</p>	<p>Perwujudan tenaga kerja yang memiliki daya saing dan mampu masuk pasar kerja di dalam dan luar negeri.</p>

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
		Penguatan Fondasi Pembangunan	Akselerasi Pembangunan	Pemantapan Pembangunan	Perwujudan Depok Sebagai Kota Peradaban
1	2	3	4	5	6
		Industri (DUDI), serta pemagangan tenaga kerja dalam dan luar negeri	Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), serta perluasan pemagangan dalam dan luar negeri	pada dunia usaha dan industri.	
		Penyediaan pelayanan transportasi publik dan logistik yang andal, untuk memperlancar distribusi barang jasa dan mendukung perekonomian daerah	Percepatan penyediaan pelayanan transportasi publik untuk memperlancar distribusi barang jasa dan mendukung perekonomian daerah	Pemantapan fungsi sarana dan prasarana logistic	Perwujudan sarana dan prasarana logistic yang dapat mendukung pengendalian inflasi
			Percepatan penyediaan sarana dan prasarana logistik yang dapat memotong rantai pasok		
		Peningkatan aksesibilitas transportasi public dan integrasi antar moda untuk mendukung kota yang efisien	Percepatan peningkatan aksesibilitas transportasi public dan integrasi antar moda untuk mendukung kota yang efisiensi	<u>Peningkatan layanan transportasi publik dan pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD) (GC)</u>	Percepatan perwujudan pengembangan kawasan <i>Transit Oriented Development</i> (TOD)
		Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil,	Pengembangan industri kecil, menengah (IKM)	Optimalisasi industri kecil, menengah (IKM)	Perwujudan sentra industri kecil,

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
		Penguatan Fondasi Pembangunan	Akselerasi Pembangunan	Pemantapan Pembangunan	Perwujudan Depok Sebagai Kota Peradaban
1	2	3	4	5	6
		menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan	terpadu yang ramah lingkungan	terpadu yang ramah lingkungan	menengah (IKM) terpadu yang ramah lingkungan
			Pengembangan ekonomi mikro, kecil, menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan	Pemantapan ekonomi mikro, kecil, menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan	Perwujudan ekonomi mikro, kecil, menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan
		Penguatan tata kelola perdagangan, dukungan pada produk unggulan dan perlindungan konsumen	Fasilitasi pasar perdagangan dalam dan luar negeri	Peningkatan system jejaring perdagangan dalam dan luar negeri	Perwujudan produk unggulan masuk ke dalam pasar global
		<u>Pengembangan wisata berbasis potensi dan budaya local (GC)</u>	Peningkatan pariwisata berbasis potensi dan budaya dengan pemenuhan aspek 6A secara paripurna (atraksi, aksesibilitas, amenities, ancillary services, aktivitas, available packages)	Pemantapan daya saing pariwisata halal dan berkelanjutan	Perwujudan daya saing pariwisata halal dan berkelanjutan
		Pengembangan ekosistem riset dan	<u>Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK</u>	Perluasan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di	Perwujudan ekosistem riset dan inovasi IPTEK

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
		Penguatan Fondasi Pembangunan	Akselerasi Pembangunan	Pemantapan Pembangunan	Perwujudan Depok Sebagai Kota Peradaban
1	2	3	4	5	6
		inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang berdaya saing nasional menuju tataran global.	<p><u>dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) yang berdaya saing global (GC)</u></p> <p>Kolaborasi penguatan riset terkait sector-sektor ekonomi produktif yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah</p>	daerah untuk mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) yang berdaya saing global	di daerah yang mendukung Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) nasional berdaya saing global
		Pemanfaatan bonus demografi dengan peningkatan kualitas penduduk usia produktif dan angkatan kerja terutama melalui upskilling maupun reskilling	Akselerasi pemanfaatan bonus demografi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling	Pemantapan bonus demografi dengan peningkatan kualitas dan daya saing penduduk usia produktif dan tenaga kerja berdaya saing	Perwujudan pemanfaatan bonus demografi dengan capaian penduduk usia produktif dan tenaga kerja yang berdaya saing global
		Peningkatan iklim investasi dan kemudahan	Akselerasi iklim investasi dan kemudahan berusaha	Peningkatan kualitas investasi, diversifikasi	Perwujudan Kota Depok sebagai kota

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
		Penguatan Fondasi Pembangunan	Akselerasi Pembangunan	Pemantapan Pembangunan	Perwujudan Depok Sebagai Kota Peradaban
1	2	3	4	5	6
		berusaha yang mempertimbangkan <i>link and match</i> industri besar dengan IKM/UMKM	yang mempertimbangkan <i>link and match</i> industri besar dengan IKM/UMKM	sektor dan pemerataan lokasi investasi	yang ramah investasi dengan penyerapan tenaga kerja lokal yang tinggi
		<u>Peningkatan kapasitas dan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan ekosistem Ekonomi Digital dan Ekonomi Kreatif (GC)</u>	Peningkatan kapasitas dan akses UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global	Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama	Perwujudan UMKM dan ekonomi kreatif berdaya saing global untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah
			Peningkatan dan pemberdayaan sektor ekonomi kreatif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah	Pemantapan pemberdayaan sektor ekonomi kreatif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah	
				Pengembangan pusat-pusat inkubasi, pusat kreatif, infrastruktur dasar dan digital, serta perluasan akses terhadap layanan keuangan dan permodalan	Pemantapan pusat-pusat inkubasi dan pusat kreatif (<i>Start Up Hub</i>)

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
		Penguatan Fondasi Pembangunan	Akselerasi Pembangunan	Pemantapan Pembangunan	Perwujudan Depok Sebagai Kota Peradaban
1	2	3	4	5	6
		Pemberian deregulasi dan debirokratisasi kemudahan perizinan terutama investasi pada sector-sektor ekonomi produktif, inklusif, ekonomi hijau, energy baru dan terbarukan	Akselerasi implementasi kemudahan perizinan terutama investasi pada sector-sektor ekonomi produktif, inklusif, ekonomi hijau, energy baru dan terbarukan	Optimalisasi kemudahan perizinan terutama investasi pada sector-sektor ekonomi produktif, inklusif, ekonomi hijau, energy baru dan terbarukan	Perwujudan investasi yang efisien pada sector-sektor ekonomi produktif, inklusif, ekonomi hijau, energy baru dan terbarukan
		Penataan dan restrukturisasi BUMD.	Peningkatan produktivitas BUMD.	Pemantapan pengembangan bisnis BUMD yang berdaya saing global	Optimalisasi BUMD yang berdaya saing global.
		Penataan dan penyiapan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau	Peningkatan kualitas ekosistem dan lanskap ekonomi hijau	Pemantapan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau	Perwujudan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau
		Penyiapan dan peningkatan produktivitas pertanian perkotaan yang berkelanjutan melalui smart farming	Percepatan peningkatan produktivitas pertanian perkotaan yang berkelanjutan melalui smart farming (pertanian, perikanan, peternakan)	Pemantapan produktivitas pertanian perkotaan yang berkelanjutan melalui smart farming dan perluasan akses pembiayaan pertanian perkotaan	Perwujudan pertanian perkotaan yang berkelanjutan

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
		Penguatan Fondasi Pembangunan	Akselerasi Pembangunan	Pemantapan Pembangunan	Perwujudan Depok Sebagai Kota Peradaban
1	2	3	4	5	6
			Penyiapan pusat riset pembibitan dan varietas unggul pertanian perkotaan		
		Penguatan proses bisnis dan kelembagaan koperasi yang berorientasi ekonomi	Akselerasi usaha kelembagaan koperasi yang berorientasi ekonomi	Pemantapan keterkaitan koperasi pada rantai nilai pasok domestik	Perwujudan modernisasi koperasi
		Fasilitasi akses terhadap hunian layak dan terjangkau	Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, penyediaan hunian vertikal perkotaan, transportasi publik, pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, kota yang tahan bencana, serta sanitasi dan air minum aman	Pemantapan infrastruktur perkotaan yang inklusif, berkelanjutan, berorientasi global dan berketahanan	Perwujudan <i>city beautification</i> dalam rangka membangun citra wajah kota yang berkarakter dan memiliki prestise sebagai kota peradaban, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata perkotaan.
		Penyediaan infrastruktur air baku dan air minum			
		Pengembangan sanitasi perkotaan			
		Penerapan ekonomi sirkular dalam <i>smart waste management</i>			
		Penguatan kota tahan bencana dengan			

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
		Penguatan Fondasi Pembangunan	Akselerasi Pembangunan	Pemantapan Pembangunan	Perwujudan Depok Sebagai Kota Peradaban
1	2	3	4	5	6
		pendekatan <i>green and grey infrastructure</i> pada pembangunan kota			
		Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan yang inklusif, berkelanjutan dan berketahanan	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan yang inklusif, berkelanjutan dan berketahanan	Pemantapan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan yang inklusif, berkelanjutan dan berketahanan melalui Kerja sama daerah dan pusat daerah	Perwujudan pengelolaan kawasan perkotaan yang terintegrasi
		Penguatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi daerah	Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi daerah	Pemantapan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi daerah	Perwujudan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi daerah
		Peningkatan <i>coverage</i> dan kecepatan akses internet pada area publik yang mendukung sektor ekonomi	Peningkatan ekosistem digital untuk semua pelaku usaha dan masyarakat	Optimalisasi ekosistem industri digital sebagai penggerak ekonomi	Perwujudan Kota Depok sebagai pusat perkembangan industri digital nasional dan global

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
		Penguatan Fondasi Pembangunan	Akselerasi Pembangunan	Pemantapan Pembangunan	Perwujudan Depok Sebagai Kota Peradaban
1	2	3	4	5	6
		Perkuatan <i>city branding</i> yang mempertegas positioning kota	Pemasaran produk-produk <i>city branding</i> untuk meningkatkan citra kota	Pemantapan <i>city branding</i> untuk meningkatkan citra, investasi, dan pariwisata kota	<u>Perwujudan <i>city branding</i> Kota Depok sebagai Kota Peradaban yang dapat meningkatkan ekonomi daerah (GC)</u>
		Penyiapan pembangunan ruas jalan baru dan ruas jalan alternatif yang dapat meningkatkan mobilitas dan meningkatkan kinerja ruas jalan	Pembangunan ruas jalan alternatif yang dapat meningkatkan mobilitas dan meningkatkan kinerja ruas jalan	Pembangunan ruas jalan yang dapat meningkatkan akses Barat-Timur Kota Depok	Pembangunan ruas jalan yang dapat meningkatkan akses Barat-Timur Kota Depok
		Pelaksanaan hubungan kemitraan <i>sister city</i> dalam rangka pembangunan perkotaan	Peningkatan hubungan kemitraan <i>sister city</i> dalam rangka pembangunan perkotaan	Pemantapan hubungan kemitraan <i>sister city</i> dalam rangka pembangunan perkotaan	Perwujudan <i>sister city</i> yang berdampak pada kemajuan kota
	Misi 3 Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani,	Meningkatkan kapasitas pemerintahan digital dan memastikan keandalan infrastruktur dan tata	Melakukan transformasi kompetensi dan peran, serta mendorong kemudahan layanan, kemandirian dan	Melakukan transformasi tata kelola pemerintahan berkelas dunia	Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital dan berkelas dunia

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
		Penguatan Fondasi Pembangunan	Akselerasi Pembangunan	Pemantapan Pembangunan	Perwujudan Depok Sebagai Kota Peradaban
1	2	3	4	5	6
	Berbasis Digital dan Berkelas Dunia	kelola transformasi digital	kolaborasi masyarakat sipil		
		Penataan kelembagaan dan penyederhanaan regulasi berbasis riset dan inovasi daerah	Peningkatan kualitas kelembagaan dan penyederhanaan regulasi berbasis teknologi informasi	Pemantapan kelembagaan, penyederhanaan regulasi dan tata kelola berbasis teknologi informasi	<u>Perwujudan kelembagaan dan kapasitas aparatur yang berorientasi layanan, profesional, bebas korupsi dan berdaya saing global. (GC)</u>
		Peningkatan kualitas SDM aparatur dan kapasitas pemerintahan digital (<i>digital governance</i>)	Peningkatan kompetensi SDM aparatur berbasis <i>collaborative governance</i>, berorientasi layanan, profesional dan bebas korupsi	Peningkatan kompetensi SDM aparatur berbasis <i>collaborative governance</i> , berorientasi layanan, profesional, bebas korupsi dan berdaya saing global	
		Penataan kelembagaan yang adaptif dan pengembangan karir SDM aparatur daerah berbasis meritokrasi.	Penguatan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan yang adaptif dan pengembangan karir SDM aparatur daerah berbasis meritokrasi.	Pemantapan sistem meritokrasi dalam manajemen kepegawaian	

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
		Penguatan Fondasi Pembangunan	Akselerasi Pembangunan	Pemantapan Pembangunan	Perwujudan Depok Sebagai Kota Peradaban
1	2	3	4	5	6
		Penguatan infrastruktur digital dan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan agile	Peningkatan infrastruktur digital dan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan agile	Pemantapan infrastruktur digital dan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan agile	<u>Perwujudan tata kelola dan layanan pemerintahan berbasis digital dan berkelas dunia. (GC)</u>
		Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan pengaduan masyarakat.	Percepatan digitalisasi layanan publik dan system pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) One stop service layanan publik dan pengaduan masyarakat	Pemantapan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah, pelayanan publik dan pengaduan masyarakat	
		Penguatan hubungan pusat daerah dan kerja sama antar daerah	Peningkatan hubungan pusat daerah dan kerja sama antar daerah	Pemantapan hubungan pusat daerah dan kerja sama antar daerah	Perwujudan hubungan pusat daerah dan kerja sama antar daerah yang mendukung pembangunan kota berkelas dunia
		Penguatan Sinergitas Perencanaan Partisipatif Pembangunan (SAPA SABA), peningkatan	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah dan perkuatan pengendalian	Pemantapan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah dan perkuatan pengendalian	Perwujudan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah dan perkuatan pengendalian

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
		Penguatan Fondasi Pembangunan	Akselerasi Pembangunan	Pemantapan Pembangunan	Perwujudan Depok Sebagai Kota Peradaban
1	2	3	4	5	6
		pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen resiko, serta memperkuat hubungan pemerintah pusat dan daerah	pembangunan melalui penerapan manajemen resiko	pembangunan melalui penerapan manajemen resiko	pembangunan melalui penerapan manajemen resiko
	Misi 4 Mewujudkan Kota yang Aman dan Tertib Serta Menjaga Stabilitas Ekonomi Daerah	Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas ekosistem ekonomi daerah	Memantapkan supremasi hukum dan stabilitas ekosistem ekonomi yang berkeadilan dan demokratis	Memperkokoh supremasi hukum dan stabilitas ekosistem ekonomi yang berkeadilan dan demokratis	Mewujudkan rasa aman dalam kehidupan masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah
		Pembentukan produk hukum yang berkualitas dengan proses yang dialogis, dialektis, dan kritis	<u>Penegakan hukum dengan penuh kepastian dan keadilan. (GC)</u>	Pemantapan penegakan hukum dengan penuh kepastian dan keadilan	Perwujudan penegakan hukum dengan penuh kepastian dan keadilan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat
		Peningkatan kesadaran hukum masyarakat			
		Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat	Peningkatan keamanan dan ketertiban Masyarakat	Pemantapan keamanan dan ketertiban masyarakat	

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
		Penguatan Fondasi Pembangunan	Akselerasi Pembangunan	Pemantapan Pembangunan	Perwujudan Depok Sebagai Kota Peradaban
1	2	3	4	5	6
		Penyelenggaraan transformasi kelembagaan dan tata kelola, 44ternat, politik, hukum dan keamanan daerah	Peningkatan ketahanan daerah dan integrasi sosial	Pemantapan ketahanan daerah dan integrasi sosial	Perwujudan ketahanan daerah dan integrasi sosial
		Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat dan dinamis	Peningkatan budaya politik masyarakat yang sehat dan dinamis	Pemantapan budaya politik masyarakat yang sehat dan dinamis	Perwujudan budaya politik masyarakat yang sehat dan dinamis
		Penguatan pengendalian inflasi daerah	Akselerasi pengendalian inflasi daerah	Pemantapan pengendalian inflasi daerah	Perwujudan stabilitas ekonomi daerah
		Kemudahan layanan perijinan dan non perijinan	Akselerasi kapasitas fiskal daerah dan penguatan potensi pembiayaan alternatif daerah	Pemantapan kapasitas fiskal daerah dan pembiayaan alternatif daerah	<u>Perwujudan kemandirian fiskal daerah. (GC)</u>
		Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, serta			

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
		Penguatan Fondasi Pembangunan	Akselerasi Pembangunan	Pemantapan Pembangunan	Perwujudan Depok Sebagai Kota Peradaban
1	2	3	4	5	6
		<p>penguatan potensi pembiayaan alternatif</p> <p>Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Kerja sama daerah dalam pengelolaan wilayah perbatasan</p>			
			Peningkatan Kerja sama daerah dalam pengelolaan wilayah perbatasan	Pemantapan Kerja sama daerah dalam pengelolaan wilayah perbatasan	Perwujudan Kerja sama daerah dalam pengelolaan wilayah perbatasan
	Misi 5 Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi yang Berkelanjutan, inklusif dan Berbasis Ketahanan Keluarga	Membangun ketahanan sosial budaya dan ekologi secara kolaboratif, inklusif dan berkelanjutan berbasis ketahanan keluarga	Meningkatkan ketahanan sosial budaya dan ekologi secara kolaboratif, inklusif dan berkelanjutan berbasis ketahanan keluarga	Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi secara kolaboratif, inklusif dan berkelanjutan berbasis ketahanan keluarga	Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi secara kolaboratif, inklusif dan berkelanjutan berbasis ketahanan keluarga
		Pemberdayaan komunitas dalam melestarikan dan mengembangkan warisan	Akselerasi nilai-nilai luhur kebudayaan dan identitas budaya dalam sendi kehidupan masyarakat berasaskan	Pelestarian dan pemantapan kebudayaan dan tradisi masyarakat dengan memanfaatkan	<u>Penguatan nilai-nilai luhur budaya berasaskan Pancasila (GC)</u>

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
		Penguatan Fondasi Pembangunan	Akselerasi Pembangunan	Pemantapan Pembangunan	Perwujudan Depok Sebagai Kota Peradaban
1	2	3	4	5	6
		budaya	Pancasila	kemajuan teknologi.	
		Menjamin kebebasan beragama bagi seluruh masyarakat, serta penguatan karakter dan jati diri bangsa	Peningkatan kerukunan antar etnis, agama dan golongan	Pemantapan kerukunan antar etnis, agama dan golongan	Perwujudan Depok sebagai kota inklusif antar etnis, agama dan golongan
		Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, lansia dan kelompok rentan lainnya	Penguatan perlindungan anak, pengarusutamaan gender, lansia, kelompok rentan dan inklusi sosial dalam pembangunan	Pemantapan perlindungan anak, pengarusutamaan gender, lansia, kelompok rentan dan inklusi sosial dalam pembangunan	Perwujudan Depok sebagai kota ramah lansia, anak, perempuan, dan disabilitas
		Pemberdayaan perempuan, anak, pemuda, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya dalam penguatan kapasitas partisipasi pembangunan			

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
		Penguatan Fondasi Pembangunan	Akselerasi Pembangunan	Pemantapan Pembangunan	Perwujudan Depok Sebagai Kota Peradaban
1	2	3	4	5	6
		<u>Pembangunan keluarga berkualitas berbasis ketahanan keluarga. (GC)</u>	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis budaya	Pemantapan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis budaya	Perwujudan pembangunan keluarga berkualitas
		Pemberdayaan potensi olahraga masyarakat dan prestasi	Peningkatan potensi olahraga masyarakat dan prestasi	Pemantapan potensi olahraga masyarakat dan prestasi	Perwujudan potensi olahraga masyarakat dan prestasi
		Pengembangan upaya pelestarian lingkungan hidup dan ekosistem alami yang berkelanjutan	Peningkatan upaya pelestarian lingkungan hidup dan ekosistem alami yang berkelanjutan	Pemantapan upaya pelestarian lingkungan hidup dan ekosistem alami yang berkelanjutan	Perwujudan upaya pelestarian lingkungan hidup dan ekosistem alami yang berkelanjutan
		Kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pengendalian pencemaran lingkungan	Peningkatan pengendalian pencemaran udara dan air serta peningkatan ketahanan air	Pemantapan pengendalian pencemaran udara dan air serta peningkatan ketahanan air	Perwujudan pengendalian pencemaran udara dan air serta peningkatan ketahanan air
		Penurunan emisi gas rumah kaca dengan penanaman dan perlindungan pohon, penataan transportasi, pengolahan sampah	Peningkatan upaya penurunan emisi gas rumah kaca dengan penanaman dan perlindungan pohon, penataan transportasi,	Pemantapan upaya penurunan emisi gas rumah kaca dengan kemitraan dan Kerja sama	Perwujudan penurunan emisi gas rumah kaca dengan kemitraan dan Kerja sama

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
		Penguatan Fondasi Pembangunan	Akselerasi Pembangunan	Pemantapan Pembangunan	Perwujudan Depok Sebagai Kota Peradaban
1	2	3	4	5	6
		serta efisiensi konsumsi listrik rumah tangga dan komersial	pengolahan sampah serta efisiensi konsumsi listrik rumah tangga dan komersial, serta membangun kemitraan dan Kerja sama		
		Penyediaan infrastruktur energi terbarukan dan jaringan gas rumah tangga dan komersial			
		<u>Peningkatan sanitasi aman perkotaan. (GC)</u>	Percepatan peningkatan sanitasi aman perkotaan	Optimalisasi sanitasi aman perkotaan	Pemantapan sanitasi aman perkotaan
		<u>Penguatan kelembagaan persampahan, pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat dan penanganan sampah melalui penggunaan teknologi (GC)</u>	Penanganan sampah melalui penggunaan teknologi dan pengolahan residu sampah secara inovatif menuju Depok Zero Waste	Pemantapan penanganan sampah melalui penggunaan teknologi dan pengolahan residu sampah secara inovatif menuju Depok <i>Zero Waste</i>	Pewujudan Depok <i>zero waste city</i> dengan pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat serta Kerja sama fasilitas pengelolaan sampah regional Jawa Barat
		Kerja sama pengelolaan sampah melalui fasilitas pengolahan regional Jawa Barat (TPPASR Lulut Nambo)	Optimalisasi kerja sama pengelolaan sampah melalui fasilitas pengolahan regional Jawa		

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
		Penguatan Fondasi Pembangunan	Akselerasi Pembangunan	Pemantapan Pembangunan	Perwujudan Depok Sebagai Kota Peradaban
1	2	3	4	5	6
			Barat (TPPASR Lulut Nambo)		
		Pengelolaan susut dan sisa pangan (<i>food waste</i>)	Pengelolaan susut dan sisa pangan (<i>food waste</i>)	-Pengendalian susut dan sisa pangan (<i>food waste</i>)	Pengendalian susut dan sisa pangan (<i>food waste</i>)
		<u>Pengelolaan risiko bencana dan kerusakan lingkungan (GC)</u>	Penyediaan infrastruktur lingkungan dan penguatan mitigasi bencana untuk mengatasi kegawatdaruratan dan kebencanaan	Pemantapan upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kolaborasi antar pemangku kepentingan	Perwujudan kolaborasi pemangku kepentingan untuk mengendalikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
		Penguatan kebudayaan lokal dan kerukunan masyarakat multikultural	Peningkatan eksistensi kebudayaan lokal dan kerukunan masyarakat multikultural	Pemantapan eksistensi kebudayaan lokal dan kerukunan masyarakat multikultural	Perwujudan eksistensi kebudayaan local dan kerukunan masyarakat multikultural
		Pemanfaatan energi terbarukan melalui pemanfaatan teknologi di sektor publik	Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan melalui pemanfaatan teknologi di sector publik	Pemantapan pemanfaatan energi terbarukan melalui pemanfaatan teknologi di sektor publik dan privat	Pemanfaatan energi terbarukan melalui pemanfaatan teknologi di sector public, privat dan komunitas
		Penguatan pondasi ketersediaan,	Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan	Pemantapan ketahanan pangan perkotaan	<u>Perwujudan sistem ketahanan pangan</u>

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
		Penguatan Fondasi Pembangunan	Akselerasi Pembangunan	Pemantapan Pembangunan	Perwujudan Depok Sebagai Kota Peradaban
1	2	3	4	5	6
		keterjangkauan dan pemanfaatan pangan	pemanfaatan pangan serta keamanan pangan		<u>yang kokoh berbasis perkotaan. (GC)</u>
		Pengendalian kerawanan serta peningkatan kewaspadaan pangan dan gizi.	Peningkatan pengendalian kerawanan serta peningkatan kewaspadaan pangan dan gizi.	Pemantapan pengendalian kerawanan serta peningkatan kewaspadaan pangan dan gizi.	
		<u>Pembangunan Community Center, pembangunan taman, penataan ruang terbuka hijau, Kawasan wisata terpadu dan Masjid Raya Kota. (GC)</u>	Pembangunan ruang kota dan penyediaan ruang publik yang multi fungsi berbasis green dan smart city.	Pemantapan pembangunan ruang kota berbasis green dan smart city.	Perwujudan pembangunan ruang kota berbasis green dan smart city
			Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis.	Peningkatan upaya pelestarian kawasan konservasi dan ekosistem alami	Perwujudan pelestarian kawasan konservasi dan ekosistem alami.
	Misi 6 Meningkatkan Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan	Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah	Mempercepat pemerataan pembangunan wilayah	Mengoptimalkan pembangunan dan pemanfaatan Infrastruktur wilayah secara adil	Mewujudkan pembangunan wilayah secara merata dan berkeadilan

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
		Penguatan Fondasi Pembangunan	Akselerasi Pembangunan	Pemantapan Pembangunan	Perwujudan Depok Sebagai Kota Peradaban
1	2	3	4	5	6
		Penyediaan dan penataan basis data perencanaan pengadaan dan pencadangan tanah untuk kegiatan strategis pembangunan	Pengadaan dan pencadangan tanah (<i>Land Banking</i>) untuk kegiatan strategis pembangunan	Pemantapan pengadaan dan pencadangan tanah (<i>Land Banking</i>) untuk kegiatan strategis pembangunan	Perwujudan pengadaan dan pencadangan tanah (<i>Land Banking</i>) untuk kegiatan strategis pembangunan
		Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas jalan antara wilayah Barat – Timur Kota Depok	Akselerasi konektivitas dan aksesibilitas jalan antara wilayah Barat – Timur Kota Depok	Pemantapan konektivitas dan aksesibilitas jalan antara wilayah Barat – Timur Kota Depok	Perwujudan konektivitas dan aksesibilitas jalan antara wilayah Barat – Timur Kota Depok
		Pembangunan dan perluasan <i>coverage</i> sarana-prasarana pelayanan transportasi publik rendah emisi yang saling terintegrasi di wilayah metropolitan Jabodetabek	Peningkatan pembangunan dan perluasan <i>coverage</i> sarana-prasarana pelayanan transportasi publik rendah emisi yang saling terintegrasi di wilayah metropolitan Jabodetabek	Pemantapan pembangunan dan perluasan <i>coverage</i> sarana-prasarana pelayanan transportasi publik rendah emisi yang saling terintegrasi di wilayah metropolitan Jabodetabek	Pewujudan pembangunan dan perluasan <i>coverage</i> sarana-prasarana pelayanan transportasi publik rendah emisi yang saling terintegrasi di wilayah metropolitan Jabodetabek
		Penyediaan infrastruktur energi terbarukan dan jaringan gas perkotaan	Percepatan penyediaan infrastruktur energi terbarukan dan jaringan gas perkotaan	Pemantapan penyediaan energi terbarukan dan jaringan gas perkotaan	Perwujudan penyediaan energi terbarukan dan jaringan gas perkotaan

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
		Penguatan Fondasi Pembangunan	Akselerasi Pembangunan	Pemantapan Pembangunan	Perwujudan Depok Sebagai Kota Peradaban
1	2	3	4	5	6
		Pembangunan ekosistem digital dalam rangka transformasi digital di bidang social, ekonomi dan lingkungan	Peningkatan ekosistem digital untuk percepatan transformasi digital di bidang social, ekonomi dan lingkungan	Pemantapan ekosistem digital untuk percepatan transformasi digital di bidang social, ekonomi dan lingkungan	Perwujudan ekosistem digital untuk percepatan transformasi digital di bidang social, ekonomi dan lingkungan
		Penataan dan pengembangan <i>coverage</i> dan kecepatan akses internet pada area – area weak coverage dan blankspot	Peningkatan <i>coverage</i> dan kecepatan akses internet pada area – area weak coverage dan blankspot	Pemantapan <i>coverage</i> dan kecepatan akses internet pada area – area weak coverage dan blankspot	Perwujudan <i>coverage</i> dan kecepatan akses internet pada area – area weak coverage dan blankspot
		Peningkatan kapasitas tampung dan jaringan infrastruktur sumber daya air	Akselerasi kapasitas tampung dan jaringan infrastruktur sumber daya air	Pemantapan kapasitas tampung dan jaringan infrastruktur sumber daya air	Perwujudan kapasitas tampung dan jaringan infrastruktur sumber daya air

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
		Penguatan Fondasi Pembangunan	Akselerasi Pembangunan	Pemantapan Pembangunan	Perwujudan Depok Sebagai Kota Peradaban
1	2	3	4	5	6
		Pemerataan pembangunan wilayah dan pengembangan pusat pertumbuhan baru di Pusat Pelayanan Kota (PPK) dan Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK)	Percepatan pengembangan pusat pertumbuhan baru di Pusat Pelayanan Kota (PPK) dan Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK)	Pemantapan pengembangan pusat pertumbuhan baru di Pusat Pelayanan Kota (PPK) dan Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK)	Perwujudan pengembangan pusat pertumbuhan baru di Pusat Pelayanan Kota (PPK) dan Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK)
		Penyediaan transportasi umum yang inklusif secara merata ke seluruh wilayah kota	Pembangunan dan pemeliharaan ITS (intelligent Transportation System) di seluruh kawasan Kota Depok.	Pemantapan transportasi umum yang terintegrasi dengan ITS (intelligent Transportation System)	Perwujudan transportasi umum yang terintegrasi dengan ITS (intelligent Transportation System)
		Penguatan aksesibilitas antar wilayah serta peningkatan sarana dan prasarana perkotaan secara merata	Percepatan pemerataan aksesibilitas antar wilayah serta peningkatan sarana dan prasarana perkotaan	Pemantapan pemerataan aksesibilitas antar wilayah serta peningkatan sarana dan prasarana perkotaan	Perwujudan pemerataan aksesibilitas antar wilayah serta peningkatan sarana dan prasarana perkotaan
	Misi 7 Mengembangkan Sarana Prasarana	Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan dasar secara	Mempercepat penyediaan sarana dan prasarana dasar yang	Mengoptimalkan pembangunan dan pemanfaatan sarana	Mewujudkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
		Penguatan Fondasi Pembangunan	Akselerasi Pembangunan	Pemantapan Pembangunan	Perwujudan Depok Sebagai Kota Peradaban
1	2	3	4	5	6
	Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	merata dan ramah lingkungan	merata dan ramah lingkungan	dan prasarana pelayanan dasar	berkualitas dan ramah lingkungan
		Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar secara merata dan ramah lingkungan,	Percepatan penyediaan sarana dan prasarana dasar yang merata dan ramah lingkungan	Optimalisasi pembangunan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan dasar	Perwujudan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan
		Fasilitasi penyediaan akses rumah tangga terhadap hunian layak di kawasan kumuh	Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di kawasan kumuh dan atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan	Pemantapan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di kawasan kumuh dan atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan	Perwujudan hunian layak di kawasan kumuh
		Pengembangan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi	Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi aman	Pemantapan akses layanan air minum dan sanitasi aman	Perwujudan akses layanan air minum dan sanitasi aman

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN				
		TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)	
		Penguatan Fondasi Pembangunan	Akselerasi Pembangunan	Pemantapan Pembangunan	Perwujudan Depok Sebagai Kota Peradaban	
1	2	3	4	5	6	
		Peningkatan akses pelayanan air minum jaringan perpipaan				
		<u>Penguatan fondasi arah kota peradaban dengan mempertajam dimensi kota cerdas (smart city), kota kreatif (creative city) dan kota hijau (green city) (GC)</u>	Penyelarasan arah kota peradaban dengan peningkatan kota cerdas (smart city) dan kota kreatif (creative city) berbasis teknologi informasi dan pemb berkelanjutan.	Pemantapan arah kota peradaban dengan peningkatan kota hijau (green city) berbasis teknologi informasi dan pemb berkelanjutan	Perwujudan Kota Depok sbg Kota Peradaban	
			Pengembangan kebijakan yang mendorong penggunaan energi terbarukan dan efisiensi energi di seluruh kota.	Pemanfaatan teknologi hijau dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur kota.	Perwujudan dimensi green city dalam pembangunan kota berkelanjutan	
		Peningkatan fungsi sungai dan setu sebagai sumber air baku dan jaringan untuk melakukan pencegahan bencana banjir	Pengembangan kebijakan untuk pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan,	<u>Peningkatan ketahanan air melalui konservasi dan efisiensi pemanfaatan air. (GC)</u>	Perwujudan ketahanan air melalui konservasi dan efisiensi pemanfaatan air	

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
		Penguatan Fondasi Pembangunan	Akselerasi Pembangunan	Pemantapan Pembangunan	Perwujudan Depok Sebagai Kota Peradaban
1	2	3	4	5	6
	Misi 8 Mewujudkan Pembangunan yang Berkesinambungan	Menguatkan kesinambungan pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata Kelola pemerintahan	Meningkatkan kesinambungan pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan	Memantapkan kesinambungan pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata Kelola pemerintahan	Mewujudkan kesinambungan pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata Kelola pemerintahan
Penguatan pengendalian pemanfaatan ruang yang berkelanjutan		Akselerasi pengendalian pemanfaatan ruang dan struktur ruang	Optimalisasi pemanfaatan ruang dan struktur ruang	Perwujudan pemanfaatan ruang dan struktur ruang	
Penguatan kesinambungan pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata Kelola pemerintahan		Peningkatan kesinambungan pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan	Pemantapan kesinambungan pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata Kelola pemerintahan	Perwujudan kesinambungan pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata Kelola pemerintahan	
Kerja sama dan koordinasi antar daerah dalam mengatasi permasalahan perkotaan dan pengelolaan potensi antar wilayah		Penguatan kemitraan yang kuat antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan sektor swasta	Pemantapan Kerja sama dan koordinasi antar daerah dalam mengatasi permasalahan perkotaan dan pengelolaan potensi antar wilayah	Perwujudan Kerja sama dan koordinasi antar daerah dalam mengatasi permasalahan perkotaan dan pengelolaan potensi antar wilayah	

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
		Penguatan Fondasi Pembangunan	Akselerasi Pembangunan	Pemantapan Pembangunan	Perwujudan Depok Sebagai Kota Peradaban
1	2	3	4	5	6
		Penguatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.	Percepatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.	Pemantapan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.	Perwujudan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.
		Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kota	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan Pusat dan Daerah	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan Pusat dan Daerah	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan Pusat dan Daerah
		Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah			
		Evaluasi pada tahapan fondasi pembangunan 2025-2029	Evaluasi pada tahapan akselerasi pembangunan 2030-2034	Evaluasi pada tahapan Pemantapan pembangunan 2035 - 2039	Evaluasi pada tahapan pencapaian Visi Depok sebagai Kota Peradaban yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Sumber: Hasil analisis Bappeda Kota Depok, 2024

5.2. Sasaran Pokok

Sasaran pokok RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045 menggambarkan rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan. Sasaran pokok ini merupakan wujud pencapaian Visi Kota Depok 2045 yaitu Kota Peradaban yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan.

Perumusan sasaran pokok RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045 mengacu pada arah pembangunan sebagai hasil penyelarasan RPJPD Kota Depok dengan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045 dengan beberapa penyesuaian sesuai karakteristik daerah. Untuk menuju arah pembangunan yang telah ditetapkan diperlukan arah kebijakan transformasi yang relevan dengan tujuan dan tahapan pembangunan yang akan dilakukan. Selain itu sasaran pokok RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045 juga dilengkapi dengan Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang telah diselaraskan dengan IUP RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045.

5.2.1. Arah Pembangunan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) bersifat jangka panjang yang memberikan arah pembangunan jangka panjang dan khusus memuat transformatif untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Arah Pembangunan dan indikator dalam RPJPN menjadi pedoman bagi Rencana Jangka Panjang Daerah untuk menentukan sasaran, arah kebijakan, dan indikator Pembangunan. 17 (Tujuh belas) arah pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJPD Kota Depok telah diselaraskan dengan arah pembangunan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat. Keselarasan arah pembangunan tersebut tersaji dalam tabel di bawah ini :

Tabel 5. 2 Keselarasan arah pembangunan RPJPD Kota Depok dengan Arah Pembangunan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045

RPJPN	RPJPD Provinsi Jawa Barat	RPJPD Kota Depok
Transformasi Sosial		
IE1. Kesehatan untuk Semua	Pelayanan Kesehatan prima untuk semua	DE1. Kesehatan untuk Semua
IE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	Pendidikan berkualitas yang merata	DE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata
IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	Ketahanan sosial masyarakat yang berbudaya maju	DE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif
Transformasi Ekonomi		
IE 4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi		DE4. Peningkatan Produktivitas Ekonomi Daerah

RPJPN	RPJPD Provinsi Jawa Barat	RPJPD Kota Depok
	Peningkatan Produktivitas Ekonomi Daerah.	
IE 5. Penerapan Ekonomi Hijau	Penerapan Ekonomi Hijau	DE5. Penerapan Ekonomi Hijau
IE 6. Transformasi Digital	Transformasi Digital	DE6. Transformasi Digital untuk meningkatkan daya saing ekonomi
IE 7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Integrasi Rantai Pasok Produksi Dan Perdagangan Domestik Dan Global	DE7. Integrasi Ekonomi Domestik, nasional menuju tatanan ekonomi global
IE 8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Pembentukan pusat kegiatan yang mendukung kluster perekonomian di setiap wilayah pengembangan	DE8. Pengembangan Kota Depok sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional dan nasional yang nyaman
Transformasi Tata Kelola		
IE 9. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Peningkatan Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif dan Inovatif	DE09. Peningkatan pemerintahan kolaboratif yang adaptif dan inovatif berbasis digital
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia		Ekosistem Sosial, Ekonomi, Hukum dan Birokrasi yang Aman, Adil dan Demokratis
IE 10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Peningkatan Keadilan Hukum Dan Demokrasi Yang Berkualitas	DE10. Peningkatan keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas
IE 11. Stabilitas Ekonomi Makro	Terkendalinya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	DE11. Stabilitas Ekonomi Daerah
IE 12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan	Peningkatan Kerja sama Internasional Dan Ketahanan Daerah	DE12. Peningkatan Kerja sama Daerah
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi		
IE 13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Peningkatan Kerukunan Umat Beragama	DE13. Peningkatan kerukunan umat beragama dan kehidupan multikultural
IE 14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Peningkatan Kualitas Keluarga, Pemuda, Dan Kesetaraan Gender	DE14. Peningkatan ketahanan keluarga, kelompok rentan dan kesetaraan gender
IE 15.		DE15.

RPJPN	RPJPD Provinsi Jawa Barat	RPJPD Kota Depok
Lingkungan Hidup Berkualitas	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
IE 16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan, Air Dan Energi	DE16. Peningkatan ketahanan pangan, air dan energi
IE 17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana Daerah Dan Perubahan Iklim	DE17. Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim

Sumber: Hasil analisis Bappeda Kota Depok, 2024

Adapun penjelasan dari **17 (Tujuh Belas) Arah Pembangunan** Kota Depok Tahun 2025 – 2045 sebagai berikut:

1. **Kesehatan untuk Semua.** Arah pembangunan ini diprioritaskan peningkatan akses layanan kesehatan yang berkualitas, dengan menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan usia harapan hidup melalui peningkatan kesehatan ibu dan anak, penanganan penyakit menular dan tidak menular, serta perluasan jaminan kesehatan nasional. Kualitas kesehatan masyarakat menjadi indikator penting dalam menentukan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, sehingga investasi dalam layanan kesehatan merupakan strategi kunci untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif.
2. **Pendidikan Berkualitas yang Merata.** Arah pembangunan ini diprioritaskan peningkatan akses pendidikan berkualitas untuk pencapaian standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional, peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi, persentase pekerja lulusan pendidikan menengah tinggi. Selanjutnya pendidikan yang berkualitas tidak hanya pada tingkat intelektual, tetapi juga pada pengembangan aspek emosional dan spiritual. Selain itu pendidikan tidak hanya dalam lingkup pendidikan formal tetapi juga dikembangkan pendidikan non-formal yang berkualitas. Dengan demikian, pengembangan pendidikan berkualitas di Kota Depok dilakukan secara holistik dan diarahkan untuk memanfaatkan peluang potensi Kota Depok di kawasan aglomerasi Jabodetabekjur, nasional dan global.
3. **Perlindungan Sosial yang Adaptif.** Arah pembangunan ini diprioritaskan pada upaya penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek dan peningkatan persentase pekerja disabilitas di sektor

formal. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan intervensi program penanggulangan kemiskinan dan kelompok rentan secara terpadu, sistem jaminan sosial yang berkelanjutan dan pemberdayaan pekerja disabilitas.

4. **Peningkatan Produktivitas Ekonomi Daerah.** Arah pembangunan ini diprioritaskan pada peningkatan rasio PDRB, industri pengolahan, pengembangan pariwisata, proporsi PDRB ekonomi kreatif, produktivitas UMKM/ Koperasi/BUMD, partisipasi angkatan kerja perempuan, penguasaan iptek, indeks inovasi daerah dan penurunan tingkat pengangguran terbuka. Investasi dalam riset dan pengembangan teknologi didorong untuk meningkatkan produktivitas sektor-sektor ekonomi utama. Program pelatihan dan pendidikan juga akan diprioritaskan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan SDM yang berkualitas dan berdaya saing dalam bidang-bidang yang relevan dengan teknologi, inovasi dan pasar kerja.
5. **Penerapan prinsip-prinsip ekonomi hijau perlu menjadi prioritas.** Arah pembangunan ini diprioritaskan pada peningkatan penerapan ekonomi hijau, dengan mengurangi dampak lingkungan dan mendorong penggunaan sumber daya secara berkelanjutan. Hal ini termasuk promosi energi terbarukan, pengelolaan sampah dan limbah yang efisien, dan pengembangan industri ramah lingkungan. Pengembangan ekonomi yang berbasis ekonomi hijau ini juga menjadi bukti komitmen untuk menjadi kota modern yang berkelanjutan serta merepresentasikan *image* sebagai Kota Layak Huni untuk semua.
6. **Transformasi digital.** Arah pembangunan ini diprioritaskan pada peningkatan proporsi penduduk yang menggunakan internet yang dapat meningkatkan daya saing ekonomi. Adopsi teknologi informasi dan komunikasi akan didorong di berbagai sektor ekonomi, termasuk melalui promosi *e-commerce* dan pembangunan infrastruktur digital. Program-program pelatihan dan literasi digital akan diperkenalkan untuk memastikan bahwa masyarakat siap menghadapi tantangan dan peluang dalam ekonomi digital global. Dengan digitalisasi ekonomi ini juga diharapkan mampu memberikan nilai tambah yang besar dalam ekonomi Kota Depok terutama sebagai kota yang akan bertumpu pada sektor jasa, pelayanan dan perdagangan.
7. **Integrasi Ekonomi Domestik, nasional menuju tatanan ekonomi global.** Arah pembangunan ini diprioritaskan pada penurunan ketimpangan atas variasi harga antar waktu, peningkatan rasio pembentukan modal tetap bruto serta peningkatan ekspor barang dan jasa. Selanjutnya perlu perkuatan integrasi antara sektor-sektor lokal dengan pasar domestik dan global melalui pembangunan infrastruktur yang mendukung dan

promosi perdagangan internasional. Selain itu integrasi ekonomi ini juga akan mengoptimalkan posisi strategis Kota Depok di kawasan aglomerasi dengan memberikan peluang pasar yang lebih luas.

8. **Pengembangan Kota Depok sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional dan nasional yang nyaman.** Arah pembangunan ini diprioritaskan pada pencapaian kota maju, inklusif, dan berkelanjutan dengan fasilitasi rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan, serta penerapan ekonomi sirkular dalam *smart waste management* dan mewujudkan pembangunan kota cerdas (*smart city*), kota kreatif (*creative city*) dan kota hijau (*green city*).
9. **Peningkatan pemerintahan kolaboratif yang adaptif dan inovatif berbasis digital.** Arah pembangunan ini diprioritaskan pada peningkatan Indeks Reformasi Hukum, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Kepuasan Masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan *Collaborative Governance* dalam pembangunan daerah dengan mengedepankan partisipasi *stakeholder* dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Selain itu arah pembangunan ini juga ditujukan untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih efisien berbasis digital yang dapat meningkatkan kepuasan masyarakat.
10. **Peningkatan keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas.** Arah pembangunan ini diprioritaskan pada peningkatan kepatuhan daerah, peningkatan kehidupan demokrasi serta peningkatan ketentraman dan ketertiban umum. Ketentraman dan ketertiban umum diukur dengan capaian indeks ketentraman dan ketertiban umum, indeks potensi konflik sosial. Kondisi daerah yang aman dan demokratis menjadi faktor utama terwujudnya stabilitas daerah yang dapat mendukung seluruh dimensi kehidupan.
11. **Stabilitas Ekonomi Daerah.** Arah pembangunan ini diprioritaskan pada peningkatan rasio pajak daerah terhadap PDRB, pendalaman/intermediasi sektor keuangan, peningkatan persentase akses UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) ke layanan keuangan dan penurunan tingkat inflasi. Stabilitas ini membuka peluang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya perluasan akses UMKM melalui fasilitasi permodalan di lembaga-lembaga keuangan diarahkan agar UMKM menjadi produktif dan dapat menjangkau pasar lokal, nasional dan global.
12. **Peningkatan Kerja sama Daerah.** Arah pembangunan ini diprioritaskan pada peningkatan efektifitas kerja sama antar daerah dan wilayah perbatasan, serta ketahanan daerah Kota Depok. Kerja sama yang dilakukan meliputi bidang-bidang yang

saling menguntungkan dalam penyelesaian masalah-masalah perkotaan antara lain kerja sama ekonomi, sosial, reformasi birokrasi, pendidikan, kesehatan, kependudukan, kebudayaan, tata ruang, lingkungan hidup, persampahan, banjir, transportasi, air minum, limbah, infrastruktur wilayah dan energi. Dengan demikian kerja sama yang dikembangkan adalah kerja sama yang berdampak pada ketahanan daerah dan pembangunan kota berkelanjutan.

13. **Peningkatan kerukunan umat beragama dan kehidupan multikultural.** Arah pembangunan ini diprioritaskan pada peningkatan pembangunan kebudayaan dan kerukunan umat beragama. Hal ini dapat diwujudkan dengan menjaga dan memastikan kelestarian dan kemajuan budaya lokal dan adat istiadat yang multikultural, serta toleransi kehidupan beragama dalam masyarakat yang heterogen, sehingga Kota Depok menjadi rumah untuk semua warga.
14. **Peningkatan ketahanan keluarga, kelompok rentan dan kesetaraan gender.** Arah pembangunan ini diprioritaskan pada peningkatan pembangunan kualitas keluarga dan penurunan ketimpangan gender. Hal ini diwujudkan dengan upaya pemenuhan hak-hak anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, lansia dan kelompok rentan lainnya serta pembangunan keluarga berkualitas berbasis ketahanan keluarga. Paradigma ketahanan keluarga dikembangkan sebagai fondasi dalam mendukung terwujudnya ketahanan nasional.
15. **Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.** Arah pembangunan ini diprioritaskan pada peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi, peningkatan kualitas lingkungan hidup daerah, perluasan rumah tangga dengan akses sanitasi aman, perluasan cakupan rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah, peningkatan layanan pengolahan sampah, serta peningkatan cakupan rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh *stakeholder* pembangunan.
16. **Peningkatan ketahanan pangan, air dan energi.** Arah pembangunan ini diprioritaskan pada peningkatan ketahanan energi, ketahanan air dan ketahanan pangan. ketahanan energi difokuskan pada peningkatan layanan listrik perkapita dengan energi terbarukan dan peningkatan kecukupan konsumsi pangan. ketahanan air difokuskan pada peningkatan kapasitas air baku dan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan. hal ini dilakukan untuk mewujudkan Kota Depok yang berketahanan dan berkelanjutan.

17. Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim. Arah pembangunan ini diprioritaskan pada penurunan risiko bencana dan penurunan emisi gas rumah kaca, melalui pembangunan rendah karbon dan pendekatan *green and gray infrastructure* pada pembangunan kota. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan kota yang memiliki ketahanan terhadap bencana dan adaptif terhadap perubahan iklim.

5.2.2 Arah Kebijakan Transformasi

Arah kebijakan transformasi dalam RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045 menggambarkan upaya transformasi sebagai penjabaran dari arah kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045, untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, pembangunan provinsi Jawa Barat dan pembangunan Kota Depok sesuai dengan karakteristik yang dimiliki Kota Depok. Berdasarkan penyelarasan dengan arah pembangunan RPJPN Tahun 2025 -2045 dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 - 2045 maka dirumuskan arah pembangunan RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045 sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. 3 Arah Kebijakan Transformasi Kota Depok

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	
Misi 1. Mewujudkan Transformasi Sosial yang Inklusif, Sehat dan Cerdas	DE1. Kesehatan untuk Semua	Transformasi Sosial	
	1	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, serta fasilitas komunal pendukung kesehatan	
	2	Percepatan Pemberdayaan masyarakat dan perubahan perilaku dalam mempertahankan Open Defecation Free (ODF)	
	3	Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan dan profesionalisme tenaga kesehatan serta penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan (GC)	
	4	Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	
	5	Peningkatan akses pelayanan kesehatan universal yang terjangkau dan berkualitas serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat	
	6	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang paripurna	
	7	Percepatan penuntasan kasus stunting dan pencapaian zero new stunting (GC)	
	8	Pengendalian zero new stunting dari hulu ke hilir baik intervensi spesifik maupun sensitive serta peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat	
	9	Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta imunisasi dasar lengkap	
	10	Pengendalian penyakit menular dan tidak menular, eliminasi penyakit tropis, serta penyehatan lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan	
	DE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	Transformasi Sosial	
		11	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) (GC)
		12	Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta , karakter dan literasi digital
		13	Penguatan pendidikan berbasis pengembangan talenta, karakter dan literasi digital (GC)
		14	Pemerataan kualitas pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah berdaya saing global (GC)
		15	Peningkatan dan pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana
16		Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah	
17	Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan		

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	
		18	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas
		19	Penguatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan
		20	Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan
		21	Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK bagi kelompok disabilitas
		22	Akselerasi pendidikan sekolah terbuka yang berdaya saing
		23	Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan
		24	Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan atau berprestasi
		25	Penguatan riset, inovasi dan penyediaan akses pendidikan pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global
		26	Peningkatan akses pendidikan pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) (GC)
		DE3. Perlindungan Sosial Adaptif	Transformasi Sosial
	27		Percepatan perluasan keikutsertaan masyarakat dalam program jaminan sosial nasional
	28		Perluasan dan peningkatan integrasi bantuan sosial berbasis data terpadu dan penyaluran tepat sasaran
	29		Perlindungan sosial adaptif dan inklusif, bagi seluruh kelompok masyarakat terutama bagi kelompok marjinal dan rentan (GC)
30	Pemantapan penanggulangan kemiskinan perkotaan terpadu		
31	Pemberdayaan perempuan, anak, pemuda, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya dalam penguatan kapasitas dan kemandirian		
Misi 2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang kreatif, Inovatif dan bertumpu	DE4. Peningkatan Produktivitas Ekonomi Daerah	Transformasi Ekonomi	
		32	Pemantapan potensi ekonomi sektor unggulan dan jasa lain yang memiliki nilai tambah tinggi serta investasi daerah yang berdaya saing guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat
		33	Pengembangan industri kecil, menengah (IKM) terpadu yang ramah lingkungan
		34	Optimalisasi industri kecil, menengah (IKM) terpadu yang ramah lingkungan
		35	Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	
pada Ekonomi Hijau		36	Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) yang berdaya saing global (GC9)
		37	Kolaborasi penguatan riset terkait sector-sektor ekonomi produktif yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah
		38	Akselerasi pemanfaatan bonus demografi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling
		39	Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi daerah
		40	Pengembangan wisata berbasis potensi dan budaya lokal (GC)
		41	Peningkatan pariwisata berbasis potensi dan budaya dengan pemenuhan aspek 6A secara paripurna (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages)
		42	Pengembangan wisata berbasis potensi dan budaya lokal (GC)
		43	Peningkatan pariwisata berbasis potensi dan budaya dengan pemenuhan aspek 6A secara paripurna (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages)
		44	Peningkatan produktivitas BUMD
	DE5. Penerapan Ekonomi Hijau	Transformasi Ekonomi	
		45	Pemantapan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau
		46	Pemberian deregulasi dan debirokratisasi kemudahan perizinan terutama investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif, inklusif, ekonomi hijau, energi baru dan terbarukan
	DE6. Transformasi Digital untuk Meningkatkan Daya Saing Ekonomi	Transformasi Ekonomi	
		47	Peningkatan kapasitas dan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan ekosistem Ekonomi Digital dan Ekonomi Kreatif (GC10)
		48	Peningkatan <i>coverage</i> dan kecepatan akses internet pada area publik yang mendukung sektor ekonomi
		Transformasi Tata Kelola	
		49	Peningkatan kualitas SDM aparatur dan kapasitas pemerintahan digital (<i>digital governance</i>)
		50	Percepatan digitalisasi layanan publik dan system pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)
		51	<i>One stop service</i> layanan publik dan pengaduan masyarakat
	Kerangka Implementasi Transformasi		

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	
		52	Pembangunan ekosistem digital dalam rangka transformasi digital di bidang social, ekonomi dan lingkungan
		53	Peningkatan <i>coverage</i> dan kecepatan akses internet pada area - area weak coverage dan blankspot
	DE7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Nasional Menuju Tatanan Ekonomi Global	Transformasi Ekonomi	
		54	Penyediaan pelayanan transportasi publik dan logistik yang andal, untuk memperlancar distribusi barang jasa dan mendukung perekonomian daerah
		55	Peningkatan kapasitas dan akses UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global
		56	Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama
		57	Pemantapan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan yang inklusif, berkelanjutan dan berketahanan melalui kerjasama daerah dan pusat daerah
	DE8. Pengembangan Kota Depok sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Regional dan Nasional yang Nyaman	Transformasi Ekonomi	
		58	Perwujudan <i>city branding</i> Kota Depok sebagai Kota Peradaban yang dapat meningkatkan ekonomi daerah (GC12)
		59	Peningkatan layanan transportasi publik dan pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD) (GC13)
		60	Pemantapan infrastruktur perkotaan yang inklusif, berkelanjutan, berorientasi global dan berketahanan
		61	Fasilitasi akses terhadap hunian layak dan terjangkau
		62	Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, transportasi publik, pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, kota yang tahan bencana, serta sanitasi dan air minum aman
		63	Penyediaan infrastruktur air baku dan air minum
		64	Pengembangan sanitasi perkotaan
		65	Penerapan ekonomi sirkular dalam <i>smart waste management</i>
		66	Penguatan kota tahan bencana dengan pendekatan <i>green and grey infrastructure</i> pada pembangunan kota
		67	Perwujudan <i>city beautification</i> dalam rangka membangun citra wajah kota yang berkarakter dan memiliki prestise sebagai kota peradaban, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata perkotaan
		Kerangka Implementasi Transformasi	
		68	Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di kawasan kumuh dan atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	
		69	Penguatan aksesibilitas antar wilayah serta peningkatan sarana dan prasarana perkotaan secara merata
		70	Penguatan dimensi <i>green and smart city</i> dalam pembangunan kota berkelanjutan (GC25)
Misi 3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Berbasis Digital dan Berkelas Dunia	DE9. Peningkatan Pemerintahan Kolaboratif yang Adaptif dan Inovatif Berbasis Digital	Transformasi Ekonomi	
		71	Pemberian deregulasi dan debirokratisasi kemudahan perizinan terutama investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif, inklusif, ekonomi hijau, energi baru dan terbarukan
		Transformasi Tata Kelola	
		72	Penataan kelembagaan dan penyederhanaan regulasi berbasis riset dan inovasi daerah
		73	Percepatan digitalisasi layanan publik dan system pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)
		74	Peningkatan kualitas SDM aparatur dan kapasitas pemerintahan digital (digital governance)
		75	<i>One stop service</i> layanan publik dan pengaduan masyarakat
		76	Peningkatan kompetensi SDM aparatur berbasis <i>collaborative governance</i> , berorientasi layanan, profesional dan bebas korupsi
		77	Penataan kelembagaan yang adaptif dan pengembangan karir SDM aparatur daerah berbasis meritokrasi
		78	Penguatan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan yang adaptif dan pengembangan karir SDM aparatur daerah berbasis meritokrasi
		79	Perwujudan kelembagaan dan kapasitas aparatur yang berorientasi layanan, profesional, bebas korupsi dan berdaya saing global. (GC14)
		80	Perwujudan tata kelola dan layanan pemerintahan berbasis digital dan berkelas dunia (GC15)
		81	Penguatan Sinergitas Perencanaan Partisipatif Pembangunan (SAPA SABA), peningkatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen resiko, serta memperkuat hubungan pemerintah pusat dan daerah
		82	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah dan perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen resiko
		83	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah dan perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen resiko
Kerangka Implementasi Transformasi			
84	Pengadaan dan pencadangan tanah (<i>Land Banking</i>) untuk kegiatan strategis pembangunan		
85	Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kota		

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	
		86	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah
Misi 4. Mewujudkan Kota yang Aman dan Tertib Serta Menjaga Stabilitas Ekonomi Daerah	DE10. Peningkatan Keadilan Hukum dan Demokrasi yang Berkualitas	Landasan Transformasi	
		87	Penegakan hukum dengan penuh kepastian dan keadilan (GC16)
		88	Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat
		89	Peningkatan budaya politik masyarakat yang sehat dan dinamis
	DE11. Stabilitas Ekonomi Daerah	Transformasi Ekonomi	
		90	Pengembangan pusat-pusat inkubasi, pusat kreatif, infrastruktur dasar dan digital, serta perluasan akses terhadap layanan keuangan dan permodalan
		Landasan Transformasi	
		91	Penguatan pengendalian inflasi daerah
		92	Akselerasi pengendalian inflasi daerah
		93	Pemantapan pengendalian inflasi daerah
		94	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, serta penguatan potensi pembiayaan alternatif
		95	Perwujudan kemandirian fiskal daerah (GC17)
	D12. Peningkatan Kerjasama Daerah	Transformasi Tata Kelola	
96		Peningkatan hubungan pusat daerah dan kerjasama antar daerah	
Landasan Transformasi			
97	Pemantapan kerjasama daerah dalam pengelolaan wilayah perbatasan		
Misi 5. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi yang	DE13. Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Kehidupan Multikultural	Landasan Transformasi	
		98	Akselerasi nilai-nilai luhur kebudayaan dan identitas budaya dalam sendi kehidupan masyarakat berasaskan Pancasila
		99	Penguatan nilai-nilai luhur budaya berasaskan Pancasila (GC19)
		100	Peningkatan kerukunan antar etnis, agama dan golongan

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	
Berkelanjutan, inklusif dan Berbasis Ketahanan Keluarga	DE14. Peningkatan Ketahanan Keluarga, Kelompok Rentan dan Kesetaraan Gender	Landasan Transformasi	
		101	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, lansia dan kelompok rentan lainnya
		102	Pemberdayaan perempuan, anak, pemuda, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya dalam penguatan partisipasi pembangunan
		103	Penguatan perlindungan anak, pengarusutamaan gender, kelompok rentan dan inklusi sosial dalam pembangunan
		104	Pembangunan keluarga berkualitas berbasis ketahanan keluarga (GC)
		105	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis budaya
	DE15. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Transformasi Sosial	
		106	Percepatan Pemenuhan sarana dan prasarana sanitasi dalam mempertahankan Open Defecation Free (ODF)
		Landasan Transformasi	
		107	Peningkatan sanitasi aman perkotaan (GC)
		108	Penguatan kelembagaan persampahan, pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat dan penanganan sampah melalui penggunaan teknologi (GC)
		109	Pewujudan Depok <i>zero waste city</i> dengan pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat serta kerjasama fasilitas pengelolaan sampah regional Jawa Barat
		110	Pembangunan Community Center, pembangunan taman, penataan ruang terbuka hijau, Kawasan wisata terpadu dan Masjid Raya Kota (GC)
		111	Peningkatan pengendalian pencemaran udara dan air serta peningkatan ketahanan air
	DE16. Peningkatan Ketahanan Pangan, Air dan Energi	Transformasi Ekonomi	
		112	Penyediaan infrastruktur air baku dan air minum
		113	Percepatan peningkatan produktivitas pertanian perkotaan yang berkelanjutan melalui <i>smart farming</i> (pertanian, perikanan, peternakan)
		114	Pemantapan produktivitas pertanian perkotaan yang berkelanjutan melalui <i>smart farming</i> dan perluasan akses pembiayaan pertanian perkotaan
115		Penyiapan pusat riset pembibitan dan varietas unggul pertanian perkotaan	
116		Penyediaan infrastruktur air baku dan air minum	

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
		Landasan Transformasi
		117 Peningkatan pengendalian pencemaran udara dan air serta peningkatan ketahanan air
		118 Perwujudan sistem ketahanan pangan yang kokoh berbasis perkotaan (GC 18)
		119 Peningkatan pengendalian pencemaran udara dan air serta peningkatan ketahanan air
		120 Penyediaan infrastruktur energi terbarukan dan jaringan gas rumah tangga dan komersial
		Kerangka Implementasi Transformasi
	121 Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi aman	
	122 Peningkatan ketahanan air melalui konservasi dan efisiensi pemanfaatan air (GC)	
	DE17. Peningkatan Ketahanan Bencana Daerah dan Perubahan Iklim	Landasan Transformasi
		123 Peningkatan upaya pelestarian lingkungan hidup dan ekosistem alami yang berkelanjutan
		124 Pengelolaan risiko bencana dan kerusakan lingkungan (GC)
		125 Pembangunan ruang kota dan penyediaan ruang publik yang multi fungsi berbasis green dan smart city.
		126 Penurunan emisi gas rumah kaca dengan penanaman dan perlindungan pohon, penataan transportasi, pengolahan sampah serta efisiensi konsumsi listrik rumah tangga dan komersial
		Kerangka Implementasi Transformasi
127 Peningkatan kapasitas tampung dan jaringan infrastruktur sumber daya air		
128 Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis		
129 Penguatan pengendalian pemanfaatan ruang yang berkelanjutan		
130 Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana pelayanan transportasi publik rendah emisi yang saling terintegrasi di wilayah metropolitan Jabodetabek		
131 Penyediaan infrastruktur energi terbarukan dan jaringan gas perkotaan		

Sumber: Hasil analisis Bappeda Kota Depok, 2024

5.2.3. Indikator Utama Pembangunan

Sasaran pokok pembangunan Kota Depok diturunkan dan diselaraskan dengan arah pembangunan pada masing-masing misi dan setiap arah pembangunan dilengkapi dengan indikator utama pembangunan (IUP). IUP ini memberikan ukuran yang lebih jelas untuk masing-masing arah pembangunan Kota Depok dalam periode waktu dua puluh tahun. IUP yang digunakan dalam RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045 ini selaras dengan IUP yang digunakan dalam RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045, terdiri dari 45 indikator dengan beberapa penyesuaian. IUP memuat *baseline* target tahun 2025 dan target pencapaian tahun 2045 dari masing-masing indikator, yang merepresentasikan arah pembangunan Kota Depok dalam periode waktu dua puluh tahun. Selanjutnya IUP Kota Depok yang telah diselaraskan dengan IUP Nasional dan IUP Provinsi Jawa Barat tersaji dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5. 4 Keselarasan Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045, RPJPN dan RPJPD Jawa Barat Tahun 2025-2045

No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045		No.	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Kota Depok 2025-2045		
		Target RPJPN			Target RPJPD Provinsi Jawa Barat				Target RPJPD KOTA DEPOK		
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045			Baseline 2025	Target 2045	
TRANSFORMASI SOSIAL				TRANSFORMASI SOSIAL				TRANSFORMASI SOSIAL			
IE1	Kesehatan untuk Semua			Pelayanan Kesehatan Prima untuk Semua			DE 01	Kesehatan untuk Semua			
1	Usia Harapan Hidup (tahun)	74,4	80	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,29	80,78	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,87	79,4
2	Kesehatan Ibu dan Anak :			2	Kesehatan Ibu dan Anak :			2	Kesehatan Ibu dan Anak :		
a.	Angka kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	122	16	a.	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	151	15	a.	Jumlah Kasus Kematian Ibu per tahun (jumlah)	35	5
b.	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	18,80	5,0	b.	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	19,0	5,0	b.	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	12,54	3,3
3	Insidensi Tuberkolisis (per 100.000 penduduk)	272	76	3	Penanganan Tuberkulosis:			3	Penanganan Tuberkulosis:		
				a.	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)*	95	95	a	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	91	98
				b.	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)*	88	98	b	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	91	98
4	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional (%)	98,0	99,5	4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	95,52	99,50	4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	96,99	100
IE2	Pendidikan Berkualitas yang Merata			Pendidikan Berkualitas yang Merata			DE 02	Pendidikan Berkualitas yang Merata			
5	Hasil pembelajaran			5	Hasil pembelajaran			5	Hasil pembelajaran		
a.	Rata-rata nilai PISA			a)	Persentase kabupaten/kota yang			a	Persentase satuan pendidikan Jenjang		

No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045		No.	RPJPD Kota Depok 2025-2045		
		Target RPJPN			Target RPJPD Provinsi Jawa Barat			Target RPJPD KOTA DEPOK		
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045	
				mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:				SD yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:		
	- Membaca	396	485	i) Literasi Membaca	25,93 - 33,33	70,37 - 74,07		i) Kemampuan Literasi	69,96 - 71,96	89,96 - 91,96
	- Matematika	404	490	ii) Numerasi	7,41 - 14,81	62,96 - 66,67		ii) Kemampuan Numerasi	53,21 - 55,21	78,21 - 80,21
	- Sains	416	487	b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:			b	Persentase satuan pendidikan Jenjang SMP yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:		
b.	Rata - rata nilai asesmen nasional			i) Literasi Membaca	45,30 - 47,30	71,42 - 73,42		i) Kemampuan Literasi	79,38 - 81,38	94,38 - 96,38
	- Literasi Membaca	62,89	75,73	ii) Numerasi	34,83 - 36,83	63,01 - 65,01		ii) Kemampuan Numerasi	68,47 - 70,47	85,47 - 87,47
	- Numerasi	54,36	68,72							
b.	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,33	12,0	c) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,52 - 9,53	12,05 - 12,09	c	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	11,87	13
c.	Harapan lama sekolah	13,32	14,81	d) Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,87 - 12,88	14,24 - 14,29	d	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,99	14,85
6	Angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan tinggi (%)	33,94	60,00	6 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)*	9,64	9,64 - 14,50	6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)*	44,01 - 47,5	65

No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045		No.	RPJPD Kota Depok 2025-2045			
		Target RPJPN			Target RPJPD Provinsi Jawa Barat			Target RPJPD KOTA DEPOK			
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		
7	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja dibidang keahlian menengah tinggi (%)	66,78	75,00	7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	68,19	75,00	7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi**	77,17	90
IE3	Perlindungan sosial yang adaptif			Ketahanan social masyarakat yang berbudaya maju			DE 03	Perlindungan sosial yang adaptif			
8	Tingkat kemiskinan (%)	7,0 – 8,0	0,5 – 0,8	8	Tingkat Kemiskinan (%)	5,85 – 6,46	0,09 - 0,59	8	Tingkat Kemiskinan (%)	1,79 - 1,98	0.03 - 0.18
9	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	43,19	99,5	9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	39,77	80,04	9	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (%)**	55	85.00
10	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	22,0	60,0	10	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	24	70	10	Persentase pekerja disabilitas di sektor formal (%)**	0,42	2
IE4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi			Peningkatan produktivitas ekonomi daerah			DE 04	Peningkatan Produktivitas Ekonomi Daerah			
11	Produktivitas Industri dan Pertanian			11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	41,87 -42,00	46,43 – 47,60	11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	28,52	26,53
a.	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	20,8	28								
b.	Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	3,2 – 3,4	3,3 – 4,2								
12	Pengembangan Pariwisata			12	Pengembangan Pariwisata			12	Pengembangan Pariwisata		
a.	Rasio PDB Pariwisata (%)	4,6	8		a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	3,15	5,36		a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	4,15	5,87
b.	Devisa Pariwisata (Milliar USD)	22,10	100		b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	536,6	1341,5		b. Jumlah Tamu Wisatawan	1,9	10,00

No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045		No.	RPJPD Kota Depok 2025-2045			
		Target RPJPN			Target RPJPD Provinsi Jawa Barat			Target RPJPD KOTA DEPOK			
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		
					(Hotel Berbintang) (Ribu Orang)*				Mancanegara (Ribu Orang)**		
13	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	7,92	11,00	13	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	22,81	18,69	13	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	15,64	25
14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN			14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD			14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD		
a.	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	1,44	5,0		a.i Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi (%)	10,37	12,03				
				a.ii Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	5,62	9,52	a	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kota (%)	4,9	15	
b.	Rasio kewirausahaan (%)	3,14	8,0		b.Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,50	9,86	b	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,35	9,13
c.	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%)	1,1	5,0		c. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,05	6,03	c	Rasio Koperasi Primer Kota (%)**	82,14	83,67-85
d.	Return of Asset (ROA) BUMN (%)	3,4	5,6		d. Return on Aset (ROA) BUMD (%)*	1,62	5,56	d	Return on Aset (ROA) BUMD (%)*	2,59-2,70	5,00 - 5,60
15	Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,50 – 5,00	4,00	15	Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik			15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,49 - 5,98	3,53 - 4,39
					a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,42 – 6,99	5,16 – 6,14				
					b. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	45	86				
16	Tingkat partisipasi Angkatan kerja perempuan (%)	56,30	70,0	16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	49,88	62,30	16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	48,92 - 52,00	70
17	Tingkat penguasaan IPTEK			17	Tingkat Penguasaan IPTEK			17	Tingkat Penguasaan IPTEK		
a.	Pengeluaran iptek dan inovasi (% PDB)	0,30	2,2-2,3		a. Indeks Inovasi Daerah	71,76	81,76	a	Indeks Inovasi Daerah	52	75

No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045		No.	RPJPD Kota Depok 2025-2045			
		Target RPJPN			Target RPJPD Provinsi Jawa Barat			Target RPJPD KOTA DEPOK			
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		
b.	Peringkat Indeks Inovasi Global (peringkat)	60	30 besar								
IE5	Penerapan Ekonomi Hijau			Penerapan Ekonomi Hijau			DE 05	Penerapan Ekonomi Hijau			
18	Tingkat penerapan ekonomi hijau			18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			
a.	Indeks Ekonomi Hijau	70,80	90.65	a	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	61.3	85.05	a	Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Pilar Ekonomi)	66.82	78.20
b.	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	20	70	b	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	23.4	67.91				
IE6	Transformasi Digital			Transformasi Digital			DE 06	Transformasi Digital untuk meningkatkan daya saing ekonomi			
19	Indeks Daya Saing Digital Ditingkat Global (peringkat)	43	20 besar	19	Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi*	6.4	8,0	19	Proporsi penduduk yang menggunakan internet (%)**	90-92	100
IE7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			DE 07	Integrasi Ekonomi Domestik, nasional menuju tatanan ekonomi global			
20	Biaya logistic (% PDB)	13,5	8,0	20	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi*	7.88	5,00	20	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Kota*	5,26 - 5,75	4,1 - 5,0
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	30,1 – 30,2	27,2	21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	24.72	21,07	21	Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	54.78	55.39
22	Ekspor Barang Dan Jasa (% PDB)	21,0 – 21,6	40,0	22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	24,42	29,32	22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	4.5	15
IE8	Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			Pembentukan Pusat Kegiatan yang mendukung kluster perekonomian di setiap wilayah pengembangan			DE 08	Pengembangan Kota Depok sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional dan nasional yang nyaman			
23	Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan			23	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			23	Kota Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan		
a.	Proporsi kontribusi PDRB wilayah	44,34	48.92	a.	Proporsi kontribusi PDRB wilayah	24,63 WM Jakarta (terdiri dari DKI Jakarta, Kota Bogor, Kab	31,19 WM Jakarta (terdiri dari DKI Jakarta, Kota Bogor, Kab				

No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045		No.	RPJPD Kota Depok 2025-2045			
		Target RPJPN			Target RPJPD Provinsi Jawa Barat			Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPD KOTA DEPOK		
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045			Baseline 2025	Target 2045	
	metropolitan terhadap nasional (%)			metropolitan terhadap nasional (%)	Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kab Tangerang, Kota Tangsel, Kota Bekasi, Kab Bekasi, Kab Cianjur 3,34% Wm Bandung (terdiri dari Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab. Bandung, Kab Bandung Barat dan Kab Sumedang	Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kab Tangerang, Kota Tangsel, Kota Bekasi, Kab Bekasi, Kab Cianjur 4,80% Wm Bandung (terdiri dari Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab. Bandung, Kab Bandung Barat dan Kab Sumedang					
b.	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	67,00	100	a. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	56.95	100	a	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	53.54	100.00	
c.	Persentase Desa Mandiri (%)	4,00	16,25	b. Persentase Desa Mandiri (%)	12.26	35.51					
TRANSFORMASI TATA KELOLA				TRANSFORMASI TATA KELOLA				TRANSFORMASI TATA KELOLA			
IE9	Regulasi dan Tata Kelola yang berintegrias dan adaptif				Peningkatan pemerintahan yang berintegrasi, adaptif dan inovatif			DE 09	Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola berbasis sistem digital dan pelayanan prima		
24	Indeks materi hukum	0,51	0,71	24	Indeks Reformasi Hukum*	90.7	100	24	Indeks Reformasi Hukum*	97.01	100
25	Indeks system pemerintahan berbasis elektronik	3,12	5,00	25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,30	5,00	25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.7	5
	Indeks pelayanan publik	3,68	5,00	26	Indeks Pelayanan Publik	4,60	5,00	26	Indeks Pelayanan Publik	3.87	5
7	Anti Korupsi			27	Indeks Integritas Nasional	72,96	87.89	27	Indeks Kepuasan Masyarakat **	84,5-85,5	90
a.	Indeks integritas nasional	74,52	96,98								
b.	Indeks persepsi korupsi	38	60								

No	RPJPN 2025-2045			RPJPD 2025-2045			RPJPD Kota Depok 2025-2045				
	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPN		Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPD Provinsi Jawa Barat		No.	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPD KOTA DEPOK		
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045			Baseline 2025	Target 2045	
SUPREMASI HUKUM, STABILITAS, DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA				KEAMANAN DAERAH TANGGUH, DEMOKRASI SUBSTANSIAL DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH							
IE10	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial			Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial <i>(nomenklatur dapat disesuaikan dengan karakteristik daerah)</i>			DE 10	Lingkungan sosial politik yang kondusif dan penegakan hukum yang berkeadilan			
28	Indeks Pembangunan Hukum	0,69	0,89	28	a. Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	70	100	28	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	70	100
					b. Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	70	90	29	Ketentraman dan Ketertiban Umum		
29	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	62.8 (2020)	80	29	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	51.78	69.16	a	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	77,3	85
								b	Indeks Potensi Konflik Sosial	1.58	1.18
30	Indeks demokrasi Indonesia	Sedang (60-80)	Tinggi (>80)	30	Indeks Demokrasi Indonesia	Tinggi	Tinggi	30	Indeks Demokrasi Indonesia	82.6	83.79
IE11	Stabilitas Ekonomi Makro			Terkendalinya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah			DE 11	Stabilitas Ekonomi			
31	Rasio pajak terhadap PDB (%)	10,0-12,0	18,0-20,0	31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,58	4.6	31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,70	4 - 4,5
32	Tingkat inflasi (%)	2,5 ± 1	2,0 ± 1	32	Tingkat Inflasi (%)	3,3 - 3,8	1,1 - 3,2	32	Tingkat Inflasi (%)	2,5 ± 1	2,0 ± 1
33	Pendalaman/Intermediasi sektor keuangan			33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan			33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan		
a.	Aset perbankan/PDB (%)	66.9	200		Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) *	25.31	78,10	a	Proporsi PDRB Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi**	4,35-4,4	7,5 - 10
b.	Aset dana pensiun/PDB (%)	7.6	60		Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,95	9,85	34	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)	20	90

No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045		No.	RPJPD Kota Depok 2025-2045			
		Target RPJPN			Target RPJPD Provinsi Jawa Barat			Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPD KOTA DEPOK		
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045			Baseline 2025	Target 2045	
								ke layanan keuangan**			
c.	Aset asuransi/PDB (%)	9.1	20		Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan*	6.256.296,31	121,148,522,37				
d.	Kapitalisasi pasar modal/PDB (%)	57.8	120		Total Kredit/PDRB (%)	23.7	73.8				
e.	Total kredit/PDB (%)	37.8	80-90								
34	Inklusi keuangan (%)	91	98	34	Inklusi Keuangan (%)	94.22	99.03				
IE12	Ketangguhan Diplomasi dan Berdaya Gentar Kawasan				Peningkatan Kerja sama International dan Ketahanan Daerah		DE 12	Peningkatan Kerja sama Daerah			
35	Asia Power Index (Diplomatic Influencer)	60,4 (2023)	75,0-80,0	35	Efektivitas Kerja sama International	90,91 (2023)	100	35	Efektifitas Kerja Sama	60	80
36	Asia Power Index (Military Capability)	14,16 (2023)	45	36	Indeks Ketahanan Nasional Daerah Jawa Barat	3,022	4,5	36	Indeks Ketahanan Dearah Kota Depok	0,52 (2023)	0.65
KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI				KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI				KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI			
IE13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju				Peningkatan Kerukunan Umat Beragama		DE 13	Kelestarian dan kemajuan budaya lokal, kearifan tradisional, adat dan agama			
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	58,39	68,15	37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	56,70 - 56,73	65,99 - 66,28	37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	54,09 - 54,1	66,08 - 66,41
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,77	84.20	38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	74,79 - 74,85	81,68 - 82,32	38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	3.5	4
IE14	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif				Peningkatan Keluarga Berkualitas, Pemuda dan Kesetaraan Gender		DE 14	Pemajuan kebudayaan Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, Masyarakat Inklusif dan Perlindungan Anak, Perempuan, Disabilitas dan Kelompok Rentan			
39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	70,29	80,00	39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	70,92 - 70,95	75,81 - 76,05	39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	63,15 (IPK: 2023)	80
40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,425	0.15	40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,459 -0,458	0,230 - 0,215	40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,152 -0,149	0,124 - 0.095

No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045		No.	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Kota Depok 2025-2045		
		Target RPJPN			Target RPJPD Provinsi Jawa Barat				Target RPJPD KOTA DEPOK		
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045			Baseline 2025	Target 2045	
IE15	Lingkungan Hidup Berkualitas				Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup		DE 15	Lingkungan Hidup Berkualitas			
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,44	0,75	41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0.557	0.741	41	Efektifitas pengelolaan kawasan konservasi (point)	74	80
42	Kualitas Lingkungan Hidup			42	Kualitas Lingkungan Hidup			42	Kualitas Lingkungan Hidup		
a.	Indeks kualitas lingkungan hidup	76,68	74,15		a. Indeks kualitas lingkungan hidup	64,06	72,08	a	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (poin)	57,87	62,91
b.	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	12,5	70,0		b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	10,49	85,00	b	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	15,41	86.91
c.	Timbulan sampah terolah difasilitasi pengolahan sampah (%)	24 (16% terdaur ulang)	90 (35% terdaur ulang)		c. Pengelolaan Sampah	11	90	c	Pengelolaan Sampah		
					i. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)			i.	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	4,87	84,08
					ii Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)	48	100	ii.	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)	84,90	100
IE16	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan				Peningkatan Ketahanan Pangan dan Energi			DE 16	Ketahanan Energi, Air dan Pangan		
43	Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan			43	Ketahanan energi, air, dan pangan			43	Ketahanan energi, air, dan pangan		
a.	Ketahanan Energi				a. Ketahanan Energi			a	Ketahanan Energi		
	Indeks ketahanan energi	6,67	8,24		i. Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	1,404	2,670	i.	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	1.415	2.700
					ii. Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*	191	165				

No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045		No.	RPJPD Kota Depok 2025-2045			
		Target RPJPN			Target RPJPD Provinsi Jawa Barat			Target RPJPD KOTA DEPOK			
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		
b.	Prevalensi ketidakcukupan pangan (%)	7,21	0,77	b. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	4,58	0,32	b	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	1,47	0,10	
c.	Ketahanan air			c. Ketahanan Air			c	Ketahanan Air			
	Kapasitas tampungan air per kapita (m3/kapita)	65,18	200	i. Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	4.93	63.12	i.	Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	4,92	13,34	
	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	39,20	100	ii. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	34.74	100	ii.	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	32,66	100,00	
IE17	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			Peningkatan Ketahanan Bencana Daerah dan Iklim			DE 17	Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim			
44	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB (%)	0,137	0.11	44 Indeks Risiko Bencana (IRB)*	109,18	92,98 – 79,08	44	Indeks Risiko Bencana (IRB)*	80,44	76,44	
45	Presentasi penurunan emisi GRK (%)			45 Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			
a.	Kumulatif	28.12	51.51	a. Kumulatif	2.66	31.65	a	Kumulatif (Ton Co2eq)	42.061,46	5.126.563,62	
b.	Tahunan	32.65	80.89	b. Tahunan	9.27	70.08					

Keterangan:

*indikator proxy Provinsi Jawa Barat

**indikator proxy Kota Depok

Sumber: RPJPN 2025-2045, RPJPD Jawa Barat 2025-2045, Hasil Analisis Bappeda Kota Depok, 2024 (diolah)

Selanjutnya untuk menstrukturkan perumusan sasaran pokok pembangunan Kota Depok Tahun 2025-2045 disusun secara sistemik dan terstruktur mulai dari misi, arah pembangunan, arah kebijakan transformasi daerah dan target indikator utama pembangunan, sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5. 5 Perumusan Sasaran Pokok Kota Depok Tahun 2025-2045

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan	
					Baseline 2025	Target 2045			
TRANSFORMASI SOSIAL									
1	Mewujudkan Transformasi Sosial yang Inklusif, Sehat dan Cerdas	DE 1. Kesehatan untuk Semua	1	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, serta fasilitas komunal pendukung kesehatan	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,87	79,4	Terwujudnya pelayanan Kesehatan Prima Untuk Semua
			2	Percepatan Pemberdayaan masyarakat dan perubahan perilaku dalam mempertahankan Open Defecation Free (ODF)	2	Kesehatan Ibu dan Anak:	35	5	
			3	Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan dan profesionalisme tenaga kesehatan serta penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan					
			4	Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan					
			5	Percepatan penuntasan kasus stunting dan pencapaian zero new stunting					
			6	Pengendalian zero new stunting dari hulu ke hilir baik intervensi spesifik maupun sensitive serta peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat					
			7	Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta imunisasi dasar lengkap					

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target		Sasaran Pokok	Keterangan
							Baseline 2025	Target 2045		
			8	Pengendalian penyakit menular dan tidak menular, eliminasi penyakit tropis, serta penyehatan lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan	b	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	91	98		
			9	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang paripurna	4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	96,99	100		
			10	Peningkatan akses pelayanan kesehatan universal yang terjangkau dan berkualitas serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat						
		DE 2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	11	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)	5	Hasil pembelajaran			Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata	
			12	Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta, karakter dan literasi digital	a	Persentase satuan pendidikan Jenjang SD yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*: i) Kemampuan Literasi	69,96 - 71,96	89,96 - 91,96		
			13	Penguatan pendidikan berbasis pengembangan talenta, karakter dan literasi digital						
			14	Pemerataan kualitas pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah berdaya saing global		ii) Kemampuan Numerasi	53,21 - 55,21	78,21 - 80,21		
			15	Peningkatan dan pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana	b	Persentase satuan pendidikan Jenjang SMP yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*: i) Kemampuan Literasi	79,38 - 81,38	94,38 - 96,38		
			16	Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah		ii) Kemampuan Numerasi	68,47 - 70,47	85,47 - 87,47		
			17	Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan						
			18	Pemberdayaan masyarakat local untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas	c	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	11,87	13		

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target		Sasaran Pokok	Keterangan
							Baseline 2025	Target 2045		
			19	Penguatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan	d	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,99	14,85		
			20	Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan	6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)*	44,01 - 47,5	65		
			21	Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK bagi kelompok disabilitas	7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi**	77,17	90		
			22	Akselerasi pendidikan sekolah terbuka yang berdaya saing						
			23	Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan						
			24	Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan atau berprestasi						
			25	Penguatan riset, inovasi dan penyediaan akses pendidikan pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global						
			26	Peningkatan akses pendidikan pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics)						
		DE 3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	27	Pemantapan penanggulangan kemiskinan perkotaan terpadu	8	Tingkat Kemiskinan (%)	1,79 - 1,98	0,03 - 0,18	Terwujudnya ketahanan sosial masyarakat yang kuat dan dinamis	
			28	Perluasan dan peningkatan integrasi bantuan sosial berbasis data terpadu dan penyaluran tepat sasaran						
			29	Percepatan perluasan keikutsertaan masyarakat dalam program jaminan sosial nasional	9	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (%)**	55	85.00		
			30	Perlindungan sosial adaptif dan inklusif, bagi seluruh kelompok masyarakat terutama bagi kelompok marjinal dan rentan						

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target		Sasaran Pokok	Keterangan
							Baseline 2025	Target 2045		
			31	Pemberdayaan perempuan, anak, pemuda, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya dalam penguatan kapasitas kemandirian	10	Persentase pekerja disabilitas di sektor formal (%)**	0,42	2		
TRANSFORMASI EKONOMI										
	Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang kreatif, Inovatif dan bertumpu pada Ekonomi Hijau	DE 4. Peningkatan Produktivitas Ekonomi Daerah	32	Pemantapan potensi ekonomi sektor unggulan dan jasa lain yang memiliki nilai tambah tinggi serta investasi daerah yang berdaya saing guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat	11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	28,52	26,53	Meningkatnya Produktivitas ekonomi daerah	
33			Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi daerah							
				12	Pengembangan Pariwisata	a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)* b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribuan Orang)**	4,15	5,87		
34			Pengembangan wisata berbasis potensi dan budaya lokal (GC11)							
35			Peningkatan pariwisata berbasis potensi dan budaya dengan pemenuhan aspek 6A secara paripurna (atraksi, aksesibilitas, amenitas, <i>ancillary services</i> , aktivitas, <i>available packages</i>)							
36			Peningkatan kapasitas dan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan ekosistem Ekonomi Digital dan Ekonomi Kreatif (GC10)	13	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	15,64	25			
				14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD	a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kota (%) b. Rasio Kewirausahaan Daerah (%) c. Rasio Koperasi Primer Kota (%)**	4,9	15		
37			Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan							
38			Pengembangan industri kecil, menengah (IKM) terpadu yang ramah lingkungan							
		39	Optimalisasi industri kecil, menengah (IKM) terpadu yang ramah lingkungan		3,35	9,13				
					82,14	83,67-85				

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan					
						Baseline 2025	Target 2045							
			40	Peningkatan produktivitas BUMD	d. Return on Aset (ROA) BUMD (%)*	2,59-2,70	5,00 - 5,60							
			41	Akselerasi pemanfaatan bonus demografi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling	15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,49 - 5,98	3,53 - 4,49						
			16		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	48,92 - 52,00	70							
			42	Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) yang berdaya saing global (GC9)	17	Tingkat Penguasaan IPTEK								
			43							a. Indeks Inovasi Daerah	52	75		
		DE 5. Penerapan Ekonomi Hijau	44	Pemberian deregulasi dan debirokratisasi kemudahan perizinan terutama investasi pada sector-sektor ekonomi produktif, inklusif, ekonomi hijau, energi baru dan terbarukan	18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			Meningkatnya Penerapan Ekonomi Hijau					
			45							a	Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Pilar Ekonomi)	66,82	78,20	
			46							Penyediaan infrastruktur energi terbarukan dan jaringan gas perkotaan				
		DE 6. Transformasi Digital untuk meningkatkan daya saing ekonomi	47	Peningkatan <i>coverage</i> dan kecepatan akses internet pada area publik yang mendukung sektor ekonomi	19	Proporsi penduduk yang menggunakan internet (%)**	90-92	100	Terwujudnya Transformasi Digital dalam meningkatkan daya saing ekonomi					
			48							Peningkatan <i>coverage</i> dan kecepatan akses internet pada area - area <i>weak coverage</i> dan <i>blankspot</i>				
			49							Pembangunan ekosistem digital dalam rangka transformasi digital di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan				
		DE 7. Integrasi ekonomi domestik dan nasional menuju tatanan ekonomi global	50	Peningkatan kapasitas dan akses UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global	20	Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	5,26 - 5,75	4,1 - 5,0	Terwujudnya Integrasi ekonomi domestik dan nasional menuju tatanan ekonomi global					
			51							Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama	21	Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	54,78	55,39
			52							Penyediaan pelayanan transportasi publik dan logistik yang andal, untuk	22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	4.5	15

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
						Baseline 2025	Target 2045		
				memperlancar distribusi barang jasa dan mendukung perekonomian daerah					
			53	Pemantapan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan yang inklusif, berkelanjutan dan berketahanan melalui kerjasama daerah dan pusat daerah					
		DE 8. Pengembangan Kota Depok sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional dan nasional yang nyaman			23	Kota Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan a Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	53,54	100,00	Terwujudnya Pengembangan Kota Depok sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional dan nasional yang nyaman
	54		Fasilitasi akses terhadap hunian layak dan terjangkau	a					
	55		Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, hunian vertikal perkotaan, transportasi publik, pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, kota yang tahan bencana, serta sanitasi dan air minum aman						
	56		Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di Kawasan kumuh dan atau urban renewal pada area yang telah mengalami <i>urban decay</i> dalam suatu kawasan perkotaan						
	57		Penyediaan infrastruktur air baku dan air minum						
	58		Pengembangan sanitasi perkotaan						
	59		Penerapan ekonomi sirkular dalam <i>smart waste management</i>						
	61		Pemantapan infrastruktur perkotaan yang inklusif, berkelanjutan, berorientasi global dan berketahanan						
	62		Penguatan aksesibilitas antar wilayah serta peningkatan sarana dan prasarana perkotaan secara merata						
	63		Peningkatan layanan transportasi publik dan pengembangan kawasan <i>Transit Oriented Development</i> (TOD) (GC13)						

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target		Sasaran Pokok	Keterangan
							Baseline 2025	Target 2045		
			64	Penguatan fondasi arah kota peradaban dengan mempertajam dimensi kota cerdas (<i>smart city</i>), kota kreatif (<i>creative city</i>) dan kota hijau (<i>green city</i>) (GC25)						
			65	Perwujudan <i>city branding</i> Kota Depok sebagai Kota Peradaban yang dapat meningkatkan ekonomi daerah (GC12)						
			66	Perwujudan <i>city beautification</i> dalam rangka membangun citra wajah kota yang berkarakter dan memiliki prestise sebagai kota peradaban, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata perkotaan						
TRANSFORMASI TATA KELOLA										
	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Berbasis Digital dan Berkelas Dunia	DE 9. Peningkatan pemerintahan kolaboratif yang adaptif dan inovatif berbasis digital	67	Penataan kelembagaan dan penyederhanaan regulasi berbasis riset dan inovasi daerah	24	Indeks Reformasi Hukum*	97.01	100	Terwujudnya pemerintahan kolaboratif yang adaptif dan inovatif berbasis digital	
68			Pemberian deregulasi dan debirokratisasi kemudahan perizinan terutama investasi pada sector-sektor ekonomi produktif, inklusif, ekonomi hijau, energi baru dan terbarukan							
69			Percepatan digitalisasi layanan publik dan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.7	5			
70			Peningkatan kualitas SDM aparatur dan kapasitas pemerintahan digital (<i>digital governance</i>)							
71			<i>One stop service</i> layanan publik dan pengaduan masyarakat							
72			Perwujudan tata kelola dan layanan pemerintahan berbasis digital dan berkelas dunia (GC15)							
73			Perwujudan kelembagaan dan kapasitas aparatur yang berorientasi layanan, profesional, bebas korupsi dan berdaya saing global. (GC14)	26	Indeks Pelayanan Publik	3.87	5			
74			Peningkatan kompetensi SDM aparatur berbasis <i>collaborative governance</i> , berorientasi layanan, profesional dan bebas korupsi							

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target		Sasaran Pokok	Keterangan
							Baseline 2025	Target 2045		
			75	Penataan kelembagaan yang adaptif dan pengembangan karir SDM aparatur daerah berbasis meritokrasi.						
			76	Penguatan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan yang adaptif dan pengembangan karir SDM aparatur daerah berbasis meritokrasi						
			77	Pengadaan dan pencadangan tanah (<i>Land Banking</i>) untuk kegiatan strategis pembangunan						
			78	Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kota						
			79	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah						
			80	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah dan perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen resiko	27	Indeks Kepuasan Masyarakat **	84,5-85,5	90		
			81	Penguatan Sinergitas Perencanaan Partisipatif Pembangunan (SAPA SABA), peningkatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen resiko, serta memperkuat hubungan pemerintah pusat dan daerah						
EKOSISTEM SOSIAL, EKONOMI, HUKUM DAN BIROKRASI YANG AMAN ADIL DAN DEMOKRATIS										
	Mewujudkan Kota yang Aman dan Tertib Serta Menjaga Stabilitas Ekonomi Daerah	DE 10. Peningkatan keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas	82	Penegakan hukum dengan penuh kepastian dan keadilan (GC16)	28	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	70	100	Terwujudnya keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas	
29					Ketentraman dan Ketertiban Umum					
83			Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat	a	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	77,3	85			
				b	Indeks Potensi Konflik Sosial	1.58	1.18			
84			Peningkatan budaya politik masyarakat yang sehat dan dinamis	30	Indeks Demokrasi Indonesia	82.6	83.79			
	DE 11. Stabilitas Ekonomi Daerah	85	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui pendapatan pajak daerah dan	31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,70	4 - 4,5			

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target		Sasaran Pokok	Keterangan	
							Baseline 2025	Target 2045			
				retribusi daerah, serta penguatan potensi pembiayaan alternatif					Terkendalinya stabilitas Ekonomi Daerah		
			86	Penguatan pengendalian inflasi daerah	32	Tingkat Inflasi (%)	2,5 ± 1	2,0 ± 1			
			87	Akselerasi pengendalian inflasi daerah	33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan a Proporsi PDRB Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi**	4,35-4,4	7,5 - 10			
			88	Pemantapan pengendalian inflasi daerah							
			89	Perwujudan kemandirian fiskal daerah (GC17)							
			90	Pengembangan pusat-pusat inkubasi, pusat kreatif, infrastruktur dasar dan digital, serta perluasan akses terhadap layanan keuangan dan permodalan	34	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan**	20	90			
		DE 12. Peningkatan Kerjasama Daerah	91	Peningkatan hubungan pusat daerah dan kerjasama antar daerah	35	Efektifitas Kerja Sama	60	80	Meningkatnya Kerja Sama Daerah		
			92	Pemantapan kerjasama daerah dalam pengelolaan wilayah perbatasan	36	Indeks Ketahanan Daerah Kota Depok	0,52	0.65			
KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI											
	Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi yang Berkelanjutan, inklusif dan Berbasis Ketahanan Keluarga	DE 13. Peningkatan kerukunan umat beragama dan kehidupan multikultural	93	Akselerasi nilai-nilai luhur kebudayaan dan identitas budaya dalam sendi kehidupan masyarakat berasaskan Pancasila	37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	54,09 - 54,1	66,08 - 66,41	Meningkatnya kerukunan umat beragama dan kehidupan multikultural		
94			Penguatan nilai-nilai luhur budaya berasaskan Pancasila								
95			Peningkatan kerukunan antar etnis, agama dan golongan	38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	3.5	4				
		DE 14. Peningkatan ketahanan keluarga, kelompok rentan dan kesetaraan gender		96	Pembangunan keluarga berkualitas berbasis ketahanan keluarga (GC)	39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	63,15	80	Meningkatnya ketahanan keluarga, kelompok rentan dan kesetaraan gender	
97				Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis budaya							
98				Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, lansia dan kelompok rentan lainnya	40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,152 - 0,149	0,124 - 0.095			
99				Penguatan perlindungan anak, pengarusutamaan gender, kelompok							

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan	
						Baseline 2025	Target 2045			
				rentan dan inklusi sosial dalam pembangunan						
			100	Pemberdayaan perempuan, anak, pemuda, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya dalam penguatan kapasitas partisipasi pembangunan						
		DE 15. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	101	Pembangunan Community Center, pembangunan taman, penataan ruang terbuka hijau, Kawasan wisata terpadu dan Masjid Raya Kota (GC)	41	Efektifitas pengelolaan kawasan konservasi (%)	74	80	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	
					42	Kualitas Lingkungan Hidup				
			102	Peningkatan pengendalian pencemaran udara dan air serta peningkatan ketahanan air	a	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (poin)	57,87	62,91		
			103	Percepatan Pemenuhan sarana dan prasarana sanitasi dalam mempertahankan <i>Open Defecation Free</i> (ODF)	b	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	15,41	86,91		
			104	Peningkatan sanitasi aman perkotaan (GC)						
					c	Pengelolaan Sampah				
			105	Penguatan kelembagaan persampahan, pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat dan penanganan sampah melalui penggunaan teknologi (GC20)	i.	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	4,87	84,08		
			106	Pewujudan Depok <i>zero waste city</i> dengan pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat serta kerjasama fasilitas pengelolaan sampah regional Jawa Barat	ii.	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)	84,90	100,00		
		DE 16. Peningkatan ketahanan pangan, air dan energi			43	Ketahanan energi, air, dan pangan			Meningkatnya ketahanan pangan, air dan energi	
					a	Ketahanan Energi				
			107	Penyediaan infrastruktur energi terbarukan dan jaringan gas rumah tangga dan komersial	i.	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	1,415	2,700		

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target		Sasaran Pokok	Keterangan
							Baseline 2025	Target 2045		
			108	Percepatan peningkatan produktivitas pertanian perkotaan yang berkelanjutan melalui smart farming (pertanian, perikanan, peternakan)	b	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	1,47	0,10		
			109	Pemantapan produktivitas pertanian perkotaan yang berkelanjutan melalui smart farming dan perluasan akses pembiayaan pertanian perkotaan						
			110	Perwujudan sistem ketahanan pangan yang kokoh berbasis perkotaan (GC 18)						
			111	Penyiapan pusat riset pembibitan dan varietas unggul pertanian perkotaan						
					c	Ketahanan Air				
			112	Penyediaan infrastruktur air baku dan air minum	i.	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	4,92	13,34		
			113	Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi aman	ii.	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	32,66	100,00		
			114	Peningkatan ketahanan air melalui konservasi dan efisiensi pemanfaatan air (GC24)						
			115	Peningkatan pengendalian pencemaran udara dan air serta peningkatan ketahanan air						
	DE 17. Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim		116	Peningkatan upaya pelestarian lingkungan hidup dan ekosistem alami yang berkelanjutan	44	Indeks Risiko Bencana (IRB)*	80,44	76,44	Meningkatnya ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim	
			117	Pengelolaan risiko bencana dan kerusakan lingkungan (GC23)						
			118	Peningkatan kapasitas tampung dan jaringan infrastruktur sumber daya air						
			119	Peningkatan ketahanan bencana dengan pendekatan <i>green and grey infrastructure</i> pada pembangunan kota						
			120	Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis						
			121	Penguatan pengendalian pemanfaatan ruang yang berkelanjutan						

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan		Target		Sasaran Pokok	Keterangan
						Baseline 2025	Target 2045		
				45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)				
			122	Penurunan emisi gas rumah kaca dengan penanaman dan perlindungan pohon, penataan transportasi, pengolahan sampah serta efisiensi konsumsi listrik rumah tangga dan komersial	a	Kumulatif (Ton Co2eq)	42.061,46	5.126.563,62	
		123	Pembangunan dan perluasan <i>coverage</i> sarana-prasarana pelayanan transportasi publik rendah emisi yang saling terintegrasi di wilayah metropolitan Jabodetabek						
		124	Penyediaan infrastruktur energi terbarukan dan jaringan gas perkotaan						

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kota Depok, 2024

*indikator proxy Provinsi Jawa Barat

**indikator proxy Kota Depok

Selanjutnya untuk mencapai sasaran pokok dan arah pembangunan RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045 digunakan alat ukur IUP dengan target yang ditetapkan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. 6 Sasaran Pokok RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	RPJPD Kota Depok 2025-2045			
		Indikator Utama Pembangunan		Target	
		(1)	(2)	Baseline 2025	Target 2045
Terwujudnya pelayanan Kesehatan Prima Untuk Semua	DE1. Kesehatan untuk Semua	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,87	79,4
		2	Kesehatan Ibu dan Anak:		
		a	Jumlah Kasus Kematian Ibu per tahun (jumlah)	35	5

RPJPD Kota Depok 2025-2045					
Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		Target	
				Baseline 2025	Target 2045
		b	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	12,54	3,3
		3	Penanganan Tuberkulosis:		
		a	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	91	98
		b	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	91	98
		4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	96,99	100
Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata	DE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	5	Hasil pembelajaran		
		a	Persentase satuan pendidikan Jenjang SD yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:		
			i) Kemampuan Literasi	69,96 - 71,96	89,96 - 91,96
			ii) Kemampuan Numerasi	53,21 - 55,21	78,21 - 80,21
		b	Persentase satuan pendidikan Jenjang SMP yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:		
			i) Kemampuan Literasi	79,38 - 81,38	94,38 - 96,38
			ii) Kemampuan Numerasi	68,47 - 70,47	85,47 - 87,47
		c	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	11,87	13
		d	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,99	14,85
		6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)*	44,01 - 47,5	65
		7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi**	77,17	90
	DE3.	8	Tingkat Kemiskinan (%)	1,79 - 1,98	0,03 - 0,18

RPJPD Kota Depok 2025-2045						
Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan			Target	
				Baseline 2025	Target 2045	
Terwujudnya ketahanan sosial masyarakat yang kuat dan dinamis	Perlindungan sosial yang adaptif	9	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (%)**	55	85,00	
		10	Persentase pekerja disabilitas di sektor formal (%)**	0,42	2	
Meningkatkannya Produktivitas ekonomi daerah	DE4. Peningkatan Produktivitas Ekonomi Daerah	11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	28,52	26,53	
		12	Pengembangan Pariwisata			
			a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	4,15	5,87	
			b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)**	1,9	10,00	
		13	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	15,64	25	
		14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD			
			a. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kota (%)	4,9	15	
			b. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,26	7,44	
			c. Rasio Koperasi Primer Kota (%)**	82,14	83,67-85	
			d. Return on Aset (ROA) BUMD (%)*	2,59-2,70	5,00 - 5,60	
		15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,49 - 5,98	3,53 - 4,39	
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	48,92 - 52,00	70			
17	Tingkat Penguasaan IPTEK					
	a. Indeks Inovasi Daerah	52	75			
Meningkatnya Penerapan Ekonomi Hijau	DE5. Penerapan Ekonomi Hijau	18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			
		a	Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Pilar Ekonomi)	66,82	78,20	
Terwujudnya Transformasi Digital	DE6.	19	Proporsi penduduk yang menggunakan internet (%)**	90-92	100	

RPJPD Kota Depok 2025-2045						
Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan			Target	
					Baseline 2025	Target 2045
dalam meningkatkan daya saing ekonomi	Transformasi Digital untuk meningkatkan daya saing ekonomi					
Terwujudnya Integrasi ekonomi domestik dan nasional menuju tatanan ekonomi global	DE7. Integrasi ekonomi domestik dan nasional menuju tatanan ekonomi global	20	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Kota*	5,26 - 5,75	4,1 - 5,0	
		21	Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	54,78	5,395	
		22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	4.5	15	
Terwujudnya Pengembangan Kota Depok sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional dan nasional yang nyaman	DE8. Pengembangan Kota Depok sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional dan nasional yang nyaman	23	Kota Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			
		a	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	53,54	100,00	
Terwujudnya pemerintahan kolaboratif yang adaptif dan inovatif berbasis digital	DE9. Peningkatan pemerintahan kolaboratif yang adaptif dan inovatif berbasis digital	24	Indeks Reformasi Hukum*	97.01	100	
		25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,7	5	
		26	Indeks Pelayanan Publik	3,87	5	
		27	Indeks Kepuasan Masyarakat**	84,5 - 85,5	90	
Terwujudnya keadilan hukum dan	DE10.	28	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	70	100	
		29	Ketentraman dan Ketertiban Umum			

RPJPD Kota Depok 2025-2045						
Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan			Target	
					Baseline 2025	Target 2045
demokrasi yang berkualitas	Peningkatan keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas	a	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum		77,3	85
		b	Indeks Potensi Konflik Sosial		1.58	1.18
		30	Indeks Demokrasi Indonesia		82.6	83.79
Terkendalinya stabilitas Ekonomi Daerah	DE11. Stabilitas Ekonomi Daerah	31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)		1,70	4 - 4,5
		32	Tingkat Inflasi (%)		2,5 ± 1	2,0 ± 1
		33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan			
		a	Proporsi PDRB Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi**		4,35-4,4	7,5 - 10
		34	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan**		20	90
Meningkatnya Kerja Sama Daerah	DE12. Peningkatan Kerja sama Daerah	35	Efektifitas Kerja Sama		60	80
		36	Indeks Ketahanan Dearah Kota Depok		0,52	0.65
Meningkatnya kerukunan umat beragama dan kehidupan multikultural	DE13. Peningkatan kerukunan umat beragama dan kehidupan multikultural	37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)		54,09 - 54,1	66,08 - 66,41
		38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)		3.5	4
Meningkatnya ketahanan keluarga, kelompok rentan dan kesetaraan gender	DE14. Peningkatan ketahanan keluarga, kelompok rentan dan kesetaraan gender	39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga		63,15	80
		40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		0,152 -0,149	0,124 - 0.095

RPJPD Kota Depok 2025-2045						
Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan			Target	
					Baseline 2025	Target 2045
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	DE15. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	41	Efektifitas pengelolaan kawasan konservasi (poin)		74	80
		42	Kualitas Lingkungan Hidup			
		a	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (poin)		57,87	62,91
		b	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)		15,41	86,91
		c	Pengelolaan Sampah			
		d	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)		4,87	84,08
		e	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)		84,90	100,00
Meningkatnya ketahanan pangan, air dan energi	DE16. Peningkatan ketahanan pangan, air dan energi	43	Ketahanan energi, air, dan pangan			
		a	Ketahanan Energi			
		i.	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*		1,415	2,700
		b	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)		1,47	0,10
		c	Ketahanan Air			
		i.	Kapasitas Air Baku (m3/detik)		4,92	13,34
		ii.	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)		32.66	100.00
Meningkatnya ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim	DE17. Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim	44	Indeks Risiko Bencana (IRB)*		80,44	76,44
		45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			
		a	Kumulatif		42.061,46	5.126.563,62

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kota Depok, 2024

* indikator proxy Provinsi Jawa Barat

** indikator proxy Kota Depok

Tabel 5. 6 Hubungan Visi dengan Sasaran Pokok RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045

Visi	Misi	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan		Target			
					Baseline 2025	Target 2045		
MAJU	TRANSFORMASI EKONOMI							
	2	Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang kreatif, Inovatif dan bertumpu pada Ekonomi Hijau	Meningkatnya Produktivitas ekonomi daerah	11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	28,52	26,53	
				12	Pengembangan Pariwisata			
					a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	4,15	5,87	
					b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)**	1,9	10	
				13	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	15,64	25	
				14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD			
					a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kota (%)	4,9	15	
					a. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kota (%)	4,9	15	
					b. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,35	9,13	
					c. Rasio Koperasi Primer Kota (%)**	82,14	83,67-85	
					d. Return on Aset (ROA) BUMD (%)*	2,59-2,70	3,53 – 4,39	
				15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,49 – 5,98	3,53 4,39	
				16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	48,92 - 52,00	70	
				17	Tingkat Penguasaan IPTEK			
					a. Indeks Inovasi Daerah	52	75	
				Meningkatnya Penerapan Ekonomi Hijau	18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		
					a	Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Pilar Ekonomi)	66,82	78,20

Visi	Misi	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan		Target		
					Baseline 2025	Target 2045	
		Terwujudnya Transformasi Digital dalam meningkatkan daya saing ekonomi	19	Proporsi penduduk yang menggunakan internet (%)**	90-92	100	
		Terwujudnya Integrasi ekonomi domestik dan nasional menuju tatanan ekonomi global	20	Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	5,26 - 5,75	4,1 - 5,0	
			21	Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	54,78	55,39	
			22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	4.5	15	
		Terwujudnya Pengembangan Kota Depok sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional dan nasional yang nyaman	23	Kota Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			
			a	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	53,54	100	
EKOSISTEM SOSIAL, EKONOMI, HUKUM DAN BIROKRASI YANG AMAN ADIL DAN DEMOKRATIS							
4	Mewujudkan Kota yang Aman dan Tertib Serta Menjaga Stabilitas Ekonomi Daerah	Terwujudnya keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas	28	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	70	100	
			29	Ketentraman dan Ketertiban Umum			
			a	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	77,3	85	
			b	Indeks Potensi Konflik Sosial	1.58	1.18	
			30	Indeks Demokrasi Indonesia	82.6	83.79	
			Terkendalinya stabilitas Ekonomi Daerah	31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,7 -2023	4 - 4,5
		32		Tingkat Inflasi (%)	2,5 ± 1	2,0 ± 1	
		33		Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan			
		a		Proporsi PDRB Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi**	4,35-4,4	7,5 - 10	
		34		Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan**	20	90	

Visi	Misi	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan		Target				
					Baseline 2025	Target 2045			
		Meningkatnya Kerja Sama Daerah	35	Efektifitas Kerja Sama	60	80			
			36	Indeks Ketahanan Daerah Kota Depok	0,52	0.65			
SEJAHTERA	1	Mewujudkan Transformasi Sosial yang Inklusif, Sehat dan Cerdas	TRANSFORMASI SOSIAL						
			Terwujudnya pelayanan Kesehatan Prima Untuk Semua	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,87	79,4		
				2	Kesehatan Ibu dan Anak:				
				a	Jumlah Kasus Kematian Ibu per tahun (jumlah)	35	5		
				b	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	12,54	3,3		
				3	Penanganan Tuberkulosis:				
				a	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	91	98		
				b	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	91	98		
				4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	96,99	100		
				Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata	5	Hasil pembelajaran			
		a			Persentase satuan pendidikan Jenjang SD yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:				
			i) Kemampuan Literasi		69,96 - 71,96	89,96 - 91,96			
			ii) Kemampuan Numerasi		53,21 - 55,21	78,21 - 80,21			
		b	Persentase satuan pendidikan Jenjang SMP yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:						
			i) Kemampuan Literasi		79,38 - 81,38	94,38 - 96,38			
			ii) Kemampuan Numerasi		68,47 - 70,47	85,47 - 87,47			
		c	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	11,87	13				

Visi	Misi	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan		Target			
					Baseline 2025	Target 2045		
			d	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,99	14,85		
			6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)*	44,01 - 47,5	65		
			7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi**	77,17	90		
		Terwujudnya ketahanan sosial masyarakat yang kuat dan dinamis	8	Tingkat Kemiskinan (%)	1,79 - 1,98	0,03 - 0,18		
			9	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (%)**	55	85,00		
			10	Persentase pekerja disabilitas di sektor formal (%)**	0,42	2		
		TRANSFORMASI TATA KELOLA						
		3	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Berbasis Digital dan Berkelas Dunia	Terwujudnya pemerintahan kolaboratif yang adaptif dan inovatif berbasis digital	24	Indeks Reformasi Hukum*	97.01	100
					25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.7	5
					26	Indeks Pelayanan Publik	3.87	5
27	Indeks Kepuasan Masyarakat **				84,5-85,5	90		
BERKELANJUTAN	KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI							
	5	Meningkatnya kerukunan umat beragama dan kehidupan multikultural	37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	54,09 - 54,1	66,08 - 66,41		
			38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	3.5	4		
		Meningkatnya ketahanan keluarga, kelompok rentan dan kesetaraan gender	39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	63,15 (IPK: 2023)	80 (IPK)		
			40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,152 - 0,149	0,124 - 0,095		
			41	Efektifitas pengelolaan kawasan konservasi (%)	74	80		

Visi	Misi	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan		Target	
					Baseline 2025	Target 2045
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	42	Kualitas Lingkungan Hidup		
			a	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (poin)	57,87	62,91
			b	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	15,41	86,91
			c	Pengelolaan Sampah		
			i.	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	4,87	84,08
			ii.	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)	84,90	100
		Meningkatnya ketahanan pangan, air dan energi	43	Ketahanan energi, air, dan pangan		
			a	Ketahanan Energi		
			i.	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	1,415	2,7
			b	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	1,47	0,10
			c	Ketahanan Air		
			i.	Kapasitas Air Baku (liter/detik)*	4,92	13,34
		ii.	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	32,66	100,00	
		Meningkatnya ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim	44	Indeks Risiko Bencana (IRB)*	80,44	76,44
			45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)		
			a	Kumulatif (Ton Co2eq)	42.061,46	5.126.563,62

Sumber : data diolah Bappeda Kota Depok, 2024

5.3. Upaya Transformasi Super Prioritas (*Game Changer*)

Dalam upaya mencapai tujuan visi Depok Emas 2045 sekaligus visi Provinsi Jawa Barat dan Visi Indonesia Emas 2045, terdapat beberapa upaya transformasi prioritas (*game changer*) Kota Depok yang dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan proses pembangunan super prioritas Kota Depok dalam kurun waktu dua puluh tahun. *Game changer* pembangunan Kota Depok ini diturunkan dari *game changer* RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat dengan penyesuaian dan penambahan berdasarkan kebutuhan pembangunan Kota Depok. *Game changer* ini dikelompokkan sesuai dengan agenda transformasi pembangunan nasional dan daerah sebagaimana berikut :

Transformasi Sosial

1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)
2. Penguatan pendidikan berbasis pengembangan talenta, karakter dan literasi digital
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan dan profesionalisme tenaga kesehatan serta penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan
4. Pemerataan kualitas pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah berdaya saing global
5. Percepatan penuntasan kasus stunting dan pencapaian zero new stunting
6. Peningkatan akses pendidikan pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics)
7. Perlindungan sosial adaptif dan inklusif, bagi seluruh kelompok masyarakat terutama bagi kelompok marjinal dan rentan

Transformasi Ekonomi

8. Peningkatan layanan transportasi publik dan pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD)
9. Pengembangan wisata berbasis potensi dan budaya lokal
10. Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) yang berdaya saing global
11. Peningkatan kapasitas dan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan ekosistem Ekonomi Digital dan Ekonomi Kreatif
12. Perwujudan city branding Kota Depok sebagai Kota Peradaban yang dapat meningkatkan ekonomi daerah

Transformasi Tata Kelola

13. Perwujudan kelembagaan dan kapasitas aparatur yang berorientasi layanan, profesional, bebas korupsi dan berdaya saing global.
14. Perwujudan tata kelola dan layanan pemerintahan berbasis digital dan berkelas dunia

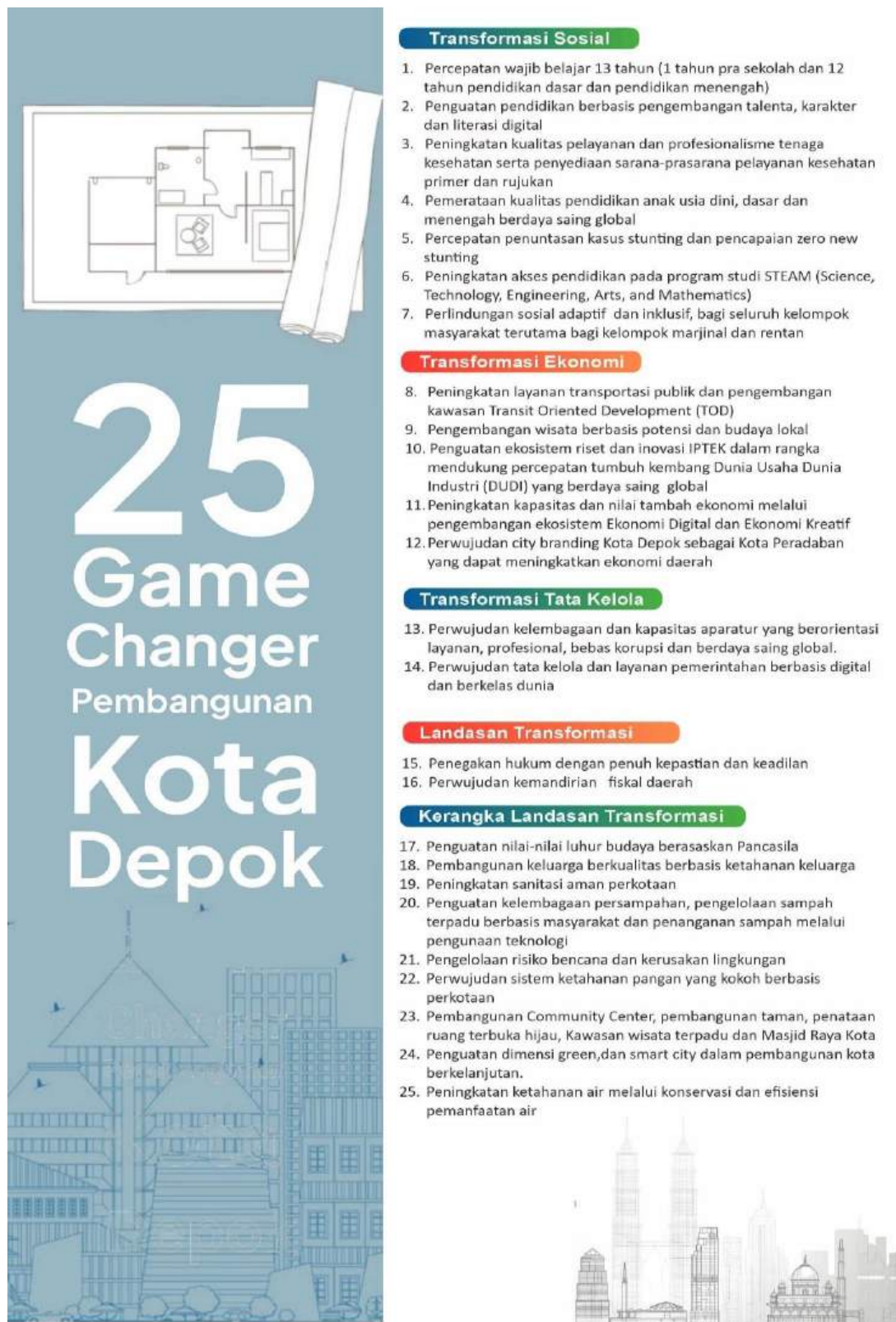
Landasan Transformasi

15. Penegakan hukum dengan penuh kepastian dan keadilan
16. Perwujudan kemandirian fiskal daerah

Kerangka Landasan Transformasi

17. Penguatan nilai-nilai luhur budaya berasaskan Pancasila
18. Pembangunan keluarga berkualitas berbasis ketahanan keluarga
19. Peningkatan sanitasi aman perkotaan
20. Penguatan kelembagaan persampahan, pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat dan penanganan sampah melalui penggunaan teknologi
21. Pengelolaan risiko bencana dan kerusakan lingkungan
22. Perwujudan sistem ketahanan pangan yang kokoh berbasis perkotaan
23. Pembangunan Community Center, pembangunan taman, penataan ruang terbuka hijau, Kawasan wisata terpadu dan Masjid Raya Kota
24. Penguatan dimensi green dan smart city dalam pembangunan kota berkelanjutan.
25. Peningkatan ketahanan air melalui konservasi dan efisiensi pemanfaatan air

Gambar 5.10 Game Changers RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045



25 Game Changer Pembangunan Kota Depok

Transformasi Sosial

1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)
2. Penguatan pendidikan berbasis pengembangan talenta, karakter dan literasi digital
3. Peningkatan kualitas pelayanan dan profesionalisme tenaga kesehatan serta penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan
4. Pemerataan kualitas pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah berdaya saing global
5. Percepatan penuntasan kasus stunting dan pencapaian zero new stunting
6. Peningkatan akses pendidikan pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics)
7. Perlindungan sosial adaptif dan inklusif, bagi seluruh kelompok masyarakat terutama bagi kelompok marjinal dan rentan

Transformasi Ekonomi

8. Peningkatan layanan transportasi publik dan pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD)
9. Pengembangan wisata berbasis potensi dan budaya lokal
10. Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) yang berdaya saing global
11. Peningkatan kapasitas dan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan ekosistem Ekonomi Digital dan Ekonomi Kreatif
12. Perwujudan city branding Kota Depok sebagai Kota Peradaban yang dapat meningkatkan ekonomi daerah

Transformasi Tata Kelola

13. Perwujudan kelembagaan dan kapasitas aparatur yang berorientasi layanan, profesional, bebas korupsi dan berdaya saing global.
14. Perwujudan tata kelola dan layanan pemerintahan berbasis digital dan berkelas dunia

Landasan Transformasi

15. Penegakan hukum dengan penuh kepastian dan keadilan
16. Perwujudan kemandirian fiskal daerah

Kerangka Landasan Transformasi

17. Penguatan nilai-nilai luhur budaya berasaskan Pancasila
18. Pembangunan keluarga berkualitas berbasis ketahanan keluarga
19. Peningkatan sanitasi aman perkotaan
20. Penguatan kelembagaan persampahan, pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat dan penanganan sampah melalui penggunaan teknologi
21. Pengelolaan risiko bencana dan kerusakan lingkungan
22. Perwujudan sistem ketahanan pangan yang kokoh berbasis perkotaan
23. Pembangunan Community Center, pembangunan taman, penataan ruang terbuka hijau, Kawasan wisata terpadu dan Masjid Raya Kota
24. Penguatan dimensi green, dan smart city dalam pembangunan kota berkelanjutan.
25. Peningkatan ketahanan air melalui konservasi dan efisiensi pemanfaatan air

Sumber: Hasil analisis Bappeda Kota Depok, 2024



Penutup

Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2025 - 2045

BAB VI

PENUTUP

RPJPD ini disusun melalui tahapan proses perumusan kebijakan dimulai dari identifikasi permasalahan dan isu strategis hingga formulasi kebijakan dengan melakukan analisis secara tematik, holistik, integratif dan spasial yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan aktor-aktor pembangunan. Demikian pula sebagai bagian integral dari proses perencanaan pembangunan nasional, RPJPD Kota Depok tegak lurus merujuk pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat.

Dalam mewujudkan visi RPJPD Kota Depok 2025-2045 diperlukan kolaborasi seluruh pihak melalui prinsip-prinsip pemerintahan kolaboratif (*collaborative governance*) dan pemerintahan dinamis (*dynamic governance*). Dengan demikian RPJPD ini bukan hanya sebagai dokumen perencanaan, tetapi sebagai peta jalan (*road map*) menuju Kota Depok sebagai Kota Peradaban yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan pada tahun 2045.

6.1. Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok merupakan dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam menjalankan pembangunan Kota Depok dalam periode dua puluh tahun. Dalam implementasi kebijakan pembangunan Kota Depok diperlukan keterpaduan dan keselarasan antar pelaku pembangunan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. RPJPD ini harus diikuti dengan manajemen risiko serta sumber pendanaan yang jelas dan terukur untuk melaksanakan rencana pembangunan secara fokus dan akuntabel. Selain itu, diperlukan kerangka regulasi dan kaidah pelaksanaan yang terstruktur untuk memastikan bahwa seluruh program pembangunan dapat menjadi perencanaan yang komprehensif, holistik dan terintegrasi.

Dokumen RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045 ditetapkan sebagai pedoman dalam:

1. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan serta dokumen perencanaan lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Depok.
2. Menyusun visi dan misi bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
3. Memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian visi dan misi daerah.

4. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi yang baik antar urusan pemerintahan daerah.
5. Menjadi acuan dalam memberikan arahan bagi penentu kebijakan pembangunan.
6. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dalam rangka untuk menjamin pelaksanaan yang efektif dan komprehensif, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD) harus dijaga untuk memastikan keselarasan dan kesinambungan dalam pembangunan daerah.
2. Untuk menjaga kesinambungan dalam penyusunan kebijakan daerah, calon Walikota dan calon Wakil Walikota harus merujuk pada RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045 dan menjadikannya sebagai pedoman dalam menyusun visi dan misi daerah, yang selanjutnya digunakan sebagai bagian dari muatan RPJMD Kota Depok untuk periode 5 tahunan.
3. Pemerintah daerah dan DPRD Kota Depok, dengan didukung oleh instansi vertikal serta seluruh pemangku kepentingan dan aktor-aktor pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan arah kebijakan pembangunan didalam RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045.
4. Wali Kota Depok dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045 dengan menggerakkan secara optimal semua potensi dan kekuatan daerah.
5. Sekretaris Daerah Kota Depok dan dibantu oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perencanaan, berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJPD Kota Depok Tahun 2025 - 2045
6. Penerapan Kerangka Logis Kinerja dan *Cascading* diperlukan untuk menghubungkan tujuan jangka panjang dengan strategi jangka menengah dan jangka pendek.
7. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJPD Kota Depok, Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perencanaan berkewajiban untuk mengkoordinasikan penyusunan RPJMD yang merupakan penjabaran RPJPD, membangun komunikasi pemerintahan dan pembangunan secara berkesinambungan, tentang muatan, serta mengkoordinasikan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kota Depok.
8. Pengendalian dan Evaluasi antar Dokumen (RKPD, RPJMD, dan RPJPD) harus dilakukan secara terkoordinasi untuk memastikan implementasi yang efektif.
9. Mekanisme Perubahan harus diatur dengan jelas sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk menanggapi perubahan kondisi atau kebijakan.

10. Komunikasi publik harus ditingkatkan melalui keterlibatan pemangku kepentingan untuk memastikan partisipasi yang luas dalam pembangunan daerah.
11. Pembiayaan pembangunan (Non Pemerintah) perlu ditingkatkan melalui kemitraan dengan sektor swasta, lembaga keuangan dan lembaga ZISWAF (Zakat, Infak, Sodakoh dan Wakaf) untuk mendukung program-program pembangunan.

Untuk memastikan optimalisasi pelaksanaan RPJPD Kota Depok maka perlu diperhatikan kerangka regulasi yang terstruktur yang mencakup pada:

1. Regulasi Daerah yang akan diatur harus disusun untuk mendukung implementasi RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045.
2. Regulasi Daerah yang akan diubah perlu disesuaikan agar sesuai dengan visi dan misi pembangunan jangka panjang.

6.2. Pembiayaan

RPJPD Kota Depok diharapkan dapat dilaksanakan dengan dukungan sumber pembiayaan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sumber pembiayaan pembangunan yang dapat digunakan antara lain bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Barat dan APBD Kota Depok. Selain itu, dimungkinkan pembiayaan pembangunan dilakukan dengan menggunakan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, seperti pembiayaan alternatif (KPBU, *blended finance*, penerbitan obligasi daerah, dan/atau sukuk daerah) serta *Corporate Social Responsibility (CSR)*

6.3. Mitigasi Risiko

Dalam implementasi visi, misi, tujuan, dan sasaran pokok pada RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045, akan dihadapkan dengan sejumlah tantangan dan hambatan yang berpengaruh dalam capaian keberhasilan. Keberlangsungan rencana pembangunan dipengaruhi oleh kemampuan membangun *framework* manajemen risiko, mengidentifikasi, mengantisipasi, dan mengelola ketidakpastian masa depan. Manajemen risiko adalah proses sistematis yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima, guna memastikan pencapaian sasaran organisasi. Tujuannya adalah mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah melalui identifikasi, analisis, pengendalian, dan pemantauan risiko.

Langkah manajemen risiko mencakup identifikasi dan penilaian risiko, serta mitigasi risiko untuk mengurangi dampak atau kemungkinan risiko. Mitigasi risiko meliputi strategi menerima risiko, mentransfer risiko, mengurangi risiko, dan menghindari risiko. Manajemen risiko RPJPD Tahun 2025-2045, meliputi lima unsur Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) meliputi: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian internal.

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS